



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Pendidikan Profesi Guru

PPG | Pendidikan Profesi Guru **prajab**

tahun **2024**

Buku Ajar

Mata Kuliah Inti

Filosofi Pendidikan Indonesia

Cetakan II



**MERDEKA
BELAJAR**



Mata Kuliah

Filosofi Pendidikan Indonesia

Cetakan II

Penulis:

Simon Rafael, S.Pd., M.Pd.

Dr. Munzil, M.Si.

Penelaah:

Dr. Makbul Muksar, S.Pd., M.Si.

Ferry Maulana Putra, S.Pd., M.Ed.

Yulia Gita Fany, S.T., M.Si.

Dido Sujaya Perwendha, S.Pd., M.Ed.

Penyunting dan Tata Letak:

Chassanova Z., S.I.P.

Desain Cover:

Redy N. Saputra, S.Pd.

Copyright © 2024

Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



Halaman Pengesahan

Koordinator PPG Prajabatan	Direktur PPG
	



Kata Pengantar **Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), mengamanatkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya dalam Pasal 8 UUGD menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sesuai dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan merupakan program pendidikan yang menyiapkan guru sebagai sumber daya manusia berkualitas untuk memenuhi kondisi ideal guru di Indonesia yang meliputi aspek kuantitas, distribusi, kualifikasi, dan kompetensi. PPG Prajabatan bertujuan menghasilkan guru profesional pemula yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong, dan mampu menggunakan teknologi digital, serta melahirkan hal-hal yang inovatif dan kreatif. Selain itu, PPG Prajabatan menekankan pada konsep Merdeka Belajar, yang berpusat kepada peserta didik dan pembelajarannya, berkomitmen menjadi teladan dan pembelajar sepanjang hayat serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PPG Prajabatan mengedepankan penguatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional melalui *clinical practice* atau program praktik lapangan yang diintegrasikan dalam perkuliahan. Sebagai calon guru pemula, mahasiswa PPG Prajabatan perlu dibekali pengalaman pembelajaran yang bermakna yang nantinya akan bermanfaat ketika mereka mengajar di kelas. Hal ini dilaksanakan dengan perkuliahan berbasis kegiatan dan refleksi yang dikombinasikan dengan

praktik lapangan, termasuk di sekolah tempat guru pemula akan ditugaskan. Pelaksanaan PPG Prajabatan melibatkan pengajar dari unsur akademisi, praktisi pendidikan, dan Guru Penggerak. Keterlibatan pengajar dari berbagai unsur ini bertujuan untuk menjembatani teori dan praktik di lapangan.

Paket-paket modul digunakan dalam perkuliahan yang dilaksanakan selama dua semester melalui tiga kelompok matakuliah, yaitu: Mata Kuliah Inti, Mata Kuliah Pilihan Selektif, dan Mata Kuliah Pilihan Elektif. Setiap modul perkuliahan mencakup komponen Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan asesmen, perangkat pembelajaran, dan isi modul. Asesmen ketercapaian CPMK dilaksanakan di antaranya melalui proyek, studi kasus, portofolio, dan tes. Perangkat pembelajaran meliputi Lembar Kerja (LK), media, dan sumber belajar yang dilengkapi dengan pranala ke sumber belajar lainnya sebagai pengayaan.

Isi modul disusun berdasarkan alur MERDEKA, yaitu: Mulai dari diri (M), Eksplorasi konsep (E), Ruang kolaborasi (R), Demonstrasi kontekstual (D), Elaborasi pemahaman (E), Koneksi antar materi (K), dan Aksi nyata (A). Modul dengan alur MERDEKA diharapkan dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri dalam mencapai tuntutan profesi sebagai agen yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan mampu mencetak generasi yang membawa perubahan ke hal yang lebih baik.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif mewujudkan penyelesaian modul ini serta membantu terlaksananya PPG Prajabatan. Semoga Allah Yang Mahakuasa senantiasa memberkati upaya yang kita lakukan demi pendidikan Indonesia. Amin.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan,

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.



Kata Pengantar Direktur Pendidikan Profesi Guru

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengambil kebijakan untuk secara bertahap mengganti guru-guru yang memasuki masa pensiun/purna tugas melalui pengangkatan guru baru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajabatan).

Kebijakan tersebut menuntut kesiapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menyelenggarakan PPG Prajabatan dengan jumlah peserta PPG Prajabatan sesuai dengan kebutuhan dan kualitas lulusan untuk menjawab tantangan kebutuhan pendidikan di sekolah.

Menanggapi tuntutan tersebut, Direktorat Pendidikan Profesi Guru (Direktorat PPG) mengkoordinasikan proses peningkatan kapasitas LPTK dalam menyelenggarakan PPG Prajabatan dalam hal jumlah dan mutu pendidikan. Untuk menanggapi tuntutan kualitas penyelenggaraan PPG Prajabatan, salah satu aktivitas yang telah dilakukan oleh Direktorat PPG, di bawah arahan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, telah mengembangkan Modul PPG Prajabatan. Hasil pengembangan tersebut dimuat di dalam dokumen ini.

Modul PPG Prajabatan memuat materi, alur, aktivitas, dan penugasan mahasiswa PPG Prajabatan. Kami berharap dengan adanya Modul PPG Prajabatan ini penyelenggaraan PPG Prajabatan di seluruh LPTK dapat terselenggara secara terstandar agar dihasilkan guru yang memiliki profil dan kompetensi sesuai kebutuhan perkembangan dunia pendidikan secara global.

Kami berterimakasih kepada LPTK penyelenggara PPG Prajabatan atas dukungan dan kerjasama dalam menyelenggarakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Jakarta, Januari 2024

Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru,

Adhika Ganendra, S.Si., M.M.

Prakata Penulis

Salam dan Bahagia,

Mata Kuliah Filosofi Pendidikan Nasional merupakan ajakan untuk menumbuhkan imperatif edukatif-moral para guru di dalam diri sendiri, komunitas para guru dan para peserta didik. Hidup dan bertumbuh di bumi Indonesia adalah berkat dan karunia yang mewarisi kekayaan berlimpah budaya dan nilai-nilai *religius-kemanusiaan* yang ditanamkan dalam sanubari melalui pendidikan di dalam keluarga, masyarakat adat dan budaya setempat. Rasa syukur atas warisan nilai-nilai merupakan dorongan positif yang memuat tanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan yang berakar pada konteks Keindonesiaan. Kita perlu menumbuhkan keyakinan bahwa menjadi guru adalah panggilan tugas, dan pilihan hidup yang bernilai. Belajar dari tokoh pendidikan nasional memiliki makna ganda, yakni menyerap pengetahuan tentang pendidikan dan mengobarkan semangat kerelaan dan kemurahan hati untuk mendampingi proses tumbuh kembang secara integral para generasi penerus bangsa. Menjadi guru adalah pewaris semangat dan jiwa gotong-royong untuk saling belajar, berkarya, dan berjuang demi kemajuan bangsa lewat dunia pendidikan.

Mata kuliah ini menguatkan visi diri mahasiswa tentang 'Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat'. Karena pendidikan itu menuntun maka tugas utama sebagai pendidikan adalah menuntun. Dalam proses menuntun, mahasiswa perlu memahami tentang manusia Indonesia melalui Pancasila sebagai identitas dan entitas manusia Indonesia.

Pancasila menjadi pendoman Pendidikan Nasional maka mari kita saling belajar untuk menumbuhkan spiritualitas, intelektualitas, motivasi dan kebanggaan sebagai guru yang terus membuka diri untuk belajar sambil berkarya dan berkarya yang menumbuhkan semangat saling belajar. Belajar menjadi ruang pertemuan untuk menguatkan panggilan diri sebagai guru dan manusia untuk menuntun kekuatan kodrat murid menjadi manusia Indonesia sesuai Profil Pelajar Pancasila.

Tim Penulis



Daftar Isi

Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar <u>i</u> Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	ii
Kata Pengantar <u>i</u> Direktur Pendidikan Profesi Guru	iv
Prakata Penulis	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Gambaran Umum	x
Ringkasan Alur MERDEKA	xiii
Topik 1	1
Perjalanan Pendidikan Nasional	1
A. Mulai dari Diri	1
B. Eksplorasi konsep	4
C. Ruang Kolaborasi	13
D. Demonstrasi Kontekstual	14
E. Elaborasi Pemahaman	14
F. Koneksi antar materi	15
G. Aksi Nyata	16
Topik 2	17
Dasar-Dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara	17
A. Memulai dari diri	17
B. Eksplorasi Konsep	19
C. Ruang Kolaborasi	25
D. Demonstrasi Kontekstual	26
E. Elaborasi Pemahaman	27
F. Koneksi antar materi	28
G. Aksi Nyata	28
Topik 3	30
Identitas Manusia Indonesia	30
A. Memulai dari diri	30
B. Eksplorasi Konsep	32
C. Ruang Kolaborasi	46



D. Demonstrasi Kontekstual	47
E. Elaborasi Pemahaman	48
F. Koneksi antar materi	49
G. Aksi Nyata	49
Topik 4	51
Pancasila Sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia	51
A. Memulai dari Diri	51
B. Eksplorasi konsep	52
C. Ruang Kolaborasi	63
D. Demonstrasi Kontekstual	64
E. Elaborasi Pemahaman	65
F. Koneksi antar Materi	66
G. Aksi Nyata	67
Daftar Pustaka	68
Lampiran	72
Profil Penulis	107



Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Refleksi calon seorang guru	2
Tabel 1. 2 Ruang kolaborasi Perjalanan Pendidikan Nasional	13
Tabel 2. 1 Refleksi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara	18
Tabel 2. 2 Refleksi Kritis Pilihan Sebagai Guru	19
Tabel 2. 3 Kolaborasi pemikiran Ki Hadjar Dewantara	25
Tabel 3. 1 Memulai dari diri	31
Tabel 3. 2 Elaborasi Pemahaman Internalisasi Identitas Manusia Indonesia	48
Tabel 4. 1 Memulai dari Diri	52
Tabel 4. 2 Perspektif Reflektif Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan	65



Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Lingkaran Emas Pribadi	4



Gambaran Umum

Filosofi Pendidikan Indonesia

(4 SKS)

Deskripsi mata kuliah

Mata kuliah ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa dalam memaknai dan menghayati dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara (KHD) sebagai sebuah filosofi pengembangan Pendidikan Nasional. Mata kuliah ini melatih mahasiswa untuk secara reflektif, kritis dan kolaboratif menelaah pemikiran-pemikiran KHD dan bagaimana strateginya dalam mewujudkan Pendidikan yang berpihak pada anak sesuai dengan keberagaman konteks sosial budaya dan nilai-nilai luhur Indonesia. Proses perkuliahan dilakukan dengan menekankan pada **dialog partisipatif kritis** sehingga mahasiswa menjadi lebih reflektif dan tajam dalam mengkritisi praktik baik-praktik baik Pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam upaya mengkontekstualkan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hadjar Dewantara, mahasiswa juga diberikan ruang untuk memahami beberapa teks tentang “Identitas Manusia Indonesia”. LPTK memilih 2 teks dari 3 teks yang diberikan dalam mata kuliah ini.

Rasional mata kuliah

Dengan mendalami Falsafah Pendidikan Ki Hajar Dewantara yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani calon guru diharapkan dapat memahami peran guru yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi para siswanya kelak, menjadi inspirasi bagi siswanya dalam belajar, sekaligus menjadi pendorong agar siswa dapat mencapai potensi terbaik mereka dengan menerapkan pengajaran yang berpihak pada siswa.



Capaian mata kuliah

1. Mahasiswa memiliki pemahaman kritis dan reflektif tentang dasar-dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara (KHD),
2. Mahasiswa memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada peserta didik pada konteks lokal kelas dan sekolah agar terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter,
3. Mahasiswa memiliki sikap reflektif-kritis dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan Filosofi Pendidikan Nasional dan Pancasila.

Topik yang dipelajari

1. Perjalanan Pendidikan Nasional
2. Dasar-Dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara
3. Identitas Manusia Indonesia
4. Pancasila sebagai Fondasi
5. Telaah Praktik Baik Pendidikan yang Memerdekakan

Asesmen sumatif

UTS

- a. Mahasiswa mengembangkan rangkuman perkuliahan dan refleksi kritis menjadi sebuah tulisan (1300-1500 kata);
- b. Mahasiswa menambahkan referensi bacaan untuk memperkaya tulisan;
- c. Mahasiswa mengumpulkan esai/makalah sesuai dengan kesepakatan. Bila mengumpulkan 1 hari atau lebih dari kesepakatan maka ada pengurangan nilai 20% dari total penilaian.

UAS

- a. Mahasiswa membuat tulisan tentang visi diri menjadi seorang guru profesional dengan mengembangkan rangkuman perkuliahan dan refleksi kritis (maksimum 3500 kata);
- b. Mahasiswa menambahkan referensi bacaan untuk memperkaya tulisan;



- c. Mahasiswa mengumpulkan esai/makalah sesuai kesepakatan. Bila mengumpulkan 1 hari atau lebih dari kesepakatan maka ada pengurangan nilai 20% dari total penilaian



Ringkasan Alur MERDEKA

Nama MK : Filosofi Pendidikan Indonesia

Jumlah Topik : 5

Judul Topik	Jumlah Pertemuan	Pertemuan Ke-	Alur Merdeka	Rincian Kegiatan	Kebutuhan
Perjalanan Pendidikan Nasional	3	1 - 3	Mulai dari Diri (Pertemuan 1)	1. Mahasiswa membuat tulisan reflektif mengapa memilih guru sebagai profesi dan panggilan hidup; 2. Mahasiswa membuat tulisan reflektif dengan menonton 2 video 3. Mahasiswa menuliskan komitmen diri dalam mempelajari Mata Kuliah Filosofi Pendidikan Nasional dengan menggunakan model <i>Golden Circle</i>	Video: 1. https://www.youtube.com/watch?v=nvLlc9O5C9c 2. https://www.youtube.com/watch?v=R3jMf0-SzCI&list=PLw9-l4jtGAA1DvsniOCiJD6CO89DGE8e&index=6 Tulisan Reflektif Tugas 1.1 Refleksi Pengalaman Bersekolah Tugas 1.2 Panggilan menjadi Guru Tugas 1.3 Komitmen Diri
			Elaborasi Pemahaman (Pertemuan 1)	1. Mahasiswa membaca 1 tulisan Ki Hadjar Dewantara dalam penganugerahan Honoris Causa di Senat Universitas Gajah Mada pada 7 November 1956; 2. Mahasiswa menonton Video "Pendidikan Zaman Kolonial"; 3. Mahasiswa menulis sebuah argumen kritis minimum 300 kata dan maksimum 500 kata	Bahan bacaan di modul Video YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=M90E2vT7zF4 Panduan menulis argumentasi kritis



Judul Topik	Jumlah Pertemuan	Pertemuan Ke-	Alur Merdeka	Rincian Kegiatan	Kebutuhan
				)tentang gerakan transformasi Ki Hadjar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan 4. Mahasiswa membaca 1 tulisan Ki Hadjar Dewantara dalam penganugerahan Honorer Causa di Senat Universitas Gajah Mada pada 7 November 1956; 5. Mahasiswa menonton Video “Pendidikan Zaman Kolonial”; 6. Mahasiswa menulis sebuah argumen kritis minimum 300 kata dan maksimum 500 kata tentang gerakan transformasi Ki Hadjar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan	Tugas 1.4 Argumentasi Kritis Mahasiswa menyajikan analisis kritisnya secara ringkas tentang Gerakan transformasi Ki Hadjar Dewantara. Tugas ini bersifat individu
			Ruang Kolaborasi (Pertemuan 2)	1. Mahasiswa berkolaborasi dalam kelompok membangun argumen kritis secara kolaboratif melihat Perjalanan Pendidikan Nasional dalam upaya membangun manusia Indonesia; 2. Mahasiswa mempresentasikan hasil kolaborasi dan mendapatkan umpan balik dari Dosen/Instruktur.	Panduan Penugasan Kelompok
			Demonstrasi Kontekstual (Pertemuan 2)	Mahasiswa membuat demonstrasi kontekstual dalam bentuk visual dan audio sebagai bentuk pemahaman mereka terhadap topik I	Tugas 1.5 Visualisasi Perjalanan Pendidikan Nasional



Judul Topik	Jumlah Pertemuan	Pertemuan Ke-	Alur Merdeka	Rincian Kegiatan	Kebutuhan
			Elaborasi Pemahaman (Pertemuan 2)	- Mahasiswa mendapatkan elaborasi pemahaman dari Dosen/Instruktur; - Mahasiswa berdialog bersama dosen dan sesama mahasiswa	Pertanyaan Pemantik Panduan Elaborasi Pemahaman
			Koneksi Antarmateri (Pertemuan 3)	Mahasiswa membuat koneksi pemahaman terkait materi pembelajaran yang dipelajari dari alur MERDEKA	Panduan Koneksi antar materi
			Aksi Nyata (Pertemuan 3)	Mahasiswa merefleksikan pembelajaran melalui aplikasi Padlet	Pertanyaan Aksi Nyata
Dasar-Dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara	4	4 - 7	M (Pertemuan 4)	- Mahasiswa membuat tulisan reflektif sejauh mana mereka mengenal Ki Hadjar Dewantara dan pemikirannya; - Mahasiswa menuliskan harapan dan ekspektasi mempelajari Topik II	Panduan di modul Tugas 2.1 Konsep Pemikiran Ki Hajar Dewantara Tabel 2.1 Harapan dan Ekspektasi
			E (Pertemuan 4)	- Mahasiswa membaca 2 tulisan Ki Hadjar Dewantara: 1) Dasar-Dasar Pendidikan 2) Metode <i>Montessori</i>, <i>Froebel</i>, Taman Anak - Mahasiswa menuliskan refleksi dan argumen kritis dengan menjawab 4 pertanyaan pemantik; - Mahasiswa menyajikan hasil reflkeksi	Bacaan di modul Lampiran B. Dasar-Dasar Pendidikan Lampiran C. Metode <i>Montessori</i> , <i>Froebel</i> , dan Taman Anak Video Budi Pekerti: https://www.youtube.com/watch?v=aaajtNkRKNg&list=PLw9-l4jtGA-A1DvsniOCijD6CO89DGE8e&index=15

Judul Topik	Jumlah Pertemuan	Pertemuan Ke-	Alur Merdeka	Rincian Kegiatan	Kebutuhan
					Video Among: https://www.youtube.com/watch?v=PBw_iuUjj-gU&list=PLw9-l4jtGA-A1DvsniOCijD6CO89DGE8e&index=17 Tugas 2.2 Pemikiran Ki Hajar Dewantara
			R (Pertemuan Ke 5)	1. Mahasiswa berkolaborasi dalam memaknai pemikiran filosofis Ki Hadjar Dewantara; 2. Mahasiswa berdialog sesama mahasiswa yang dipandu oleh Dosen/Instruktur	Panduan Tugas Kelompok Tabel 2.2 Rubrik Penilaian Eksplorasi Sosio Kultural berdasarkan Pemikiran KHD
			D (Pertemuan ke 5)	Mahasiswa membuat demonstrasi kontekstual dalam bentuk visual dan audio sebagai bentuk pemahaman mereka terhadap topik II	Tugas 2.3 Perwujudan Pemikiran Ki Hajar Dewantara Tabel 2.3 Rubrik Penilaian Demonstrasi Kontekstual Pemikiran KHD
			E (Petemuan ke 6)	1. Mahasiswa mendapatkan elaborasi pemahaman dari Dosen/Instruktur; 2. Mahasiswa berdialog bersama dosen dan sesama mahasiswa	Panduan diskusi Panduan presentasi
			K (Pertemuan ke 7)	Mahasiswa membuat koneksi pemahaman terkait materi pembelajaran yang dipelajari pada Topik II dengan Topik I	Panduan kegiatan Koneksi antar materi



Judul Topik	Jumlah Pertemuan	Pertemuan Ke-	Alur Merdeka	Rincian Kegiatan	Kebutuhan
			A (Pertemuan ke 7)	Mahasiswa merefleksikan pembelajaran dengan membuat tulisan kritis (artikel atau jurnal) sesuai pertanyaan panduan	Pertanyaan refleksi
Identitas Manusia Indonesia	3	9 - 11	M	Mahasiswa menulis tulisan reflektif dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik	Tugas 3.1 Identitas Manusia Indonesia
			E	Mahasiswa membaca tulisan tentang 'Identitas Manusia Indonesia'	Bahan bacaan di modul
			R	Mahasiswa membuat rumusan tentang Identitas Manusia Indonesia dengan mengeksplorasi nilai-nilai luhur pada konteks sosio-kultural di daerahnya	Tugas 3.2 Rumusan Identitas Manusia Indonesia
			D	Mahasiswa membuat demonstrasi kontekstual dalam bentuk visual dan audio sebagai bentuk pemahaman mereka terhadap topik III	Panduan demonstrasi kontekstual
			E	1. Mahasiswa mendapatkan elaborasi pemahaman dari Dosen/Instruktur; 2. Mahasiswa berdialog bersama dosen dan sesama mahasiswa	Panduan Presentasi
			K	Mahasiswa membuat koneksi pemahaman terkait materi pembelajaran yang dipelajari pada Topik III dengan Topik II dan Topik I	Panduan koneksi antar materi



Judul Topik	Jumlah Pertemuan	Pertemuan Ke-	Alur Merdeka	Rincian Kegiatan	Kebutuhan
			A	Mahasiswa merefleksikan pembelajaran dengan membuat tulisan reflektif dengan 2 pertanyaan pemantik	Tugas 3.3 Identitas Mahasiswa Indonesia
Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Nasional	2	12 - 13	M	Mahasiswa membuat tulisan reflektif dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik	Tugas 4.1 Fondasi
			E	1. Mahasiswa membaca tulisan Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia; 2. Mahasiswa membaca Keputusan Kepala Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, Suplemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka	Bahan bacaan di modul
			R	1. Mahasiswa mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia dan perwujudan Profil Pelajar Pancasila pada Pendidikan yang Berpihak pada Murid dalam Pendidikan Abad ke-21 dalam kelompok kecil. 2. Mahasiswa membuat sebuah rumusan tentang Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia dan perwujudan Profil Pelajar Pancasila pada Pendidikan yang Berpihak pada Peserta didik dalam Pendidikan Abad ke-21 dari perspektif kodrat alam dan kodrat zaman.	Tugas 4.2 Rumusan Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia



Judul Topik	Jumlah Pertemuan	Pertemuan Ke-	Alur Merdeka	Rincian Kegiatan	Kebutuhan
			D	Mahasiswa membuat demonstrasi kontekstual dalam bentuk visual dan audio sebagai bentuk pemahaman mereka terhadap topik IV	Panduan Demonstrasi Kontekstual
			E	1. Mahasiswa mendapatkan elaborasi pemahaman dari Dosen/Instruktur; 2. Mahasiswa berdialog bersama dosen dan sesama mahasiswa	Panduan presentasi
			K	Mahasiswa membuat koneksi pemahaman terkait materi pembelajaran yang dipelajari pada Topik IV dengan Topik I, Topik II dan Topik III	Panduan Koneksi antar materi
			A	Mahasiswa merefleksikan pembelajaran dengan membuat tulisan reflektif dengan 2 pertanyaan pemantik	Tugas 4.3 Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia
Telaah Praktik Baik Pendidikan yang Memerdekakan	2	14 - 15	M	Mahasiswa membuat tulisan reflektif dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik	Tugas 5.1 Pendidikan yang Memerdekakan
			E	Mahasiswa menelaah praktik baik implementasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik di beberapa sekolah melalui video-video yang disediakan	Tabel 5.1 Daftar Tautan Video



Judul Topik	Jumlah Pertemuan	Pertemuan Ke-	Alur Merdeka	Rincian Kegiatan	Kebutuhan
			R	1. Mahasiswa mengeksplorasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam kelompok kecil; 2. Mahasiswa membuat sebuah rumusan tentang implementasi kurikulum merdeka dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik.	Tugas 5.2 Implementasi Kurikulum Merdeka
			D	Mahasiswa membuat demonstrasi kontekstual dalam bentuk visual dan audio sebagai bentuk pemahaman mereka terhadap topik I	Panduan Demonstrasi Kontekstual
			E	1. Mahasiswa mendapatkan elaborasi pemahaman dari Dosen/Instruktur; 2. Mahasiswa berdialog bersama dosen dan sesama mahasiswa	Panduan presentasi
			K	Mahasiswa membuat koneksi pemahaman terkait materi pembelajaran yang dipelajari di Topik V dengan Topik I hingga Topik IV	Panduan Koneksi antarmateri
			A	1. Mahasiswa membuat sebuah proyek perubahan (change project) tentang pendidikan yang berpihak pada murid dan memerdekakan peserta didik dalam Pendidikan Abad ke-21 dengan sekolah mitra mahasiswa.	Petunjuk Proyek Perubahan



Judul Topik	Jumlah Pertemuan	Pertemuan Ke-	Alur Merdeka	Rincian Kegiatan	Kebutuhan
				2. Mahasiswa membuat proyek perubahan ini dapat dilakukan berdasarkan case based atau project based.	



Topik 1 Perjalanan Pendidikan Nasional

Durasi	3 Pertemuan
Capain Pembelajaran	Setelah mempelajari topik ini, Mahasiswa mampu:
1. Mahasiswa merefleksikan alasan pemilihan 2. Memahami pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Pidato Penerimaan <i>Honoris Causa</i> dari UGM 3. Mahasiswa memahami pemikiran kritis Pidato Ki Hadjar Dewantara 4. Mahasiswa membuat tulisan reflektif mengenal Ki Hadjar Dewantara dan pemikirannya 5. Mahasiswa memahami 2 tulisan Ki Hadjar Dewantara, Metode Montessori, dan Froebel.	

A. Mulai dari Diri

1. Pengantar

Salam Bahagia

Sebelumnya kami sampaikan ucapan selamat pada saudara yang telah lolos untuk mengikuti Program Profesi Guru Prajabatan. Saudara sangat beruntung mampu mengalahkan ribuan peserta lainnya. Tentunya ketika saudara mengikuti tes PPG Prajab ini, telah terbesit dalam hati saudara untuk menjadi guru yang profesional. Sebagai calon guru, saudara harus memahami bagaimana perjalanan Pendidikan nasional Indonesia. Perjalanan Panjang Pendidikan nasional, bahkan dimulai sebelum Indonesia merdeka, dengan partisipasi masyarakat luas. Pendidikan sebelum Indonesia memiliki beberapa ragam, mulai dari Pendidikan formal sampai Pendidikan nonformal. Perjalanan Panjang Pendidikan nasional, dapat dijadikan bahan refleksi diri bagi calon guru, untuk meneguhkan hati menjadi seorang guru yang profesional. Sebagai bahan refleksi, saudara diminta untuk menonton video tentang 'Pendidikan Zaman Kolonial' memberikan visualisasi tentang gambaran Pendidikan sebelum kemerdekaan. Kemudian untuk meneguhkan

niat saudara sebagai calon guru profesional, silahkan anda simak video “Menenal Diri dan Peran Guru” dan “Mendidik menyeluruh”. Untuk memahami lebih dalam tentang perjalanan Pendidikan nasional, silahkan saudara baca 1 tulisan tentang gagasan Ki Hadjar Dewantara.

2. Siapa saya sebagai guru

Perkuliah pada PPG Prajabatan ini menggunakan alur MERDEKA yang akan menuntun dan membelajarkan saudara sebagai guru yang refleksi dan guru pembelajar. Tahap pertama dalam alur ini adalah **Mulai dari diri sendiri**. Tahapan ini merupakan tahapan refleksi kritis saudara terhadap persepsi dan harapan saudara sebagai calon guru. Untuk membantu saudara melakukan refleksi kritis, silahkan saudara simak dua video **“Menenal Diri dan Perannya sebagai Guru”** (<https://www.youtube.com/watch?v=nvLlc9O5C9c>) dan **“Mendidik Menyeluruh”** (<https://www.youtube.com/watch?v=R3jMf0-SzCI&list=PLw9-l4jtGA-A1DvsniOCliD6CO89DGE8e&index=6>). Untuk membantu saudara, silahkan isi tabel berikut:

Tabel 1. 1 Refleksi calon seorang guru

Refleksi	Respon
1. Pengalaman apa yang membuat Anda menjadi rindu bersekolah, atau, pengalaman apa yang membuat Anda kehilangan motivasi untuk bersekolah? (pilih salah satu)	
2. Peristiwa apa yang membuat Anda merasa berkembang dan belajar sebagai seorang pembelajar?	
3. Anda tentu mempunyai sosok guru idola? Mengapa anda mengidolakannya?	
4. Cobalah anda renungkan selama sekolah dan kuliah, proses belajar apa yang dampaknya saudara rasakan sampai saat ini? (diharapkan mahasiswa mengungkapkan proses kognitif dan afektif yang didapat selama belajar)	



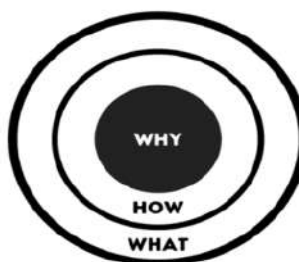
Refleksi	Respon
5. Mengapa saya memilih menjadi guru? Dan bagaimana saya menjadi guru yang berpihak pada peserta didik?	

Isian tabel di atas akan saudara gunakan untuk membuat tulisan refleksi kritis tentang perjalanan pendidikan nasional ini setelah tahapan eksplorasi konsep. Agar saudara dapat menggali konsep-konsep yang ada dalam filosofi pendidikan ini, saudara harus memiliki komitmen diri yang kuat dalam mempelajarinya. Komitmen diri dalam mempelajari Mata Kuliah Filosofi Pendidikan Nasional juga menjadi bagian dari proses Anda mengawali perjalanan Anda memaknai dan menghayati proses mengenal diri dan peran sebagai seorang pendidik.

Komitmen Diri akan direfleksikan kembali pada pertemuan akhir kuliah ini. Pertanyaan panduan untuk membuat Komitmen Diri adalah:

Lingkaran Emas Pribadi (Golden Circle)

Nama :
Asal Kota/Kabupaten :
Provinsi :



WHY (tujuan: alasan, keyakinan, motivasi)

HOW (strategi dan kebutuhan)

WHAT (langkah-langkah konkrit dan waktu yang dibutuhkan)

Gambar 1. 1 Lingkaran Emas Pribadi

B. Eksplorasi konsep

Setelah saudara melakukan refleksi kritis dan berkomitmen untuk mempelajari mata kuliah filosofi pendidikan nasional ini sebagai bekal calon guru profesional, anda perlu mempelajari lebih dalam lagi tentang sejarah panjang perjalanan pendidikan nasional kita. Terdapat dua hal yang harus anda kaji lebih dalam yaitu tentang perspektif pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan nasional, dan Sejarah perkembangan kurikulum pendidikan nasional sebagai wujud arah dan implementasi pendidikan nasional.

1. Perjalanan Pendidikan Nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara

Anda membaca tulisan [teks pidato Ki Hadjar Dewantara](#) pada penganugerahan *Honoris Causa* oleh Universitas Gajah Mada pada 7 November 1956 (*lihat Lampiran 1*). Video “Pendidikan Zaman Kolonial”

(<https://www.youtube.com/watch?v=M90E2vT7zF4>) memberikan visualisasi bagi Anda untuk melihat Perjalan Pendidikan Nasional secara kritis dalam membangun konsep pemikiran Anda.

2. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional

a. Kurikulum 1947, 1952 dan 1964

Kurikulum pertama kali sejak Indonesia merdeka yaitu kurikulum yang mulai digunakan pada tahun 1947, yang dikenal dengan nama “Rentjana Pelajaran 1947”. Dalam kurikulum ini terlihat dengan jelas arah pendidikan di Indonesia, yaitu lebih mengarah pada perubahan secara politis. Perubahan dari arah pendidikan Belanda menuju pada kepentingan Nasional. Kurikulum ini baru diberlakukan setelah tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 1950.

Kurikulum 1947 lebih menekankan pada karakter peserta didik, untuk menanamkan rasa kebangsaan yang kuat pada peserta didik. Kurikulum 1947 masih belum menekankan pada kemampuan kognitif peserta didik. Terdapat dua hal pokok dalam kurikulum 1947, yaitu (1) daftar mata pelajaran dan jam pelajaran, (2) Garis-garis besar pengajaran. Kurikulum 1947 lebih menekankan pada pendidikan watak, karakter masyarakat, dan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Pendidikan lebih diarahkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kurikulum 1947 kemudian disempurnakan dengan kurikulum 1952 yang dikenal dengan nama “Rentjana Pelajaran Terurai 1952”. Kurikulum 1952 lebih menonjolkan bahwa setiap mata pelajaran harus berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta harus dapat membangun kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Pada kurikulum 1952 ini mulai terlihat arah pendidikan nasional, mulai dari isi materi pelajaran serta kompetensi guru, diantaranya bahwa guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Pedoman pelaksanaan pembelajaran di kelas dalam bentuk silabus, sudah mulai dikenalkan pada kurikulum 1952 ini.

Kurikulum 1952 kemudian disempurnakan pada tahun 1964 yang dikenal dengan nama “Rentjana Pendidikan 1964”. Pokok-pokok yang ada dalam kurikulum 1964 ini adalah menggambarkan keinginan pemerintah agar rakyat Indonesia memiliki akademik sejak mulai tingkat sekolah dasar. Pendidikan lebih dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, dan kesehatan jasmani. Mata Pelajaran pada kurikulum 1964 diklasifikasikan pada 5 kelompok bidang studi, yaitu: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keterampilan dan jasmaniah.

b. Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 lahir akibat perubahan politik di Indonesia, yaitu dari orde lama ke orde baru. Terdapat perubahan tujuan pendidikan yang mendasar pada kurikulum 1968 ini, yaitu tujuan pendidikan lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari orientasi pada pelaksana Undang-Undang dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Mata Pelajaran lebih bersifat teoritis, dan tidak selalu mengaitkan dengan kehidupan nyata di masyarakat.

c. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 lebih menekankan pada pembelajaran yang efektif dan efisien, Lahirnya kurikulum 1975 dipengaruhi oleh perubahan manajemen pendidikan, yaitu *manajemen by objective* (MBO). Pada kurikulum 1975 inilah mulai dikenalkan satuan pelajaran, yaitu rencana pembelajaran setiap satu pokok bahasan. Dengan adanya rencana pelajaran ini, tujuan pembelajaran di kelas dapat dilakukan penilaian yang lebih terukur. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi dua yaitu tujuan instruksional umum (TIU) dan tujuan instruksional khusus (TIK).

d. Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 sering dikenal pula dengan nama kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 lebih menekankan pada *process skill*

approach. Siswa tidak lagi ditempatkan sebagai objek dalam pembelajaran, tetapi ditempatkan sebagai subjek belajar. Pada kurikulum 1984, mulai dikenal istilah Cara Siswa Belajar Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL). Perubahan pendekatan ini di lapangan banyak mengalami kendala, karena guru masih belum terbiasa mengaktifkan belajar siswa. Guru yang terbiasa memberi materi pelajaran secara langsung (*direct instruction*) mengalami kesulitan saat harus beralih mengaktifkan siswa belajar.

e. Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dengan memberi banyak penambahan pelajaran, terutama materi pelajaran muatan lokal, sehingga kurikulum 1994 ini dikenal sebagai kurikulum yang super padat. Kurikulum 1994 dikenal dengan nama kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Kurikulum 1994 memiliki ciri sebagai berikut:

- Orientasi pendidikan pada pendidikan kewarganegaraan, menenkan pada pentingnya mendidik siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan menjadi fokus penting dalam upaya membentuk karakter peserta didik
- Mengintegrasikan nilai-nilai pancasila dan kebudayaan nasional sebagai bagian dari integral dari pendidikan. Hal ini mencerminkan tujuan membangun kesadaran nasional dan menghargai keberagaman budaya Indonesia
- Pendidikan karakter melibatkan nilai-nilai moral, etika dan sikap positif
- KTSP memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Sekolah lebih banyak diberi kebebasan dalam menentukan metode pengajaran dan penilaian yang sesuai.
- Kurikulum berbasis kompetensi, yang penekannanya tidak hanya pada penguasaan pengetahuan tetapi pada pengembangan

keterampilan dan sikap yang diperukan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja

- Pembelajaran aktif, guru diharapkan menjadi fasilitator pembelajaran yang membimbing siswa untuk berpikir kritis dan kreatif
- Penilaiannya ada dua jenis, yaitu penilaian formatif (penilaian selama pembelajaran) dan penilaian sumatif (penilaian akhir pembelajaran) untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan siswa.

f. Kurikulum 2004

Kurikulum 2004 sebagai pengganti dari kurikulum 1994, memiliki ciri khas sebagai berikut:

- Menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu materi pelajaran diarahkan agar terkait dengan kehidupan sehari-hari, agar siswa dengan mudah dapat mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan kehidupan nyata.
- Pendekatan keterampilan, yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, bekerjasama dan berpikir kreatif
- Integrasi mata pelajaran, yaitu memperkuat hubungan antar mata pelajaran, agar siswa dapat memahami keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain.
- Penekanan pada pembentukan karakter siswa, yang menekankan pada nilai-nilai moral, etika dan sikap positif sebagai bagian integral dari proses pembelajaran
- Mendorong pembelajaran aktif, yaitu lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam belajar. Guru diharapkan hanya sebagai fasilitator yang memberi dukungan belajar pada siswa
- Pengembangan sikap ilmiah, penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran di kelas, agar siswa lebih mudah memahami

konsep-konsep materi pelajaran. Pengembangan potensi siswa secara menyeluruh, yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotoris.

g. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 adalah kerangka kurikulum nasional yang diperkenalkan di Indonesia sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Berikut adalah beberapa ciri khas dari Kurikulum 2013:

- **Kurikulum Berbasis Kompetensi:**
Kurikulum 2013 dirancang sebagai kurikulum berbasis kompetensi, yang menekankan pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa, bukan hanya pada penguasaan pengetahuan.
- **Pendekatan Saintifik:**
Mengusung pendekatan saintifik dalam pembelajaran, mendorong siswa untuk berpikir kritis, observatif, dan memecahkan masalah melalui proses ilmiah.
- **Pembelajaran Tematik:**
Mendukung pembelajaran tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran di sekitar tema tertentu, meningkatkan keterkaitan konsep dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.
- **Pendidikan Karakter:**
Menekankan pentingnya pendidikan karakter, melibatkan pembentukan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif pada siswa.
- **Pembelajaran Inklusif:**
Memberikan perhatian khusus pada pembelajaran inklusif, di mana berbagai kebutuhan dan potensi siswa diakomodasi untuk mendukung keberagaman dalam kelas.
- **Penekanan pada Literasi dan Numerasi:**
Memberikan penekanan pada pengembangan literasi (keterampilan membaca dan menulis) dan numerasi

(keterampilan matematika), sebagai dasar keterampilan yang penting.

- **Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):**
Mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan akses terhadap informasi.
- **Pendekatan Pembelajaran Aktif:**
Menggalakkan pendekatan pembelajaran aktif, di mana siswa aktif terlibat dalam pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator.
- **Penilaian Formatif:**
Menggunakan penilaian formatif secara terus-menerus untuk memberikan umpan balik dan membantu perkembangan siswa.
- **Peningkatan Kreativitas dan Kritisisme :**
Mendorong pengembangan kreativitas dan kritisitas siswa melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang menantang.

h. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk memperbaharui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Seiring waktu, implementasi dan pengembangan KMB dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan evaluasi dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Konsep "Merdeka Belajar" pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, pada tahun 2019. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar sebagai bagian dari upaya reformasi pendidikan.

Ciri Khas Kurikulum Merdeka

- **Fleksibilitas dan Otonomi Sekolah:**

KMB memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di masing-masing sekolah.

- Pendidikan Karakter dan *Soft Skills*
Menekankan pembentukan karakter dan pengembangan soft skills (keterampilan lunak) seperti kreativitas, kolaborasi, kritis, dan komunikasi.
- Pembelajaran Kontekstual:
Mendorong pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka dapat lebih mudah mengaitkan konsep pembelajaran dengan pengalaman praktis.
- Penekanan pada Teknologi dan Digitalisasi:
Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara lebih luas dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan digital siswa.
- Penilaian Formatif dan Portofolio:
Menekankan penggunaan penilaian formatif secara berkelanjutan, dan pengembangan portofolio sebagai bentuk penilaian komprehensif kemajuan siswa.
- Pembelajaran Inklusif:
Mendorong praktik pembelajaran inklusif yang mengakomodasi kebutuhan dan potensi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
- Pemberdayaan Siswa:
Mendorong pemberdayaan siswa dalam proses pembelajaran, termasuk partisipasi mereka dalam merancang jalannya pembelajaran.



- **Pelibatan Orang Tua dan Masyarakat:**
Melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra dalam pendidikan, mengakui peran penting mereka dalam mendukung perkembangan anak-anak.
- **Penyederhanaan Struktur Kurikulum:**
Upaya untuk menyederhanakan struktur kurikulum agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh sekolah.

3. Analisis Refleksi Kritis Perjalanan Pendidikan Nasional Indonesia

Setelah saudara membaca pidato Ki Hadjar Dewantara, melihat visualisasi, dan membaca juga tentang sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia, sekarang saudara diminta untuk membuat tulisan refleksi kritis perjalanan pendidikan nasional Indonesia minimal 300 kata dan maksimal 500 kata.

Lembar kerja 1.1 Analisis reflektif kritis perjalanan pendidikan nasional

Analisis Reflektif Kritis Perjalanan Pendidikan Nasional

C. Ruang Kolaborasi

Pada ruang kolaborasi ini, saudara secara berkelompok (tiap kelompok 5 mahasiswa) melakukan diskusi tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia, berdasarkan hasil refleksi dan telaah kritis saudara terhadap sumber belajar yang telah diberikan. Untuk membantu saudara melakukan kolaborasi dalam kelompok, gunakan pertanyaan pemandu yang diberikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2 Ruang kolaborasi Perjalanan Pendidikan Nasional

Pertanyaan	Respon
1. Apa praktik Pendidikan saat ini yang 'membelenggu' kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat Perjalanan Pendidikan Nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan?	
2. Adakah model-model Pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan 'belenggu' yang belum memerdekakan peserta didik?	
2. Apa yang Anda tawarkan sebagai model Pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik?	

Hasil kolaborasi kelompok perlu didiskusikan lebih lanjut di kelas untuk mendapatkan penguatan dari dosen pembimbing saudara. Dosen akan memberikan penguatan terhadap beberapa konsep yang telah saudara pelajari. Jika ada konsep-konsep yang perlu diperdalam lebih lanjut, jadikan konsep tersebut sebagai topik diskusi kelas.

D. Demonstrasi Kontekstual

Pada tahapan ruang kolaborasi, diharapkan saudara semakin memahami bagaimana perjalanan pendidikan Indonesia. Sekarang saudara diminta untuk melakukan demonstrasi kontekstual tentang pemahaman anda dalam bentuk tulisan, video atau podcast yang dapat menggambarkan pemahaman saudara terhadap pemahaman materi yang telah anda pelajari. Diskusikan dengan dosen saudara tentang bentuk demonstrasi kontekstual saudara.

Lembar kerja 1.2: Demonstrasi kontekstual Perjalanan Pendidikan Nasional

Judul Demonstrasi kontekstual	
Bentuk	Vlog/Podcas/Presentation/Audio
Sinopsis Demonstrasi kontekstual	
Link Produk Demonstrasi Kontekstual	

E. Elaborasi Pemahaman

Setelah anda melakukan demonstrasi kontekstual yang merupakan indikator pemahaman saudara terhadap materi yang sudah dipelajari, sekarang saudara diminta untuk menggunakan pemahaman saudara untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

Lembar kerja 1.3 : Elaborasi Pemahaman

Pertanyaan	Respon
1. Apa langkah awal melepaskan 'belenggu' pada Pendidikan Indonesia dalam upaya mewujudkan Pendidikan yang memerdekakan peserta didik?	
2. Sebagai seorang guru, mengapa kita perlu melepaskan diri dari 'belenggu' praktik-praktik Pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik?	
3. Bagaimana melepaskan diri dari 'belenggu' praktik-praktik Pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik?	
4. Berdasarkan peta jalan Pendidikan Indonesia, bagaimana prediksi Pendidikan kita pada masa yang akan datang?	

Pertemuan Minggu ke 3.2:

F. Koneksi antar materi

Saudara sudah melakukan refleksi dan mempelajari tentang perjalanan pendidikan nasional, sekarang saudara lakukan koneksi antar materi yang sudah anda pahami dalam bentuk mind mapping.

Lembar Kerja 1.4 : Koneksi antar materi

Maind Mapping Koneksi antar materi



Pertemuan Minggu ke 3.3:

G. Aksi Nyata

Setelah anda mempelajari materi perjalanan pendidikan nasional Indonesia, dimulai dari refleksi diri, memahami pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan Nasional, serta sejarah perkembangan kurikulum pendidikan nasional Indonesia. Sekarang saudara diminta untuk melakukan aksi nyata, yaitu membuat tulisan ringkas tentang sosok guru masa depan yang saudara idamkan

Lembar Kerja 1.5 : Aksi Nyata

Aksi Nyata :
Saya sosok guru ideal masa depan

Topik 2 Dasar-Dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara

Durasi	4 Pertemuan
Capain Pembelajaran	Setelah mempelajari topik ini, Mahasiswa mampu:
1. Mahasiswa membuat tulisan reflektif mengenal Ki Hadjar Dewantara dan pemikirannya 2. Mahasiswa memahami 2 tulisan Ki Hadjar Dewantara,) Metode Montessori, dan Froebel, 3. Mahasiswa mampu melakukan refleksi kritis terhadap Dasar-Dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara 4. Mahasiswa memahami pemahaman inti pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Dasar-Dasar Pendidikan 5. Mahasiswa mampu membuat menuliskan koneksi materi antara Topik 1 dan Topik 2 6. Mahasiswa menuliskan esai/makalah sebagai bahan UTS	

A. Memulai dari diri

1. Pengantar

Salam dan Bahagia,

Topik Pembelajaran yang Anda pelajari dalam tahap ini adalah mengenal secara mendalam pemikiran filosofi Ki Hadjar Dewantara tentang Pendidikan. Tiga tulisan Ki Hadjar Dewantara yaitu, 1) Dasar-Dasar Pendidikan; 2) Metode Montessori, Froebel dan Taman Anak; 3) Pidato Sambutan Ki Hadjar Dewantara – Dewan Senat Universitas Gadjah Mada menjadi landasan utama bagi Anda untuk membangun argumen kritis dan reflektif tentang esensi pendidikan Ki Hadjar Dewantara

2. Siapa Ki Hadjar Dewantara bagi saya?

Anda sudah sering mendengar kata-kata seperti ***budi pekerti, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*** yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional. Oleh sebab itu, pada tahap awal ini, Anda akan berdialog dengan diri Anda sendiri untuk menemukan pemikiran mendasar Ki Hadjar Dewantara dan relevansinya dengan peran Anda sebagai pendidik

Tabel 2. 1 Refleksi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara

Refleksi	Respon
1. Apa yang anda ketahui dan pahami dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran?	
2. Apa relevansi pemikiran Ki Hadjar Dewantara dengan konteks Pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan saat anda bersekolah?	
3. Apakah anda merasa memiliki kemerdekaan belajar ketika anda memiliki peserta didik?	
4. Apakah anda memiliki juga merasa memiliki kemerdekaan ketika anda memilih profesi guru?	

Isian tabel di atas akan digunakan sebagai tulisan saudara untuk melakukan refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang dasar-dasar Pendidikan. Pemikiran tersebut saudara hubungkan dengan konteks pendidikan di Indonesia masa kini. Sebagai seorang calon guru yang sudah menikmati pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sarjana, tentu saudara memiliki dan menikmati pengalaman pendidikan pada beberapa jenjang tersebut. Gunakan pengalaman tersebut untuk melakukan refleksi kritis terhadap dasar-dasar pemikiran Ki Hadjar Dewantara.

Dari hasil refleksi kritis saudara di atas, sekarang saudara diminta untuk melakukan kontemplasi terhadap pilihan saudara sebagai calon guru profesional, yang akan melibatkan diri dalam perjalanan pendidikan di Indonesia. Untuk melakukan kontemplasi diri anda sebagai seorang calon guru, silahkan saudara isi tabel berikut:

Tabel 2. 2 Refleksi Kritis Pilihan Sebagai Guru

Apakah saja harapan yang ingin saudara lihat pada diri anda sebagai seorang pendidik dan peserta didik	Apa saja kegiatan, materi, dan manfaat yang anda dalam mempelajari topik ini
Untuk diri sendiri:	Untuk diri sendiri
Untuk diri sendiri:	Untuk diri sendiri

Saudara telah melakukan refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Dasar-dasar pemikiran pendidikan, dan anda telah melakukan kontemplasi diri tentang harapan anda pada topik ini sebagai bekal anda sebagai calon guru profesional.

B. Eksplorasi Konsep

Setelah saudara melakukan refleksi kritis dan kontemplasi diri, saudara perlu membekali diri dengan beberapa pengetahuan tentang pemikiran Dasar-Dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Berapa literatur yang dapat saudara

gunakan sebagai referensi adalah (1) Dasar-Dasar Pendidikan. Keluarga, Th I No 1,2,3,4., No, Des 1936., Jan, Feb 1937 (lihat lampiran 2), dan (2) Metode Montessori, Froebel dan Taman Anak, Wasita, Jilid No 1 Oktober 1928 (lihat lampiran 3).

1. Ki Hadjar Dewantara

Ki Hadjar Dewantara (KHD) membedakan kata Pendidikan dan Pengajaran dalam memahami arti dan tujuan Pendidikan. Menurut KHD, pengajaran (*onderwijs*) adalah bagian dari Pendidikan. Pengajaran merupakan proses Pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan (*opvoeding*) memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut KHD (2009), “pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya” (Yulius Edison Dara, 2020 dalam artikel Ayo Guru Berbagi “Koneksi Antar Materi - Kesimpulan Refleksi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara” atau dapat diakses melalui <https://bit.ly/3chth8K>).

Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan.

Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perikehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan (rakyat). Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan

orang lain (merdeka batin) dan menjadi mandiri (merdeka lahir). Kekuatan diri (kodrat) yang dimiliki, menuntun peserta didik menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain.

2. Dasar-Dasar Pendidikan yang Menuntun

KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu: menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya (bukan dasarnya) hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak.

Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik (kurang berkualitas) dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta 'tangan dingin' pak tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal.

Dalam proses "menuntun", anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai 'pamong' dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang 'pamong' dapat memberikan 'tuntunan' agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu,

tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain (menjadi manusia dan anggota masyarakat)

KHD juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, “waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru. Hendaknya barang baru tersebut diselaraskan lebih dahulu”. KHD menggunakan ‘barang-barang’ sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru, namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar.

Kekuatan sosio-kultural menjadi proses ‘menebalkan’ kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun (memfasilitasi/membantu) anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki laku-nya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa.

3. Kodrat Alam dan Kodrat Zaman

KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “sifat” dan “bentuk” lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan “isi” dan “irama”

KHD mengelaborasi Pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut

“Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk,

isi dan wirama (yakni cara mewujudkannya) hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan” (Ki Hadjar Dewantara, 2009, hal. 21)

KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki Keterampilan Abad 21 sedangkan dalam memaknai kodrat alam maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur.

Mengenai Pendidikan dengan perspektif global, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh KHD adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik.

KHD menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid Abad ke-21, tentu sangat berbeda dengan para peserta didik pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki 2 musim (musim hujan dan musim kemarau) serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid.

4. Budi Pekerti

Menurut KHD, budi pekerti, atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara Cipta (kognitif), Karsa (afektif) sehingga menciptakan Karya (psikomotor).

Lebih lanjut KHD menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi-pekerti (pembentukan watak individual). Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya.

Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak.

Budi Pekerti merupakan keselarasan (keseimbangan) hidup antara cipta, rasa, karsa dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggungjawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi Pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya (kemerdekaan diri) dan kemerdekaan orang lain.

(<https://www.youtube.com/watch?v=aaajtINkRKNg&list=PLw9-I4jtGA-A1DvsniOCijD6CO89DGE8e&index=14>)

5. Sistem Among

Sistem Among menjadi salah satu kekuatan mahasiswa untuk memahami secara mendalam peran seorang pendidik dalam menuntun kekuatan kodrat anak. Silahkan menyimak video tentang 'Sistem Among' pada tautan ini:

<https://www.youtube.com/watch?v=PBwUj-gU&list=PLw9-l4jtGA-A1DvsniOCljD6CO89DGE8e&index=17>

C. Ruang Kolaborasi

Pada ruang kolaborasi ini, saudara secara berkelompok (tiap kelompok 5 mahasiswa) melakukan diskusi tentang pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan, berdasarkan hasil refleksi dan telaah kritis saudara terhadap sumber belajar yang telah diberikan. Untuk membantu saudara melakukan kolaborasi dalam kelompok, gunakan pertanyaan pemandu yang diberikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 3 Kolaborasi pemikiran Ki Hadjar Dewantara

Pertanyaan	Respon
1. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan?	
2. Bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya (nilai-nilai luhur) di daerah saudara? Apa yang dapat saudara lakukan untuk mewujudkan pendidikan dengan konteks budaya?	
3. Mengapa pendidikan perlu mempertimbangan kodrat alam dan kodrat zaman	
4. Apa relevansi pemikiran KHD "Pendidikan yang	

Pertanyaan	Respon
memerdekakan murid” dengan anda sebagai profesi pendidik?	

Hasil kolaborasi kelompok perlu didiskusikan lebih lanjut di kelas untuk mendapatkan penguatan dari dosen pembimbing saudara. Dosen akan memberikan penguatan terhadap beberapa konsep yang telah saudara pelajari. Jika ada konsep-konsep yang perlu diperdalam lebih lanjut, jadikan konsep tersebut sebagai topik diskusi kelas.

D. Demonstrasi Kontekstual

Pada tahapan ruang kolaborasi, diharapkan saudara semakin memahami bagaimana pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. Sekarang saudara diminta untuk melakukan demonstrasi kontekstual tentang pemahaman anda dalam bentuk tulisan, video atau podcast yang dapat menggambarkan pemahaman saudara terhadap pemahaman materi yang telah anda pelajari. Diskusikan dengan dosen saudara tentang bentuk demonstrasi kontekstual saudara.

Lembar kerja 2.2: Demonstrasi kontekstual

Judul Demonstrasi kontekstual	
Bentuk	Vlog/Podcast/Presentation/Audio
Sinopsis Demonstrasi kontekstual	

Link Produk Demonstrasi Kontekstual	

E. Elaborasi Pemahaman

Setelah melakukan demonstrasi kontekstual yang merupakan indikator pemahaman saudara terhadap materi yang sudah dipelajari, sekarang saudara diminta untuk menggunakan pemahaman untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

Lembar Kerja 2.1: Elaborasi Pemahaman

Pertanyaan	Respon
1. Apa kekuatan konteks sosio-kultural (nilai-nilai luhur budaya) di daerah anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara	
2. Bagaimana Pemikiran Ki Hadjar Dewntara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik, sebagai anggota masyarakat	
3. Ambillah salah satu kekuatan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, kemudian uraikan bagaimana cara anda menggunakannya untuk menebalkan laku peserta didik sesuai dengan konteks lokal dan sosial budaya	

F. Koneksi antar materi

Saudara sudah melakukan refleksi dan mempelajari tentang perjalanan pendidikan nasional, sekarang lakukan koneksi antar materi yang sudah saudara pahami dalam bentuk *mind mapping*.

Lembar Kerja 2.2 : Koneksi antar materi

Mind Mapping Koneksi antar materi

G. Aksi Nyata

Setelah anda mempelajari materi pemikiran Ki Hadjar Dewantara, dimulai dari refleksi diri, memahami pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. Sekarang saudara diminta untuk melakukan aksi nyata, yaitu membuat tulisan ringkas tentang sosok guru masa depan yang saudara idamkan.

Lembar Kerja 2.3: Aksi Nyata

Aksi Nyata :
Menjadi Guru yang memerdekakan Siswa





Topik 3 Identitas Manusia Indonesia

Durasi	3 Pertemuan
Capaian Pembelajaran	Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu
1. Mahasiswa membuat tulisan refleksi diri mengenai Topik Bahasan yang dipilih LPTK 2. Mahasiswa memahami materi kuliah dari 2 Topik Bahasan tentang identitas manusia Indonesia 3. Mahasiswa dapat melakukan telaah kritis terhadap sumber belajar tentang identitas manusia Indonesia 4. Mahasiswa mengevaluasi pemahaman tentang identitas manusia Indonesia 5. Mahasiswa mampu membuat koneksi antar materi tentang identitas manusia Indonesia	

A. Memulai dari diri

1. Pengantar

Salam dan Bahagia,

Memahami Identitas Manusia Indonesia menjadi sebuah refleksi penguatan bagi Mahasiswa dalam membangun perspektif kritis tentang pengembangan pendidikan Indonesia. Keragaman kultural Indonesia menjadi kekuatan Pendidikan Indonesia untuk menjadikan nilai-nilai luhur dan akar-akar budaya setiap daerah sebagai sumber belajar dalam menguatkan identitas Manusia Indonesia.

2. Manusia Indonesia menurut saya

Pendidikan sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur budaya bangsa, tidak lepas dari pemahaman kita terhadap manusia Indonesia. Untuk memahami lebih dalam tentang manusia Indonesia, anda perlu melakukan refleksi, dengan mengisi respon terhadap pertanyaan-pertanyaan pemantik di bawah ini:

Tabel 3. 1 Memulai dari diri

Pertanyaan	Respon
Menurut Anda, apa yang khas dan unik sebagai manusia Indonesia?	
Sebagai calon pendidikan profesional, Mengapa Anda perlu mengenal manusia Indonesia dalam proses mendidik?	
Apa yang Anda disyukuri sebagai manusia Indonesia?	

Pertanyaan pemantik di atas untuk membantu saudara melakukan refleksi untuk mengenal diri sebagai manusia Indonesia, sekaligus untuk mengenal peserta didik sebagai manusia Indonesia. Pemahaman saudara tentang karakteristik manusia Indonesia, dapat saudara gunakan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didikan Indonesia.

B. Eksplorasi Konsep

Setelah saudara melakukan refleksi dan kontemplasi tentang identitas manusia Indonesia, sekarang saat saudara memperdalam beberapa kajian tentang identitas manusia Indonesia melalui beberapa tulisan di bawah ini:

1. Pengantar

Kebhinekatunggalikaan menjadi kekuatan bangsa Indonesia memaknai keberagaman sosio-kultural dan nilai-nilai luhur yang ada pada setiap daerah. Akar-akar budaya merajut keberagaman untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Pancasila menjadi perekat keberagaman nilai-nilai luhur budaya yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke

2. Identitas Manusia Indonesia

Dengan menggunakan metode fenomenologi atau analisis eksistensial, manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Istilah kemanusiaan Indonesia dipilih mengingat tidak mudahnya mendeskripsikan apa dan siapa manusia Indonesia yang sesungguhnya. Kemanusiaan Indonesia dimaksudkan untuk menyampaikan pengertian luas dan mendalam tentang pengalaman manusia Indonesia yang terbentuk secara relasional-dialogal-historis sejak sebelum adanya negara Republik Indonesia sampai dengan kini dan masa depan. Kemanusiaan Indonesia mencakup nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuitas, dialogilitas, dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Setidaknya ada tiga hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni nilai kebhinekatunggalikaan, nilai-nilai Pancasila dan Religiositas.

a. Manusia Indonesia Lahir, hidup dan Berkembang dalam Kebhinekatunggalikaan

Di dalam pengalaman berelasi, berinteraksi, berdialog, beraktivitas, dan memperjuangkan hidupnya, orang-orang Indonesia menemukan makna

keindonesiaannya yang kaya akan keragaman (kebhinekaan). Keragaman merupakan pengalaman manusia di dunia ini terutama di era global ini. Bagi orang-orang Indonesia, keragaman atau kebhinekaan merupakan salah satu struktur hakiki atau karakter keindonesiaannya yang amat khas. Keragaman (kebhinekaan) itu merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas keindonesiaan sejak Indonesia belum diakui sebagai sebuah negara. Mereka yang berjuang untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang yang sejak semula hidup dalam pengalaman relasi dengan latar belakang perbedaan dan keragaman agama (kepercayaan), ras, suku, warna kulit, dan bahasa dalam konteks ribuan pulau, tradisi, ritual, mitos, legenda, simbolisme bangunan, hasil bumi, dan flora-fauna. Makna keragaman manusia Indonesia yang hidup dalam negara kepulauan dan beriklim tropis serta dilingkupi lautan tentu berbeda dengan makna keragaman orang-orang dari benua Afrika, Eropa dan Amerika. Selain itu, keragaman yang menjadi karakter keindonesiaan juga bersifat terbuka terhadap pemaknaan baru. Dalam perjalanan waktu, keragaman yang diterima sebagai warisan itu dihidupi dalam relasi yang dinamis sehingga membutuhkan pemaknaan baru. Makna keragaman yang menjadi karakter keindonesiaan bersifat transendental dan terbuka untuk digali melalui proses eksplorasi pengalaman lokalitas manusia Indonesia.

Bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Pertama, keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah (tanpa dirancang) yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Kedua, masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, bahasa, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Semuanya itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Karenanya, di dalam nilai keragaman terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Dengan kata lain, keragaman

merupakan nilai kemanusiaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa dan budaya Indonesia.

Dengan menggunakan pemikiran Koentjaraningrat, budaya mempunyai tiga wujud. Wujud pertama dari budaya adalah ide, gagasan, nilai, atau norma yang dihidupi di tengah konteks masyarakat. Wujud kedua adalah berbagai aktivitas atau pola tindakan manusia di tengah masyarakat. Yang ketiga adalah benda-benda bernilai yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau disebut juga *artifact*. Wujud pertama berciri abstrak atau spiritual. Artinya, disebut wujud abstrak atau spiritual karena memang tidak kasat mata. Meski demikian, ide-ide, gagasan atau nilai-nilai itu memberi pengaruh dan mendorong kehidupan dan aktivitas manusia di tengah masyarakat yang secara kontinyu sehingga membentuk adat kebiasaan. Tindakan atau aktivitas manusia dalam memperjuangkan nilai-nilai di dalam kebersamaan masyarakat akhirnya membentuk sistem sosial atau sebuah pola perilaku yang mentradisi dan bisa menghasilkan wujud fisik budaya atau *artifact* yang bernilai luhur. Dengan demikian, sistem nilai, sistem sosial dan hasil karya manusia yang bernilai luhur merupakan satu kesatuan yang ketiganya merupakan wujud budaya.

Koentjaraningrat menambahkan penjelasannya bahwa budaya juga memuat tujuh unsur penting, yakni bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, dan sistem ilmu pengetahuan. Baginya, ketujuh unsur kebudayaan ini bersifat universal karena ditemukan di setiap masyarakat. Hal-hal yang disebutkan oleh Koentjaraningrat ditegaskan oleh Battista Mondin. Bagi Mondin, budaya merupakan kesatuan dari empat pilar penting, yakni nilai-nilai, bahasa, adat-istiadat atau tradisi, dan teknik pengungkapan dalam perilaku manusia. Pemikiran Koentjaraningrat dan Battista Mondin memperjelas dan membantu penegasan secara rinci apa yang dimaksud dengan keragaman sebagai nilai yang menunjukkan identitas dan jiwa budaya bangsa Indonesia.

b. Manusia Indonesia sebagai Manusia Pancasila

Menilik sejarahnya, keberadaan manusia Indonesia sebagai bangsa yang akan merdeka membutuhkan fondasi filosofis sebagai penegas identitasnya. Fondasi filosofis memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, rasa-perasaan sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup berbangsa. Mencari fondasi hidup berbangsa sudah menjadi pergulatan Ir. Soekarno sejak tahun 1925. Dalam imajinasi dan cita-cita menggapai kemerdekaan Indonesia, Soekarno sudah menggumuli nilai-nilai budaya yang sudah dihidupi oleh masyarakat nusantara yang akan dijadikan sebagai ideologi bangsa. Dengan demikian, tujuan perumusan Pancasila adalah untuk menemukan perekat dan penyatuan hidup berbangsa bagi segala suku dan bangsa di nusantara ini. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di kepulauan nusantara, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Segala segala kekayaan melingkupi masyarakat Indonesia yang berbhineka di kristalisasi dalam Pancasila. Karenanya, pancasila berisi “djiwa bangsa Indonesia”. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong-royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara.

Menghargai dan memberi ruang kepada setiap warga dan bangsa untuk memberikan sumbangan bagi kebersamaan dalam membangun dunia merupakan wujud penghayatan nilai-nilai Pancasila. Setiap warga masyarakat saling membutuhkan satu sama lain dalam kebersamaan sebagai makhluk sosial. Rukun dan damai merupakan kebutuhan setiap pribadi di dalam hidup bersama di tengah dunia. Terciptanya hidup harmonis dan damai menjadi tanggungjawab setiap pribadi dalam kebersamaan yang mempertebal rasa aman dan syukur setiap pribadi sebagai warga masyarakat. Sila-sila Pancasila memuat imperative etis untuk hidup bersatu, bertanggungjawab, bekerjasama, hidup adil dan bermusyawarah (bergotong-royong) untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, keseimbangan dinamis antara hak dan

kewajiban setiap warga perlu mendapatkan tempat untuk mewujudkannya. Lebih dari itu, dalam konteks pendidikan Indonesia, seperti yang ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara, pengenalan terhadap para siswa dan dialog edukatif untuk menumbuhkan karakter lebih dari sekedar mengembangkan kemampuan intelektual dalam semangat kompetisi individualism.

c. Manusia Indonesia sebagai Manusia Religius

Religiositas merupakan salah satu aspek insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Religiositas merupakan hal yang mendasar atau esensial dalam hidup manusia. Dalam pengertian lain, Religiositas merupakan daya-daya insani yang bersifat batiniah yang ada di dalam kedalaman hati. Religiositas merupakan “ibu dari cinta kepada kebenaran, kesukaan pada gejala yang wajar, sederhana, jujur dan sejati”.

Religiositas merupakan inti dan daya agama. Bisa diumpamakan kalau agama adalah bunga yang indah, Religiositas merupakan sari bunga yang terletak di dalam jantung bunga itu. Agama atau *religion* (Latin: *religio, re-legere*) merupakan model kehidupan yang ditandai oleh ikatan atau keterhubungan praksis kehidupan doa-ritual, komunitas persaudaraan, dan tindakan amal kasih. Dengan demikian, Religiositas dan agama (*religion*) merupakan dua sisi dari model kehidupan yang menyatukan aspek empiris dan meta empiris atau menyatukan dua sisi insani, yakni sisi jasmaniah dan rohaniah. Ketika agama tidak didasari oleh kualitas batin atau religiositas, ia kehilangan daya dan akan menjadi sekedar kegiatan sosial-politik tanpa visi kemanusiaan yang utuh. Sementara Religiositas tanpa agama akan menjadi gerakan karismatik yang tidak bisa dijamin kelestarian dan keberlanjutannya.

Secara geografis, Indonesia merupakan bagian dari Asia yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya agama-agama besar dan etika. Salah satu karakter khas masyarakat Asia adalah kedalaman dan kekayaan religiositas yang memberi pengaruh besar pada praksis kehidupan. Hidup berkomunitas yang harmonis lebih dipentingkan dibandingkan kepentingan individual. Komunitas-komunitas memiliki tradisi kepercayaan dan ritual yang khas. Dalam bidang politik, Religiositas memberi pengaruh besar pada model dan praksis kepemimpinan. Religiositas juga berpengaruh terhadap praksis hidup masyarakat dan pendidikan dalam keluarga dan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum didominasi oleh perkembangan modernitas dan industri. Religiositas berpengaruh dalam memahami arti dan menghayati makna kesejahteraan.

Masyarakat Indonesia pada khususnya dan Asia pada umumnya menghayati hidup sebagai peziarahan menuju pada tujuan. Agama-agama besar di Asia mengajarkan tentang hidup sebagai berziarah. Setiap tahun ada jutaan umat muslim mengadakan ziarah ke tanah suci Mekah. Jutaan umat Kristiani mengadakan ziarah ke tempat-tempat suci. Umat Hindu juga mengenal ziarah. Umat Budha pun demikian juga. Di masyarakat Jawa ada tradisi ziarah kubur. Berziarah merupakan kegiatan yang didorong gerakan batin dan pilihan dari dalam hati. Ziarah merupakan gerakan spiritual kosmik yang bertolak dari kesadaran diri untuk membarui hidup, meninggalkan hal-hal negatif di masa lalu, menimba semangat baru untuk membangun hidup lebih baik di masa depan. Ziarah merupakan lambang dari perjalanan hidup manusia yang terus menerus perlu memahami jati dirinya, relasinya dengan Tuhan, dan keterbukaan untuk mengalami bantuan serta bimbingan-Nya demi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Kesadaran manusia sebagai peziarah secara simbolik diekspresikan dalam berbagai tarian tradisional dan upacara adat. Upacara Nyadran dan Labuhan merupakan bentuk konkrit dari perayaan adat yang mengungkapkan keyakinan manusia bahwa hidup adalah peziarahan. Kegiatan berziarah dan upacara adat ziarah mengungkapkan keyakinan

bahwa Tuhan adalah penguasa hidup manusia dan alam semesta. Dalam perayaan adat yang mengungkapkan keyakinan pentingnya pembaharuan hidup dalam peziarahan hidup secara jelas diungkapkan pula tanggung jawab manusia untuk menjaga kelestarian alam. Keselamatan manusia ditandai oleh relasi harmonis manusia dengan Allah dan alam semesta. Keyakinan ini juga menjadi salah satu inti yang diimani para pemeluk agama-agama besar. Dengan melaksanakan upacara tradisional atau kearifan lokal yang mengekspresikan keyakinan akan peziarahan hidup, para pemeluk agama yang berbeda mendapatkan ruang untuk berdialog dan membarui relasi serta komitmennya untuk melestarikan persaudaraan dan pelestarian alam.

Dapat dikatakan bahwa banyak agama asli dan agama besar di Asia menempatkan ziarah sebagai salah satu spiritualitas yang penting. Ziarah merupakan sikap religius yang berkarakter relasional dan dinamis. Setiap manusia merupakan peziarah. Ia berasal dari Sang Pencipta dan menuju pada Sang Pencipta. Spiritualitas ziarah yang dinamis menjadi titik temu berbagai penganut agama yang berbeda untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis, adil dan bersaudara sehingga bisa saling membantu dalam menjalani peziarahan hidup dengan damai dan bahagia. Relasi dan dialog antar pemeluk agama yang berbeda dan antar umat manusia sebagai peziarah semakin berkualitas ketika dalam peziarahan hidup ini setiap pribadi sungguh menghayati tanggung jawabnya untuk melestarikan alam dan menjaga harmoni. Dalam dialog juga dibangun kesadaran dan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kesadaran sebagai bagian dari komunitas umat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sama.

Religiositas yang bertumbuh atas dasar pengalaman relasi manusia dengan Allah, dengan alam duniawi dan melalui alam duniawi, menumbuhkan sikap-sikap religius. Pemeluk agama apapun adalah makhluk Tuhan yang hidup dan bertanggungjawab untuk mengembangkan kualitas hidup bersama di tengah semesta ini. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama mestinya memiliki sikap-sikap insani yang meliputi sebelas hal.



- Mengakui Kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Tuhan serta meyakini tanggung jawab manusia untuk mengembangkan diri secara aktif dan dinamis dalam kesatuan dengan alam sekitar.
- Meyakini bahwa hidup merupakan tugas mulia dan panggilan penuh cinta kasih dari Tuhan Yang Maha arif dan Pengasih. Hidup bukan sebagai fakta statis dan nasib yang tidak bisa diubah.
- Melihat manusia dalam kesatuan dengan sesama dan seluruh alam semesta yang dianugerahi rahmat kemerdekaan untuk memelihara dan melestarikannya secara kreatif serta menggunakan alam untuk tujuan yang mulia demi mencapai Sang Pencipta.
- Melihat alam semesta sebagai sahabat yang membantu manusia untuk hidup bermartabat dan mencintai Sang Pencipta.
- Melihat sejarah hidup manusia sebagai suatu proses dari Tuhan dan demi perkembangan ke arah tujuan pemenuhan janji Tuhan yang Mahabaik
- Peka terhadap segala yang terjadi di alam semesta dan inti kehidupannya. Dengan demikian manusia semakin menjunjung tinggi hal-hal yang agung dan sekaligus menghargai yang kecil dan remeh sebagai bagian dari proses hidup manusia di tengah alam semesta ini menuju pada Sang Pencipta.
- Memiliki tanggung jawab terhadap hidup pribadi dan bersama, teguh pada prinsip (tidak mudah terbawa arus), menyadari keterbatasan diri dan memahami sesama serta peduli pada mereka yang lemah.
- Berjuang untuk membangun hidup sejahtera dengan segala bakat yang dimiliki (eksplorasi sejati) namun menyadari bahwa segala yang diupayakan serta hal-hal material sifatnya sementara dalam proses mengalami Allah yang mengatasi ruang dan waktu (mistikus).

- Memiliki belarasa dengan sesama dan bertanggungjawab terhadap kehidupan bersama.
- Mengakui adanya hidup fana dan baka dengan mengakui Tuhan yang Maha rahim terlibat dalam hidup fana maupun baka.
- Menghayati hidup secara integral (utuh) di dalam kefanaan yang berhubungan dengan kebakaan.

Sikap religious kosmik atau spiritualitas kosmik mestinya menjadi jiwa dalam mengembangkan visi kemanusiaan Indonesia. Spiritualitas kosmis merupakan titik tolak dan titik temu berdialog untuk mencari jalan-jalan bersama mengembangkan hidup bersama yang integral dan ekologis secara dinamis dan kontinyu dalam keragaman budaya Indonesia. Visi ini mestinya menjadi dasar untuk menata bidang politik, ekonomi, pendidikan dan berbagai kebijakan publik. Karenanya, manusia Indonesia mestinya mewujudkan dirinya sebagai pribadi-pribadi yang menghidupi nilai keragaman, berjiwa Pancasila dan mewujudkan spiritualitas kosmik.

d. Pendidikan Indonesia

Pendidikan dalam konteks Indonesia terjadi dalam relasi kesalingan, bukan rivalitas. Pendidikan terjadi dalam kerjasama bukan saling mengalahkan dan mengungguli. Pendidikan merupakan ruang untuk menghargai pengalaman (relasional-dialogal subjek-objek), bukan sekedar mentransfer informasi, menolong yang lemah, bukan mengeksploitasi. Pendidikan dalam bingkai keindonesiaan merupakan penegasan kesederajatan martabat manusia Indonesia untuk mengikis dominasi mayoritas pada minoritas dan berbagai bentuk gerakan yang memecah persatuan bangsa.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multi budaya, bahasa, agama, keyakinan, etnis, suku, dan kearifan lokal, pendidikan mempunyai peran penting dalam melestarikan keragaman, menjaga kesatuan, memelihara keharmonisan, dan mengembangkan kualitas

keindonesiaan. Pendidikan berperan penting untuk membangun paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai bangsa Indonesia. Dalam konteks keragaman Indonesia, pendidikan yang bercorak seragam bertentangan dengan konteks. Akan tetapi, Indonesia juga membutuhkan suatu pola umum yang bisa menyatukan. Dengan demikian, paradigma pendidikan itu sendiri yang mestinya menyatukan semuanya. Sebagai contoh, paradigma pluralisme, dirasa kurang cocok untuk Indonesia yang sangat kaya dan dinamis dalam relasi keragaman. Pluralisme memberikan peluang untuk mengakui perbedaan atas keragaman namun kurang memberi ruang pada relasi-dialogal atas realitas keragaman tersebut. Pluralisme lebih menekankan kesatuan pasif dalam keragaman dan cenderung membuka peluang untuk masing-masing komponen untuk sekedar tidak saling mengganggu. Akibatnya, kebenaran dilihat sebagai sesuatu yang relatif dan atau kelompok besar mendominasi yang kecil sehingga sulit menemukan titik temu yang mendinamisir transformasi hidup bersama. Paradigma inilah menjadi dasar pendidikan agama di sekolah-sekolah sampai saat ini.

Kalau mau mengembangkan kesatuan dalam dialog yang dinamis dalam masyarakat, paradigma transformasi masyarakat berdialog menjadi salah satu alternatif. Dalam paradigma ini, kekayaan hidup dan dialog yang terjadi di dalam masyarakat menjadi titik tolak perkembangan masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal atau nilai-nilai religius lokal menjadi titik tolak pendorong pendidikan transformatif masyarakat itu sendiri. Paradigma transformatif masyarakat berdialog menjadi dasar untuk mengembangkan pendidikan transformatif yang menyatukan, mendinamisir dan mentransformasi masyarakat dalam konteks keragaman seperti Indonesia. Inilah dasar pentingnya mengembangkan pendidikan religiositas yang menjadi dasar untuk pengembangan pribadi-pribadi yang demokratis, menghargai keragaman, membangun ruang keterlibatan aktif masing-masing anggota masyarakat. Pendidikan religiositas penting untuk memberi

dasar spiritualitas dan humanisme karena demokrasi sendiri tidak pernah mempunyai pengertian tunggal.

Salah satu warisan masyarakat Asia dan Indonesia adalah kecerdasan (kejeniusan) religius. Agama-agama dan budaya-budaya Asia mewariskan sebuah visi hidup integral dan dinamis. Proses hidup manusia merupakan manifestasi (perwujudan) relasi timbal balik dan integral antara dirinya dengan sesama, alam dan Tuhan. Segala peristiwa hidup dipengaruhi oleh alam dan Tuhan serta berpengaruh pada alam dan keutuhan kehidupan. Visi kosmik yang integral mempunyai implikasi pada hidup secara luas, termasuk dalam memahami pendidikan. Hidup adalah peziarahan yang bermakna edukatif. Pendidikan terjadi di dalam praksis hidup bermasyarakat dengan segala penghayatan warisan tradisi. Keluarga dan masyarakat merupakan tempat pendidikan terpenting. Pengelolaan pendidikan formal mestinya ditarik dari visi kosmik kehidupan.

Penghayatan tradisi merupakan salah satu model pendidikan kosmik. Sebagai salah satu contoh pendidikan lewat tradisi adalah upacara labuhan. Dalam kearifan lokal, terutama dalam fenomena labuhan Gunung Merapi, dinyatakan bahwa kualitas hidup bersama (keadaban publik) ditentukan oleh relasi manusia-alam gaib dan alam semesta. Hidup manusia tidak bisa diatur sendiri berdasarkan relasi dengan pemerintah atau pemilik modal (kekayaan) ekonomis belaka. Dalam tradisi labuhan terungkap keyakinan bahwa Tuhan berperan penting dalam menentukan nasib manusia. Alam semesta adalah tanda berkah yang selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan manusia secara berlimpah. Fenomena letusan Gunung Merapi bukan dilihat sebagai musibah melainkan siklus alam yang selalu memberikan berkah berupa pasir dan kesuburan alam. Maka, labuhan bukan untuk menghentikan letusan Gunung Merapi melainkan doa syukur kepada TYME atas segala anugerah alam disertai permohonan agar letusan tidak menghancurkan hidup manusia. Dalam kerangka pikir ini, kita dapat memahami bahwa masyarakat di sekitar Gunung Merapi sulit untuk diminta bertransmigrasi. Ada ungkapan “di lereng gunung ada

bahaya letusan. Di pantai, ada bahaya tsunami. Di darat ada bahaya puting beliung. Hidup manusia ada di tengah Tuhan Yang Mahakuasa”. Dalam kerangka kearifan lokal ini, kesejahteraan diyakini berasal dari Tuhan yang layak disyukuri. Mbah Marijan yang menjadi juru kunci Gunung Merapi merepresentasikan paham kesejahteraan masyarakat di lereng merapi. Ia selalu memperkenalkan kepada tamu-tamunya sebagai orang bodoh dan menjelaskan kepada para tamu: “Kalau orang pintar, diberi satu akan minta dua. Tapi kalau orang bodoh, diberi satu akan disyukuri”. Ungkapan itu menjelaskan bahwa paham kesejahteraan berkarakter kosmik dan integral.

Labuhan Gunung Merapi berkaitan dengan penghayatan religiositas masyarakat Kerajaan Mataram–Yogyakarta. Labuhan merupakan ungkapan keyakinan akan keterjalinan hidup manusia dengan sesama, TYME (alam gaib) dan alam semesta. Relasi intensif manusia-TYME-alam (tiga serangkai) menentukan kualitas keadaban manusia.

Secara historis, tradisi labuhan gunung Merapi diwariskan oleh Panembahan Senopati, Raja Mataram yang pertama. Labuhan Gunung dilakukan di penghujung Bulan Rajab. Begitu labuhan Parangkusumo usai, rangkaian acara pembuka labuhan Merapi pun dimulai. Pawai iring-iringan prajurit keraton, ulama, bangsawan, dan pemain gamelan dari pelataran Bebeng menuju rumah juru kunci di Kinahrejo, diikuti dengan perebutan sesaji – hasil kebun penduduk setempat seperti sayur, buah, nasi lengkap dengan lauk dan ayam panggang – dan kesenian jathilan.

Awalnya, labuhan merupakan tanda syukur Senopati dan penghormatan kepada Ratu Laut Kidul dan Penguasa Merapi atas bantuan mereka mendirikan Kerajaan Mataram. Kemudian, perayaan ini menjadi peringatan atas jasa rakyat kecil yang membantu Senopati membuka Alas Mentaok, cikal bakal Kerajaan Mataram. Upacara adat ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada alam, Gunung

Merapi yang telah menjadi sumber penghidupan mereka (pasir dan alam subur sebagai tanda berkah).

Dalam etika publik, pengembangan keadaban publik ditentukan oleh peran tiga kekuatan negara, masyarakat pasar dan masyarakat warga (yang cenderung berciri administratif-statistik). Relasi ketiganya berciri regulatif-komplementer-distributif. Labuhan merupakan penghayatan terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kearifan lokal labuhan, keadaban publik dibangun berdasarkan relasi 3 poros, yakni manusia-dunia gaib (Tuhan)-alam. Relasi itu berciri rekonsiliatif-kerakyatan-simbolik/religius.

Sejarah membuktikan bahwa keadaban publik yang hanya dibangun berdasarkan kekuatan manusia (*antroposentrisme*) menghasilkan peradaban manusia yang miskin, dangkal dan kacau. Keadaban yang berciri ekonomis belaka tanpa mengindahkan aspek ekologis terbukti menghadirkan bencana. Itulah yang terjadi dalam era Orba dan dalam kadar tertentu terjadi hingga kini. Penghancuran hutan dengan dalih pengembangan ekonomi terjadi secara membabi buta. Perkebunan kelapa sawit adalah contohnya. Bahaya kekeringan mengancam hutan yang telah beralih menjadi perkebunan kelapa sawit. Manusia menghancurkan sesama dengan kasat mata terjadi dalam masyarakat pasar yang menganut semangat persaingan.

Kearifan lokal yang terkandung dalam labuhan Merapi merupakan salah satu model mengatur hidup bersama yang sudah dihayati bangsa Indonesia secara berabad-abad. Keadaban publik sebagaimana dicita-citakan oleh sila ke-2 dari Pancasila. Kemanusiaan Indonesia dihayati dan dikembangkan dalam relasi intensif dengan sesama dari berbagai latar belakang SARA yang berbeda, dalam keragaman alam dan keyakinan akan TYME.

Keadaban publik yang berkualitas memuat beberapa aspek penting. Pertama, menjunjung tinggi perjuangan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan dilaksanakan secara kontinyu. Kedua, solidaritas antar warga (kerakyatan) dibangun dan dikembangkan. Ketiga,

penghargaan terhadap alam selalu terjaga. Keempat, manusia selalu ada dalam relasi dengan Tuhan. Kelima, relasi antar manusia-Tuhan-alam selalu diperbarui (rekonsiliatif). Dalam kultur Jawa, hidup manusia dengan segala tindakannya (*laku*) peziarahan hidup bersifat etis-eudaimonistik. Artinya, hidup manusia berproses dalam mewujudkan kebaikan demi kebahagiaan.

Lalu bagaimana dengan pendidikan formal? Semestinya pendidikan dirancang berdasarkan visi spiritualitas kosmik. Implikasinya, keluarga, masyarakat, alam dan sekolah bersifat organis dan sinergis. Pembelajaran bersifat dialogis dan mengintegrasikan aspek informatif, formatif dan transformatif. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, mengenal kearifan lokal, nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas kosmik lebih mendasar daripada pelajaran agama. Kontak dengan alam, masyarakat dan peziarahan merupakan unsur sangat penting.

Dalam visi spiritualitas kosmik, manusia adalah peziarah yang berkembang secara dinamis dan integral. Perkembangan itu berkarakter integral, yaitu kesatuan aspek batiniah-jasmaniah. Daya batin (religiositas) terungkap dalam sikap dan perilaku manusiawi. Hidup manusia merupakan kesatuan dari Religiositas-sikap religius-tindakan religius. Manusia berkembang secara integral dalam arti bahwa manusia berkembang dalam relasi timbal balik dengan sesama-Tuhan dan alam.

Memahami manusia sebagai peziarah berarti menempatkan manusia sebagai pembelajar sepanjang hayat. Perkembangan setiap pribadi mempunyai pengaruh terhadap masyarakat dan alam semesta. Suatu proses pendidikan selalu mempunyai implikasi bagi kehidupan relasi setiap pribadi dengan sesama dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, perkembangan dan transformasi yang terjadi dalam proses pendidikan merangkum peningkatan kualitas budaya, sosial, dan ekologis.

Pendidikan tidak cukup hanya membantu untuk memahami keragaman. Pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman, dan melawan segala bentuk yang merongrong kesatuan. Karenanya, pendidikan mesti menjadi praksis hidup bersama yang saling peduli, mengasihi, menghargai dan bukan saling mengalahkan dalam semangat kompetisi.

C. Ruang Kolaborasi

Pada ruang kolaborasi ini, saudara secara berkelompok (tiap kelompok 5 mahasiswa) melakukan diskusi tentang identitas manusia Indonesia, berdasarkan hasil refleksi dan telaah kritis saudara terhadap sumber belajar yang telah diberikan. Untuk membantu saudara melakukan kolaborasi dalam kelompok, gunakan pertanyaan pemandu yang diberikan pada tabel dibawah ini.

Lembar Kerja 3.1: Ruang Kolaborasi Identitas Manusia Indonesia

Pertanyaan	Respon
Apa yang saya ketahui tentang identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur yang ada	
Mengapa kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional?	
Bagaimana rumusan tentang identitas manusia Indonesia	

Pertanyaan	Respon
menjadi sebuah landasan kuat implementasi pendidikan di Indonesia?	

Hasil kolaborasi kelompok, kemudian saudara diskusikan dalam forum kelas dibawah bimbingan dosen pengampu matakuliah. Dosen akan memberikan penguatan pada hasil kolaborasi kelas.

D. Demonstrasi Kontekstual

Setelah saudara melakukan refleksi kritis, melakukan eksplorasi konsep dan kolaborasi tentang identitas manusia Indonesia, tentu saudara telah dapat mengambil intisari identitas manusia Indonesia, sebagai bekal saudara sebagai calon guru profesional dalam merancang pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, pada sesi demonstrasi kontekstual ini, saudara diminta memberikan gambaran yang kontekstual tentang identitas manusia Indonesia dengan media visual atau audio. Media visual dapat berupa video pendek, infografis, poster, karikatur atau komik atau menggunakan *podcast* untuk menjelaskan hasil rumusan tentang identitas manusia Indonesia.

Lembar Kerja 3.2: Demonstrasi Kontekstual

Judul	Deskripsi

E. Elaborasi Pemahaman

Pada Pembelajaran kali ini, Anda akan berlatih memberikan perspektif reflektif kritis berdasarkan pemahaman dan internalisasi tentang identitas manusia Indonesia dalam ruang diskusi virtual (non-virtual). Sebagai pemandu untuk elaborasi pemahaman, gunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik berikut:

Tabel 3. 2 Elaborasi Pemahaman Internalisasi Identitas Manusia Indonesia

Pertanyaan	Respon
Apa yang khas dan unik sebagai manusia Indonesia?	
Apa yang saya syukuri sebagai manusia Indonesia?	
Mengapa penting memahami keunikan identitas manusia Indonesia dalam mengembangkan pendidikan Indonesia?	
Bagaimana identitas manusia Indonesia menjadi sebuah landasan mengimplementasi pendidikan nasional?	

Hasil elaborasi pemahaman saudara kemudian didiskusikan pada forum kelas, untuk mendapatkan penguatan dari dosen pengampu matakuliah.



F. Koneksi antar materi

Saudara sudah melakukan refleksi dan mempelajari tentang perjalanan pendidikan nasional, sekarang saudara lakukan koneksi antar materi yang sudah anda pahami dalam bentuk mind mapping.

Lembar Kerja 3.1: Koneksi antar materi

Mind Mapping Koneksi antar materi

G. Aksi Nyata

Setelah anda mempelajari materi identitas manusia Indonesia, dimulai dari refleksi diri, memahami identitas manusia Indonesia. Sekarang saudara diminta untuk melakukan aksi nyata, yaitu membuat tulisan ringkas tentang proses pembelajaran yang saudara idamkan sesuai dengan identitas manusia Indonesia

Lembar Kerja 3.2: Aksi Nyata

Aksi Nyata :

Proses Pembelajaran yang sesuai dengan Identitas Manusia Indonesia



Topik 4

Pancasila Sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia

Durasi	3 Pertemuan
Capaian Pembelajaran	Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu
1. Mahasiswa mampu memaknai tentang i “Pendidikan Yang Memerdekakan 2. Mahasiswa memahami “Pendidikan Yang Memerdekakan 3. Mahasiswa dapat melakukan refleksi kritis tentang “Pendidikan yang memerdekakan 4. Mahasiswa mampu membuat koneksi materi tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia	

A. Memulai dari Diri

1. Pengantar

Pembahasan pada Topik IV memberikan perspektif kepada Mahasiswa tentang Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan entitas dan identitas Bangsa Indonesia serta Profil Pelajar Pancasila (PPP) menguatkan konsep berpikir Mahasiswa dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan murid dalam Pendidikan Abad ke-21.

2. Pancasila dan Profil Pelajar Pancasila Menurut saya

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia, haruslah menjadi landasan utama dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu cara yang paling efektif untuk menghasilkan generasi bangsa yang berkarakter dan memahami nilai-nilai pancasila, adalah melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu pendidikan di Indonesia sudah selayaknya harus menghasilkan pelajar yang memiliki nilai-nilai seperti yang tertuang dalam

pancasila. Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah bagaimana seharusnya profil pelajar pancasila, dan bagaimana mewujudkannya.

Untuk memulai pembahasan ini, marilah kita mulai dari diri sendiri. Silahkan saudara melakukan refleksi dan perenungan dengan profil pelajar pancasila menurut saudara. Untuk membantu saudara melakukan refleksi, silahkan saudara isi jawaban dari beberapa pertanyaan pemantik di bawah ini.

Tabel 4. 1 Memulai dari Diri

Pertanyaan	Respon
Apa yang Anda ketahui tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas Bangsa Indonesia?	
Apa yang Anda ketahui tentang Profil Pelajar Pancasila (PPP)?	
Bagaimana menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia?	

Pertanyaan pemantik di atas untuk membantu saudara melakukan refleksi tentang profil pelajar pancasila menurut anda. Hasil refleksi anda akan sangat menentukan langkah selanjutnya, terutama dalam merancang pembelajaran yang mengarah pada penguatan profil pelajar pancasila.

B. Eksplorasi konsep

Setelah saudara melakukan refleksi, tentang bagaimana profil pelajar Pancasila menurut anda, sekarang Anda diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Semoga dengan bacaan ini akan menambah wawasan serta mempertajam analisis kritis saudara tentang profil pelajaran Pancasila.

1. Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia

a. Pendahuluan

Pancasila menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam kebhinekaan dalam setiap latar belakang kehidupan sosial-budaya, ekonomi dan agama. Profil Pelajar Pancasila dalam pendidikan Indonesia yaitu Beriman, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia; Berkebinekaan Global; Gotong Royong; Kreatif; Bernalar Kritis dan Mandiri. Pada topik ini, mahasiswa secara mendalam merefleksikan hadirnya Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia.

b. Pendidikan demi Kesatuan Bangsa

Salah satu karakter bangsa Indonesia adalah kebhinekaan (*diversity*) dalam suku, ras, agama dan budaya. Masyarakat Indonesia hidup tersebar di wilayah Indonesia yang terdiri ribuan pulau, suku, dan wilayah yang dikelilingi laut. Ada lebih dari 740 bahasa daerah di Indonesia. Kesadaran multikultural-religius menjadi titik pijak dan bagian dari proses pengembangan hidup bersama di Indonesia (Eliharni, 2016). Artinya, nilai-nilai kemanusiaan Indonesia bertumbuh di dalam hati warga Indonesia yang hidup dalam kebhinekatunggalikaan yang kaya dengan nilai-nilai religius.

Setiap orang Indonesia lahir dan bertumbuh di dalam pengalaman dan pergulatan hidup bersama di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural-religius. Dalam perspektif fenomenologi, identitas orang Indonesia berakar dan berkembang dalam pengalaman berada di dalam dunia dan berada bersama orang lain yang memiliki latar belakang budaya, agama dan suku yang berbeda (Heidegger, 1962). Untuk menjadi bangsa yang tetap bersatu dan berkembang, ada kebutuhan untuk selalu melestarikan kemajemukan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan, menguatkan kesetiakawanan dan menegaskan identitas bangsa yang majemuk. Setiap warga Indonesia berperan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuitas, dan dialogilitas demi keutuhan dan penegasan identitas bangsa.

Di satu sisi, keragaman budaya, suku, ras, Religiositas dan agama merupakan kekayaan yang membentuk identitas Indonesia. Di sisi lain, perbedaan suku, ras, agama dan budaya berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sudah sering konflik sosial pecah dipicu oleh sentiment perbedaan. Karenanya, seluruh elemen hidup berbangsa memiliki peran dan tanggungjawab untuk menjaga kesatuan dalam perbedaan atau kebhinekatunggalikaan (*unity in diversity*) sebagai identitas kultural dan politik bangsa (Pedersen, 2016). Tantangan selanjutnya adalah dinamika menegaskan kebhinekatunggalikaan menjadi identitas moral atau karakter setiap warga Indonesia. Kesadaran akan kesamaan nilai-nilai moral yang berakar dari keyakinan agama yang berbeda-beda merupakan jembatan untuk membangun kehidupan bersama yang adil, bersaudara, berbelarasa dan damai (Kusuma & Susilo, 2020).

Menjaga kesatuan, melestarikan kemajemukan, meningkatkan persaudaraan dan mengakarkan jiwa kesetiakawanan perlu ditanamkan di dalam keluarga dan proses pendidikan seumur hidup secara formal dan informal. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang kaya dengan nilai-nilai religius, pendidikan agama di keluarga, sekolah dan masyarakat memiliki peran penting dan perlu dijalankan dalam semangat kerjasama yang sinergis. Dalam konteks masyarakat Indonesia, pendidikan agama merupakan bagian penting dari pendidikan masyarakat yang memiliki peran strategis untuk menegaskan identitas Indonesia sebagai bangsa yang bersatu di dalam kebhinekaan budaya dan religiositas. Pendidikan memiliki di dalam keluarga, masyarakat dan sekolah memiliki peran strategis untuk melestarikan kesatuan bangsa dan mencegah perpecahan dan konflik horizontal. Untuk melestarikan kesatuan dalam kebhinekaan budaya, agama dan kepercayaan, hidup toleran saja tidak cukup dan kurang efektif untuk menjaga kehidupan bersama yang harmonis, adil dan damai (HPW, 2014).

Nilai-nilai budaya dan religious itu diartikulasikan dalam lima sila atau Pancasila sebagai dasar Negara. Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan kehidupan bangsa yang menempatkan penghormatan kepada Allah sebagai

pilar penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia bukan Negara agama dan bukan juga negara sekuler, namun keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa merupakan jiwa kehidupan setiap warga Indonesia (Nuryanto, 2014). Karenanya, pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan manusia Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia.

Pendidikan agama ditetapkan oleh Undang-undang sebagai kewajiban yang diberikan di semua sekolah. Pendidikan agama juga dilaksanakan di keluarga dan masyarakat. Akan tetapi, pendidikan agama di keluarga, sekolah dan masyarakat sama-sama berorientasi pada penguasaan pengetahuan kognitif dan tuntutan pelaksanaan aktivitas ritual (Nuryanto, 2014). Sentuhan afektif dan pembentukan sikap kurang mendapatkan perhatian dalam proses pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama di sekolah juga cenderung memisahkan dan memasukkan para peserta didik yang beragama berbeda ke dalam kotak agamanya masing-masing. Akibatnya, para peserta didik lebih banyak melihat dan mengalami sisi perbedaan daripada pengalaman yang menyatukan.

Pendidikan agama yang memisahkan peserta didik yang berbeda agama ke dalam kelompok yang berbeda dan cenderung belajar tentang dogma serta aturan ritual kurang memberi kontribusi yang optimal bagi kehidupan bersama sebagai bangsa yang multireligius (Mangunwijaya, 2020[1]). Sebagai seorang imam Katolik (a Catholic priest), pegiat arsitek Nusantara, budayawan, pejuang kemanusiaan, pelayan orang-orang miskin, dan pendiri Sekolah Dasar Eksperimental, Y.B. Mangunwijaya memberi perhatian tentang pentingnya pendidikan yang berkontribusi bagi pelestarian kesatuan Indonesia dalam kebhinekatunggalikaan (*unity in diversity of Indonesia*). Sebagai bangsa yang memiliki akar keragaman dan kekayaan nilai-nilai religius, Indonesia perlu mengoptimalkan pendidikan agama bagi penegasan identitas dan kesatuan bangsa.

Para pendiri bangsa telah menggali nilai-nilai filsafat hidup berbangsa yang dirumuskan dalam dasar Negara Pancasila. Karenanya, Pancasila merupakan dasar filosofis pendidikan pada umumnya dan pendidikan

agama di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, ras dan suku di tengah tantangan dan ancaman keterpecahan hidup berbangsa.

c. Pendidikan dalam Masyarakat Pancasila

Soekarno, sebagai Bapak Proklamator Indonesia, menggali nilai-nilai Pancasila dari nilai-nilai budaya bangsa untuk dijadikan perekat dan penyatu hidup berbangsa. Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia (Bung Karno, 1960). Pancasila yang memuat lima sila sebagai kesatuan merupakan identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan yang termuat dalam sila-sila Pancasila merupakan pondasi filosofis pengembangan hidup bersama di bidang politik, sosial, budaya dan pendidikan di Indonesia.

Pancasila disebut sebagai filsafat hidup berbangsa karena selain menjadi dasar Negara, Pancasila juga memuat visi hidup berbangsa. Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang meliputi keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, visi kemanusiaan yang adil dan beradab, cita-cita kesatuan hidup berbangsa, penegakan hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk berpartisipasi aktif dalam hidup berbangsa, dan perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Hijriana, 2020; Siswoyo, 2013). Y.B. Mangunwijaya menegaskan bahwa Pancasila memuat nilai-nilai humanisme-religius bangsa Indonesia yang digali dari pengalaman dan tradisi hidup masyarakat Indonesia yang multireligius (Mangunwijaya, 2020[1]).

Idealisme yang termuat dalam Pancasila menjadi filsafat pendidikan bangsa. Artinya, seluruh warga Indonesia disatukan dalam cita-cita yang sama untuk mengembangkan diri dan berkontribusi bagi perwujudan nilai-nilai Pancasila. Kehidupan keluarga, masyarakat dan aktivitas pendidikan formal memiliki cita-cita yang sama, yakni mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Karenanya, selain menjadi dasar Negara, Pancasila merupakan pemersatu dan jiwa kehidupan setiap warga Negara Indonesia sejak sebelum terbentuknya

Indonesia sebagai Negara yang merdeka. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai-nilai fundamental atau filosofi keindonesiaan.

Setidaknya ada dua hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia (Mangunwijaya, 2020 [1]). *Pertama*, kekayaan religiositas bangsa Indonesia yang majemuk menjadi salah satu karakter khas masyarakat yang menjadi jiwa atau pendorong perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Kekayaan religius itu diungkapkan dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar untuk hidup bersaudara, bersatu, berdialog dan mewujudkan keadilan sosial. *Kedua*, setiap warga masyarakat Indonesia lahir, hidup dan berkembang di dalam keragaman (kebhinekaan). Keragaman atau kebhinekaan merupakan salah satu struktur hakiki atau karakter keindonesiaan yang amat unik. Keberagamaan (kebhinekaan) itu merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas bangsa Indonesia (Na'imah, Sukiman, & Nurdin, 2017). Para pendiri bangsa sangat menghargai sejarah bangsa yang dibentuk dan dikembangkan dalam pengalaman relasi antar warga bangsa yang berlatar belakang keragaman agama (kepercayaan), ras, suku, warna kulit, dan bahasa dalam konteks ribuan pulau, tradisi, ritual, mitos, legenda, simbolisme bangunan, hasil bumi, dan flora-fauna. Keragaman dan kebhinekaan Indonesia memuat nilai-nilai filosofi dan religiositas (W.P. Alston, 2001).

Keragaman yang menjadi karakter bangsa Indonesia merupakan warisan yang dihidupi dalam relasi yang dinamis di tengah arus globalisasi. Keragaman yang menjadi karakter bangsa Indonesia bersifat transendental dan terbuka untuk digali maknanya melalui proses eksplorasi pengalaman lokalitas manusia Indonesia dalam relasi dengan bangsa-bangsa lain. Pendidikan berperan penting dalam melestarikan dan memaknai keragaman yang menjadi warisan luhur bangsa.

Bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini keragaman merupakan kekayaan

masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, bahasa, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Semuanya itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Keragaman merupakan nilai kemanusiaan Indonesia yang membentuk keunikan setiap pribadi, identitas bangsa dan budaya Indonesia (Na'imah, Sukiman, & Nurdin, 2017). Setiap pribadi yang lahir dan hidup di Indonesia memiliki keunikan budaya.

Lima sila Pancasila memuat nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dalam perjalanan sejarah yang panjang. Lima sila itu merupakan satu kesatuan yang menjiwai hidup berbangsa (Hijriana, 2020). Sila pertama adalah *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Semua warga Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa, ras, dan budaya memiliki keyakinan kepada yang Maha Esa. Religiositas merupakan identitas manusia Indonesia yang memberi dasar bersikap dan bertindak etis di tengah masyarakat. Saling menghargai pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda merupakan bagian dari kesadaran dan praktik hidup bersama.

Sila kedua dari Pancasila adalah *Kemanusiaan yang adil dan beradab*. Saling menghargai martabat pribadi manusia merupakan pelaksanaan dari keyakinan religious bahwa setiap pribadi merupakan ciptaan Tuhan. Sila kedua menekankan prinsip etis pentingnya menghargai sesama warga masyarakat tanpa diskriminasi karena perbedaan latar belakang budaya, etnis, suku dan kepercayaan.

Sila ketiga adalah *Persatuan Indonesia*. Sila ketiga merupakan *prinsip* moral dan imperatif etis bagi semua warga Indonesia. Menghargai nilai-nilai yang menyatukan di tengah perbedaan dan keragaman merupakan sikap dasar yang perlu dikembangkan dalam hidup di tengah keluarga, masyarakat dan ruang Sekolah. Setiap warga Indonesia menyadari bahwa kesatuan dalam keragaman dan perbedaan merupakan identitas bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan (Mangunwijaya, 2020 [2]; Siswoyo, 2013).

Sila keempat adalah *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*. Sila ini berhubungan dengan tradisi berdialog dan bermusyawarah dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan hidup bersama. Prinsip musyawarah atau dialog memberi peluang dan hak kepada setiap warga untuk terlibat secara aktif dalam penentuan kebijakan hidup bersama. Dalam konteks hidup berbangsa, hak dan suara rakyat direpresentasikan melalui para wakil rakyat.

Sila kelima dari Pancasila adalah *Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Hidup bersama dalam keragaman dijamin dengan penegakan keadilan. Sikap adil didukung dengan kesetiakawanan dan kemurahan hati untuk hidup saling membantu atau gotong-royong. Keadilan sosial dan kesetiakawanan merupakan prinsip etis yang penting dalam membangun kesatuan bangsa yang memiliki wilayah yang sangat luas, dan situasi geografis serta kondisi demografis yang beragam.

Pancasila menjadi dasar Negara, identitas bangsa, filosofi hidup bersama, dan cara hidup setiap orang Indonesia. Kelima sila Pancasila terhubung satu sama lain secara integral dan mencerminkan spiritualitas, jiwa dan kehidupan bangsa Indonesia (Octaviani, 2018). Sila pertama mendasari keempat sila yang lain.

Pada era Orde Baru (1966-1998), Pancasila mengalami reduksi makna. Pemerintah menjadi penafsir tunggal atas Pancasila dan cenderung berhenti menjadi label berbagai gerakan seperti Ekonomi Pancasila, Pendidikan Pancasila, Tani Pancasila, Pemuda Pancasila, dll. Pemerintah membuat rumusan doktrinal terkait dengan penafsiran Pancasila untuk dijadikan bahan pengajaran di kelas, penataran bagi para calon pejabat dan hafalan. Pendekatan politik dalam memaknai Pancasila menjadikan nilai-nilai Pancasila yang dihayati dalam keragaman cara di berbagai kearifan lokal masyarakat Indonesia kurang mendapatkan apresiasi. Pendekatan politik dalam memaknai Pancasila cenderung menafikan faktor historis dari Pancasila yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kearifan lokal. Karenanya, dalam dasawarsa terakhir, mulai banyak penelitian yang

menggunakan pendekatan fenomenologis dan kultural untuk mengeksplorasi penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kearifan lokal masyarakat di berbagai wilayah Indonesia (Rosidin, 2016).

Sejak berakhirnya rezim Orde Baru di tahun 1998 dan munculnya gerakan reformasi, kebebasan dan demokrasi menjadi diskursus politik yang menggeser pemaknaan nilai-nilai Pancasila. Baru Beberapa tahun terakhir, berbagai gerakan merevitalisasi Pancasila sebagaimana dicetuskan oleh Soekarno mulai menggeliat kembali. Merevitalisasi Pancasila berarti menegaskan identitas manusia Indonesia yang dalam sejarahnya memang suka memberi (murah hati) dan percaya akan kekayaan bangsa Indonesia menjadi modal untuk terlibat aktif dalam membangun dunia. Soekarno menegaskan bahwa Pancasila menjadi jiwa yang menyatukan seluruh Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Kerelaan untuk berkorban dan hidup saling membantu (gotong-royong) merupakan semangat dan sikap bangsa (Bung Karno, 1960). Kemurahan hati dalam relasi global dan keterlibatan untuk membangun dunia merupakan nilai-nilai kemanusiaan Indonesia yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia sejalan cita-cita Bung Karno.

Menghargai dan memberi ruang kepada setiap pribadi untuk memberikan sumbangan bagi kebersamaan dalam membangun dunia merupakan wujud keadilan sosial. Dasar kerohanian keadilan sosial adalah keyakinan bahwa setiap warga masyarakat saling membutuhkan satu sama lain dalam kebersamaan sebagai makhluk sosial (Kaelan, 2002). Rukun dan damai merupakan kebutuhan setiap pribadi di dalam hidup bersama di tengah dunia. Terciptanya hidup harmonis dan damai menjadi tanggung jawab setiap pribadi dalam kebersamaan yang mempertebal rasa aman dan syukur setiap pribadi sebagai warga masyarakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memuat tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, keseimbangan dinamis antara hak dan kewajiban setiap warga perlu mendapatkan tempat untuk mewujudkannya.

Pancasila memuat nilai-nilai yang perlu dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk kemampuan berperilaku: 1) mampu mengambil sikap yang bertanggungjawab sesuai dengan hati nuraninya demi kemajuan bangsa, 2) mampu mengenali masalah hidup bersama dan menemukan cara-cara pemecahannya, 3) mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, 4) mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia (Kaelan, 2016). Melalui pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila diharapkan generasi muda bangsa Indonesia mampu mengembangkan life skill untuk kemajuan bangsa yang memiliki rasa tanggung jawab, pemecahan masalah, dapat menganalisis terhadap masalah-masalah. Dengan kata lain, pendidikan dalam bingkai nilai-nilai filsafat Pancasila membentuk karakter dan keterampilan pribadi yang unggul, karakter akademis yang rasional dan kolaboratif, karakter religius yang menyatukan keragaman, karakter sosial yang empatik dan bersaudara (Sulianti, 2018).

Pancasila menjadi visi dan perspektif pendidikan humanis-religius yang menekankan pentingnya iman kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu, menegakkan hak dan kewajiban secara seimbang, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan beradab. Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar pendidikan agama yang bervisi kebangsaan yang berperikemanusiaan, bersatu, berdaulat dan adil (Shofiana, 2014). Dengan demikian, pendidikan agama dalam kerangka filsafat Pancasila berorientasi pada pengembangan identitas manusia Indonesia yang menghargai nilai-nilai luhur bangsa, melestarikan keragaman, dan terbuka terhadap dialog di era globalisasi. Pendidikan agama dalam kerangka filsafat Pancasila menguatkan relasi dinamis manusia Indonesia dengan Allah Maha Esa, meningkatkan relasi dengan sesama dalam semangat saling menghargai dan menyatukan hidup berbangsa dalam kemajemukan (Shofiana, 2014).

Nilai-nilai masyarakat Indonesia yang dirangkum dalam lima sila Pancasila mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang merupakan kesatuan

dari keanekaragaman agama, keyakinan, budaya, etnis, kearifan lokal, pulau, wilayah geografis dan hayati. Pancasila memuat nilai-nilai keindonesiaan yang perlu dilestarikan dan dikembangkan secara dinamis. Melindungi keragaman sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila (Riyanto, 2006). Humanisme Pancasila berkarakter religius dan ekologis. Motivasi dan tanggung jawab untuk melestarikan kebhinekatunggalikaan Indonesia berdasar pada nilai-nilai religius, kultural dan ekologis.

Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila merupakan filsafat hidup bersama yang memuat nilai-nilai ontologies, epistemologis dan aksiologis (Widiuseno, 2014). Nilai-nilai Pancasila merupakan jiwa hidup masyarakat yang sudah ada sebelum berdirinya Indonesia sebagai suatu Negara. Secara ontologis, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar hidup bersama yang menjadi dasar persaudaraan dan kesatuan bangsa. Secara epistemologis, nilai-nilai Pancasila memuat kebenaran yang sudah teruji oleh waktu dan digali dari praktik kehidupan berbagai komunitas lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Secara aksiologis, nilai-nilai Pancasila yang mendorong hidup setiap warga masyarakat Indonesia dan menjadi imperatif etis untuk melestarikan kesatuan dan mengembangkan kualitas hidup bangsa dan Negara Indonesia (Riyanto, 2015).

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, proses pendidikan perlu mengelaborasi potensi religius para peserta didik untuk menumbuhkan relasi empatik yang mendukung proses dan praktik berdialog yang terwujud dalam tradisi bergotong-royong di dalam kehidupan sehari-hari (Endro, 2016). Dialog dalam tindakan bergotong-royong menjadi ruang implementasi aktivitas manusiawi yang mengaktualisasikan potensi kognitif, spiritual, afektif, sosial, dan moral yang terarah pada pelestarian kesatuan bangsa dalam kebhinekaan. Proses dan praktik dialog dalam masyarakat Pancasila berlangsung secara kontinu di tengah perkembangan zaman untuk menguatkan identitas bangsa dan menegaskan kontribusi bangsa dalam relasi dengan bangsa-bangsa lain secara global.

d. Profil Pelajar Pancasila

Pendidikan Nasional Indonesia bermuara pada Profil Pelajar Pancasila (PPP) sebagai perwujudan manusia Indonesia yang kuat dengan nilai-nilai luhur budaya yang menjadi akar pendidikan dalam upaya memaknai dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan.

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka memberikan panduan tentang dan bagaimana Profil Pelajar Pancasila menjadi bagian esensial dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Panduan implementasi Kurikulum Merdeka dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dapat dilihat pada tautan ini:

https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduh/Dimensi_PPP.pdf

C. Ruang Kolaborasi

Ruang Kolaborasi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia dan perwujudan Profil Pelajar Pancasila pada Pendidikan yang Berpihak pada Peserta Didik dalam Pendidikan Abad ke-21 dalam kelompok kecil. Mahasiswa membuat sebuah rumusan tentang Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia dan perwujudan Profil Pelajar Pancasila pada Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam Pendidikan Abad ke-21 dari perspektif kodrat alam dan kodrat zaman. Rumusan ini dapat mengacu pada pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang menekan pendidikan sejatinya dikembangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Beberapa pertanyaan pemantik dibawah dapat memberikan panduan dalam membuat rumusan:

Lembar Kerja 4.1: Ruang Kolaborasi

Pertanyaan	Respon
Apa apa relevansi Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia dan perwujudan Profil Pelajar Pancasila pada Pendidikan yang Berpihak pada peserta didik dalam Pendidikan Abad ke-21?	
Bagaimana mewujudkan Profil Pelajar Pancasila pada Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21?	

Pertemuan Minggu ke 14.1

D. Demonstrasi Kontekstual

Setelah saudara melakukan refleksi kritis, melakukan eksplorasi konsep dan kolaborasi tentang pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, tentu saudara telah dapat mengambil intisari dari arti pentingnya Pancasila sebagai pemberi arah pendidikan Indonesia, dalam membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, pada sesi demonstrasi kontekstual ini, Saudara diminta membuat sebuah Demonstrasi Kontekstual untuk memberikan gambaran yang kontekstual tentang Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia dan perwujudan Profil Pelajar Pancasila pada Pendidikan yang Berpihak pada Peserta Didik dalam Pendidikan Abad ke-21 dengan media visual atau audio. Media visual dapat berupa video pendek, infografis, poster, karikatur atau komik atau menggunakan *podcast* untuk menjelaskan hasil rumusan tentang Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia

dan perwujudan Profil Pelajar Pancasila pada Pendidikan yang Berpihak pada Peserta Didik dalam Pendidikan Abad ke-21.

Lembar Kerja 4.2 : Demontasi Kontekstual

Judul	Deskripsi

E. Elaborasi Pemahaman

Pada Pembelajaran kali ini, Anda akan berlatih memberikan perspektif reflektif kritis berdasarkan pemahaman dan internalisasi tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia dalam ruang diskusi virtual (non-virtual). Sebagai pemandu untuk elaborasi pemahaman, gunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik berikut:

Tabel 4. 2 Perspektif Reflektif Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan

Pertanyaan	Respon
Apa yang Anda ketahui tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas Bangsa Indonesia?	
Apa yang Anda ketahui tentang Profil Pelajar Pancasila (PPP)?	

Pertanyaan	Respon
Bagaimana menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia?	
Apa apa relevansi Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia dan perwujudan Profil Pelajar Pancasila pada Pendidikan yang Berpihak pada Peserta Didik dalam Pendidikan Abad ke-21?	
Bagaimana mewujudkan Profil Pelajar Pancasila pada pendidikan yang Berpihak pada Peserta Didik dalam pendidikan abad ke-21?	

F. Koneksi antar Materi

Saudara sudah melakukan refleksi dan mempelajari tentang Pancasila sebagai fondasi Pendidikan Indonesia, sekarang saudara lakukan koneksi antar materi yang sudah anda pahami dalam bentuk mind mapping.

Lembar Kerja 4.3: Koneksi antar materi

Mind Mapping Koneksi antar materi



G. Aksi Nyata

Setelah anda mempelajari materi Pancasila sebagai fondasi Pendidikan Indonesia, dimulai dari refleksi diri, memahami Pancasila sebagai fondasi pendidikan Nasional,. Sekarang saudara diminta untuk melakukan aksi nyata, yaitu membuat tulisan ringkas tentang proses pembelajaran yang saudara idamkan sesuai dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia

Lembar Kerja 4.4 : Aksi Nyata

Aksi Nyata :

Proses Pembelajaran yang sesuai dengan Identitas Manusia Indonesia

Daftar Pustaka

- Alberto Torres, Carlos, *Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global World* (Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, 1998).
- Alston, W. P., "Religious Belief and Values", *Faith and Philosophy*, XVIII, (Januari 2001), 36-49.
- Armada Riyanto dkk (ed.) (2015). *Kearifan Lokal-Pancasila: Butir-butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bung Karno. (1960). *Pantjasila Dasar Filsafat Negara*. Djakarta: Jajasan Empu Tantular.
- Chethimattam, J.B., "New Religious Movements and Popular Religiosity", *Rethinking New Religious Movements*. (Roma: Research Center On Cultures and Religions- Pontifical Gregoriana University, 1998), 631-644.
- Dewantara, K.H. (2009). *Menuju Manusia Merdeka*. Yogyakarta: Leutika
- Eliharni. (2016). "The Challenge of Religious Education in Indonesia Multiculturalism". *Journal of Education and Human Development*, 5(4): 1-24.
- Endro, Gunardi. (2016). *Tinjauan Filosofis Praktik Gotong Royong*. Respon: Jurnal Etika Sosial. 21 (1): 89-112.
DOI: <https://doi.org/10.25170/respons.v21i01.526>
- Hans, Nicolas, *Comparative Education: A Study of Educational Factors and Traditions*, (London: Routledge Paperback, 1967).
- Heidegger, M. (1962). *Being and Time*. (English translation by John Macquarrie & Edward Robinson). New York: Harper & Row.
- Hijriana. (2020). "Building Indonesian Humanity through Civic Education in High School". *Journal La Edusci*. 01 (4): 26-30.
- Husain HPW., Nazar. (2014). *Interreligious Relation and Violence On Religion in Indonesia Religion Philosophical Perspective*. *Al-Ulum*. 14(2): 311-324.

- Husserl, E., *The Basic Problem of Phenomenology Volume XII*, English transl. by Ingo Faris & James G. Hart (Springer: Dordrecht, 2006).
- Husserl, E., *General Introduction to Pure Phenomenology Volume II*, English transl. by F. Kerseten (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1983)
- Ibnu Mujib-Yance Z. Rumahuru, *Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog: Membangun Fondasi Dialog Agama-agama Berbasis Teologi Humanis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Inandiak-Heri Dono, Elizabeth D., *Merapi Omahku* (Yogyakarta: Babad Alas, 2010).
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Aksara Baru:, Jakarta, 1979).
- Kusuma, Jamaludin Hadi and Sulistiyono Susilo. (2020). *Intercultural and Religious Sensitivity among Young Indonesian Interfaith Groups*. Religions. 11 (26): 3-22.
- Mamani, Vicenta, "Popular Religiosity and Evangelism in Anumara Culture", *International Review of Mission* 82 (2011), 391 - 400.
- Manchala, Deenabandhu , "Theological Reflections on Pilgrimage", *The Ecumenical Review* 66 (2014), 139-145.
- Mangunwijaya, Y.B. (2020[1]). *Sekolah Merdeka: Pendidikan Pemerdekaan*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Mangunwijaya, Y.B. (2020 [2]). *Menumbuhkan Sikap Religius Anak-anak*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Mangunwijaya, YB., *Manusia, Pasca modern, Semesta dan Tuhan: Renungan Filsafat Hidup Manusia Modern* (Kanisius: Yogyakarta, 1999).

- Mangunwijaya, Y.B., "Menumbuhkan Sikap Religius Anak-anak", dalam Dari Pelajaran Agama ke Pendidikan Religiositas (Yogyakarta: Dinamika Edukasi Dasar-Misereor, 2005), 47-53.
- Mondin, B., *Filosofia della Cultura e dei Valori* (Milano: Massimo, 1994).
- Na'imah, Sukiman, & Nurdin, Indra Fajar. (2017). Developing The Model Of Inclusive Religious Education At Indonesia And Thailand Elementary Schools. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR –JRME)*. 7(5): 1-39.
- Nuryanto, Agus M. (2014). "Comparing Religious Education in Indonesia and Japan". *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*. 52 (2): 435-458.
- Octaviani, Wendy Anugrah. (2018). Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari sebagai Sebuah Bangsa. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*. 5(2): 123-128.
- Painadath, Sebastian, *Spiritual Co-Pilgrims: Toward a Christian Spirituality in Dialogue with Asian Religions* (Quezon City: Claretian Publications, 2014),
- Pedersen, Lane. (2016). Religious Pluralism in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*. 17(5); 387-398.
<https://doi.org/10.1080/14442213.2016.1218534>.
- Rafael, Simon (2020). Refleksi Filosofis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Modul Program Guru Penggerak, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Riyanto, Agus. (2006). Pengamalan/Aplikasi Nilai-nilai Pancasila dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yustisia*. 6: 1-6.
- Rosidin. (2016). Role of Local Wisdom in Preserving the Religious Harmony of Samin Community in Blimbing Blora. *International Journal of Latest Research in Science and Technology*. 5 (2): 25-30.
- Shofiana, Gabrielia Febrianty. (2014). Philosophy, Pancasila and Modern Technology. *Yuridika*. 29 (2): 139-148.



Siswoyo, D. (2013). Philosophy of education in Indonesia: Theory and thoughts of institutionalized state (PANCASILA). *Asian Social Science*, 9(12), 136.

Sulianti, Ani. (2018). "Revitalisasi Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Life Skill". *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 6 (2): 111-117.
<http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship>.

Sudiarja, A, Agama (di Zaman) yang Berubah (Yogyakarta: Kanisius, 2006),

Widisuseno, Iriyanto. (2014). Azas Filosofis Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. *Humanika*. 20(2). 62-66.



Lampiran

A. Ujian Tengah Semester (UTS)

Keterangan: dilaksanakan pada minggu ke-8

Petunjuk:

1. Buatlah esay naratif tentang: **Sosok Guru Masa Depan**
2. Esai memuat refleksi pengalaman Anda saat bersekolah dan saat mengikuti Pendidikan Profesi Guru.
3. Esai harus menggambarkan bagaimana mata kuliah ini membantu Anda membuat penggambaran sosok guru masa depan.
4. Sertakan contoh-contoh konkrit pengalaman selama pembelajaran di PPG yang menyumbangkan pemikiran tentang sosok guru masa depan

Ketentuan:

1. Esai ditulis dengan huruf Times New Roman 12, spasi 1,5.
2. Esai ditulis dalam 500—1.000 kata.
3. Esai dilengkapi dengan daftar rujukan (apabila ada)

Penilaian: dikembangkan mandiri oleh dosen sesuai dengan petunjuk esai



B. Ujian Akhir Semester (UAS)

Keterangan: dilaksanakan pada minggu ke-16

Petunjuk:

1. Buatlah esay dengan tema: **Pembelajaran yang sesuai dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia**
2. Esay memuat refleksi pengalaman Anda saat bersekolah dan saat mengikuti Pendidikan Profesi Guru.
3. Esay harus memuat gambaran bagaimana mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia membantu Anda membuat tulisan ini
4. Sertakan contoh-contoh konkrit pengalaman selama mengikuti pembelajaran di PPG membantu anda merumuskan esai ini.

Ketentuan:

4. Esai ditulis dengan huruf Times New Roman 12, spasi 1,5.
5. Esai ditulis dalam 500—1.000 kata.
6. Esai dilengkapi dengan daftar rujukan (apabila ada)

Penilaian: Penilaian: dikembangkan mandiri oleh dosen sesuai dengan petunjuk esai

C. Pidato Sambutan Ki Hadjar Dewantara. Dewan Senat Universitas Gadjah Mada, 7 November 1956

Saudara Ketua Sidang Senat Terbuka!

Perkenankan saya membuka kata sambutan kami ini dengan ucapan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada Dewan Senat Universitas, yang dalam sidangnya tanggal 7 November 1956 telah memutuskan akan pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada kami.

Ucapan terima kasih itu saya tujukan pula kepada Saudara Prof. Dr. Sardjito yang selaku Presiden Universitas telah berhasil mengumpulkan berbagai unsur, yang dianggap cukup penting, untuk dipakai sebagai dasar atau alasan guna mempertanggungjawabkan Senat tersebut.

Saudara Ketua!

Dari pidato Prof. Sardjito, yang penting ringkas dan tegas itu, dapatlah saya menangkap dua buah kesan utama.

Pertama, beliau tidak saja meninjau objek penyelidikannya secara eksklusif, namun memasukkan pula “penyandera” mengenai pribadi kami ke dalam uraiannya. Kedua, dengan tegas beliau menghubungkan, bahwa menyatukan tiga lapangan pekerjaan kami, yaitu: 1. Perjuangan kemerdekaan nasional, 2. Perjuangan pendidikan dan 3. Perjuangan kebudayaan, menjadi satu “tritunggal”.

Mengenai kesan yang pertama, yaitu bahwa disamping pengutaraan dasar-dasar yang pokok serta garis-garis besarnya, Prof. Sardjito masih menganggap perlu menyandera sifat pribadi kami, itu menunjukkan ketelitian beliau dalam menyelidiki soal yang sedang beliau hadapi. Memang kebaikan sifat-sifat dasar serta kebaikan garis-garis besar atau bentuknya ataupun organisasinya, belum menjadi pasti adanya isi serta irama atau cara melaksanakan yang baik. Dalam pada itu harus kita sadari, bahwa “sifat” dan “bentuk” adalah unsur-unsur yang timbul karena pengaruh kodrat alam, sedangkan “isi” dan “irama” sangat lekat hubungannya dengan zamannya dan pribadinya seseorang yang bersangkutan

empat ukuran ini, S.B.I (Sifat, Bentuk, Isi dan Irama) sungguh perlu dipakai untuk mendapatkan nilai yang lengkap dan benar.

Saudara Ketua!

Cara penilaian dengan memaknai 4 ukuran tersebut, sungguh perlu digunakan, lebih-lebih di zaman sekarang, berhubungan dengan kerapkalinya kita harus menghargai dan menilai anasir-anasir kebudayaan yang datang dari dunia luar, terutama dunia Barat di sini sampailah kita pada saat baik untuk mulai menyinggung-nyinggung soal kebudayaan, yang termasuk dalam kesan yang kedua. Kini kita berada di zaman “akulturasi” atau pertukaran kebudayaan dengan dunia Barat. “Sifat” pokok dari tiap-tiap kebudayaan adalah universal, yang boleh dianggap sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa murah kepada makhluk manusia untuk mempertinggi hidup dan penghidupannya. Adapun “bentuk” dari kebudayaan tadi terjadi karena pengaruh kodrat alam, yang di dunia ini berlain-lainan macam dan rupanya. Adapun “isi” zaman itu tidak lain daripada waktu yang ditempati masyarakat, yang biasanya menunjukkan sifat-sifat dan corak warna hidup kejiwaan yang agak khusus dan yang terus menerus berganti-ganti isinya. Akhirnya tentang “irama” yang harus dipahami bahwa cara menggunakan segala unsur kebudayaan itu menjadi tanggung jawab tiap-tiap orang atau masyarakat yang berpribadi.

Adapun semboyan yang mengandung filsafat dalam soal akulturasi yang telah kita masukan dalam rangkain asas-asas ke-Tamansiswaan-an. Yaitu “Asas Tir-con” yang mengajarkan, bahwa di dalam pertukaran kebudayaan dengan dunia luar harus kontinuitas dengan alam kebudayaannya sendiri, lalu konvergensi dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang ada, dan akhirnya jika kita sudah bersatu dalam alam universal, kita bersama mewujudkan persatuan dunia dan manusia yang konsentris. Konsentris berarti bertitik pusat satu dengan alam-alam kebudayaan sedunia, tetapi masih memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri. Inilah suatu bentuk dari sifat “Bhineka Tunggal Ika”

Dalam keterangan tentang sifat dan dasar di atas, istilah “bentuk” ini saya gambarkan sebagai “organisasi”. Dalam hal ini haruslah kita ingati, bahwa tiap-tiap organisasi, agar bermanfaat, harus bersifat “organis” yang berarti hidup, jangan sampai suatu bentuk organisasi menghalangi-halangi terlaksananya kenyataan-

kenyataan yang menjadi tujuan organisasi itu. Memang benar organisasi perlu untuk tata tertibnya keadaan lahir, akan tetapi jangan organisasi itu bertentangan dengan hakekatnya suatu kenyataan. Ingatlah saya akan suatu pelajaran yang dipentingkan dalam filsafat Islam, yang berbunyi “Syari’at tidak dengan hakikat adalah kosong” sebaliknya “Hakikat tidak dengan syari’at adalah batal”.

Dengan sendiri teringatlah saya akan petuah suci, berasal dari Sultan Agung Mataram, yang terkenal sebagai Aulia, sebagai Pujangga dan Pemimpin Negara di abad yang ke-17. Menurut Sultan Agung, kalau syari’at sembahyang tidak dituntun oleh kesucian jiwa (yang disebut gending olehnya), maka batallah sholatnya orang terhadap Yang Maha Kuasa. Tak ada perlunya orang memelihara hidup kebatinan, jika tidak berisikan pengluhuran Zat Allah Yang Maha Kuasa.

Bagi mereka yang ingin mengetahui wejangan Sang Sultan Agung mengenai hal tersebut, baiklah disini saya sajikan naskah yang orisinil, terkutip dari Serat Sastra Gending ciptaannya.

Pramila gending yen bubrah,

Gugur sembahe mringi Widdhi,

Batal wisesaning salat,

Tanpa gawe ulah gending,

Denge ngran tembang gending:

Tuk ireng swara linuhung,

Amuji asamaning Zat,

Swara saking osik wadhi,

Osik mulya wentaring cipta surasa

Saudara Ketua!

Dalam pidatonya maka Prof. Sardjito menyatakan, bahwa hidup dan pekerjaan kami menunjukkan banyak facet-facetnya, yang tidak memudahkan bagi Senat untuk memilih keilmuan gelar apa yang akan disajikan. Ada yang menitikberatkan

pengharapannya kepada keahlian kami dalam soal “Pendidikan”, karena menurut Prof. Sardjito yang sekarang dilihat oleh masyarakat sebagai pekerjaan yang sungguh besar, ekstensif dan intensif, ialah dilangsungkan perguruan Tamansiswa. Sebaliknya ada yang beranggapan, bahwa hal itu hanya mengenai satu facet saja dan dengan sendirinya dianggap belum cukup. Akhirnya oleh Dewan Senat ditetapkan, bahwa pengharapan serta penilaian terhadap apa yang oleh Prof. Sardjito disebut “jasa-jasa” kami, ialah dengan memandang pribadi kami sebagai perintis kemerdekaan nasional, perintis Pendidikan nasional dan perintis kebudayaan nasional.

Saya sendiri dapat memahami sepenuhnya apa yang dinyatakan oleh Dewan Senat itu. Bahkan kami dapat membenarkan pula penilaian tersebut. Bahkan kami dapat membenarkan pula penilaian tersebut. Seperti berulang-ulang telah saya nyatakan sendiri, Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Dalam pada itu, sudah pada waktu berdirinya Tamansiswa saya beranggapan (dan ini tidak disinggung-singgung oleh Prof. Sardjito), bahwa kemerdekaan nusa dan bangsa untuk mengejar keselamatan dan kebahagiaan rakyat, tidak mungkin tercapai hanya dengan jalan politik. Terhadap pergerakan politik, orang tahu akan gambaran khayal kami, yang kerap kali juga sudah kami jelaskan, bahwa untuk dapat bekerja di sawah dan ladang dengan tentram dan seksama (yakni tugas cara pendidik dan para pejuang kebudayaan) sangat kita perlukan adanya pagar yang kokoh dan kuat, untuk menolak segala bahaya yang mengancam dari segala kekuasaan dan kekuatan yang mungkin dapat merusak sawah dan ladang serta tanaman-tanamannya, yang kita pelihara. “Pagar” tadi tidak bukan dan tak lain adalah pergerakan politik rakyat kita. Itulah sebabnya selalu adanya hubungan yang baik dan erat antara pergerakan pendidikan dan kebudayaan Tamansiswa dengan pergerakan politik.

Ada satu hal di dalam pidato Prof. Sardjito yang perlu kami beri sedikit penjelasan. Saudara Sardjito menganggap “aneh” bahwa dari pemimpin-pemimpin kita sekarang ini sebagian terbesar adalah buah dari pendidikan dan pengajaran di

zaman Belanda itu, namun begitu toh tidak dapat dikatakan, bahwa mereka itu terasing dari dan kehilangan dasar-dasar nasionalnya.

Saudara Ketua!

Dalam hal ini harus kita insyafi, bahwa para penguasa bangsa Belanda di Indonesia sebenarnya sama sekali tidak memperhatikan soal pendidikan kebudayaan. Mereka semata-mata mementingkan pengajaran, yang intelektualitas serta materialistis, karena pendidikan di situ semata-mata berupa pendidikan intelek. Dalam keadaan yang sedemikian, anak-anak dan pemuda-pemuda kita, yang di rumah keluarganya, masih dapat mengecap suasana kultural tetap mendapatkan pengaruh dari segala apa yang terus hidup di dalam berbagai tradisi kebudayaan, sekalipun dalam lapangan ini belum ada pendidikan yang modern. Keuntungan dari keadaan tersebut ialah, bahwa banyak pemimpin-pemimpin di zaman sekarang itu tidak terasing atau kehilangan dasar-dasar nasionalismenya. Ini bukan barang “aneh”, sebaliknya hal yang “logis” yang dapat dimengerti, hal biasa, hal yang semestinya. Saya sendiri adalah produk dari pendidikan dan pengajaran Barat, karena di waktu kecil saya belum ada perguruan nasional. Semoga soal ini kita perhatikan secukupnya, yaitu bahwa disamping pendidikan kecerdasan pikiran harus ada pendidikan yang kultural. Jangan sampai kita hanya meniru sistem pendidikan dan pengajaran yang sepi pengaruh kebudayaan, seperti yang kita alami di zaman Belanda, dengan pendidikannya yang intelektualis, materialise dan kolonial itu.

Baiklah di sini kita sadari, bawah pendidikan dan pengajaran secara Barat tidak boleh mutlak kita anggap jelek. Banyak ilmu pengetahuan yang harus kita kejar, sekalipun dengan melalui sekolah-sekolah Barat. Kita mengerti, bahwa juga di Indonesia kini masih banyak pendidikan dan pengajaran yang dilakukan secara sistem Barat. Ini tidak mengapa, asalkan kepada anak-anak kita diberi pendidikan kultural dan nasional, yang semua-semuanya kita tujukan ke arah keluhuran manusia, nusa dan bangsa, tidak dengan memisahkan diri dari kesatuan kemanusiaan. Untuk dapat mencapai tujuan ini cukuplah di sini saya nasehatkan: didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Di samping itu pelajarilah hidup kejiwaan rakyat kita, dengan

adat istiadatnya yang dalam hal ini bukannya kita tiru secara mentah-mentah, namun karena bagi kita adat istiadat itu merupakan petunjuk-petunjuk yang berharga.

Tentang pengertian “keluarga” yang baru saja saya singgung sebagai lingkungan yang melindungi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak dalam hidup kebudayaannya, perlulah di sini diketahui, bahwa di dalam sistem Tamansiswa hidup keluarga itu mendapat tempat yang luhur dan istimewa. Sebagai masyarakat yang paling kecil namun yang paling suci dan murni dalam dasar-dasar sosialnya, lingkungan keluarga itu merupakan suatu pusat pendidikan yang termulia. Cinta kasih, semangat tolong-menolong, rasa kewajiban berkorban dan ikut bertanggungjawab dan lain-lain, pendek kata segala unsur-unsur dari budi sosial dan kesusilaan dalam sifat-sifat pokoknya terdapat di dalam hidup keluarga. Selain itu, seperti sudah disinggung di atas, lingkungan keluarga inilah yang meneruskan segala tradisi, baik yang mengenai hidup kemasyarakatan, keagamaan, kesenian, ilmu pengetahuan dan lain-lain unsur daripada budi kesusilaan. Berpisahnya anak-anak dengan keluarganya berarti kehilangan tuntunan ataupun pedoman, untuk laku hidupnya dan membahayakan keselamatan dan kebahagiaannya sebagai manusia yang susila dan bertanggungjawab. Tak usah saya jelaskan di sini, bahwa menurut statistik secara modern dapat dibuktikan, bahwa kejahatan-kejahatan kriminal sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai hidup kekeluargaan dan atau berasal dari keluarga yang rusak kesusilaannya. Semoga hal yang amat penting ini jangan dilupakan oleh pemimpin-pemimpin perguruan kita di Indonesia.

Nasehat-nasehat serupa yang saya ucapkan itu adalah perlu, karena sudah sejak lama rakyat kita boleh dikata keputusan tradisi. Kita tidak tahu lagi bagaimana sifat dan bentuk serta isi dan irama pendidikan dan pengajaran di zaman dahulu kala. Rakyat kita sekarang berhasrat besar untuk mengadakan pembangunan, juga di lapangan kebudayaan dan pendidikan. Saya peringatkan di sini, bahwa hingga sekarang kita kenal kebudayaan di zaman dulu. Pujanga-pujangga kita dan Ki Dalang di bawah blencong hingga kini masih menceritakan adanya cantrik, cekel, manguyu, jejanggan, malah sebutan-sebutan untuk student-student putri, seperti mentrik, sontrang, dahyang, bidang dan lain-lain. Pula nama-nama untuk guru-guru besarnya, seperti dwijawara, hajar, pandita, wiku, begawan dan sebagainya.

Adanya istilah-istilah itu membuktikan, bahwa di zaman dahulu sudah pernah ada perguruan-perguruan luhur, dengan peraturan-peraturan tata tertib yang berdiferensiasi, dimana terbukti para wanita diperbolehkan mengikuti pelajaran di pawiyatan-pawiyatan luhur. (Barang tentu kita semua tahu, bahwa di Nederland misalnya, di zaman serratus tahun yang lalu, kaum perempuan dilarang menjadi student. Dr. Aletta H. Jacobs almarhum, yang pernah hidup di zaman kita ini, adalah student perempuan yang untuk pertama kali diperbolehkan mengikuti perguruan tinggi, sampai menempuh ujian terakhir dan memperoleh derajat “medika”).

Yang saya utarakan ini adalah termasuk pengetahuan “spekulatif” tetapi cukup penting kira saya untuk diselidiki secara ilmiah “positif” oleh para ahli sejarah dan kebudayaan kita.

Saya mempunyai keyakinan, Saudara Ketua, bahwa seandainya bangsa kita tidak keputusan naluri atau tradisi, tidak kehilangan “garis kontinu” dengan zaman lampau, maka sistem pendidikan dan pengajaran di negeri kita, yang sekarang sudah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, di zaman yang kita tempati sekarang ini, pasti akan mempunyai bentuk serta isi dan irama, yang lain daripada yang kita lihat sekarang; mulai di taman kanak-kanak sampai di universitas-universitas. Saya mengerti, bahwa bentuk, isi dan irama yang kita dapati di zaman sekarang ini, baik yang menjadi milik badan-badan perguruan partikelir maupun yang dipelihara oleh Kementerian P.P dan K, pada umumnya masih merupakan doordruk (sekali pun doordruk yang sudah dikoreksi di sana-sini) dari sekolah-sekolah yang terpakai dalam sistem Belanda. Malah kadang-kadang masih nampak juga, sekali pun suram-suram, tendens-tendens yang materialistis dan kolonial.

Saya mengerti, Saudara Ketua, bahwa rakyat kita merasa wajib, segera atau dalam waktu yang singkat melakukan pembangunan di lapangan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi tidak ada contoh-contoh yang positif, yang lebih baik dan cepat kita tiru. Kita lihat di zaman sekarang masih dipakainya bentuk-bentuk rumah sekolah, daftar-daftar pelajaran yang tidak cukup memberi semangat mencari ilmu pengetahuan sendiri, karena tiap-tiap hari, tiap-tiap triwulan, tiap tahun pelajar-pelajar kita terus terancam oleh sistem penilaian dan penghargaan yang

intelektualis. Anak-anak dan pemuda-pemuda kita sukar belajar dengan tentram, karena dikejar-kejar oleh ujian-ujian yang sangat keras dalam tuntutan-tuntutannya. Mereka belajar tidak untuk perkembangan hidup kejiwaannya; sebaliknya, mereka belajar untuk dapat nilai-nilai yang tinggi dalam rapor sekolahnya atau untuk dapat ijazah. Dalam soal ini sebaliknya lah kita para pemimpin perguruan, bersama-sama dengan Kementerian P.P. dan K. mencari bagaimana caranya kita dapat memberantas penyakit examen cultus dan diploma jacht itu.

Saudara Ketua, saya sendiri sebagai pemimpin perguruan menyadari, bahwa maksud-maksud yang baik dari para perintis acapkali gagal, tidak berdaya untuk mempengaruhi masyarakat yang sudah terlanjur dalam batinnya terikat oleh bentuk, isi dan irama yang ada di dalam sistem-sistem pendidikan dan pengajaran secara Barat, sekalipun masyarakat tadi insaf benar-benar, bahwa peserta didik pendidikan Barat tersebut sebenarnya tidak cocok dengan kebutuhan hidup kita, baik lahir maupun batin. Syukurlah sejak tercapainya kemerdekaan nusa dan bangsa kita, tampak adanya keinginan, kehendak, bahkan hasrat dari berbagai golongan rakyat, untuk memperbaiki segala apa yang tidak atau kurang beres itu. Syukurlah pula, bahwa Kementerian P.P. dan K. kita, yang berturut-turut dipimpin oleh orang-orang yang ahli, makin lama makin nampak keinsafannya dan kesadarannya untuk mengadakan berbagai perubahan yang diperlukan.

Saudara Ketua, janganlah sekali-kali orang mengira, bahwa kita harus menolak pengaruh-pengaruh kultural dari dunia luar umumnya, dunia Barat khususnya. Jangan sekali-kali! Sebaliknya janganlah kita memasukan bentuk, isi dan irama dari luar yang tidak perlu. Dalam hal ini kita wajib mewujudkan kepada dunia, bahwa kita cukup bebas dan merdeka serta berdaulat, untuk memilih sendiri segala apa yang kita perlukan. Indonesia bukan Nederland, bukan Inggris, bukan Amerika. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Padang. . . bukan Amsterdam, Leiden, Utrecht, Groningen, bukan juga London, Cambridge, bukan juga kota-kota universitas Amerika. Memang benar, kita harus meniru segala apa yang baik dari negeri manapun. Ambilah sifat-sifat dasar yang ada di seluruh dunia, yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan nasional kita. Sebaliknya, rakyat kita harus berani, sanggup dan mampu untuk mewujudkan bentuk sendiri, isi sendiri dan irama sendiri, seperti yang layak boleh



diharap-harapkan dari bangsa yang telah memasuki dunia internasional, tetapi sebagai bangsa yang berpribadi.

Marilah sekarang kita meninjau secara singkat berturut-turut soal-soal Politik Pendidikan Kolonial zaman V.O.C serta rumusan dalil-dalil mengenai Pendidikan dan Pendidikan Nasional, serta Kebudayaan.

1. Politik Pendidikan Kolonial di Zaman VOC dan Hindia Belanda

Pada zaman beralihnya V.O.C (Vereenigde Oostindische Compagnie) menjadi pemerintah “Hindia Belanda”, maka sebenarnya sekali-kali tidak ada perubahan sikap dan tindakan terhadap segala urusan tanah air kita. Pada hakekatnya pemerintah HB (Hindia Belanda) merupakan konsolidasi dari segala apa yang tadinya dilakukan oleh VOC tersebut. Baru sesudah nampak adanya kebangunan nasional pada permulaan abad ke-20, bersama waktu dengan mulai tumbuhnya aliran “kolonial modern”, yang disebut *ethische koers* atau *ethische politiek* di Nederland, barulah nampak adanya perubahan dalam sikap pemerintah kolonial. Sayang hanya mengenai beberapa hal; antara lain yang bertali dengan pendidikan dan pengajaran bagi rakyat, hal mana kini akan kami jelaskan lebih lanjut.

Seperti diketahui maka dalam zaman OIC (Oost Indische Compagnie) bangsa Belanda menganggap tanah air kita semata-mata sebagai objek perdagangan. Mencari dan mendapatkan keuntungan materiil yang sebesar-besarnya itulah maksud dan tujuan dari segala usahanya dalam segala lapangan. Tidak lebih dan tidak kurang. Pendidikan dan pengajaran diserahkan sama sekali kepada para pendeta Kristen. Kemudian ada instruksi yang menegaskan, bahwa kepada pihak rakyat hendaknya diberi pengajaran membaca, menulis dan berhitung, akan tetapi hanya seperlunya saja dan melulu untuk mendidik orang-orang pembantu dalam beberapa usahanya. Jadi semata-mata guna memperbesar keuntungan perusahaan-perusahaannya sendiri.

Para zaman Napoleon Bonaparte jatuh kekuasaannya, dan pemerintah Nederland dibentuk kembali (tahun 1816), maka di negeri kita Indonesia oleh pemerintah HB diadakan peraturan-peraturan pemerintah pokok, semacam “Undang-Undang Dasar” (yang disebut *Regeeringsreglement*, singkatan dari *Replacement op het beleid van de Regeering van Nederlands Indie*). Dalam R.R 1818 itu mulai disebut tentang pemeliharaan pengajaran, akan tetapi tidak pernah dilakukan. Pada tahun 1836 diubah dan dalam R.R 1836 tadi sama sekali tidak disebut-sebut lagi tentang pengajaran. Baru dalam R.R 1854 terdapat pasal-pasal yang mengenai pendidikan dan pengajaran. Diantaranya dicantumkan pasal 125 yang berbunyi: *Het openbaar onderwijs vormteen*

voorwerp van aanhoudende zorg van de gouyerneur generaal (Pengajaran negeri adalah hal yang senantiasa menjadi perhatian gubernur-jendral). Ketetapan ini sungguh baik, akan tetapi pasal-pasal berikut berikutnya membuktikan jiwa kolonialnya pemerintah HB. Pasal 126 misalnya menetapkan, bahwa pemberian pengajaran kepada anak-anak bangsa Eropa dibolehkan secara bebas (Het onderwijs aan Europeanen is vrij). Pasal 127 berbunyi selengkapnya: Voldoend openbaar lager onderwijs moet worden gegeven overall, waar de behoefte der Europees bevolking dit vordert en de omstandigheden het toelaten, yang artinya ialah sedapat-dapatnya harus ada pemberian pengajaran rendah dari pemerintah yang mencukupi kebutuhan penduduk bangsa Eropa.

Teranglah di situ maksudnya: jangan sampai ada anak-anak bangsa Eropa tidak mendapatkan pengajaran. Bagaimanakah sikap pemerintah HB terhadap anak-anak Indonesia? Pasal 128 dalam soal itu menyebutkan: De goeverneur-generaal zorgt voor de oprichting van scholen tenminste van de Inlandse bevolking, dan ini berarti untuk rakyat gubernur-jenderal disertai untuk mendirikan sekolah-sekolah. Lain tidak; lebih daripada mendirikan pun tidak. Tak ada disebut-sebut di situ tentang keharusan, tentang kebutuhan, tentang perlunya ada usaha yang mencakup dan lain-lain sebagainya.

Pada waktu itu ada beberapa bupati mendirikan “sekolah-sekolah kabupaten”, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian lahir, Reglement voor het Inlands onderwijs; lalu didirikan sekolah guru di Sala, yang kemudian pindah ke Magelang, lalu ke Bandung (1866). Dengan berangsur-angsur dapat didirikan “sekolah-sekolah bumiputera”, yang hanya mempunyai 3 kelas, sedang gurunya seorang dari Kweekschool, dan lain-lainnya (pembantu) berasal dari “sekolah bumiputera” itu juga, sesudah mendapatkan didikan tambahan.

Maksud dan tujuan dari segala usaha itu tetap untuk mendidik calon-calon pegawai negeri dan pembantu-pembantu perusahaan-perusahaan kepunyaan Belanda. Maksud dan tujuan tersebut tidak berubah, ketika pemerintah memberi kelonggaran kepada anak-anak Indonesia, untuk memasuki Europeesche Lagere School, karena yang dibolehkan ialah hanya calon-calon

peserta didik “dokter Jawa”, peserta didik Hoofden School. Suatu bukti bahwa pemerintah Belanda semata-mata mementingkan pendidikan calon-calon pegawai negeri, ialah adanya ujian, yang sangat digemari oleh anak-anak bumiputera, yang disebut Kleinambtenaarsexamen.

2. Zaman Etik dan Kebangunan Nasional

Haluan daripada sistem pendidikan, yang diadakan oleh pihak Belanda seperti tergambar di atas itu, tetapi harus mempengaruhi segala usaha pendidikan. Juga yang dilakukan sesudah aliran Ethische politiek atau Ethische koers timbul, pada permulaan abad ke-20 (dan sebenarnya sebagai akibat “Kebangunan Nasional” pada permulaan abad ke-20). Haluan tadi boleh digambarkan sebagai haluan “kolonial lunak”, yang dalam sistem pendidikannya tetap menunjukkan sifat “intelektualistik”, pula “individualistik” dan “materialistik”. Sekali-kali tidak mengandung cita-cita kebudayaan. Pada hal pendidikan dan pengajaran itu sebenarnya harus bersifat pemeliharaan tumbuhnya benih-benih kebudayaan. Juga sekolah-sekolah yang didirikan oleh bangsa kita sendiri (sesudah menginjak ke dalam zaman “Kebangunan Nasional”) tidak dapat melepaskan diri dari belenggu intelektualisme, individualisme, materialisme dan kolonialisme tadi. Sungguhpun cita-cita Raden Ajeng Kartini (1900) sudah mulai mengandung jiwa nasional dan cita-cita Dokter Wahidin Sudirohusodo (1908) sudah membayangkan aliran kultural namun organisasi teknik pendidikan dan pengajaran tetap tak berubah. Masuknya anasir kebudayaan ke dalam sekolah-sekolah yang bermaksud mewujudkan perguruan kebangsaan, pula masuknya anasir-anasir agama ke dalam sekolah-sekolah Islam, tidak dapat menghapuskan corak warna jiwa kolonial dengan sekaligus.

3. Zaman Bangkitnya Jiwa Merdeka

Baru pada tahun 1920 timbullah cita-cita baru, yang menghendaki perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru tadi seakan-akan merupakan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik. Idaman kemerdekaan nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa, itulah pokok sistem pendidikan dan pengajaran, yang pada tahun 1922 dapat tercipta oleh “Tamansiswa” di Yogyakarta. Bahwa aliran Tamansiswa itu sebenarnya sudah terkandung dalam jiwa rakyat di seluruh tanah air kita, adalah terbukti dengan berdirinya perguruan-perguruan Tamansiswa di seluruh kepulauan Indonesia: di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku. Juga sekolah-sekolah yang berdasarkan “keagamaan” (Islam, Kristen, Katolik), asalkan berani berdiri sebagai sekolah partikelir yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah Hindia Belanda, di samping dasar-dasar keagamaannya masing-masing, memasukan juga dasar dan semangat revolusioner. Dengan begitu, maka gerakan pendidikan berlaku sejalan dengan gerakan politik, dan inilah yang menyebabkan amat banyak orang-orang bekas murid nasional tadi (tidak hanya yang terdidik dalam perguruan Tamansiswa saja) kini secara bermanfaat dan efisien dapat ikut serta dalam segala usaha kenegaraan baik dalam gerakan revolusi maupun dalam usaha pembangunan bangsa dan negara.

4. Tentang Pendidikan dan Pendidikan Nasional

Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), fikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak. Maksudnya ialah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak, selaras dengan alamnya dan masyarakatnya. Karena itulah pasal-pasal di bawah ini harus kita pentingkan:

- a. Segala syarat, usaha dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya keadaan.
- b. Kodratnya keadaan tadi ada tersimpan dalam adat istiadat masing-masing rakyat, yang karenanya tergolong-golong menjadi “bangsa-bangsa” dengan sifatnya perikehidupan sendiri-sendiri, sifat-sifat mana terjadi dari campurnya semua daya upaya untuk mendapatkan hidup tertib damai.
- c. Adat istiadat, sebagai sifat daya upaya akan tertibnya damai itu, tiada luput dari pengaruh “zaman” dan “alam” karena itu tidak tetap, akan tetapi senantiasa berubah, bentuk, isi dan iramanya.
- d. Akan mengetahui garis hidup yang tetap dari suatu bangsa, perlulah kita mengetahui zaman yang telah lalu, mengetahui menjelmanya zaman itu, ke dalam zaman sekarang, mengetahui zaman yang berlaku ini, lalu dapat insyaAllah kita akan zaman yang akan datang.
- e. Pengaruh baru adalah terjadinya dari bergaulnya bangsa yang satu dengan yang lain, pergaulan mana pada sekarang mudah sekali, terbawa dari adanya perhubungan modern. Harulah kita awas, akan dapat memilih mana yang baik untuk menambah kemuliaan hidup kita, mana yang merugikan pada kita, dengan selalu mengingat bahwa semua kemajuan ilmu pengetahuan dan segala perikehidupan itu adalah kemurahan Tuhan untuk segenap umat manusia di seluruh dunia, meskipun hidupnya masing-masing menurut garis sendiri yang tetap. Jika kita tidak boleh menolaknya.

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis-garis bangsanya (kultural-nasional) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan (maatschappelijk), yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya,

sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerjasama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia.

Pendidikan budi pekerti harus menggunakan syarat-syarat sesuai dengan ruh kebangsaan, menuju ke arah keluhuran dan kesucian hidup bati, serta ketertiban dan kedamaian hidup lahir; baik syarat-syarat baru yang berfaedah untuk maksud dan tujuan kita.

Teristimewa haruslah kita mementingkan pangkal kehidupan kita yang terus hidup dalam kesenian, peradaban dan keagamaan kita; atau terdapat dalam kitab-kitab cerita (dongeng-dongeng, mite, legenda, babad dan lain-lain). Semua itu adalah “arsip nasional”, dalam mana ada tersimpan berbagai “kekayaan batin” dari bangsa kita. Dengan mengetahui segalanya itu, niscayalah langkah kita menuju ke arah zaman baru akan berhasil tetap dan kekal, karena zaman baru kita “dijodohkan” sebagai “mempelai” dengan zaman yang lalu.

Berhubung dengan apa yang tersebut di atas, perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya dengan perikehidupan rakyat, agar mereka tidak hanya dapat “pengetahuan” saja tentang hidup rakyatnya, namun juga dapat “mengalami” sendiri dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya.

Karena itu seyogyanyalah kita mengutamakan cara “pondok sistem”, berdasarkan hidup kekeluargaan, untuk mempersatukan pengajaran pengetahuan dengan pengajaran budi pekerti, sistem mana dalam sejarah kebudayaan bangsa kita bukan barang asing. Dahulu bernama “asrama”, kemudian di zaman Islam menjelma jadi “pondok pesantren”.

Pengajaran pengetahuan adalah sebagian dari pendidikan, yang terutama dipergunakan untuk mendidik pikiran; dan ini perlu sekali, tidak saja untuk memajukan kecerdasan batin, namun pula untuk melancarkan hidup pada umumnya. Seyogyanyalah pendidikan pikiran ini dibangun setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya dan selebar-lebarnya, agar anak-anak kelak dapat membangun peri kehidupannya lahir dan batin dengan sebaik-baiknya.

Pendidikan jasmani yang pada zaman dahulu kala juga tidak asing, harus dipertimbangkan untuk kesehatan diri sendiri dan untuk mendapatkan keturunan yang kuat.

5. Tentang Kebudayaan

Kebudayaan, yang berarti buah budi manusia, adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yakni alam dan zaman (kodrat dan masyarakat), dalam perjuangan mana terbukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai-bagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.

- a. Sebagai buah perjuangan manusia yang berada di dalam satu alam dan satu zaman, maka kebudayaan itu selalu bersifat kebangsaan (nasional) dan mewujudkan sifat atau watak, yakni kepribadian bangsa. Dan inilah sifat kemerdekaan kebangsaan dalam arti kultural.
- b. Tiap-tiap kebudayaan menunjukkan indah dan tingginya adab kemanusiaan pada hidupnya masing-masing bangsa yang memilikinya; dalam hal ini keluhuran dan kehalusan hidup manusia selalu dipakainya sebagai ukuran.
- c. Tiap-tiap kebudayaan sebagai buah kemenangan manusia terhadap segala kekuatan alam dan zaman, selalu memudahkan dan melancarkan hidup serta memberi alat-alat baru untuk meneruskan kemajuan hidup; sedang memudahkan serta memajukan berarti pula memfaedahkan dan mempertinggi hidup.

Hidup tumbuhnya kebudayaan, sebagai buah budi manusia, kebudayaan tidak terluput dari segala kejadian dan tabiat yang ada pada hidup manusia:

- a. Lahir, bertumbuh, maju, berkembang, berbuah, sakit, menjadi tua, mundur dan mati.
- b. Kawin dan berketurunan:
- c. Secara “asosiasi”, yakni berkumpul tetapi tidak bersatu, kerap kali menurunkan bastaard, yakni bersifat campuran dan kadang-kadang menunjukkan kemunduran atau dekadensi.

- d. Secara “asimilasi”, yakni bersatu padu atau manunggil dan biasanya menurunkan “angkatan baru yang murni”
- e. Mengalami seleksi: apa yang kuat terus hidup, yang lemah mati. Setelah hukum evolusi lain-lainnya tak dapat dihindari di dalam hidup kebudayaan. Maka kebudayaan (cultural, cultivate, culture) ialah memelihara serta memajukan hidup manusia ke arah keadaban. Dalam pada itu termasuk pula pengertian “memuja-muja” (cultus, vereering) dan inilah yang kerap kali menyebabkan hidup bekunya (verstaaring) kebudayaan. Karena itu haruslah selalu diingat:
 - a. Pemeliharaan kebudayaan harus bermaksud memajukan dan menyesuaikan kebudayaan dengan tiap-tiap pergantian alam dan zaman.
 - b. Karena pengasingan (isolasi) kebudayaan menyebabkan kemunduran dan matinya, maka harus selalu ada hubungan antara kebudayaan dengan kodrat dan masyarakat.
 - c. Pembaruan kebudayaan mengharuskan pula adanya hubungan dengan kebudayaan lain yang dapat mengembangkan (memajukan, menyempurnakan) atau memperkaya (yakni menambah) kebudayaan sendiri.
 - d. Kemajuan kebudayaan harus berupa lanjutan langsung dari kebudayaan sendiri (kontinuitet) menuju ke arah kesatuan kebudayaan dunia (konvergensi) dan tetap terus mempunyai sifat kepribadian di dalam lingkungan kemanusiaan sedunia (konsentrisitet).

Kebudayaan Indonesia yang sekarang masih berupa berkumpulnya segala kebudayaan untuk seluruh rakyat.

- a. Berhubung dengan tetap adanya kesatuan alam dan zaman, kesatuan sejarah (dulu dan sekarang), kesatuan masyarakat dan lain-lainnya, maka kesatuan kebudayaan Indonesia hanya soal waktu.
- b. Sebagai bahan untuk membangun kebudayaan kebangsaan Indonesia perlulah segala sari-sari serta puncak-puncak kebudayaan yang terdapat di seluruh daerah Indonesia dipergunakan untuk menjadi modal isinya.

- c. Dari luar lingkungan kebangsaan perlu pula diambil bahan-bahan yang dapat memperkembangkan dan/atau memperkaya kebudayaan kita sendiri.
- d. Dalam memasukan bahan-bahan, baik dari kebudayaan daerah-daerah maupun dari kebudayaan asing, perlu senantiasa diingat syarat-syarat kontinuitas, konvergensi dan konsentrisitas tersebut di muka.
- e. Jangan dilupakan, bahwa kemerdekaan bangsa tidak cukup hanya berupa kemerdekaan politik, tetapi harus berarti pula kesanggupan dan kemampuan mewujudkan kemerdekaan kebudayaan bangsa, yakni kekhususan dan kepribadian dalam segala sifat hidup dan penghidupannya, di atas dasar adab kemanusiaan yang luas, luhur dan dalam.

Sekianlah Saudara Ketua, kata sambutan kami atas uraian Presiden Universitas Sdr. Prof. Dr. Sardjito. Pidato kami tadi semata-mata berwujud dan-rede, tetapi kami maksudkan sebagai penjelasan dan sementara tambahan yang perlu-perlu, supaya para anggota Senat, Dewan Kurator, para Guru Besar dan Dwijawara lainnya, pula para Sarjana dan Peserta didik Universitas dapat mengetahuinya. Jika ada perkataan-perkataan yang janggal, kami minta maaf sebanyak-banyaknya.

Saya tutup kata penyambutan kami ini dengan sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kemurahan hati Senat Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada kami. Kepada Saudara Prof. Dr. Sardjito pula saya menyatakan rasa penghargaan yang sedalam-dalamnya untuk pidatonya yang telah beliau ucapkan secara tulus ikhlas tadi.

Semoga Tuhan membalas segala budi baik itu.

D. Dasar-Dasar Pendidikan. Keluarga, Th. I No.1,2,3,4., Nov, Des 1936., Jan, Febr. 1937

Dasar Dasar Pendidikan

a. Arti dan Maksud Pendidikan

Kata 'Pendidikan' dan 'Pengajaran' itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya gabungan kedua kata itu dapat mengeruhkan pengertiannya yang asli. Ketahuilah, pembaca yang terhormat, bahwa sebenarnya yang dinamakan 'pengajaran' (*onderwijs*) itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin.

Sekarang saya akan menerangkan arti dan maksud pendidikan (*opvoeding*) pada umumnya. Dengan sengaja saya memakai keterangan 'pada umumnya', karena dalam arti khususnya, pendidikan mempunyai beragam jenis pengertian. Bisa dikatakan bahwa tiap-tiap aliran hidup, baik aliran agama maupun aliran kemasyarakatan mempunyai maksud yang berbeda. Tidak hanya maksud dan tujuannya yang berbeda-beda, cara mendidiknya juga tidak sama. Mengenai keadaan yang penting ini, saya kan menerangkan secara lebih luas.

Walaupun bermacam-macam maksud, tujuan, cara, bentuk, syarat-syarat dan alat-alat dalam soal pendidikan, pendidikan yang berhubungan dengan aliran-aliran hidup yang beragam itu memiliki dasar-dasar atau garis-garis yang sama.

Menurut pengertian umum, berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam beragam jenis pendidikan itu, pendidikan diartikan sebagai 'tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak'. Maksud Pendidikan yaitu: menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.

b. Hanya Tuntunan dalam Hidup

Pertama kali harus diingat, bahwa pendidikan itu hanya suatu ‘tuntunan’ di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa ‘kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu’ tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya (bukan dasarnya) hidup dan tumbuhnya itu.

Uraian tersebut akan lebih jelas jika kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani (dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik) yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman pada dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat-iradatnya padi. Misalnya ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam, bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara, tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat ‘menuntun’, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar.

c. Perlukah Tuntunan Pendidikan itu?

Meskipun pendidikan itu hanya ‘tuntunan’ saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi perlu juga Pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak. Andaikata anak tidak baik

dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan, tentu akan mudah menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, akan tetapi dengan adanya tuntunan itu ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Tidak sedikit anak-anak yang baik dasarnya, tetapi karena pengaruh-pengaruh keadaan yang buruk, kemudian menjadi orang-orang jahat.

Pengaruh-pengaruh yang dimaksudkan itu ialah pengaruh yang muncul dari beragam jenis keadaan anak. Anak yang satu mungkin hidup dalam keluarga yang serba kekurangan, sehingga ditemui beragam jenis kesukaran yang menghambat kecerdasan budi anak. Bisa juga dalam keluarga itu tidak ditemui kemiskinan keduniawian, akan tetapi amat kekurangan budi luhur atau kesucian, sehingga anak-anak mudah terkena pengaruh-pengaruh yang jahat.

Menurut ilmu pendidikan, hubungan antara dasar dan keadaan itu terdapat adanya 'konvergensi'. Artinya, keduanya saling mempengaruhi, hingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu.

Mengenai perlu tidaknya tuntunan dalam kehidupan manusia, sama artinya dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh-kembangnya tanaman. Misalnya, kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari bapak tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik, atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak mendapat sinar matahari atau kekurangan air, maka biji jagung itu (walaupun dasarnya baik), tidak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Sebaliknya kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh bapak tani, maka biji itu

akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya.

d. Dasar Jiwa Anak dan Kekuasaan Pendidikan

Yang dimaksud dengan istilah 'dasar-j jiwa' yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Dengan kata lain, keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia. Mengenai dasar jiwa yang dimiliki anak-anak itu, terdapat tiga aliran yang berhubungan dengan soal daya Pendidikan. *Pertama*, yaitu anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya, si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Teori ini dinamakan teori rasa (lapisan lilin yang masih dapat dicoret-corek oleh si pendidik). Namun, aliran ini merupakan aliran lama yang sekarang hampir tidak diakui kebenarannya di kalangan kaum cendekiawan.

Kedua, ialah aliran negatif, yang berpendapat, bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengamati supaya pengaruh-pengaruh yang jahat tidak mendekati diri anak. Jadi, aliran negatif menganggap bahwa pendidikan hanya dapat menolak pengaruh-pengaruh dari luar, sedangkan budi pekerti yang tidak nampak ada di dalam jiwa anak tak akan diwujudkan.

Ketiga, ialah aliran yang terkenal dengan nama *convergentie-theorie*. Teori ini mengajarkan, bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Lebih lanjut menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram.

e. Tabiat yang Dapat dan yang Tidak Dapat Berubah

Menurut *convergentie-theorie*, watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, dinamakan bagian yang *intelligible*, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran (intelekt) serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. *Kedua*, dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia (bios = hidup) dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup.

Yang disebut *intelligible* yang dapat berubah karena pengaruh misalnya kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan, kurang cepatnya berpikir dan sebagainya. Dengan kata lain, keadaan pikiran, serta kecakapan untuk menimbang-nimbang dan kuat-lemahnya kemauan. Bagian yang disebut 'biologis' yang tak dapat berubah ialah bagian-bagian jiwa mengenai 'perasaan' yang berjenis-jenis di dalam jiwa manusia. Misalnya, rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa sosial, rasa agama, rasa berani, dan sebagainya. Rasa-rasa itu tetap pada di dalam jiwa manusia, mulai anak masih kecil hingga menjadi orang dewasa.

Seringkali anak yang penakut, sesudah mendapatkan didikan yang baik akan segera hilang rasa takut tersebut. Sebenarnya anak itu bukan berubah menjadi orang yang berwatak pemberani, hanya saja rasa takutnya itu tidak nampak karena sudah mendapatkan kecerdasan pikiran. Akibatnya, anak tersebut mulai pandai menimbang dan memikirkan sesuatu sehingga dapat memperkuat kemauannya untuk tidak takut. Hal inilah yang dapat menutup rasa takut yang asli dimiliki anak tersebut. Karena ketakutannya itu hanya 'tertutup' saja oleh pikirannya, maka anak tersebut terkadang diserang rasa takut dengan tiba-tiba. Keadaan ini terjadi jika pikirannya sedang tak bergerak. Kalau pikirannya tak bergerak sebentar saja, maka ia seketika akan takut lagi menurut dasar biologisnya sendiri.

Demikian pula orang yang bertabiat pemalu, belas-kasihan, bengis, murka, pemaarah dan sebagainya, selama ia sempat memikirkan segala

keadaannya, maka ia dapat menahan nafsunya yang asli. Namun, jika pikirannya tidak sempat bergerak (dalam keadaan yang tiba-tiba datangnya), tentulah tabiat-tabiatnya yang asli itu akan muncul dengan sendiri.

f. Perlunya Menguasai Diri dalam Pendidikan Budi Pekerti

Watak biologis dan tidak dapat lenyap dari jiwa manusia sangat banyak contohnya. Kita juga dapat melihat dalam kehidupan setiap manusia. Misalnya, orang yang karena pendidikannya, keadaan dan pengaruh lainnya, seharusnya berbudi dermawan. Namun demikian, jika ia memang mempunyai dasar watak kikir atau pelit, maka ia kan selalu kelihatan kikir, walaupun orang tersebut tahu akan kewajibannya sebagai dermawan terhadap fakir miskin (ini pengaruh pendidikannya yang baik). Semasa ia tidak sempat berpikir, tentulah tabiat kikir orang tersebut itu akan selalu kelihatan. Setidak-tidaknya kedermawanan orang itu akan berbeda dengan orang yang memang berdasar watak dermawan.

Janganlah pendidik itu berputus asa kerana menganggap tabiat-tabiat yang biologis (hidup perasaan) itu tidak dapat dilenyapkan sama sekali. Memang benar kecerdasan *intelligible* (hidup angan-angan) hanya dapat menutupi tabiat-tabiat perasaan yang tidak baik, akan tetapi harus diingat bahwa dengan menguasai diri (*zelfbeheersing*) secara tetap dan kuat, ia akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik itu. Jadi, kalau kecerdasan budi yang dimiliki orang tersebut sungguh baik, yaitu dapat mengadakan budi pekerti yang baik dan kokoh sehingga dapat mewujudkan kepribadian (*persoonlijkheid*) dan karakter (jiwa yang berasas hukum kebatinan), maka ia akan selalu dapat mengalahkan nafsu dan tabiat-tabiatnya yang asli dan biologis tadi.

Oleh karena itu, menguasai diri (*zelfbeheersing*) merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaban. **'Beschaving is zelfbeheersing'** (adab itu berarti dapat menguasai diri), demikian menurut pengajaran adat atau etika.

Kita sekarang sampai pada pembahasan '**budi pekerti**' atau '**watak**' diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Dalam bahasa asing, disebut sebagai 'karakter', yaitu jiwa yang berasas hukum kebatinan. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya.

Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi berarti pikiran-perasaan-kemauan, sedangkan pekerti artinya 'tenaga'. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia, mulai angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga.

Dengan adanya budi pekerti, setiap manusia berdiri sebagai manusia, dengan dasar-dasar yang jahat dan memang dapat dihilangkan, maupun dalam arti neutralisieren (menutup, mengurangi) tabiat-tabiat jahat yang biologis atau yang tak dapat lenyap sama sekali karena sudah Bersatu dengan jiwa.

g. Jenis-Jenis Budi Pekerti

Setelah kita mengetahui bahwa budi pekerti seseorang itu dapat mewujudkan sifat kebatinan seseorang dengan pasti dan tetap, kita juga harus mengetahui pula bahwa tidak ada dua budi pekerti orang yang sama. Jadi, sama keadaanya dengan roman muka manusia, tidak ada dua orang yang sama. Meskipun, orang dapat membedakan budi pekerti manusia menjadi beberapa macam atau jenis (*typen*), sehingga orang dapat mempunyai ikhtisar tentang garis-garis atau sifat-sifat watak orang secara umum.

Pembagian budi pekerti menjadi beberapa jenis tersebut berdasarkan pada sifat angan-angan, sifat perasaaan, dan sifat kemauan (*analysis*). kemudian, tiga sifat itu digabungkan menjadi satu (*synthetic*); sehingga mewujudkan suatu macam atau tipe budi pekerti yang pasti. Salah satu

pembagian tipe budi pekerti yang terkenal disampaikan oleh almarhum Prof. Dr. Heymans, guru besar Universitas Groningen, yang sudah mengadakan penyelidikan disertai percobaan dan ditetapkan adanya 8 jenis budi pekerti orang.

Ada pula yang membagi budi pekerti menjadi beberapa jenis berdasarkan hasrat seseorang. Jadi, bukan pembagian *analysis*, akan tetapi pembagian secara global dan *etis* (*etis* = menurut rasa adab). Adapun Prof. Spranger membagi budi pekerti menjadi 6 jenis, yakni bersandar pada Hasrat orang pada: 1. Kekuasaan (*macht mensch*), 2. Agama (*religious mensch*), 3. Keindahan (*kunst mensch*), 4. Kegunaan atau faedah (*nuts mensch* atau *economisch mensch*), 5. Pengetahuan atau kenyataan (*wetenschaps*) dan 6. Menolong mendermakan atau mengabdikan (*sociale mensch*).

Selain dua macam pembagian tersebut terdapat pula teori-teori tentang jenis-jenis budi pekerti yang lain. Misalnya, menghubungkan sifat jasmani seseorang dengan watak orang tersebut (Prof. Kretschmer), seperti ilmu firasat dari Imam Syafi'i. kemudian, terdapat pula pendapat yang mengukur budi-pekerti orang dengan melihat cara seseorang memandang dirinya sendiri sebagai pusat pemandangan, atau sebaliknya, sebagai sebagian saja dari alam yang besar ini (Adler, Kunkel). Ada pula yang mengadakan pembagian *introversion* dan *extraversion* (Jung), yaitu orang yang selalu memandang ke dalam batinnya sendiri, atau yang memandang ke arah luar, dan demikianlah seterusnya.

Dalam soal watak atau budi pekerti manusia, jangan dilupakan bahwa tiap-tiap manusia mendapat pengaruh dari yang menurunkan (*erfelijkheidsleer*). Jadi, sama pula dengan menurunnya sifat-sifat jasmani dari tiap-tiap orang (sifatnya roman muka, rambutnya, warna kulitnya, pendek-tingginya badan, dan lain-lain). Jangan dilupakan juga bahwa seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, pendidikan dan segala pengalaman tersebut berpengaruh besar pada tumbuhnya budi pekerti.

h. Naluri Pendidikan

Setelah ikhtisar arti, maksud, dan tujuan pendidikan dijelaskan pada uraian sebelumnya, sekarang akan dijelaskan bagian-bagian khusus: untuk permulaan mengenai syarat-syarat dan alat-alat dalam pendidikan yang teratur. Disebut 'yang teratur', sebab pendidikan itu sebenarnya berlaku di tiap-tiap keluarga dengan cara yang tidak teratur. Berlakunya pendidikan dari tiap-tiap orang terhadap anak-anak terbawa oleh adanya pedagogis *instinct*, yakni keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Naluri atau *instinct* disebabkan pula oleh adanya naluri yang pokok (*our instinct*), yang bertujuan agar terwujudnya keberlangsungan keturunan (*ngudhi-tuwuh*, *behoud van de sort*).

Pendidikan yang dilakukan oleh setiap orang terhadap anak-anaknya, pada umumnya hanya berdasarkan pada cara-kebiasaan (*taditie*, *sleure*) dan seringkali dipengaruhi oleh perasaan yang berganti-ganti dari si pendidik. Dengan kata lain, tidak dengan 'keinsyafan' dan tidak tetap. Jika terdapat keinsyafan, maka keinsyafan itu hanya berdasar atas 'perkiraan' atau 'rabaan' belaka, yakni tidak berdasarkan pengetahuan. Andaikata ada dasar pengetahuan yang berasal dari 'pengalaman', sehingga hal ini berarti kurang luar (*eenzijdig*).

i. Syarat-Syarat Pengetahuan

Pendidikan yang teratur yaitu pendidikan yang berdasarkan pada pengetahuan, yang dinamakan "Ilmu Pendidikan". Ilmu ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih berhubungan ilmu-ilmu lainnya, yang dinamakan ilmu syarat-syarat pendidikan (*hulpwetenschappen*), yang terbagi menjadi 5 jenis, yaitu:

- 1) Ilmu hidup batin manusia (ilmu jiwa, *psychologie*);
- 2) Ilmu hidup jasmani manusia (*fysiologie*);
- 3) Ilmu keadaan atau kesopanan (etika atau *moral*);
- 4) Ilmu keindahan atau ketertiban-lahir (estetika);

5) Ilmu tambo Pendidikan (ikhtisar cara-cara Pendidikan)

Untuk memahami perlunya mempunyai 5 jenis pengetahuan tersebut, kita dapat mengadakan perbandingan antara keadaan seorang 'juru didik' dengan tukang pengukir kayu. Seorang pengukir kayu tentu wajib mempunyai pengetahuan yang dalam dan luas tentang hakikat atau keadaan kayu. Maksudnya, ia harus tahu ilmu kayu (lihat No. 1 dan No. 2 diatas). Pengukir wajib mengetahui jenis kayu yang keras dan yang tidak keras, yang boleh dipergunakan untuk ukiran yang halus atau yang kasar, begitu seterusnya. Karena pendidikan itu 'mengukir' manusia, sementara manusia mempunyai hidup lahir dan batin, maka ilmu kemanusiaan itu ada dua macam, yaitu Ilmu Jiwa (*psychologie*) dan Ilmu Hidup Jasmani (*fysiologie*), seperti tersebut pada no.1 dan no.2.

Seorang pengukir kayu yang hendak mewujudkan pekerjaan (ukiran-ukiran) yang baik, harus mengerti tentang keindahan-keindahan ukiran. Bagi seorang pendidik sama halnya harus mengerti tentang keindahan-keindahan batin dan lahir (etika dan estetika), karena manusia itu bersifat batin dan lahir (lihat No. 3 dan No. 4)

Akhirnya, seorang pengukir kayu dapat menghasilkan karya ukiran-ukiran yang bagus kalau ia mempunyai pengetahuan tentang beragam jenis ukiran dari pengukir-pengukir lainnya, baik zaman sekarang maupun zaman dahulu, di negerinya sendiri atau di negeri asing. Itulah ilmu '**tambo pendidikan**' bagi kaum Pendidik.

Dengan mengadakan perbandingan tersebut, maka kita tidak perlu memberikan keterangan sendiri secara luas, karena setiap pembaca dapat membuat keterangan sendiri yang panjang, lebar dan terang.

j. Peralatan Pendidikan

Yang dimaksud dengan 'peralatan' adalah alat-alat pokok, yakni cara-cara mendidik. Perlu diketahui bahwa cara-cara mendidik beragam banyaknya, akan tetapi pada dasarnya cara tersebut dapat dibagi seperti berikut:

- 1) Memberi contoh (*voorbeeld*);

- 2) Pembiasaan (*pakulinan, gewoontevorming*)
- 3) Pengajaran (*wulang-wuruk, leering*)
- 4) Perintah, paksaan dan hukuman (*regearing en tucht*);
- 5) Tindakan (*laku, zelfbeheersing, zelfdiscipline*);
- 6) Pengalaman lahir dan batin (*nglakoni, ngrasa, beleving*).

Cara-cara tersebut tidak perlu dilakukan semuanya, bahkan ada kaum pendidik yang tidak sepakat dengan salah satu cara. Misalnya, para pendidik dari pihak *vrije opvoeding* (Pendidikan bebas), tidak suka memakai alat nomor 4 (perintah, paksaan, hukuman). Seringkali pendidik menggunakan salah satu cara saja dan pada umumnya disesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu, misalnya disesuaikan dengan umur anak-anak didik.

k. Hubungan dengan Umur

Untuk keperluan Pendidikan, umur anak didik dibagi menjadi 3 masa, masing-masing dari 7 atau 8 tahun (1 windu): a) waktu pertama (1-7 tahun) dinamakan masa kanak-kanak (*kinderperiode*); b) waktu kedua (7-14 tahun), yakni masa pertumbuhan jiwa pikiran (*intellectueel periode*); dan c) masa ketiga (14-21 tahun) dinamakan masa terbentuknya budi pekerti (*sociale periode*).



Apabila alat-alat atau cara-cara Pendidikan di atas dihubungkan dengan umur anak-anak, maka berikut dapat disajikan menggunakan cara sesuai dengan umur tersebut:

- 1) Masa kanak-kanak: cara no.1 dan no.2;
- 2) Masa ke-2: cara no. 3 dan no. 4;
- 3) Masa ke-3: cara no. 5 dan no.6.

E. Metode Montessori, Froebel dan Taman Anak. Wasita, Jilid No.1

Oktober 1928

Permainan Anak Adalah Pendidikan

Barangkali pembaca sudah pernah mendengar, bahwa dalam Taman Siswa diadakan kelompok Taman Anak, yang di HIS sama dengan *Voorklas*, Kelas 1, II dan III. Sementara, kelompok yang kedua dinamakan *Lagere School* (Taman Muda), yaitu mulai kelas 4 sampai 7 jika menurut aturan HIS.

Kedua kelompok tersebut mempunyai ketua sendiri-sendiri,. Metode pengajaran yang digunakan pada keduanya juga berbeda. Umpamanya, pengajar di Taman Anak semuanya adalah guru wanita (*sontrang/mentrik*). Sebab, rasa batin anak kecil (kecintaan, tasa takut, bangga, manja) masih tertuju kepada ibunya sehingga anak-anak tersebut masih sehati dengan pendidik wanita. Adapun pada HIS kelas yang tinggi, anak-anak kebanyakan sudah berlagak seperti laki-laki dewasa dan suka bergaul dengan bapaknya. Oleh karena itu, mereka harus dididik oleh guru laki-laki.

Selain itu, mata pelajaran di Taman Anak tersebut dikonsentrasikan pada pelajaran latihan panca indra. Sebab, mendidik anak kecil itu bukan atau belum memberikan pengetahuan, akan tetapi baru berusaha akan menyempurnakan rasa pikiran. Segala tenaga dan tingkah laku lahir yang mereka miliki sebenarnya besar pengaruhnya bagi kehidupan batin mereka dan demikian pula sebaliknya. Jalan perantaraan pendidikan lahir ke dalam batinnya tersebut adalah melalui panca indra. Maka dari itu, latihan panca indra adalah pekerjaan lahir untuk mendidik batin (pikiran, rasa, kemauan, nafsu dan lain-lain)

Di Eropa, metode pengajaran seperti itu juga diakui. Orang yang pertama mendidik anak dengan cara demikian ialah sang pujangga pendidik, Dr. Froebel. Selain itu, juga ada sang pujangga wanita, yakni Dr. Maria Montessori di kota Roma (Italia). Metode Froebel dan Montessori in mempunyai perbedaan yang cukup besar, tetapi ini yang dimiliki sebenarnya sama, yaitu mencari jalan lahir untuk mendidik batin.

Mari kita Kembali ke pembahasan tentang ‘Taman Anak’ di Yogyakarta. Dalam proses pembelajarannya, ternyata tidak hanya mengkonsentrasikan pada pelajaran (latihan) panca indra saja, tetapi permainan anak juga dimasukkan pada pembelajaran di sekolah sebagai kultur. Kita tidak dapat membandingkan metode Froebel, Montessori dan Taman Siswa tentang pengaruh tenaga lahir pada batin seperti berikut:

1. Montessori mementingkan pelajaran panca indra, hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indra dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan.
2. Froebel juga menjadikan panca indra sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indra juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun, dalam proses pembelajarannya anak masih diperintah.
3. Taman Siswa bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut, akan tetapi pelajaran panca indra dan permainan anak itu tidak dipisah, yaitu dianggap satu. Sebab, dalam Taman Siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among (Pemelihara) dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak.

Beberapa contoh dapat disebutkan, misalnya permainan anak Jawa seperti: *sumbar*, *gateng*, dan *unclang* yang mendidik anak agar saksama (*titi paritis*), cekatan, menjernihkan penglihatan dan lain-lain. Kemudian juga permainan seperti: *dakon*, *cublak-cublak suweng* dan *kubuk* yang mendidik anak tentang pengertian perhitungan dan perkiraan (taksiran). Selain itu, permainan *gobag*, *trembung*, *raton*, *cu*, *geritan*, *obrog*, *panahan si*, *jamuran*, *jelungan*, dan lain-lain.nya yang bersifat olahraga yang tentunya akan mendidik anak dalam hal: kekuatan dan kesehatan badan, kecekatan dan keberanian, ketajaman dalam penglihatan dan lain-lain ada juga permainan seperti: menghias bunga (*ngronce*), menyulam daun pisang atau janur, atau membuat tikar, dan pekerjaan anak lainnya yang dapat menjadikan mereka memiliki sikap tertib dan teratur.

Melihat kondisi anak kita sendiri seperti yang telah dijelaskan diatas, sudah barang tentu bahwa kita bangsa Indonesia juga memiliki sejenis metode Montessori dan metode Froble yaitu Metode Kodrat Iradat (Natur dan Evolusi). Bisa juga dinamakan metode Kaki Among Nini Among, yaitu metode Among Siswa.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa kita tidak perlu mengadakan barang tiruan jika memang kita sudah mempunyai barang tersebut sendiri. Sebab, barang tiruan tidak akan dapat menyamai barang yang murni seperti kepunyaan sendiri. Kain cap meskipun indah rupanya, tetapi derajatnya dibawah kain batik. Yang boleh kita pakai sebagai alat penghidupan yaitu barang-barang yang tidak kita miliki. Namun, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru. Hendaknya barang baru tersebut diselaraskan lebih dahulu. Maksudnya, disesuaikan dengan rasa kita dan keadaan hidup kita. Inilah yang dinamakan “menasionalisasikan”.

Penjelasan singkat tentang permainan anak sebagai alat pendidikan dan juga tentang asas-asasnya ‘Taman Anak’ dalam Taman Siswa yang disesuaikan dengan metode Montessori dan Frobel tersebut bertujuan agar kaum pendidik dan ibu-ibu dapat mengadakan metode sendiri yang selaras dengan kehidupan bangsa kita.

Profil Penulis

Simon Petrus Rafael lahir di Timor, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Setelah tamat SMP, ia melanjutkan studinya di SMAK Satya Wacana Salatiga. Ia meraih gelar Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris pada tahun 2000 dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Setelah lulus, Simon menjadi Guru Drama dan Bahasa & Sastra Inggris di SMA Santa Laurensia, Alam Sutera, Serpong. Pada tahun 2009, Simon meraih gelar Magister Pendidikan dari Universitas Pelita Harapan. Sejak tahun 2009 hingga saat ini, Simon menjadi Pelatih Guru dari daerah terpencil hingga beberapa kota di Indonesia. Pengalaman menjadi Pelatih Guru menjadi aset bagi Simon dalam berbagi pengalaman dengan Guru Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Simon adalah salah satu pengembang 2 Modul Program Guru Penggerak (Modul 1.1. Refleksi Filosofis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan Modul 2.3. Supervisi Akademik dengan Pendekatan Coaching). Pengalaman bersama Program Guru Penggerak selama 2 tahun memberikan perspektif yang mendalam tentang Mata Kuliah Filosofi Pendidikan Nasional

Munzil, lahir di Pamekasan. Gelar Sarjana Pendidikan Kimia diperolehnya dari IKIP Malang, Magister Sains dalam bidang kimia analitik dari Institut Teknologi Bandung dan Doktor bidang teknologi pembelajaran dari Universitas Negeri Malang. Saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Negeri Malang. Selain mengajar di kampus, Munzil terlibat dalam beberapa kegiatan di lingkungan Kemendikbud dan Kemenag Republik Indonesia dalam Program Profesi Guru (PPG) baik dalam Jabatan maupun Pra Jabatan. Pada tahun 2022 terlibat dalam penyusunan modul di Direktorat PPG KEMENDIKBUDRISTEK yang sebelumnya telah menempuh *Training of Trainers (ToT) "Professional Training Programs for Master Trainers in Design & Computational Thinking and Mentoring Skills for Educators"* bekerja sama dengan *National Institute of Education (NIE)* Singapura, dan pada tahun 2023 ini terlibat dalam revisi Modul Filosofi Pendidikan. *Contact person: munzil.fmipa@um.ac.id, atau di 081555600555*



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN GURU

Rencana Pembelajaran Semester

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Filosofi Pendidikan Indonesia	PPG-01	3	MK Inti	1	.
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	KA. Prodi	
	 Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd		 Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd	 Lusi Marleni, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	Sikap	S1.	Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa; menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan, dan etika profesi; meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, patriotis, toleran, multikulturalis, kolaboratif, peduli lingkungan, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan berjiwa wirausaha		
	Pengetahuan	P1.	Menguasai dan menerapkan teori dan konsep untuk menyusun alur belajar berdasarkan tingkat kompleksitas bidang ilmu yang terkait		
		P2.	Memiliki pengetahuan untuk memetakan tingkat penguasaan peserta didik dengan mempertimbangkan proses belajar, kebutuhan, tahap perkembangan, dan latar belakang peserta didik untuk kepentingan pembelajaran		
		P3.	Memahami strategi perencanaan tujuan belajar, indikator dan strategi pencapaian sesuai dengan tahap perkembangan murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila		
		P4.	Memahami pengetahuan tentang teknik evaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum dan lingkungan belajar		

	Keterampilan Umum	KU1.	Bekerja sebagai guru secara profesional
		KU2.	Membuat keputusan secara independen dalam menjalankan pekerjaan sebagai guru berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
		KU3.	Mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi guru dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama komunitas guru
		KU4.	Evaluasi secara kritis terhadap kinerja dan keputusan sendiri atau sejawat
		KU5.	Memimpin tim kerja dalam memecahkan permasalahan pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya untuk pengembangan organisasi
		KU6.	Membangun jejaring dan berkolaborasi dengan sejawat, profesi lain, dan pemangku kepentingan
	Keterampilan Khusus	KK1.	Mengembangkan pengetahuan profesional dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik dan mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif dan progresif terhadap perkembangan zaman
		KK2.	Mengembangkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta memfasilitasi peserta didik belajar dengan melibatkan orang tua dan masyarakat
		KK3.	Menunjukkan praktik pembelajaran profesional yang terdiri dari merancang, melaksanakan, melakukan asesmen, dan melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan
		KK4.	Mengembangkan kemampuan profesional yang berkelanjutan dan menerapkan keterampilan kepemimpinan dalam mengembangkan profesinya
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mahasiswa memiliki pemahaman kritis dan reflektif tentang dasar-dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara (KHD) 2. Mahasiswa memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah agar terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter, 3. Mahasiswa memiliki sikap reflektif-kritis dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan Filosofi Pendidikan Nasional dan Pancasila serta pengembangan karakter.		

Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan	1. Sejarah Gerakan Budi Utomo, R. A. Kartini, dan Ki Hadjar Dewantara 2. Dasar-Dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara 3. Tahapan Perkembangan Anak (Wiraga, Wiraga-Wirama, Wirama) 4. Filsafat Manusia 5. Pendidikan dan Kebudayaan 6. Pedagogik Kritis KHD 7. Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia 8. Profil Pelajar Pancasila 9. Profil Pendidikan Abad XXI 10. Implementasi pembelajaran Among dalam pengembangan karakter 11. Ragam filsafat Pendidikan di Dunia
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa dalam memaknai dan menghayati dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara (KHD) sebagai sebuah filosofi pengembangan Pendidikan Nasional. Mata kuliah ini melatih mahasiswa untuk secara reflektif, kritis dan kolaboratif menelaah pemikiran-pemikiran KHD dan bagaimana strateginya dalam mewujudkan Pendidikan yang berpihak pada anak sesuai dengan keberagaman konteks sosial budaya dan nilai-nilai luhur Indonesia. Proses perkuliahan dilakukan dengan menekankan pada dialog partisipatif kritis sehingga mahasiswa menjadi lebih reflektif dan tajam dalam mengkritisi praktik baik-praktik baik Pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam upaya mengkontekstualkan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hadjar Dewantara, mahasiswa juga diberikan ruang untuk memahami beberapa teks tentang “Identitas Manusia Indonesia”. LPTK memilih 2 teks dari 3 teks yang diberikan dalam mata kuliah ini.
Strategi Penilaian	Strategi penilaian yang dilakukan selama proses perkuliahan meliputi: 1) Rangkuman Perkuliahan dan Refleksi Kritis menjadi Tugas Terstruktur. Mahasiswa menyerahkan hasil rangkuman dan refleksi kritis sebagai bagian penilaian terstruktur. Dosen memberikan umpan balik terhadap tugas mahasiswa untuk menguatkan pemahaman mahasiswa. Bobot penilaian ini adalah 25%; 2) Presentasi kelompok dengan bobot 15%; 3) Ujian Tengah Semester (UTS) dalam bentuk tulisan kritis mahasiswa yang dikembangkan dari rangkuman perkuliahan dan refleksi kritis dari Topik 1 dan Topik 2. Bobot penilaian adalah 30%; 4) Ujian Akhir Semester (UAS) dalam bentuk tulisan ‘Visi Diri’ (maksimum 3500 kata) mahasiswa menjadi seorang pendidikan profesional berdasarkan refleksi kritis setelah mempelajari Topik 1, Topik 2, Topik 3 dan Topik 4. Bobot penilaian adalah 30%

Proporsi Penilaian

Proporsi Penilaian per Kategori *)		
No	Kategori	Proporsi
1	Rangkuman Perkuliahan & Refleksi Kritis	25%
2	Presentasi kelompok	15%
3	UTS	30%
4	UAS	30%
Total		100%

Keterangan Penilaian per Kategori:

1. Refleksi Perkuliahan/Tugas Terstruktur

- Mahasiswa menulis rangkuman kuliah dan refleksi kritis setelah perkuliahan (150-200 kata);
- Batas waktu pengiriman rangkuman dan refleksi kritis 1 hari setelah perkuliahan paling telat pukul 23:59;
- Mahasiswa mengirimkan tugas dalam bentuk word-docs dan dosen memberikan umpan balik terhadap tugas rangkuman kuliah;
- Pengiriman rangkuman dan refleksi kritis lebih dari kesepakatan akan mendapatkan poin maksimum 70 (C).

2. Presentasi Kelompok

- Materi presentasi sesuai dengan petunjuk di setiap topik materi;
- Materi presentasi kelompok diunggah di platform belajar (MS Teams) untuk dipelajari oleh kelompok lain;
- Presentasi kelompok setiap pertemuan dinilai dan diakumulasi sebagai penilai akhir.

3. UTS

- Mahasiswa mengembangkan rangkuman perkuliahan dan refleksi kritis menjadi sebuah tulisan (1300-1500 kata);
- Mahasiswa menambahkan referensi bacaan untuk memperkaya tulisan;
- Mahasiswa mengumpulkan esai/makalah sesuai dengan kesepakatan. Bila mengumpulkan 1 hari atau lebih dari kesepakatan maka ada pengurangan nilai 20% dari total penilaian.

	4. UAS a. Mahasiswa membuat tulisan tentang visi diri menjadi seorang guru profesional dengan mengembangkan rangkuman perkuliahan dan refleksi kritis (maksimum 3500 kata); b. Mahasiswa menambahkan referensi bacaan untuk memperkaya tulisan; c. Mahasiswa mengumpulkan esai/makalah sesuai kesepakatan. Bila mengumpulkan 1 hari atau lebih dari kesepakatan maka ada pengurangan nilai 20% dari total penilaian
Daftar Pustaka	1. Dewantara, Ki Hadjar. 2013. <i>Pendidikan</i>. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa. 2. Mangunwijaya, Y. B. 2020. <i>Sekolah Merdeka - Pendidikan Pemerdekaan</i>. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 3. Guru, Yayasan Cahaya. 2019. <i>Cahaya Bineka Taman Bangsa</i>. Jakarta: Yayasan Cahaya Guru. 4. Tilaar, H.A.R. 2010. <i>Paradigma Baru Pendidikan Nasional</i>. Jakarta: Rineka Cipta. 5. —. 2011. <i>Pedagogik Kritis</i>. Jakarta: Rineka Cipta. 6. —. 2007. <i>Mengindonesia - Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia</i>. Jakarta: Rineka Cipta. 7. Wahono, Francis. 2021. <i>Pendidikan Yang Memerdekakan</i>. Yogyakarta: Yayasan Cindelaras Paritrana. 8. Sastrapratedja, M. 2013. <i>Pendidikan Sebagai Humanisasi</i>. Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila. 9. —. 2013. <i>Lima Gagasan Yang Dapat Mengubah Indonesia</i>. Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila. 10. Latif, Yudi. 2020. <i>Pendidikan Yang Berkebudayaan</i>. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 11. Soewito, Irna H.N Hadi. 2019. <i>Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan</i>. Jakarta: PT. Gramedia. 12. Siswa, Taman. n.d. <i>Membudayakan Pancasila Melalui Pendidikan</i>. Yogyakarta: Panitia Pelaksana Temukarya Nasional Taman Siswa. 13. Raharjo, Toto. 2018. <i>Sekolah Biasa Saja</i>. Yogyakarta: INSISTPress. 14. Leahy, Louis. 2001. <i>Siapaakah Manusia?</i> Yogyakarta: Kanisius. 15. Sudiardja, A. 2006. <i>Karya Lengkap Driyarkara</i>. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 16. Dewantara, Ki Hadjar. 2009. <i>Menuju Manusia Merdeka</i>. Yogyakarta: Leutika.

Minggu ke	Sub CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian
		Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Topik 1 – Perjalanan Pendidikan Nasional (3 Minggu Pertemuan)						
1 – Mulai dari Diri & Eksplorasi Konsep	1. Mahasiswa mampu merefleksikan alasan pemilihan profesi guru melalui tulisan; 2. Mahasiswa mampu memahami pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Pidato Penerimaan Honoris Causa dari UGM; 3. Mahasiswa mampu memahami perjalanan perkembangan Kurikulum Nasional Indonesia	1. Tulisan refleksi diri mengenai alasan memilih profesi guru yang diunggah di LMS; 2. Rangkuman dan refleksi kritis Pidato Ki Hadjar Dewantara saat Penerimaan Honoris Causa dari UGM; 3. Paham perjalanan perkembangan Kurikulum Nasional Indonesia	Tulisan refleksi diri & komitmen diri dalam belajar	1. Mahasiswa secara mandiri membuat tulisan refleksi 2. Mahasiswa mengamati video yang disediakan, kemudian membuat rangkuman ringkas isi dari video 3. Mahasiswa dan dosen melakukan diskusi untuk membahas nilai-nilai yang ada dalam video 4. Mahasiswa diminta membaca naskah pidato Ki Hajar Dewantara	1. Menonton video: a. https://www.youtube.com/watch?v=nvLlc9O5C9c ; b. https://www.youtube.com/watch?v=R3jMf0-SzCl&list=PLw9-l4jtGAA1DvsniOCijD6CO89DGE8e&index=6 2. Menonton video "Pendidikan Jaman Kolonial" - https://www.youtube.com/watch?v=M90E2vT7zF4 3. Pidato Ki Hadjar Dewantara saat Penerimaan Honoris Causa dari UGM	Rangkuman dan refleksi kritis perkuliahan satu (Dosen memberikan Penilaian - Bobot Nilai 10%)

2 – Ruang Kolaborasi & Demonstrasi Kontekstual	1. Mahasiswa mampu memahami pemikiran kritis Pidato Ki Hadjar Dewantara melalui diskusi kelompok;	1. Presentasi hasil diskusi kelompok 2. Demonstrasi kontekstual pemahaman mahasiswa tentang Pidato Ki Hadjar Dewantara sesuai dengan kompetensi mahasiswa (seperti vlog, infografis, poster, storyboard dll)	Tulisan reflektif perkuliahan kedua	1. Mahasiswa secara berkelompok berdiskusi tentang naskah pidato Ki Hadjar Dewantara 2. Setiap kelompok diminta membuat presentasi hasil telaahnya, baik dalam bentuk poster, vlog, podcast atau bentuk lainnya	1. Presentasi hasil diskusi kelompok. Materi presentasi adalah materi inti dari hasil diskusi kelompok; 10' waktu presentasi (termasuk tanggapan dosen) 2. Hasil Demonstrasi Kontekstual	Rangkuman dan refleksi kritis perkuliahan kedua (Dosen memberikan Penilaian - Bobot Nilai 10%)
3 – Elaborasi Pemahaman & Koneksi Antar Materi & Aksi Nyata	1. Mahasiswa mampu memahami inti pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Pidato Penganugerahan Honoris Causa dari UGM melalui dialog;	1. Mahasiswa paham inti pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Pidato Penganugerahan Honoris Causa dari UGM melalui elaborasi pemahaman dan dialog bersama Dosen;	Tulisan reflektif perkuliahan ketiga	1. Mahasiswa melakukan diskusi kelompok untuk melakukan elaborasi pemahaman pemikiran Ki Hadjar Dewantara dengan dunia pendidikan saat ini	Materi Elaborasi Pemahaman oleh Dosen berdasarkan Pidato Ki Hadjar Dewantara Penganugerahan Honoris Causa dari UGM	Rangkuman dan refleksi kritis perkuliahan ketiga (Dosen memberikan Penilaian)

		2. Hasil koneksi pemahaman mahasiswa dengan elaborasi Dosen 3. Refleksi pemahaman materi di Padlet		2. Dosen memberi penguatan hasil elaborasi mahasiswa terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara 3. Mahasiswa diminta untuk membuat gagasan pendidikan masa depan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara		
Topik 2 – Dasar-Dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara (4 Minggu Pertemuan)						
4 – Mulai Dari Diri & Elaborasi Pemahaman	1. Mahasiswa mampu membuat tulisan reflektif mengenal Ki Hadjar Dewantara dan pemikirannya; 2. Mahasiswa mampu memahami 2 tulisan Ki Hadjar Dewantara,)	1. Tulisan reflektif sejauh mana mahasiswa mengenal Ki Hadjar Dewantara dan pemikiran; 2. Mahasiswa paham 2 tulisan Ki Hadjar Dewantara: 1) Dasar-Dasar	Tulisan reflektif perkuliahan keempat	1. Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diberi tugas terstruktur untuk membuat tulisan ttg pemikiran Ki Hadjar Dewantara 2. Mahasiswa melakukan	1. 2 tulisan Ki Hadjar Dewantara: 1) Dasar-Dasar Pendidikan 2) Metode Montessori, Froebel, Taman Anak; 2. Video: https://www.youtube.com/watch?v=aajtlNkRKNg&list=PLw9-	Rangkuman dan refleksi kritis perkuliahan keempat (Dosen memberikan Penilaian)

	Metode Montessori, dan Froebel,	Pendidikan 2) Metode Montessori, Froebel, Taman Anak; dan setelah menonton video refleksi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara oleh Bapak Dr. Iwan Syahril 3. Tulisan refleksi kritis mahasiswa terhadap Dasar-Dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara		diskusi dibawah bimbingan dosen tentang dasar-dasar pendidikan 3. Mahasiswa membuat tulisan refleksi kritis tentang dasar-dasar pendidikan berdasarkan hasil diskusi kelompok	l4jtGA-A1DvsniOCljD6CO89DGE8e&index=15	
5 – Ruang Kolaborasi & Demosntrasi Kontekstual	1. Mahasiswa mampu melakukan refleksi kritis terhadap Dasar-Dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara;	1. Presentasi hasil diskusi kelompok 2. Demonstrasi kontekstual pemahaman mahasiswa tentang Dasar-Dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara sesuai dengan kompetensi	Tulisan reflektif perkuliahan kelima	1. Mahasiswa melakukan diskusi kelompok (tiap kelompok terdiri dari 4 mahasiswa), dibawah bimbingan dosen. Hasil diskusi yang berupa pemahaman dan		Rangkuman dan refleksi kritis perkuliahan kelima (Dosen memberikan Penilaian)

		mahasiswa (seperti vlog, infografis, poster, story board dll)		refleksi kritis mahasiswa. 2. Presentasi hasil diskusi kelompok, dilanjutkan dengan tanya jawab antar kelompok 3. Mahasiswa diminta membuat gagasan pemikirannya tentang Pendidikan masa depan berdasarkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara		
6 – Elaborasi Pemahaman	1. Mahasiswa mampu memahami pemahaman inti pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Dasar-Dasar Pendidikan;	1. Mahasiswa paham inti pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Dasar-Dasar Pendidikan; 2. Evaluasi pemahaman kritis mahasiswa	Tulisan reflektif perkuliahan keenam	1. Diskusi kelompok untuk mengkaji pendidikan saat ini berdasarkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara 2. Dosen memberi penguatan tentang hasil		Rangkuman dan refleksi kritis perkuliahan keenam (Dosen memberikan Penilaian)

		melalui dialog bersama Dosen		diskusi mahasiswa		
7 – Koneksi Antar Materi & Aksi Nyata	1. Mahasiswa mampu menuliskan koneksi materi antara Topik 1 dan Topik 2, 2. Mahasiswa mampu menuliskan esai/makalah sebagai bahan UTS	1. Mahasiswa menuliskan koneksi materi antara Topik 1 dan Topik 2, 2. Mahasiswa menuliskan esai/makalah sebagai bahan UTS	Tulisan reflektif perkuliahan ketujuh	1. Mahasiswa diminta untuk melakukan kajian hubungan antar materi yang dipelajari 2. Dosen memberi penguatan hasil koneksi antara materi dari mahasiswa 3. Diskusi kelompok	Dasar-Dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara	Rangkuman dan refleksi kritis perkuliahan ketujuh (Dosen memberikan Penilaian)

UTS

- a. Mahasiswa mengembangkan rangkuman perkuliahan dan refleksi kritis menjadi sebuah tulisan (1300-1500 kata);
- b. Mahasiswa menambahkan referensi bacaan untuk memperkaya tulisan;
- c. Mahasiswa mengumpulkan esai/makalah sesuai dengan kesepakatan. Bila mengumpulkan 1 hari atau lebih dari kesepakatan maka ada pengurangan nilai 20% dari total penilaian.

Topik 3 – Manusia Indonesia (3 Minggu Pertemuan)

Catatan Topik 3:

1. Topik 3 memberikan kemerdekaan bagi setiap LPTK untuk memilih 2 teks/tulisan yang dijadikan sebagai Materi Bahasan;
2. LPTK memilih 2 topik kajian sesuai dengan konteks dan keunikan setiap daerah;
3. Topik ini memberikan kemerdekaan bagi setiap LPTK untuk mengkoneksikan dengan MK Sosial Kultural untuk memberikan perspektif bagi mahasiswa untuk lebih dalam memahami Topik 3 – Manusia Indonesia

9 – Mulai dari Diri & Eksplorasi Konsep	1. Mahasiswa membuat tulisan refleksi diri mengenai Topik Bahasan yang dipilih LPTK; 2. Mahasiswa memahami materi kuliah dari 2 Topik Bahasan	1. Tulisan refleksi diri tentang topik yang dibahas; 2. Mahasiswa paham materi kuliah dari 2 Topik Bahasan	Tulisan reflektif perkuliahan kesembilan	1. Mahasiswa ditugaskan untuk membuat tulisan tentang topik yang akan dibahas sebelum pertemuan perkuliahan di kelas 2. Mahasiswa diminta untuk mengkaji yang relevan dengan topik yang dibahas 3. Diskusi di kelas hasil dari tulisan mahasiswa, Dosen memberi penguatan dari hasil diskusi	2 Topik Bahasan: (tahap mengembangkan)	Rangkuman dan refleksi kritis perkuliahan kesembilan (Dosen memberikan Penilaian)
10 – Ruang Kolaborasi & Demonstrasi Kontekstual	1. Mahasiswa dapat melakukan telaah kritis terhadap sumber belajar tentang identitas manusia Indoneisa	1. Presentasi hasil diskusi kelompok 2. Demonstrasi kontekstual pemahaman mahasiswa tentang 2 teks yang dibaca	Tulisan reflektif perkuliahan kesepuluh	1. Mahasiswa melakukan diskusi kelompok untuk berbagi pemahaman dan refleksi kritis terhadap 2 teks yang dibaca	1. Presentasi hasil diskusi kelompok. Materi presentasi adalah materi inti dari hasil diskusi kelompok; 10' waktu presentasi	Rangkuman dan refleksi kritis perkuliahan kedua (Dosen memberikan Penilaian)

		sesuai dengan kompetensi mahasiswa (seperti vlog, infografis, poster, story board dll)		2. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok; 3. Mahasiswa membuat Demonstrasi Kontekstual akan pemahaman diri berdasarkan teks yang dibaca	(termasuk tanggapan dosen) 2. Hasil Demonstrasi Kontekstual	
11 – Elaborasi Pemahaman	1. Mahasiswa mengevaluasi pemahaman tentang identitas manusia Indoneisa	1. Mahasiswa paham inti 2 teks melalui elaborasi pemahaman dan dialog bersama Dosen; 2. Evaluasi pemahaman kritis mahasiswa melalui dialog bersama Dosen	Tulisan reflektif perkuliahan kesebelas	1. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mencari inti dari 2 teks bacaan 2. Dosen dan mahasiswa melakukan diskusi untuk melakukan evaluasi terhadap pemahaman inti bacaan 2 teks 3. Dosen memberi penguatan terhadap pemahaman mahasiswa	Materi Elaborasi Pemahaman oleh Dosen berdasarkan 2 teks	Rangkuman dan refleksi kritis perkuliahan kesebelas (Dosen memberikan Penilaian)

12 – Koneksi Antar Materi & Aksi Nyata	1. Mahasiswa mampu membuat koneksi antar materi tentang identitas manusia Indonesia	1. Hasil koneksi pemahaman mahasiswa dengan elaborasi Dosen 2. Refleksi pemahaman materi di Padlet	Tulisan reflektif perkuliahan kesebelas	1. Mahasiswa melakukan diskusi kelompok untuk melakukan koneksi pemahaman antar materi yang pernah dipelajari 2. Dosen memberi penguatan terhadap hasil diskusi kelompok tentang koneksi antar materi yang sudah dipahami mahasiswa	Materi Elaborasi Pemahaman oleh Dosen berdasarkan 2 teks	Rangkuman dan refleksi kritis perkuliahan keduabelas (Dosen memberikan Penilaian)
Topik 4 – Pendidikan Yang Memerdekakan (3 Minggu Pertemuan)						
13 – Mulai dari Diri & Eksplorasi Konsep	1. Mahasiswa mampu memaknai tentang i “Pendidikan Yang Memerdekakan”; 2. Mahasiswa memahami “Pendidikan Yang Memerdekakan”	1. Tulisan refleksi diri mengenai ‘Pendidikan Yang Memerdekakan’ di LMS 2. Rangkuman dan refleksi kritis berdasarkan 4 video	Tulisan reflektif perkuliahan ketigabelas	1. Sebelum perkuliahan, dosen menugas mahasiswa untuk membuat tulisan reflesi mengenai pendidikan yang memerdekakan, dengan mengamatai sumber belajar	1. Menonton video: a. https://www.youtube.com/watch?v=G0wmwTkR4ns b. https://www.youtube.com/watch?v=ec5BKQdmlPY c. https://www.youtube.com/watch?v=qDCoPFXVGas d. https://www.youtube.com/watch?v=u6Lky4rBMqE	Rangkuman dan refleksi kritis perkuliahan ketigabelas (Dosen memberikan Penilaian)

				yang telah disediakan 2. Mahasiswa dan dosen melakukan diskusi atas refleksi yang telah dibuat oleh siswa 3. Dosen memberi penguatan pemahaman mahasiswa tentang pendidikan yang memerdekakan		
14 – Ruang Kolaborasi & Demonstrasi Kontekstual	1. Mahasiswa dapat melakukan refleksi kritis tentang “Pendidikan yang memerdekakan”	1. Presentasi hasil diskusi kelompok 2. Demonstrasi kontekstual pemahaman mahasiswa tentang “Pendidikan Yang Memerdekakan” sesuai dengan kompetensi mahasiswa (seperti vlog,	Tulisan reflektif perkuliahan keempatbelas	1. Mahasiswa secara berkelompok melakukan telaah kritis tentang “Pendidikan yang memerdekakan” 2. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok; 3. Mahasiswa berdiskusi kelompok untuk	1. Presentasi hasil diskusi kelompok. Materi presentasi adalah materi inti dari hasil diskusi kelompok; 10’ waktu presentasi (termasuk tanggapan dosen) 2. Hasil Demonstrasi Kontekstual	Rangkuman dan refleksi kritis perkuliahan keempatbelas (Dosen memberikan Penilaian)

		infografis, poster, storyboard dll)		membuat demonstrasi kontekstual dalam bentuk tulisan/poster tentang “Pendidikan yang memerdekakan”		
15 – Elaborasi Pemahaman & Koneksi Antar Materi & Aksi Nyata	1. Mahasiswa mampu membuat koneksi materi tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia	1. Mahasiswa paham inti “Pendidikan Yang Memerdekakan” melalui elaborasi pemahaman dan dialog bersama Dosen; 2. Hasil koneksi pemahaman mahasiswa dengan elaborasi Dosen 3. Refleksi pemahaman materi di Padlet	Tulisan reflektif perkuliahan kelimabelas	1. dosen memberi permasalahan yang lebih kompleks yang berhubungan dengan materi yang dipelajari serta menghubungkan dengan materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya 2. Mahasiswa secara berkelompok memecahkan masalah yang diberikan dosen 3. mahasiswa diminta untuk	Materi Elaborasi Pemahaman oleh Dosen berdasarkan 4 Video yang ditonton Mahasiswa	Rangkuman dan refleksi kritis perkuliahan kelimabelas (Dosen memberikan Penilaian)

				merancang aksi nyata sesuai dengan topik yang dipelajari		
UAS a. Mahasiswa mengembangkan rangkuman perkuliahan dan refleksi kritis menjadi sebuah tulisan (maksimum 3500 kata); b. Mahasiswa menambahkan referensi bacaan untuk memperkaya tulisan; c. Mahasiswa mengumpulkan esai/makalah sesuai dengan kesepakatan. Bila mengumpulkan 1 hari atau lebih dari kesepakatan maka ada pengurangan nilai 20% dari total penilaian.						

DAFTAR HADIR KULIAH
PENDIDIKAN PROFESI GURU - FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Nama Matakuliah : FILOSOFI PENDIDIKAN INDONESIA

Semester / SKS : 1 / 2

Kelas / Tahun Akd : B / 2024/2025 Ganjil

Dosen Pengampu : MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd

Dosen Pengajar :

$$\vdots$$
[illegible]

25	2486906069	SAKINAH	1	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	2486906070	SANDI PRATAMA	1	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	2486906077	SRI DEFY RAHMAWATI	1	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	2486906090	WINDI RIANA SARI	1	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mengetahui,
Ketua Program Studi



LUSI MARLENI, S.Pd, M.Pd

Bangkinang, 12 Februari 2025
Dosen Pengajar



MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd

- CATATAN :
- Jumlah tatap muka / pertemuan mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%
 - Absensi perkuliahan secara digital, data kehadiran diambil dari sistem secara otomatis
 - Pakain untuk mahasiswa : tidak boleh memakai sandal, kaos oblong, sandal, anting, kalung, gelang
 - Pakaian untuk mahasiswi : Tidak boleh memakai sandal, kaos ketat dan baju transparan



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 158-9/KPTS/UPTT/KP/IX/2024

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL PRODI S1
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD), S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PG-PAUD), S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA, S1 PENDIDIKAN
BAHASA INGGRIS DAN S1 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN
REKREASI (PENJASKESREK) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN AKADEMIK 2024/ 2025

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran semester ganjil Prodi S1 PGSD, S1 PG-PAUD, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan S1 PENJASKESREK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2024/ 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
 - 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - 8. Akta Notaris Ratu Helda Purnamasari, SH., MKn. No. 20. tanggal 18 September 2021 tentang Perubahan Badan Hukum Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - 9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan dan Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk/mengangkat Dosen Mengajar Semester Ganjil Prodi S1 PGSD, S1 PG-PAUD, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan S1 PENJASKESREK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 s.d 5 keputusan ini;
- Kedua** :
- Nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga** :
- Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada kas Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku untuk semester ganjil Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bangkinang
Pada Tanggal : 01 September 2024

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Rektor,

Prof. Dr. Amir Luthfi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Lembaga & Pusat di lingkungan Universitas Pahlawan.
- 2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan.
- 3. Bendahara Universitas Pahlawan.

SEMESTER V

No	Hari	Jam	Mata Kuliah	Sem	SKS	Dosen	
1	Senin	07.30-08.20	Semantic and Pragmatics	V	2	Dr. Citra Ayu, M.Pd	
		11.40-13.00	Kewirausahaan	V	2	Efti Novita sari, S.Pd, MM	
		13.00-14.40	Pengelolaan Pendidikan	V	2	Putri Asilestari, M.Pd	
2	Selasa	07.30-08.20	TEFL I	V	2	Prof. Dr. Syafnil Anwar, M.Pd	
		11.40-13.00	Extensive Reading	V	2	Hannisa Haris, M.Pd	
3	Rabu	07.30-09.20	Curriculum and Material Development (CMD)	V	3	Dr. Wida Rianti, M.Pd	
		09.30-11.20	Languange Learning Evalution	V	2	Dr. Lely Zuyana Amril M.Pd	
4	Kamis	07.30-09.20	IT IN EDUCATION	V	3	Roni Pasia, M.Kom	
		11.40-13.00	Manajemen Bimbel & Englis Course	V	3	Dr. Citra Ayu, M.Pd	

21

SEMESTER VII

No	Hari	Jam	Mata Kuliah	Sem	SKS	Dosen	
1	Rabu	07.30-08.20	Magang II	VII A	2	Putri Asilestari, M.Pd	
		11.40-13.00	English for Young Learners	VII A	2	Lusi Marleni, M.Pd	
3	Jumat	07.30-08.20	Critical Essay	VII A	2	Dr. Citra Ayu, M.Pd	
		10.50-12.30	English for Specific Purposes	VII A	2	Dr. Wida Rianti, M.Pd	
4	Sabtu	07.30-09.20	Seminar on ELT	VII A	2	Dr. Masrul, M.Pd	
		09.30-12.20	TOEFL	VII A	4	Lusi Marleni, M.Pd	
		13.00-14.40	English for Tourism	VII A	2	Dr. Wida Rianti, M.Pd	
		14.10-15.10	Error Analysis	VII A	2	Nurhidayah Sari, M.Pd	

JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2024/ 2025
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

Semester I A

No	Hari	Jam	Mata Kuliah	Sem	SKS	Dosen	Ruangan
	Senin	07.30-09.20	Speaking I	I	2	Hannisa Haris, M.Pd	
		09.10-10.50	Listening I	I	2	Lusi Marleni, M.Pd	
		16.30-18.00	Bahasa Indonesia	I	2	Bambang Irawan, M.Pd	
2	Rabu	07.30-09.10	Grammar I	I	2	Dr. Wida Rianti, M.Pd	
		10.30-12.20	Writing I	I	2	Dr. Masrul, M.Pd	
		13.00-14.40	Reading I	I	2	Putri Asilestari, M.Pd	
3	Kamis	07.30-08.20	Vocabulary	I	2	Dr. Citra Ayu, M.Pd	
		09.10-10.00	Landasan Pendidikan	I	2	Dr. Wida Rianti, M.Pd	
	Jumat	07.30-08.20	Pendidikan Agama Islam	I	2	Hidayat, M.Ag.	

18

SEMESTER III A

No	Hari	Jam	Mata Kuliah	Sem	SKS	Dosen	
1	Senin	07.30-08.20	Grammar III	III	2	Hannisa Haris, M.Pd	
		11.40-13.00	Bimbingan Konseling	III	2	Dr. Wida Rianti, M.Pd	
2	Selasa	09.10-10.50	PLSBT	III	2	Prof. Dr. Amir Luthfi	
		11.40-13.00	Pendidikan Pancasila	III	2	Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd	
3	Rabu	07.30-09.20	Phonology	III	2	Dr. Citra Ayu, M.Pd	
		09.30-11.20	Psikologi Pendidikan	III	2	Lusi Marleni, M.Pd	
4	Kamis	07.30-08.20	Reading III	III	2	Putri Asilestari, M.Pd	
		11.40-13.00	Introduction to Linguistics	III	2	Dr. Citra Ayu, M.Pd	
	Jumat	07.30-08.20	Writing III	III	2	Dr. Masrul, M.Pd	
		10.50-12.30	Translation I	III	2	Dr. Wida Rianti, M.Pd	

20



PENDIDIKAN PANCASILA

untuk Perguruan Tinggi





BUKU AJAR MATA KULIAH WAJIB UMUM
PENDIDIKAN PANCASILA

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia
2016

Catatan Penggunaan:

Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpan dalam bentuk apapun misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (*scanning*), maupun cara-cara lain, kecuali dengan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila
Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Copyright©2016

Dilindungi Undang-Undang
Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

ISBN 978-602-6470-01-0

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disklaimer: Buku ini merupakan Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum yang dipersiapkan pemerintah untuk menjadi salah satu sumber nilai dan bahan dalam penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai bangsa Indonesia seutuhnya. Buku bahan ajar ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Buku Bahan Ajar Pancasila ini merupakan “bahan ajar yang dinamis” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman, terakhir diperkaya dengan muatan kesadaran pajak. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Cetakan ke-1: 2016
Disusun dengan huruf HP Simplified Light, 11 pt

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 3 tentang kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

Sejalan dengan agenda revolusi karakter bangsa dalam Nawacita, Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat. Peningkatan kemampuan pikir, rasa, dan perilaku yang lebih bermartabat sebagai landasan membangun lingkungan di sekitarnya yang dikenal dengan *General Education* sehingga lulusan eksis dan siap menghadapi tantangan global dan perilaku yang lebih integratif dengan berbagai disiplin ilmu.

Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada semua Perguruan Tinggi agar segera menggunakan Buku Ajar MKWU sebagai wahana pendidikan karakter Bangsa Indonesia yang memperkuat "*softskills*" lulusan sehingga membentuk karakter kuat keindonesiaan yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks di abad 21.

Saya memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang telah berkontribusi dalam memperkaya materi buku ini dengan penguatan kesadaran pajak. Terima kasih kepada tim penyusun buku dan semua pihak yang telah memberikan dedikasi dan masukan yang sangat berharga.

Akhir kata semoga buku ajar ini bermanfaat bagi perguruan tinggi dan dapat membentuk sikap insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan berkepribadian Indonesia yang kokoh di era MEA dan global, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Jakarta, Juni 2016
Direktur Jenderal

Intan Ahmad

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PEMBELAJARAN

Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) pada Perguruan Tinggi memiliki posisi strategis dalam melakukan transmisi pengetahuan dan transformasi sikap serta perilaku mahasiswa Indonesia melalui proses pembelajaran. Dalam upaya meningkatkan mutu lulusan dan pembentukan karakter bangsa perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan materi yang dinamis mengikuti perkembangan yang senantiasa dilakukan secara terus menerus, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman, serta semangat belanegara.

Penerapan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), ditindaklanjuti dengan penulisan buku ajar yang dapat dijadikan sumber aktivitas pembelajaran MKWU dalam rangka mendidik lulusan yang berkarakter Bangsa Indonesia. Pokok bahasan dalam buku ini sengaja disajikan dengan pendekatan aktivitas pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning/SCL*). Pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik melalui proses berpikir kritis, analitis, induktif, deduktif, reflektif serta memicu “*high order thinking*” melalui dialog kreatif partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata dan menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat sejalan dengan konsep *General Education*.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penulis, atas dedikasi dan kerja kerasnya .

Akhirnya, semoga Buku ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan cita cita revolusi karakter bangsa. Buku ini masih harus disempurnakan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan kritik dari para pembaca untuk perbaikan buku ini.

Jakarta, Juni 2016

Direktur Pembelajaran

Paristiyanti Nurwardani

Tim Penyusun:

- Paristiyanti Nurwardani (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
- Hestu Yoga Saksama (Direktorat Jenderal Pajak)
- Arqom Kuswanjono (Universitas Gadjah Mada)
- Misnal Munir (Universitas Gadjah Mada)
- Rizal Mustansyir (Universitas Gadjah Mada)
- Encep Syarief Nurdin (Universitas Pendidikan Indonesia)
- Edi Mulyono (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
- Sanityas Jukti Prawatyani (Direktorat Jenderal Pajak)
- Aan Almaidah Anwar (Direktorat Jenderal Pajak)
- Evawany (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
- Fajar Priyautama (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
- Ary Festanto (Direktorat Jenderal Pajak)

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI) -SIKAP

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI) -KETERAMPILAN UMUM LEVEL 6 (D4/S1)

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, Mampu menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama didalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI) -KETERAMPILAN KHUSUS LEVEL 6 (D4/S1)

Dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau pengelola prodi (dlm hal tdk memiliki forum Prodi)

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI) -PENGETAHUAN LEVEL 6 (D4/S1)

Dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau pengelola prodi (dlm hal tdk memiliki forum Prodi)

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PENDAHULUAN	1
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA	11
A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila	12
B. Menanya Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila	22
C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pendidikan Pancasila ...	27
1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila	27
2. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila	29
3. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila	30
4. Sumber Politik Pendidikan Pancasila	31
D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila	32
1. Dinamika Pendidikan Pancasila	32
2. Tantangan Pendidikan Pancasila	36
E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pendidikan Pancasila untuk Masa Depan	42
F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pendidikan Pancasila	45
1. Pengertian Mata Kuliah Pendidikan Pancasila	45
2. Pentingnya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila	46
G. Tugas Belajar Lanjut: Mari Belajar Pancasila	46
BAB II BAGAIMANA PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA?	48

A.	Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia	50
1.	Periode Pengusulan Pancasila	50
2.	Periode Perumusan Pancasila.....	53
3.	Periode Pengesahan Pancasila	54
B.	Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia.....	61
1.	Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia.....	61
2.	Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia	63
3.	Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa Indonesia	63
4.	Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa	64
5.	Pancasila sebagai Perjanjian Luhur	64
C.	Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia	64
1.	Sumber Historis Pancasila.....	64
2.	Sumber Sosiologis Pancasila.....	65
3.	Sumber Politis Pancasila	66
D.	Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia	66
1.	Argumen tentang Dinamika Pancasila dalam Sejarah Bangsa	66
2.	Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	67
E.	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia untuk Masa Depan	67
1.	Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa.....	67
2.	Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa	68
F.	Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia	69
G.	Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar tentang Pentingnya Kajian Pancasila Melalui Pendekatan Sejarah.	69

BAB III BAGAIMANA PANCASILA MENJADI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA?	71

A.	Menelusuri Konsep Negara, Tujuan Negara dan Urgensi Dasar Negara	72
1.	Menelusuri Konsep Negara	72
2.	Menelusuri Konsep Tujuan Negara.....	75
3.	Menelusuri Konsep dan Urgensi Dasar Negara	80
B.	Menanya Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Dasar Negara	82
C.	Menggali Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Negara	85
1.	Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara	85
2.	Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara	86
3.	Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara	87
4.	Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Negara	89
D.	Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara	90
1.	Argumen tentang Dinamika Pancasila.....	90
2.	Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila	92
E.	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara	93
1.	Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara	93
2.	Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan RI	97
3.	Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945.....	98
4.	Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI 1945	100
5.	Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan.....	102
F.	Rangkuman tentang Makna dan Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Negara.....	112
G.	Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Dasar Negara	112
BAB IV MENGAPA PANCASILA MENJADI IDEOLOGI NEGARA?		114
A.	Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara	116
1.	Konsep Pancasila sebagai Ideologi Negara	116

2.	Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara	123
B.	Menanya Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Ideologi Negara.....	125
1.	Warga Negara Memahami dan Melaksanakan Pancasila sebagai Ideologi Negara	125
2.	Penyelenggara Negara Memahami dan Melaksanakan Pancasila sebagai Ideologi Negara	128
C.	Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara	130
1.	Sumber historis Pancasila sebagai Ideologi Negara	130
2.	Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara	132
3.	Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara.....	132
D.	Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara	133
1.	Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Ideologi Negara.....	133
2.	Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara.....	134
E.	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara.....	135
1.	Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Negara	135
2.	Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara	136
F.	Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Ideologi Negara	137
G.	Tugas Belajar Lanjut: Projek Belajar Pancasila sebagai Ideologi Negara	137
BAB V MENGAPA PANCASILA MERUPAKAN SISTEM FILSAFAT?		139
A.	Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat .	140
1.	Konsep Pancasila sebagai Sistem Filsafat	140
B.	Menanya Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Sistem Filsafat	147

1.	Filsafat Pancasila sebagai <i>Genetivus Objectivus</i> dan <i>Genetivus Subjectivus</i>	147
2.	Landasan Ontologis Filsafat Pancasila	148
3.	Landasan Epistemologis Filsafat Pancasila.....	152
4.	Landasan Aksiologis Pancasila.....	154
C.	Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Filsafat	157
1.	Sumber Historis Pancasila sebagai Sistem Filsafat.....	157
2.	Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Sistem Filsafat	159
3.	Sumber Politis Pancasila sebagai Sistem Filsafat	161
D.	Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat	168
1.	Dinamika Pancasila sebagai Sistem Filsafat.....	168
2.	Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat	169
E.	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat	170
1.	Esensi (hakikat) Pancasila sebagai Sistem Filsafat	170
2.	Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat.....	171
F.	Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Sistem Filsafat	171
G.	Tugas Belajar Lanjut: Projek Belajar Pancasila sebagai Sistem Filsafat	172
BAB VI BAGAIMANA PANCASILA MENJADI SISTEM ETIKA?		173
A.	Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika.....	175
1.	Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika	175
2.	Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika	181
B.	Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Sistem Etika	183
C.	Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Etika	186
1.	Sumber historis	186
2.	Sumber Sosiologis	188

3. Sumber politis.....	189
D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika	190
1. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Sistem Etika	190
2. Argumen tentang Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika .	192
E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika	192
1. Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika	192
2. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika	193
F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Sistem Etika	194
G. Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Sistem Etika	194

BAB VII MENGAPA PANCASILA MENJADI DASAR NILAI PENGEMBANGAN

ILMU?	195
A. Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	197
1. Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.....	197
2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	199
B. Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	200
C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia	202
1. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia	202
2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia	211
3. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia	212
D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.....	214

1.	Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu	214
2.	Argumen tentang Tantangan Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu	215
E.	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu untuk Masa Depan	216
1.	Esensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	216
2.	Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	217
F.	Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.....	218
G.	Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	218
DAFTAR PUSTAKA		242

PENDAHULUAN

Buku ajar pendidikan Pancasila ini terdiri atas tujuh bab. **Bab pertama**, diawali dengan latar belakang pendidikan Pancasila; kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter; landasan hukum pendidikan Pancasila; kerangka konseptual pendidikan Pancasila; visi dan misi; tujuan pendidikan Pancasila; desain mata kuliah; kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada bagian pengantar ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Bahasan materi ini penting untuk diketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta merta diimplementasikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembang kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti.

Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi (baca: perguruan tinggi) di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi: bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia; menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila; menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana; menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Bab kedua membahas Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pokok bahasan ini mengkaji dinamika Pancasila pada era pra kemerdekaan, awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada bagian ini, mahasiswa akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila, mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI, masih mengalami tantangan berupa “amnesia sejarah” (istilah yang digunakan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011).

Pada bab kedua ini, mahasiswa akan diajak untuk membahas sejarah perumusan Pancasila. Bahasan ini penting agar mahasiswa mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan proses dirumuskannya Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru.

Pembahasan pada bab kedua ini, diawali dengan penelusuran tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kemudian, menanyakan dan menemukan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa perlu menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kemudian, mahasiswa perlu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia sekaligus mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Akhirnya, mahasiswa perlu merangkum pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi: berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks

Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial dan alam; memahami dan menganalisis dinamika Pancasila secara historis; mempresentasikan dinamika Pancasila secara historis, serta merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang.

Bab ketiga membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok bahasan ini mengkaji hubungan antara Pancasila dan Proklamasi, hubungan antara Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Pada bab ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara, yang semuanya itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Mahasiswa diajak untuk mengetahui dan membahas bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Agar partisipasi mahasiswa di masa yang akan datang efektif, maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi dasar; berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Sadar dan berkomitmen melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan

ketentuan hukum di bawahnya, sebagai wujud kecintaannya pada tanah air; mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif; bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat; berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakkan moral dan hukum; mengidentifikasi, mengkritisi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, baik yang bersifat idealis maupun praktis-pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara.

Pada bab keempat dibahas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pokok bahasan ini mengkaji Pengertian dan Sejarah Ideologi, Pancasila dan Ideologi Dunia, Pancasila dan Agama. Bahasan ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber, seperti: kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya, berbagai komponen budaya yang meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Mahasiswa perlu mengetahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara, lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka.

Mahasiswa diajak untuk mengetahui bahwa agama juga dapat menjadi sumber bagi suatu ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Adapun ideologi yang bersumber dari pemikiran para tokoh, seperti marxisme. Marxisme termasuk salah satu di antara aliran ideologi (*mainstream*) yang berasal dari pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx. Pengaruh ideologi Marxisme masih terasa sampai

sekarang di beberapa negara, walaupun hanya menyisakan segelintir negara, seperti: Korea Utara, Kuba, dan Vietnam. Bahkan, Cina pernah berjaya menggunakan ideologi Marxis di zaman Mao Ze Dong, meskipun sekarang bergeser menjadi semi liberal, demikian pula halnya dengan Rusia.

Dewasa ini, ideologi berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas, seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Ideologi pasar berkembang dalam kehidupan modern sehingga melahirkan sikap konsumtif, sedangkan ideologi agama berkembang ke arah radikalisme agama. Lalu, bagaimana dengan ideologi Pancasila? Apakah Pancasila itu bersumber dari kebudayaan, agama, atau pemikiran tokoh? Hal inilah yang akan ditelusuri dalam bab keempat ini.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi; berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya. Mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. Menganalisis ideologi besar dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia. Menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila. Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya. Mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif. Menganalisis ideologi besar dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia. Menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila.

Pokok bahasan dalam **bab kelima** mengkaji pengertian filsafat, filsafat Pancasila, hakikat sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide *philosophische grondslag*. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat.

Sistem filsafat merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya, seperti: Notonagoro, Soerjanto Poespowardoyo, dan Sastrapratedja. Mereka termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat akan dibahas pada subbab tersendiri. Mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi: bersikap inklusif, toleran dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya; mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif; bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar prinsip musyawarah; memahami dan menganalisis hakikat sila-sila Pancasila, serta mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku; mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan tentang Pancasila yang hidup dalam tata kehidupan Indonesia.

Pokok bahasan **bab keenam** Pancasila dikaji sebagai sistem etika yang meliputi: pengertian etika, etika Pancasila, Pancasila sebagai solusi problem bangsa, seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lain-lain. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan *way of life* bangsa

Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia untuk bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah-akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Oleh karena itu, keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai (*value-free*).

Mahasiswa yang berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial, perlu menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan juga lingkungannya. Pancasila sebagai sistem etika merupakan *moral guidance* yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan di sekitar Anda. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral-akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, seperti: jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya.

Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasilais juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga mahasiswa memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi dan dekadensi moral dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Setelah mempelajari dan membahas bab keenam ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi; taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan dalam pengembangan keilmuan

serta kehidupan akademik dan profesinya; mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial dan alam; mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif; Berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum; menguasai pengetahuan tentang pengertian etika, aliran-aliran etika, etika Pancasila, dan Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa; terampil merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa dengan pendekatan Pancasila.

Bab ketujuh membahas dan mengkaji Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. ebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dewasa ini, mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya artinya iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama akan dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. *Pertama*; iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human-religius. *Kedua*; iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human-religius. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. *Ketiga*; iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri (faktor internal), tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal (budaya, ideologi, dan agama) untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat.

Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama, meskipun hal tersebut belum dapat

berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut, di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik di masyarakat. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama, jelas bercorak positivistis. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Karena iptek yang berkembang di ruang hampa nilai justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan.

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Karena pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman *Renaissance* di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas.

Bertitik tolak dari asumsi tersebut, maka *das sollen* ideologi Pancasila berperan sebagai *leading principle* dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Para ilmuwan tetap berpeluang untuk mengembangkan profesionalitasnya tanpa mengabaikan nilai ideologis yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri. Berdasarkan bahasan bab ketujuh ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi: bersikap inklusif, toleran dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya; bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat; merumuskan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia; merumuskan konsep karakter keilmuan

berdasar Pancasila; menciptakan model pemimpin, warga negara dan ilmuwan yang Pancasila.

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA



Gambar 1.0 Pancasila sebagai dasar NKRI
Sumber: id.wikipedia.org

Pada bagian pengantar ini, Anda akan diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal tersebut penting untuk diketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta merta diimplementasikan baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembang kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti pendidikan

Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi (baca: perguruan tinggi) di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi sebagai berikut:

Bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia; menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila; menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana; menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem pendidikan di Indonesia.



Anda masing-masing dipersilakan untuk mencari informasi tentang:

- 1. Pendidikan Pancasila dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.*
- 2. Pendidikan Pancasila dan urgensinya bagi mahasiswa atau generasi muda.*
- 3. Alasan mendasar diperlukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.*

Buat resume mengenai ketiga hal tersebut sebagai laporan individual

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila

Anda tentu sudah mempelajari pendidikan Pancasila. Materi pendidikan Pancasila apa saja yang sudah Anda pelajari? Anda sudah pernah mengenal pendidikan budi pekerti, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), dan lain-lain. Namun, apakah Anda sudah benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut? Apa kesan Anda setelah memperoleh pelajaran-pelajaran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila tersebut? Jawaban yang Anda ajukan mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman atas perlu atau tidaknya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, sebagai contoh:

1. Percaya kepada Tuhan dan toleran,
2. Gotong royong,
3. Musyawarah,
4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya.



ILUSTRASIKAN GAMBAR TENTANG GOTONG ROYONG DALAM MASYARAKAT INDONESIA!

Coba Anda perhatikan dengan seksama, pengamalan nilai-nilai yang sesuai dengan butir-butir di atas yang berkembang di lingkungan masyarakat! Apakah nilai-nilai tersebut masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat atau nilai-nilai itu sudah pudar?

Manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak. Alasannya jelas bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Konsekuensinya, pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu, dengan menempatkan posisi pemerintah sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan. Pajak menjadi solusi untuk kesenjangan tersebut.

Dalam konteks kekinian, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan, apakah nilai-nilai Pancasila telah sepenuhnya dilaksanakan oleh aparaturnya pemerintah? Ataukah Anda masih menemukan perilaku aparaturnya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apabila jawabannya masih banyak perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, sudah barang tentu perilaku seperti itu dapat dikategorikan perilaku yang tidak mensyukuri kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Notonagoro (kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, kausa finalis), merupakan penyebab lahirnya negara

kebangsaan Republik Indonesia, maka penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara.



Gambar 1.1 Gotong royong sebagai salah satu nilai dalam Pancasila. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing. (Sumber: sipolanmelihatawan.blogspot.com)

Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila.

1. Masalah Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa, karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016, sebesar 74,6 % penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak Wajib Pajak Perorangan maupun badan (lembaga/instansi/perusahaan/dan lain-lain) yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki, bahkan banyak kekayaannya yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.



Gambar I.1: *Free rider*, menikmati manfaat pembangunan tanpa berkontribusi melalui pajak. Hal ini diibaratkan seperti penumpang kereta api yang tidak membeli tiket tetapi menikmati manfaat transportasi tersebut

(Sumber: <http://kp2kpngabang.blogspot.co.id/2013/09/jangan-menjadi-free-rider-di-atas-roda.html>)

2. Masalah Korupsi

Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. *Transparency Internasional* (TI) merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia.



Gambar I.2: Unjuk rasa mahasiswa menentang korupsi

Sumber: www.beritalima.com

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai/moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah

pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari.

Sebenarnya, perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja. Tetapi seperti kata peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hal inilah tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip *good governance* dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia.

3. Masalah Lingkungan

Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini, citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan, yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan.

Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan ANDAL dan AMDAL, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila.



Gambar 1.4 Gunung Sampah di Bantar Gebang

Sumber: <http://www.bekasibusiness.com/2015/01/29/tpst-bantar-gebang-antisipasi-longsor-dengan-jaga-kemiringan-tumpukan-sampah/>

4. Masalah Disintegrasi Bangsa

Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Disamping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan Negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh acapkali mengemuka dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali Anda menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4 % menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila (Dailami, 2014:3).

5. Masalah Dekadensi Moral

Dewasa ini, fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan, perilaku kekerasan juga acapkali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya sudah dapat ditebak, perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat.

Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencegah makin merosotnya moralitas masyarakat? Bagaimana caranya meningkatkan

kontrol sosial dalam masyarakat yang notabene semakin permisif? Apakah cukup memadai apabila hanya dilakukan dengan cara meningkatkan pelaksanaan fungsi dan peran dari lembaga sensor film dan Komisi Penyiaran Indonesia? Bukankah upaya mencegah dekadensi moral tersebut juga merupakan tantangan bagi Anda?

6. Masalah Narkoba

Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis, dilihat dari kacamata bandar narkoba, Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba.

Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tahun 2013, POLRI mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika maupun narkoba jenis bahan berbahaya lainnya. Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus dari tahun sebelumnya. Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba yang ditangani oleh POLRI hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba (<http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/27/13/821215/sepanjang-2013-kasus-narkoba-meningkat>).

Bukankah hal ini mengancam generasi penerus bangsa? Apakah Anda tidak merasa prihatin terhadap peningkatan jumlah korban narkoba tersebut?

7. Masalah Penegakan Hukum yang Berkeadilan



ILUSTRASIKAN NERACA KEADILAN SEBAGAI PENGGANTI GAMBAR DI BAWAH INI, AGAK BERAT SEBELAH!



Gambar I.4: Simbol hukum
Sumber: kicauanpenaku.blogspot.com

Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparaturnya. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa.

8. Masalah Terorisme

Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun, faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh paham ekstrim tersebut? Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim tersebut. Agama yang

sejatinya menuntun manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang, di tangan teroris, agama mengejawantah menjadi keyakinan yang bengis tanpa belas kasihan terhadap sesama.

Dengan melihat permasalahan tersebut, tentu Anda mengerutkan dahi dan bertanya, apakah ada hal-hal positif yang dapat meningkatkan kebanggaan Anda sebagai bagian dari bangsa ini? Sudah barang tentu, hal-hal positif masih lebih banyak dibandingkan dengan hal-hal negatif di negara Indonesia. Agar tidak tertarik dan cenderung subjektif, hanya memperhatikan hal-hal yang kurang baik dari bangsa ini, silakan Anda cari tokoh-tokoh yang menginspirasi dalam melawan/mengatasi masalah-masalah tersebut!



Anda dipersilakan melakukan diskusi kelompok untuk menginventarisasi kategori tokoh-tokoh (baik tokoh lokal, nasional, maupun internasional) sebagai berikut:

Tokoh Pejabat dan/atau Penggiat Antikorupsi (KPK, Polisi, Jaksa, LSM, dan sebagainya), Tokoh Pecinta Lingkungan, Tokoh Pejuang Integrasi Bangsa dalam era globalisasi, Tokoh Penggiat Moral/Karakter Bangsa, Tokoh Penggiat Antinarkoba, Tokoh Penegak Hukum yang adil, Tokoh Anti Terorisme. Anda diminta untuk menyerahkan daftar tokoh hasil diskusi kelompok tersebut kepada dosen.

Dengan memperhatikan masalah tersebut, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila, yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (*leitmotive*) dan bintang penunjuk jalan (*leitstar*) (Abdulgani, 1979: 14). Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Dengan demikian, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan meminjam istilah Branson (1998), yaitu sebagai pembentuk *civic disposition* yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan *civic knowledge* dan *civic skills* mahasiswa.

Lantas, apakah yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila?

Kedudukan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib umum (MKWU) yang berdiri sendiri dan harus ditempuh oleh setiap mahasiswa, baik

pada jenjang diploma maupun jenjang sarjana. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan *knowledge*, *attitude*, dan *skill* mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (*guiding principle*) sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).

Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut:

Visi Pendidikan Pancasila

Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

Misi Pendidikan Pancasila

1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis).
2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial).
3. Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural).
4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (*synthetic discipline*), sebagai misi akademik (Sumber: Tim Dikti).

Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, empat pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang meliputi *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* (Delors, 1996). Berdasarkan ke-empat pilar pendidikan tersebut, pilar ke-empat menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan.

Anda dipersilakan untuk mencari informasi yang dapat memperkaya pemahaman Anda tentang pilar-pilar pembelajaran menurut UNESCO.



Anda dipersilakan untuk mempelajari dari berbagai sumber tentang pengertian dari pilar-pilar pembelajaran sebagai berikut:

1. *Learning to know*
2. *Learning to do*
3. *Learning to be*
4. *Learning to live together*

Kemudian, buatlah ringkasan untuk dilaporkan kepada dosen!

Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten, baik oleh warga negara, oknum aparat maupun pemimpin bangsa, dikemudian hari dapat diminimalkan.



Anda dipersilakan untuk menelusuri dari berbagai sumber tentang urgensi pendidikan Pancasila dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia, dan hal-hal apa saja yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila tersebut.

Setelah Anda menjawab pertanyaan di atas, Anda diharapkan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok kemudian membuat laporan secara tertulis.

B. Menanya Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila

Dalam pikiran Anda pasti pernah terlintas, mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Hal tersebut terjadi mengingat jurusan/program studi di perguruan tinggi sangat spesifik sehingga ada pihak-pihak yang menganggap pendidikan Pancasila dianggap kurang penting karena tidak terkait langsung dengan program studi yang diambilnya. Namun, apabila Anda berpikir jernih dan jujur terhadap diri sendiri, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran (*mainstream*) dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya.

Selain itu, degradasi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-

norma sosial yang hidup dimasyarakat, menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Dalam kehidupan politik, para elit politik (eksekutif dan legislatif) mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati *fatsoen* politik dan kering dari jiwa kenegarawanan. Bahkan, banyak politikus yang terjerat masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan menggerus nilai-nilai moral anak bangsa.

Korupsi sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari pajak masyarakat. Oleh karena terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara tersebut, maka target pembangunan yang semestinya dapat dicapai dengan dana tersebut menjadi terbengkalai.

Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain:

1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri,
2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang,
3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan (solidaritas) nasional,
4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan,
5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa,
6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum,
7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila.

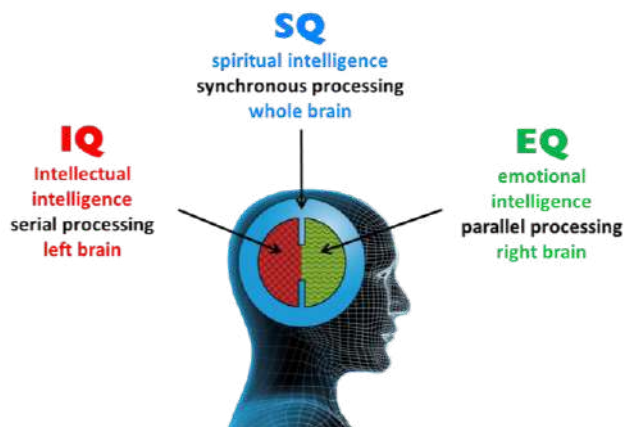
Penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang hal-hal tersebut sangat penting karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu bangsa (meminjam istilah dari Kenichi Ohmae, 1995 yaitu, *the end of the nation-state*). Punahnya suatu negara dapat terjadi karena empat “I”, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi (Ohmae, 2002: xv). Agar lebih jelas, Anda dapat menggali informasi tentang ke-empat konsep tersebut untuk memperkaya wawasan Anda tentang penyebab punahnya suatu bangsa. Kepunahan suatu bangsa tidak hanya ditimbulkan oleh faktor eksternal, tetapi

juga ditentukan oleh faktor internal yang ada dalam diri bangsa itu sendiri. Salah satu contoh terkenal dalam sejarah, ialah musnahnya bangsa Aztec di Meksiko yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang maju, tetapi punah dalam waktu singkat setelah kedatangan petualang dari Portugis

Agar Anda memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan punahnya suatu bangsa, maka carilah informasinya melalui berbagai sumber!



ILUSTRASIKAN GAMBAR YANG MENCERMINKAN TENTANG SQ, IQ, DAN EQ SEPERTI GAMBAR DI BAWAH INI!



Gambar 1.5: *The Psychology of Spiritual Intelligence*
Sumber: sqi.co

Dalam rangka menanggulangi keadaan tersebut, pemerintah telah mengupayakan agar pendidikan Pancasila ini tetap diselenggarakan di perguruan tinggi. Meskipun pada tataran implementasinya, mengalami pasang surut pemberlakuannya, tetapi sejatinya pendidikan Pancasila harus tetap dilaksanakan dalam rangka membentengi moralitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, tanggung jawab berada di pundak perguruan tinggi untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, kecerdasan tidak hanya mencakup intelektual, tetapi juga mencakup pula kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang menjadi dasar bagi pengembangan kecerdasan bangsa dalam bentuk kecerdasan ideologis.



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan hal-hal berikut dengan teman sekelompok:

- 1. Apakah yang dapat Anda pahami tentang pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan/program studi yang sedang ditempuh?*
- 2. Bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program Studi Anda?*
- 3. Bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi Anda?*
Anda diminta membuat laporan secara tertulis kepada dosen!

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan Pancasila sangat penting diselenggarakan di perguruan tinggi. Berdasarkan SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa:

1. agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya;
2. agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
3. agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;
4. agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional, mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar:

1. menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur;
3. memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani;
4. mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni; serta
5. mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya.

Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk:

1. memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.
4. membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013: viii).

Sebelumnya, penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 914/E/T/2011, tertanggal 30 Juni 2011, ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 (dua) SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi, memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 2, menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Pasal 35 ayat (3) menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib

diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan, demi terwujudnya tujuan negara.



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan kelompok Anda hal-hal sebagai berikut:

- 1. mencari dari berbagai sumber tentang alasan pendidikan Pancasila diperlukan untuk negara Indonesia.*
- 2. menemukan alasan pendidikan Pancasila harus dilaksanakan di perguruan tinggi.*
- 3. menunjukkan apa yang akan terjadi apabila pendidikan Pancasila tidak diselenggarakan dalam dunia pendidikan Indonesia.*

Kemudian Anda diminta untuk melaporkan secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pendidikan Pancasila

Dilihat dari segi objek materil, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara, dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Materi perkuliahan dikembangkan dari fenomena sosial untuk dikaji dan ditemukan solusinya yang rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa. Dengan demikian, kesadaran sosial mahasiswa turut serta dalam memecahkan permasalahan-permasalahan sosial. Hal ini akan terus bertumbuh melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada gilirannya, mahasiswa akan memiliki argumentasi bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila bermakna penting dalam sistem pendidikan tinggi di tanah air.

1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila

Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43SM) yang mengungkapkan, "*Historia Vitae*

Magistra”, yang bermakna, “Sejarah memberikan kearifan”. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum (*common-sense*) adalah “Sejarah merupakan guru kehidupan”. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, Anda juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah.



Gambar 1.6: Pidato Presiden Soekarno
Sumber: radiosilaturahim.com

Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik, misalnya mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara lain karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan IPTEKS termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi

bangsa lemah dan penguasaan IPTEKS lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidaknya tidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi perjuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai IPTEKS sesuai dengan prodi masing-masing.



Berdasarkan penjelasan di atas, Anda dipersilakan mencari fakta-fakta historis dan pelajaran yang menginspirasi Anda dari berbagai sumber, guna memberikan kontribusi yang konstruktif bagi masa depan bangsa yang lebih baik. Kemudian, Anda diminta untuk melaporkan secara tertulis kepada dosen.

2. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila

Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antarmanusia. Di dalamnya mengkaji, antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, disamping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Soekanto (1982:19) menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000: 13).

Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila, meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila, sebagaimana dikemukakan Beliau dalam paparan sebagai berikut:

“Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalan daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya... Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wata’ala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wata’ala (Latif, 2011: 21)

Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya (kemerdekaan) bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna Alinea III Pembukaan UUD 1945. Sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan Bangsa Indonesia ini wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat.

Bentuk lain mensyukuri kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan negara melalui kewajiban membayar pajak, karena dengan dana pajak itulah pembangunan dapat dilangsungkan secara optimal.

Sejalan dengan hal itu, Anda juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial (*agent of social control*) yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.



Dalam rangka mensyukuri karunia kemerdekaan, Anda diminta untuk mengidentifikasi sekurang-kurangnya 3 fenomena permasalahan sosial yang menurut Anda tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, Anda diminta untuk membuat ringkasan secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen.

3. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*). Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara

hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis (hukum) merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan Undang-Undang (*law enforcement*) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif, apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial (*social order*) dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur.



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok Anda tentang faktor penghambat dan penunjang diberlakukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kemudian, buatlah laporan tertulis untuk diserahkan kepada dosen!

4. Sumber Politik Pendidikan Pancasila

Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiardjo (1998:32) sebagai berikut:

“Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, idée, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, suatu “Weltanschauung”, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang,

atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.”

Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya, Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis.

Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut, yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), dan pembagian (*distribution*) sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, Anda diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi memberikan masukan konstruktif, baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik.



Anda dipersilakan untuk mengemukakan contoh output politik dari suprastruktur politik yang inputnya berawal dari infrastruktur politik, baik yang sesuai maupun yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, Anda diminta untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok dan membuat laporan tertulis untuk diserahkan kepada dosen.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila

1. Dinamika Pendidikan Pancasila

Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian, pada 1 Juli 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi Pidato Bung Karno tentang *Lahirnya Pancasila*. Buku tersebut disertai kata pengantar dari Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat yang

sebagaimana diketahui sebelumnya, beliau menjadi *Kaitjoo* (Ketua) *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan).

Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan/pendidikan Pancasila adalah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada 1960, diterbitkan buku oleh Departemen P dan K, dengan judul *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)*. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Selain itu, terbit pula buku yang berjudul *Penetapan Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*, pada tahun 1961, dengan penerbit CV Dua-R, yang dibubuhi kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia. Buku tersebut nampaknya lebih ditujukan untuk masyarakat umum dan aparatur negara.

Tidak lama sejak lahirnya Ketetapan MPR RI, Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetia Pancakarsa, P-4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi Pendidikan Pancasila. Selanjutnya diperkuat dengan Tap MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa “Pendidikan Pancasila” termasuk Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Dalam rangka menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi, Dirjen Dikti, menerbitkan SK, Nomor 25/DIKTI/KEP/1985, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Sebelumnya, Dirjen Dikti telah mengeluarkan SK tertanggal 5 Desember 1983, Nomor 86/DIKTI/Kep/1983, tentang Pelaksanaan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pola Seratus Jam di Perguruan Tinggi. Kemudian, dilengkapi dengan SK Kepala BP-7 Pusat tanggal 2 Januari 1984, Nomor KEP/01/BP-7/I/1984, tentang Penataran P-4 Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi Negeri dan Swasta, menyusul kemudian diterbitkan SK tanggal 13 April 1984, No. KEP-24/BP-7/IV/1984, tentang Pedoman Penyusunan Materi Khusus sesuai Bidang Ilmu yang Diasuh Fakultas/Akademi dalam Rangka Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi Negeri dan Swasta.

Dampak dari beberapa kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan Penataran P-4 tersebut, terdapat beberapa perguruan tinggi terutama perguruan tinggi

swasta yang tidak mampu menyelenggarakan penataran P-4 Pola 100 jam sehingga tetap menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila dengan atau tanpa penataran P-4 pola 45 jam. Di lain pihak, terdapat pula beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menyelenggarakan penataran P-4 pola 100 jam bersamaan dengan itu juga melaksanakan mata kuliah pendidikan Pancasila.

Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, nomor 1 Tahun 1967, tentang Pedoman Penyusunan Daftar Perkuliahan, yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian, terbit peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis tersebut, yaitu khususnya pada pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi, jo. Pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor 467/DIKTI/Kep/1999, yang substansinya menentukan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa baik program diploma maupun program sarjana. Pada 2000, Dirjen Dikti mengeluarkan kebijakan yang memperkuat keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu:

- 1) SK Dirjen Dikti, Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi,
- 2) SK Dirjen Dikti, Nomor 265/Dikti/2000, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK), dan
- 3) SK Dirjen Dikti, Nomor 38/Dikti/Kep/2002, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Seiring dengan terjadinya peristiwa reformasi pada 1998, lahirlah Ketetapan MPR, Nomor XVIII/ MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), sejak itu Penataran P-4 tidak lagi dilaksanakan.

Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan.

Dalam Undang-Undang tersebut pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Hasil survei Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 yang dilaksanakan di 81 perguruan tinggi negeri menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena perguruan tinggi merupakan wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa dikemudian hari. Namun, masih terdapat beberapa perguruan tinggi negeri yang tetap mempertahankan mata kuliah pendidikan Pancasila, salah satunya adalah Universitas Gajah Mada (UGM).

Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, pecinta negara proklamasi, baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi, maupun instansi pemerintah, melakukan berbagai langkah, antara lain menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya membudayakan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini melalui pendidikan tinggi. Di beberapa kementerian, khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional diadakan seminar-seminar dan salah satu *output*-nya adalah terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 914/E/T/2011, pada tanggal 30 Juni 2011, perihal penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Dalam surat edaran tersebut, Dirjen Dikti merekomendasikan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi minimal 2 (dua) SKS secara terpisah, atau dilaksanakan bersama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS.

Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam Pasal 35 jo. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 2, menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Pasal 35 Ayat (3) menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Dengan demikian, pembuat undang-undang menghendaki agar mata kuliah pendidikan Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi.



Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang dinamika pendidikan Pancasila di universitas/ perguruan tinggi masing-masing, apakah terjadi pasang surut pelaksanaan pendidikan Pancasila. Kemudian, Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok dan menyusun kesimpulan secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen.

2. Tantangan Pendidikan Pancasila

Abdulgani menyatakan bahwa Pancasila adalah *leitmotive* dan *leitstar*, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya *leitmotive* dan *leitstar* Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan dasar moral (1979:14). Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila.

Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya, dan spesialisasi program studi yang makin tajam (yang menyebabkan kurang tertarik sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila). Adapun tantangan yang bersifat eksternal, antara lain adalah krisis keteladanan dari para elite politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat.

Untuk lebih memahami dinamika dan tantangan Pancasila pada era globalisasi, Anda diminta untuk menganalisis penggalan-penggalan pidato kebangsaan yang disampaikan oleh mantan presiden dan presiden republik Indonesia sebagai berikut:

Pidato Presiden Ketiga RI, B.J. Habibie tanggal 1 Juni 2011

Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada?

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.

Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila?

Para hadirin yang berbahagia,

Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah "lenyap" dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 -- 66 tahun yang lalu -- telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain:

- (1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya;*
- (2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia (KAM);*
- (3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap "manipulasi" informasi dengan segala dampaknya.*

Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebelum-berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya 'amnesia nasional' tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai "grundnorm" (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama, dan afiliasi politik. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini.

Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur, dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai "tidak Pancasila" atau "anti Pancasila". Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tertentu, menurut saya, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan!

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/01/lm43df-ini-dia-pidato-lengkap-presiden-ketiga-ri-bj-habibie>

PIDATO KEBANGSAAN Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri

.... Saudara-saudara,

Penerimaan atas pidato 1 Juni 1945 oleh keseluruhan anggota BPUPK sangat mudah dimengerti, mengapa Pancasila diterima secara aklamasi. Hal ini bukan saja karena intisari dari substansi yang dirumuskan Bung Karno memiliki akar yang kuat dalam sejarah panjang Indonesia, tetapi nilai-nilai yang

melekat di dalamnya melewati sekat-sekat subjektifitas dari sebuah peradaban dan waktu. Oleh karenanya, Pancasila dengan spirit kelahirannya pada 1 Juni 1945, bukan sebatas konsep ideologis, tetapi ia sekaligus menjadi sebuah konsep etis. Contoh pesan etis ini terlihat jelas, dalam pelantikan Menteri Agama, 2 Maret 1962, Bung Karno memberikan wejangan pada K.H. Saifuddin Zuhri yang menggantikan K.H. Wahib Wahab sebagai Menteri Agama, "Saudara adalah bukan saja tokoh dari masyarakat Agama Islam, tetapi saudara adalah pula tokoh dari bangsa Indonesia seluruhnya" Pesan etis ini menjadisangat penting guna mengakhiri dikotomi Nasionalisme dan Islam yang telah berjalan lama dalam politik Indonesia.

Demikian juga, Pancasila pernah disalahtafsirkan semata-mata sebagai suatu konsep politik dalam kerangka membangun persatuan nasional. Padahal, persatuan nasional yang dimaksudkan oleh Bung Karno adalah untuk menghadapi kapitalisme dan imperialisme sebagai penyebab dari "kerusakan yang hebat pada kemanusiaan". Kerusakan yang hebat pada kemanusiaan tersebut pernah disampaikan oleh Bung Karno sebagai manusia yang berada di abad 20. Bayangkan, kini kita yang berada di abad 21, dan terbukti, bahwa apa yang diprediksikan ternyata sangat visioner dan jauh ke depan, kini menjadi kebenaran dan fakta sejarah.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Dari sinilah kita mengerti, dalam suatu alur pikir Bung Karno yang termaktub di dalam Trisakti (1964), yang digagas melalui perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Apakah cita-cita di atas terlampaui naif untuk dapat dicapai bangsa ini? Apakah kita tidak boleh bercita-cita seperti itu? Salahkah jika sebagai bangsa memiliki cita-cita agar berdaulat secara politik? Saya merasa pasti dan dengan tegas mengatakan bahwa kita semua akan menyatakan tidak. Bukankah sekarang kita merasakan adanya kebenarannya, bahwa dalam mencukupi kebutuhan pangan, energi, dan di dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kita merasa tidak lagi berdaulat sepenuhnya? Karena itulah, hal yang lebih penting melalui peringatan Pancasila 1 Juni ini, bukanlah terletak pada acara seremoni belaka, tetapi kita letakkan pada hikmah dan manfaat bagi bangsa kedepan untuk menghadapi berbagai tantangan zaman yang kian hari semakin kompleks.

Bagi saya, peringatan kali ini mestinya merupakan jalan baru, jalan ideologis, untuk mempertegas bahwa tidak ada bangsa besar jika tidak bertumpu pada ideologi yang mengakar pada nurani rakyatnya. Kita bisa memberikan contoh negara, seperti Jepang, Jerman, Amerika, Inggris, dan RRT, menemukan kekokohnya pada fondasi ideologi yang mengakar kuat dalam budaya masyarakatnya. Sebab ideologi menjadi alasan, sekaligus penuntun arah sebuah bangsa dalam meraih kebesarannya. Ideologilah yang menjadi motif

sekaligus penjaga harapan bagi rakyatnya. Memudarnya Pancasila di mata dan hati sanubari rakyatnya sendiri, telah berakibat jelas, yakni negeri ini kehilangan orientasi, jati diri, dan harapan. Tanpa harapan negeri ini akan sulit menjadi bangsa yang besar karena harapan adalah salah satu kekuatan yang mampu memelihara daya juang sebuah bangsa. Harapan yang dibangun dari sebuah ideologi akan mempunyai kekuatan yang maha dahsyat bagi sebuah bangsa, dan harapan merupakan pelita besar dalam jati diri bangsa.

Guna menjawab harapan di atas, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Sebab Pancasila akan dinilai, ditimbang, dan menemukan jalan kebesarannya melalui jejak-jejak tapak perjuangan. Perjuangan setiap pemimpin dan rakyat Indonesia sendiri. Perjuangan agar Pancasila bukan saja menjadi bintang penunjuk, tetapi menjadi kenyataan yang membumi. Tanpa itu, kita akan terus membincangkan Pancasila, tetapi tidak mampu membumikan dan melaksanakannya hingga akhirnya kita terlelap dalam pelukan Neo-kapitalisme dan Neo-imperialisme serta terbangunnya Fundamentalisme yang saat ini menjadi ancaman besar bagi bangsa dan negara kita. Demikian pula, Pancasila tidak akan pernah mencapai fase penerimaan sempurna secara sosial, politik, dan budaya oleh rakyatnya, justru ketika alur benang merah sejarah bangsa dalam perjalanan Pancasila dilupakan oleh bangsanya, dan dipisahkan dengan penggalinya sendiri. Inilah salah satu tugas sejarah yang harus segera diselesaikan.

Demikian pula halnya dengan persoalan sumber rujukan, ketika kita menyatakan Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Pertanyaan yang menohok bagi kita adalah, ketika para penyelenggara negara dan pembuat Undang-Undang harus merujuk, dokumen apakah yang bisa digunakan oleh mereka sebagai referensi tentang Pancasila? Pancasila yang bukan terus diperbincangkan, tetapi referensi Pancasila yang membumi. Pertanyaan tersebut sangat sederhana, tetapi saya berkeyakinan dalam kurun 13 tahun reformasi, menunjukkan kealpaan kita semua terhadap dokumen penting sebagai rujukan Pancasila dalam proses ketatanegaraan kita. Bukan Pancasila yang harus diperbincangkan, tetapi referensi Pancasila yang membumi.

<http://beritasore.com/2011/06/01/pidato-kebangsaan-presiden-republik-indonesia-ke-5-megawati-soekarnoputri/>

Pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 1 Juni 2011

Makna memperingati pidato bung Karno 1 Juni 1945 yang banyak dimaknai sebagai hari Kelahiran Pancasila, menurut pendapat saya ada dua, pertama, adalah sebuah refleksi kesejarahan dan kontemplasi untuk mengingat kembali gagasan cemerlang dan pemikiran besar bung Karno yang disampaikan oleh beliau pada tanggal 1 Juni 1945. Ingat, pada saat itu para founding fathers kita tengah merumuskan dasar-dasar dari Indonesia merdeka. Memang berkali-

kali bung Karno mengatakan bahwa beliau bukan pembentuk atau pencipta Pancasila, melainkan penggali Pancasila, tetapi sejarah telah menorehkan tinta emas, bahwa dijadikannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sangat terkait erat dengan peran dan pemikiran besar Bung Karno.

Yang kedua, memperingati pidato 1 Juni 1945 adalah menjadi misi kita kedepan ini melakukan aktualisasi agar pikiran-pikiran besar dan fundamental itu terus dapat diaktualisasikan guna menjawab tantangan dan persoalan yang kita hadapi di masa kini dan masa depan.

Hadirin yang saya muliakan,

Disamping kontemplasi dan aktualisasi, yang mencerminkan pidato refleksi kesejarahan pada kesempatan yang mulia ini, sekali lagi ,saya ingin menyampaikan tentang satu hal penting, yaitu sebuah pemikiran tentang perlunya revitalisasi Pancasila, sebagai dasar dan ideologi negara dan sekaligus sebagai rujukan dan inspirasi bagi upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa. Saya yakin, yang ada di ruangan ini bahkan rakyat kita di seluruh tanah air bersejambang, Pancasila harus kita revitalisasikan dan aktualisasikan.

Pertanyaannya, bagaimana cara mengaktualisasikan yang efektif sehingga rakyat kita bukan hanya menghayati tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila?

....Sekali lagi saudara-saudara,ini sangat fundamental, yaitu dasar dari Indonesia merdeka, dasar dari negara kita adalah ideologi Pancasila. Saudara-saudara, akhir-akhir ini saya menangkap kegelisahan dan kecemasan banyak kalangan, melihat fenomena dan realitas kehidupan masyarakat kita termasuk alam pikiran yang melandasinya. Apa yang terjadi pada tingkat publik kita ada yang cemas jangan-jangan dalam era reformasi demokratisasi dan globalisasi ini sebagian kalangan tertarik dan tergoda untuk menganut ideologi lain, selain Pancasila. Ada juga yang cemas dan mengkhawatirkan jangan-jangan ada kalangan yang kembali ingin menghidupkan pikiran untuk mendirikan negara berdasarkan agama.

Terhadap godaan, apalagi gerakan nyata dari sebagian kalangan yang memaksakan dasar negara selain Pancasila, baik dasar agama ataupun ideologi lain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya harus mengatakan dengan tegas bahwa, niat dan gerakan politik itu bertentangan dengan semangat dan pilihan kita untuk mendirikan negara berdasarkan Pancasila. Gerakan dan paksaan semacam itu tidak ada tempat di bumi Indonesia. Jika gerakan itu melanggar hukum tentulah tidak boleh kita biarkan, tetapi satu hal, cara-cara menghadapi dan menangani gerakan semacam itu haruslah tetap bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan aturan hukum atau rule of law. Tidak boleh main tuding dan main tuduh karena akan memancing aksi adu domba yang akhirnya menimbulkan perpecahan bangsa.

Disamping itu, negara tidak dapat dan tidak seharusnya mengontrol pandangan dan pendapat orang seorang. "We cannot and we should not control the mind of the people", kecuali apabila pemikiran itu dimanifestasikan dalam tindakan nyata yang bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang dan aturan hukum lain, negara harus mencegah dan menindaknya.

Kuncinya saudara-saudara, negara mesti bertindak tegas dan tepat, tetapi tidak menimbulkan iklim ketakutan serta tetap dalam cara-cara yang demokratis dan berlandaskan kepada rule of law. Negara harus membimbing dan mendidik warganya untuk tidak menyimpang dari konstitusi dan perangkat perundang-undangan lainnya....

....Akhirnya, saya telah menyampaikan dua substansi utama dalam pidato ini, yang pertama tadi adalah refleksi dan kontempelasi pikiran-pikiran besar Bung Karno, kemudian yang kedua adanya keperluan bagi kita untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui cara-cara yang efektif dan perlu kita garis bawahi melalui edukasi, sosialisasi, dan keteladanan.

Dan pada kesempatan yang baik ini hadirin yang saya muliakan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Pancasila bukanlah doktrin yang dogmatis, tetapi sebuah living ideology, sebuah working ideology. Sebagai ideology yang hidup dan terbuka, Pancasila akan mampu melintasi dimensi ruang dan waktu.

<http://setkab.go.id/berita-1927-pidato-presiden-ri-1-juni-2011.html>

Selain pidato dari 3 orang Presiden sebagaimana tersebut di atas coba Anda telusuri dari berbagai sumber tentang pidato presiden Republik Indonesia yang lainnya yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan Pancasila dalam rangka membina karakter bangsa Indonesia.



Berdasarkan pidato di atas, Anda diminta untuk mengemukakan poin utama isi pidato ketiga presiden tersebut yang terkait dengan pembinaan kesadaran masyarakat dan aparatur dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bernegara. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok kemudian merumuskan kesimpulan hasil diskusi tersebut untuk diserahkan kepada dosen

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pendidikan Pancasila untuk Masa Depan

Menurut penjelasan pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi:

1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila
2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia
3. Pancasila sebagai dasar negara

4. Pancasila sebagai ideologi negara
5. Pancasila sebagai sistem filsafat
6. Pancasila sebagai sistem etika
7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.

Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (*student centered learning*), untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik sebagai etika, filsafat negara, maupun ideologi bangsa secara *scientific*. Dengan harapan, nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi *guiding principles* atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan/program studi masing-masing. Implikasi dari pendidikan Pancasila tersebut adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang.



Berdasarkan penjelasan di atas, Anda dipersilakan untuk mengemukakan hal yang paling pokok untuk dipelajari dari pendidikan Pancasila guna menghadapi masa depan.

Kemudian Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok dan membuat kesimpulannya secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen.

Apakah Anda mempunyai cita-cita yang harus dicapai di masa yang akan datang? Hal tersebut menjadi sesuatu yang lumrah karena manusia selalu menginginkan suatu hal yang dikemudian hari akan mempermudah dan menjadi batu pijakan agar kehidupannya menjadi bahagia, damai, dan sejahtera.

Apakah Anda tahu warga negara seperti apa yang hendak dibentuk dari sistem pendidikan Indonesia saat ini? Anda pasti sedikit banyak mengetahui tentang hal tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2003, pasal 3 menegaskan bahwa: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Harapan tersebut memang tidak mudah untuk diwujudkan. Akan tetapi, pendidikan dianggap merupakan alternatif terbaik dalam melakukan rekayasa sosial secara damai. Pendidikan adalah alternatif yang bersifat preventif untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, penekanannya dengan memberikan kontribusi dalam pendalaman penghayatan dan penerapan nilai-nilai Pancasila kepada generasi baru bangsa. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah menggunakan atau mengalokasikan 20% dana APBN yang sebagian berasal dari pajak untuk membiayai pendidikan nasional.

Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Lebih-lebih, para mahasiswa yang *notabene* merupakan calon-calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa harus memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila karena akan menentukan eksistensi bangsa ke depan. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan/program studi, sebab nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan/program studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang.

Contoh urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi, misalnya yang berkaitan dengan tugas menyusun/membentuk peraturan perundang-undangan. Orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut, harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan dan pola pengamalan yang lebih baik daripada warga negara yang lain karena merekalah yang akan menentukan meresap atau tidaknya nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun/dibentuknya. Contoh lainnya, lulusan/output dari program studi energi di kemudian hari akan menentukan kebijakan tentang eksplorasi, eksploitasi, industrialisasi, dan distribusi energi dijalankan. Begitu pula dengan lulusan/output dari program studi perpajakan yang akan menjadi pegawai pajak maupun bekerja di bidang perpajakan, mahasiswa lulusan prodi perpajakan dituntut memiliki kejujuran dan komitmen sehingga dapat

memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tempat bekerja secara baik dan benar.

Demikian pula halnya bahwa keberadaan pendidikan Pancasila merupakan suatu yang esensial bagi program studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bahkan keharusan Pancasila disebarluaskan secara masif, antara lain melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dalam hal ini, Riyanto (2009: 4) menyatakan bahwa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya.

Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat penting, tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang, baik yang akan berprofesi sebagai pengusaha/*entrepreneur*, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat memiliki peran amat menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan.



Berdasarkan uraian di atas, apa yang dapat Anda simpulkan tentang urgensi dan manfaat pendidikan Pancasila untuk masa depan bangsa? Setelah Anda menjawab pertanyaan di atas, Anda diminta mendiskusikannya dengan teman sekelompok kemudian kesimpulan hasil diskusi tersebut diserahkan kepada dosen.

F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pendidikan Pancasila

1. Pengertian Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan

proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan *knowledge*, *attitude*, dan *skill* mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (*guiding principle*) sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).

2. Pentingnya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Urgensi pendidikan Pancasila, yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (*leitmotive*) dan bintang penunjuk jalan (*leitstar*) bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

G. Tugas Belajar Lanjut: Mari Belajar Pancasila

Untuk memahami Pancasila secara utuh dan mengetahui landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila, Anda diharapkan dapat mencari informasi dari berbagai sumber tentang:

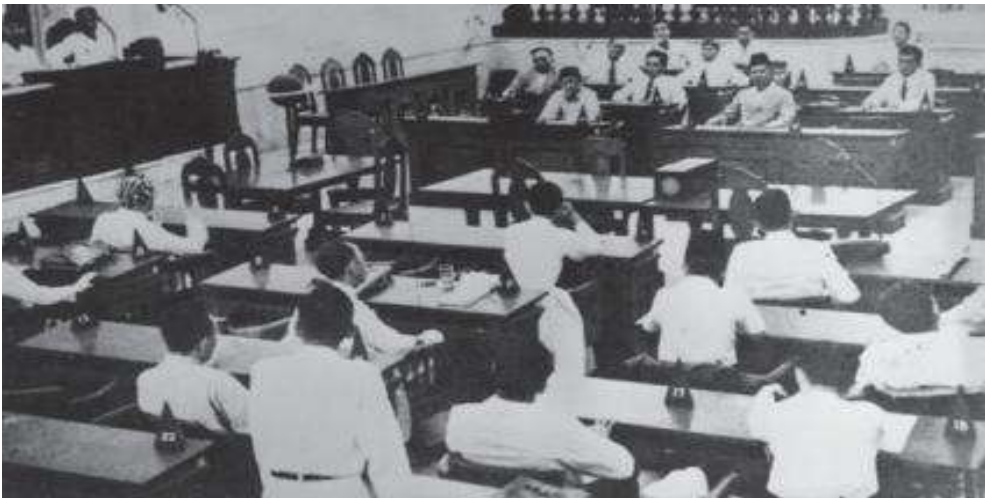
1. Ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya,
2. fenomena sosial yang menunjukkan urgensi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

Tugas selanjutnya, yaitu Anda melakukan survei terbatas kepada mahasiswa tentang tingkat pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan mahasiswa dan tentang persepsi mahasiswa

mengenai tingkat kesadaran nilai-nilai Pancasila para elit politik, pengusaha, dan warga negara, khususnya generasi muda dewasa ini! Hasil survei tersebut kemudian diserahkan kepada dosen dan didiskusikan di kelas Anda.

BAB II

BAGAIMANA PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA?



Gambar 2.0 Suasana sidang BPUPKI dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara.
Sumber: id.wikipedia.org

Pada bab ini, Anda akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI, masih mengalami tantangan berupa “amnesia sejarah” (istilah yang dipergunakan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011).

Dalam Bab II ini, Anda akan diajak untuk menelusuri tentang sejarah perumusan Pancasila. Penelusuran ini penting agar Anda mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah agar Anda dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru.

Perlu Anda ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka.

Tahukah Anda, bahwa pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P-4 yang sarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Bagaimana cara menghindari kesalahpahaman atau sesat pikir yang menghinggapi sebagian generasi muda dewasa ini? Untuk itu, Anda sebagai mahasiswa perlu mempelajari kembali sejarah perumusan Pancasila yang dilaksanakan sebelum masa kemerdekaan. Selain itu, untuk memperluas wawasan Anda tentang pentingnya nilai dasar dalam suatu negara, maka Anda harus melakukan aktivitas sebagai berikut.

Setelah Anda melaksanakan penelusuran konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, kemudian Anda diminta mencari dan menemukan alasan mengapa bangsa Indonesia memerlukan Pancasila. Selanjutnya, Anda perlu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, Anda juga perlu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dengan pendekatan historis sekaligus mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pada akhir kajian historis ini, Anda perlu merangkum makna dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.



Anda dipersilakan untuk:

- 1. Mencari nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional negara-negara selain negara Republik Indonesia,*
- 2. Mencari model-model pewarisan nilai-nilai dasar di negara bersangkutan,*
- 3. Membandingkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh negara-negara tersebut dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia,*
- 4. Mengkritisi nilai-nilai dasar dari negara-negara selain Indonesia tersebut dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia sendiri.*

Kemudian, diskusikan dengan kelompok Anda dan dibuat laporan secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen secara tertulis.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Anda dapat menguasai kompetensi sebagai berikut:

1. berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial, dan alam; serta
3. memahami, menganalisis, mempresentasikan dinamika Pancasila secara historis, dan merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia

1. Periode Pengusulan Pancasila

Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah, Sartono Kartodirdjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mochtar Pabottinggi dalam artikelnya yang berjudul *Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik*, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan *Perhimpunan Indonesia* yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. *Perhimpunan Indonesia* menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian, disusul lahirnya *Soempah Pemoeda* 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda, tidak sedikitpun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Oleh karena itu, Pabottinggi menegaskan bahwa diktum John Stuart Mill atas Cass R. Sunstein tentang keniscayaan mengumpulkan *the best minds* atau *the best character* yang dimiliki suatu bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi, sudah terpenuhi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian

mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. (Pabottinggi, 2006: 158-159). Selanjutnya, sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini.

Masih ingatkah Anda sejarah perumusan Pancasila yang telah dipelajari sejak di SMA/SMK/MA? Untuk membantu mengingatkan Anda, berikut ini dikemukakan beberapa peristiwa penting tentang perumusan Pancasila. Perlu Anda ketahui bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh dr. Rajiman Wedyodiningrat yang didampingi oleh dua orang Ketua Muda (Wakil Ketua), yaitu Raden Panji Suroso dan *Ichibangase* (orang Jepang). BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, panglima tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara.



Gambar II.1: Penyampaian usulan tentang dasar negara oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI. (Sumber: rpp-diahpermana.blogspot.com)

Siapa sajakah tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI tersebut? Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muh Yamin, Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo,

Mr. Soepomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi berikut, termasuk kita.



Anda dipersilakan untuk menelusuri isi pidato tokoh-tokoh seperti: Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, dan Soepomo tersebut dalam sidang BPUPKI pertama. Diskusikan dengan kelompok Anda dan disusun dalam bentuk laporan secara tertulis

Sebagaimana Anda ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Ir. Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir. Soekarno menyampaikan lima butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut:

- a. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,
- b. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan,
- c. Mufakat atau Demokrasi,
- d. Kesejahteraan Sosial,
- e. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama *Pancasila*. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu *Trisila* yang terdiri atas (1) *Sosio-Nasionalisme*, (2) *Sosio-Demokrasi*, dan (3) *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu *Ekasila* yang berisi asas *Gotong-Royong*.

Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul *Lahirnya Pancasila* (1947). Perlu Anda ketahui bahwa dari judul buku tersebut menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Di satu pihak, ketika Soekarno masih berkuasa, terjadi semacam pengultusan terhadap Soekarno sehingga 1 Juni selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Di lain pihak, ketika pemerintahan Soekarno jatuh, muncul upaya-upaya “de-Soekarnoisasi” oleh penguasa Orde Baru sehingga dikesankan seolah-olah Soekarno tidak besar jasanya dalam penggalan dan perumusan Pancasila.

Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara (*Philosophische grondslag*) yang diusulkan oleh Soekarno, dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang (Ki Bagus Hadi Kusumo, K.H. Wahid Hasyim, Muh. Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Moh. Hatta) yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian, sidang pertama BPUPKI (29 Mei - 1 Juni 1945) ini berhenti untuk sementara.

2. Periode Perumusan Pancasila

Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 - 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut.

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang dijuluki “Piagam Jakarta” ini di kemudian hari dijadikan “Pembukaan” UUD 1945, dengan sejumlah perubahan di sana-sini.

Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap Sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, Pemerintah Pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi:

- (1) pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI),
- (2) panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945, dan

(3) direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan.

Esok paginya, 8 Agustus 1945, Sukarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi (Penguasa Militer Jepang di Kawasan Asia Tenggara) yang berkedudukan di Saigon, Vietnam (sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh). Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat Pemerintah Jepang 7 Agustus 1945 tadi. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yaitu: Soekarno, Moh. Hatta, Radjiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Purboyo, Suryohamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Kadir, Yap Cwan Bing, Muh. Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latuharhary, I Gde Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hasyim, T. Moh. Hasan (Sartono Kartodirdjo, dkk., 1975: 16--17).

Jatuhnya Bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk, Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang meluluhlantakkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin melemah, memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu, menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu, termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekadar penjaga kekosongan kekuasaan.

Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia.

3. Periode Pengesahan Pancasila

Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan ternyata pada 14

Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan M. Hatta ke Rengas Dengklok (dalam istilah pemuda pada waktu itu “mengamankan”), tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 WIB menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini no. 71 Jakarta (Kartodirdjo, dkk., 1975: 26).

Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Moh. Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwitunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta, akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah (Lihat Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi, William Frederick dan Soeri Soeroto, 2002: hal. 308 – 311).

Sampai detik ini, teks Proklamasi yang dikenal luas adalah sebagai berikut:

Proklamasi

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

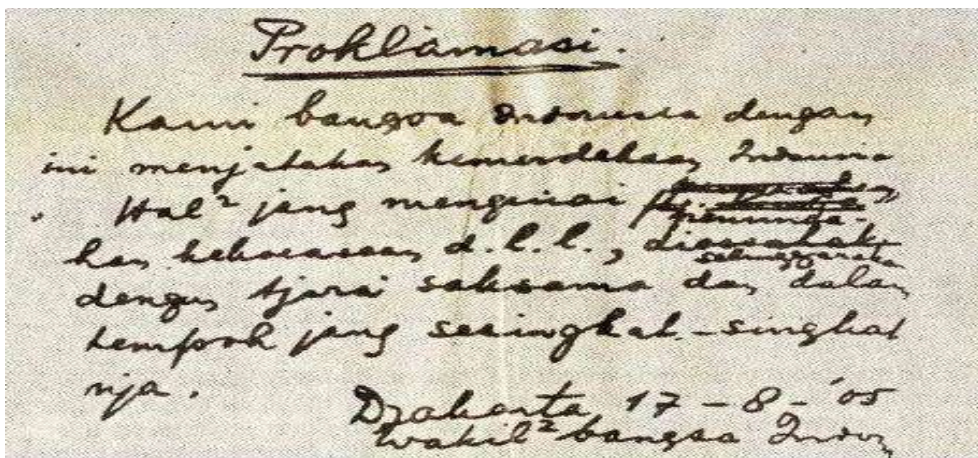
Jakarta, 17 Agustus 2605

Atas Nama Bangsa Indonesia

Soekarno-Hatta



Gambar II.2: Pembacaan teks Proklamasi 17 Agustus 1945.
(Foto: Blogspot.com)



Gambar II.3 Draft teks naskah proklamasi yang merupakan tulisan tangan Soekarno.
(Foto: Blogspot.com)

Perlu Anda ketahui bahwa sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah

Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Koesoema Soemantri, dan Ahmad Subarjo.

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD '45) yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Naskah Pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang Tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta).
3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimejo.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia Bagian Timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata “Ketuhanan”, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah “Yang Maha Esa”.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib, ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi

Pancasila. Salah satu bentuk ancaman itu muncul dari pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia.

Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan berbagai cara. Tindakan Belanda itu dilakukan dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, maka Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Perubahan bentuk negara dari Negara Serikat ke Negara Kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Permasalahannya ialah ketika Indonesia kembali Negara Kesatuan, ternyata tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menimbulkan persoalan kehidupan bernegara dikemudian hari.



Anda dipersilakan untuk menelusuri isi mukaddimah Konstitusi RIS dan Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian, Anda diminta untuk membandingkan rumusan Pancasila dalam dua konstitusi tersebut dengan rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan kelompok Anda, dan disusun dalam bentuk laporan tertulis

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dilaksanakanlah Pemilu yang pertama pada 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante (yang akan mengemban tugas membuat Konstitusi/Undang-Undang Dasar) dan DPR (yang akan berperan sebagai parlemen). Pada 1956, Badan Konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat UUD yang definitif sebagai pengganti UUDS 1950. Sebenarnya telah banyak pasal-pasal yang dirumuskan, akan tetapi sidang menjadi berlarut-larut ketika pembicaraan memasuki kawasan dasar negara. Sebagian anggota menghendaki Islam sebagai dasar negara, sementara sebagian yang lain tetap menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Kebuntuan ini diselesaikan lewat voting, tetapi selalu gagal mencapai putusan karena selalu tidak memenuhi syarat voting yang ditetapkan. Akibatnya, banyak anggota Konstituante yang menyatakan tidak akan lagi menghadiri sidang. Keadaan ini memprihatinkan Soekarno sebagai Kepala Negara.

Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah “darurat” dengan mengeluarkan dekrit.



Anda dipersilakan untuk menelusuri apa isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan faktor apa yang melatarbelakangi keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut, serta mencermati relevansinya dengan masa depan bangsa Indonesia. Diskusikan dalam kelompok Anda dan susun laporan secara tertulis.

Setelah Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959, seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena pemberlakuan kembali UUD 1945 menuntut konsekuensi sebagai berikut: *Pertama*, penulisan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. *Kedua*, penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat Batang Tubuh UUD '45. Dan, *ketiga*, segera dibentuk MPRS dan DPAS. Pada kenyataannya, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan sila-sila Pancasila yang tidak seragam.

Sesudah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP No. III/MPRS/1960. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida, artinya berada pada posisi tertinggi yang membawahi ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA yang pada waktu itu diangkat Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya sehingga mengakibatkan sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik dengan mendekati maupun menjauhi presiden. Pertentangan antarpihak begitu keras, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat (AD) sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira AD yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI).



Anda dipersilakan untuk menelusuri proses terjadinya peristiwa G30S PKI tersebut agar mengetahui dimana letak penyimpangan peristiwa tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan peristiwa G30S PKI tersebut dalam kelompok dan melaporkannya secara tertulis.



Gambar II.4: Demonstrasi Tritura oleh mahasiswa pada 1966, salah satunya menuntut penurunan harga bahan pokok (sumber: s-kisah.blogspot.com)

Peristiwa G30S PKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasaan itu diawali dengan terbitnya Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang di kemudian hari terkenal dengan nama **Supersemar** (Surat Perintah Sebelas Maret). Surat itu intinya berisi perintah presiden kepada Soeharto agar *“mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan”*. Supersemar ini dibuat di Istana Bogor dan dijemput oleh Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf.

Supersemar ini pun juga menjadi kontroversial di belakang hari. Supersemar yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto itu kemudian dikuatkan dengan TAP No. IX/MPRS/1966 pada 21 Juni 1966. Dengan demikian, status supersemar menjadi berubah: Mula-mula hanya sebuah surat perintah presiden kemudian menjadi ketetapan MPRS. Jadi, yang memerintah Soeharto bukan lagi Presiden Soekarno, melainkan MPRS. Hal ini merupakan fakta sejarah terjadinya peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Bulan berikutnya, tepatnya 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan TAP No. XVIII/ MPRS/1966 yang isinya mencabut TAP No. III/MPRS/1960 tentang *Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup*. Konsekuensinya, sejak saat itu Soekarno bukan lagi berstatus sebagai presiden seumur hidup.



Anda dipersilakan untuk menelusuri proses peralihan kekuasaan dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto dari berbagai sumber dan mendiskusikan dengan teman-teman sekelompok Anda, kemudian melaporkannya secara tertulis.

Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Inpres No. 12/1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (ingatlah, dulu setelah Dekrit 5 Juli 1959 penulisan Pancasila beraneka ragam). Ketika MPR mengadakan Sidang Umum 1978 Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR tentang Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P-4). Usul ini diterima dan dijadikan TAP No. II/MPR/1978 tentang P-4 (Ekaprasetia Pancakarsa). Dalam TAP itu diperintahkan supaya Pemerintah dan DPR menyebarluaskan P-4. Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan Inpres No. 10/1978 yang berisi Penataran bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia. Kemudian, dikeluarkan juga Keppres No. 10/1979 tentang pembentukan BP-7 dari tingkat Pusat hingga Dati II. Pancasila juga dijadikan satu-satunya asas bagi orsospol (tercantum dalam UU No. 3/1985 ttg. Parpol dan Golkar) dan bagi ormas (tercantum dalam UU No. 8/1985 ttg. Ormas). Banyak pro dan kontra atas lahirnya kedua undang-undang itu. Namun, dengan kekuasaan rezim Soeharto yang makin kokoh sehingga tidak ada yang berani menentang (BP7 Pusat, 1971).

B. Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia.

1. Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa mana pun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut.

Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Salah satu definisi kebudayaan adalah sebagai berikut: "suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan" (Sastrapratedja, 1991: 144). Apabila definisi kebudayaan ini ditarik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat

dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru, yakni kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu atau kelompok.

Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. (J.W.M. Bakker, 1984: 22) menyebutkan adanya beberapa saluran inkulturasi, yang meliputi: jaringan pendidikan, kontrol, dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan *self expression*. Kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil akulturasi sebagaimana yang ditengarai Eka Dharmaputera dalam bukunya *Pancasila: Identitas dan Modernitas*. Haviland menegaskan bahwa akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antarkebudayaan yang berlangsung lama. Hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi: 1) Substitusi; penggantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural yang minimal; 2) Sinkretisme; percampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru; 3) Adisi; tambahan unsur atau kompleks-kompleks baru; 4) Orijinasi; tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah; 5) Rejeksi; perubahan yang berlangsung cepat dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan kebangkitan (Haviland, 1985: 263).

Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. As'ad Ali dalam buku *Negara Pancasila; Jalan Kemashlahatan Berbangsa* mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar, seperti: peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, konstruksi tradisi dan kultur masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh tidak bisa dilepaskan dari peran peradaban Islam. Sementara konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak terlepas dari peradaban Kristen. Demikian pula halnya dengan konstruksi

budaya masyarakat Bali yang sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu (Ali, 2010: 75).



1. *Ilustrasi tentang gambar salah satu masyarakat adat melayu/minangkabau/suku lain yang dipengaruhi peradaban Islam.*
2. *ilustrasi ttg gambar salah satu masyarakat adat toraja/papua yang dipengaruhi peradaban Kristen.*

2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri, demikian pula halnya dengan ideologi bangsa (Bakry, 1994: 157). Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Di samping itu, proses akulturasi dan inkulturasi ikut memengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai variasi yang sangat beragam. Kendatipun demikian, kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa itu. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri.

3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa Indonesia

Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata (Bakry, 1994: 158). Pancasila sebagai pandangan hidup

berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa

Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan *volkgeist* (jiwa rakyat atau jiwa bangsa). Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia (Bakry, 1994: 157).

5. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur

Perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara (*political consensus*) sebagai dasar negara Indonesia (Bakry, 1994: 161). Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat.



Anda dipersilakan untuk menanya alasan dan mengkritisi tentang proses pembentukan Pancasila sebagai:

- (1). Identitas bangsa Indonesia,*
- (2). Kepribadian bangsa Indonesia,*
- (3). Pandangan hidup bangsa Indonesia,*
- (4). Jiwa bangsa Indonesia,*
- (5). Perjanjian luhur bangsa Indonesia.*

Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan anggota kelompok Anda dan melaporkannya secara tertulis.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia

1. Sumber Historis Pancasila

Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila Ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beranekaragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada

kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman.



Anda diminta untuk menggali informasi penyebaran agama pada masa zaman dahulu? Misalnya, bagaimana penyebaran agama pada zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan seterusnya? Kemudian, mendiskusikan dengan teman sekelompok Anda untuk mendapatkan informasi tentang suasana kehidupan bertoleransi antarumat beragama pada masa itu, dan menyusun laporan secara tertulis.

2. Sumber Sosiologis Pancasila

Nilai-nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan) secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat, bahwa kebiasaan bergotongroyong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerjasama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila Keadilan Sosial.



Gambar II.5: Toleransi Umat Beragama
Sumber: acehterkini.com

Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan.

3. Sumber Politik Pancasila

Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari *local wisdom*, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah.



Anda dipersilakan untuk menggali informasi dan mengkritisi cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda atau dalam organisasi yang ada di sekitar Anda? Apa bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Apa bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Diskusikan dengan teman sekelompok Anda dan disusun dalam laporan tertulis.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila dalam Sejarah Bangsa

Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan presiden Soekarno, terutama pada 1960-an NASAKOM lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P-4 sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikkan Pancasila dengan P-4. Pada masa pemerintahan era

reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan.



Anda dipersilakan untuk menemukan argumen tentang dinamika dan perubahan Pancasila sejak pra proklamasi, masa awal kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, kemudian mendiskusikannya dengan teman sekelompok Anda dan menyusun laporan secara tertulis.

2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP No.III/MPRS/1960 Tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima (5) tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali". Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu lima tahun.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia untuk Masa Depan

1. Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa

Pancasila pada hakikatnya merupakan *Philosophische Grondslag dan Weltanschauung*. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*) karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut: alasan filosofis berdirinya suatu negara; setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (*Weltanschauung*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat.

2. Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa

Hasil Survei yang dilakukan KOMPAS yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila, lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila (Ali, 2009: 2).

Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Anda dipersilakan untuk mendeskripsikan dan mengkritisi faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Kemudian, mendiskusikannya dengan teman sekelompok dan melaporkannya secara tertulis.



Gambar II.6: Kerusuhan Jakarta 1998, Dimana nilai-nilai Pancasila?

Sumber: faminfo.blogspot.com

F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia

Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia (*The Founding fathers*).
2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat.
3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan.

Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut:

1. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.
3. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia.
4. Kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia.

G. Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar tentang Pentingnya Kajian Pancasila Melalui Pendekatan Sejarah.

Untuk memahami dinamika proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, Anda dapat mencari informasi dari berbagai sumber tentang:

1. Latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar negara.
2. Alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

3. Kemukakan pendapat dan penilaian Anda tentang perbedaan pandangan tersebut.
4. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi perbedaan tersebut?

Tugas selanjutnya yaitu, Anda dapat melakukan survei terbatas untuk menjajagi pengetahuan mahasiswa tentang sejarah terbentuknya teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

BAB III

BAGAIMANA PANCASILA MENJADI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA?



Gambar III.0 Ibarat sebuah konstruksi bangunan, Pancasila merupakan fondasi yang membuat kokoh. (Sumber: www.bell-architects.com)

Pada bab ini, Anda diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan Negara yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sebagaimana Anda ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya Anda sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi, berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan

Pancasila. Agar partisipasi Anda di masa yang akan datang efektif, maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi dasar sebagai berikut:

Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; sadar dan berkomitmen melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan hukum di bawahnya, sebagai wujud kecintaannya pada tanah air; mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif; bertanggungjawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat; berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum; mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara baik yang bersifat idealis maupun praktis-pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara; mengkritisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, baik yang bersifat idealis maupun praktis-pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, seseorang dengan ketaatan membayar pajak sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, maka ia telah berkontribusi secara konkrit dalam pengamalan sila-sila Pancasila.

A. Menelusuri Konsep Negara, Tujuan Negara dan Urgensi Dasar Negara

1. Menelusuri Konsep Negara



Anda masing-masing dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang:

- 1. Makna dan hakikat dasar negara.*
- 2. Tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara.*
- 3. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah.*

Kemudian didiskusikan kepada teman sekelompok dan membuat ringkasannya untuk diserahkan kepada dosen!

Apakah Anda pernah mendengar istilah *Homo Faber* (makhluk yang menggunakan teknologi), *Homo Socius* (makhluk bermasyarakat), *Homo Economicus* (makhluk ekonomi), dan istilah *Zoon Politicon* atau makhluk politik? Istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia. Selain itu, predikat-predikat tersebut mengisyaratkan bahwa interaksi antarmanusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan, atau kepentingan (*interest*) masing-masing. Akibatnya, pergaulan manusia dapat bersamaan (sejalan), berbeda, atau bertentangan satu sama lain, bahkan meminjam istilah Thomas Hobbes manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain (*homo homini lupus*). Oleh karena itu, agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia membutuhkan negara. Apakah negara itu? Menurut Diponolo (1975: 23-25) negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Lebih lanjut, Diponolo mengemukakan beberapa definisi negara yang dalam hal ini penulis paparkan secara skematis, sebagaimana **Gambar III.1**

Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 (tiga) unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara yaitu:

- a. Unsur tempat, atau daerah, wilayah atau *territoir*
- b. Unsur manusia, atau umat (baca: masyarakat), rakyat atau bangsa
- c. Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan.

Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif, dalam hal ini pengakuan dari negara lain.

Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a. Negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara
- b. Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara.



Gambar III.1: Definisi Negara oleh para ahli

Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan/cara mewujudkan tujuan negara tersebut, akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara.

Agar pemahaman Anda lebih komprehensif, di bawah ini dikemukakan contoh pengaruh dasar negara terhadap bentuk negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia, antara lain: Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945). Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai negara serikat. Lebih

lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik bukan *despot* (tuan rumah) atau absolutisme (pemerintahan yang sewenang-wenang). Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, ditegaskan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmordjo (2009: 25) bahwa : “konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara”.

Apabila dipelajari secara seksama uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat satu prinsip penting yang dianut, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh CarlSchmidt, yaitu *demokratischen Rechtsstaat* (Wahjono dalam Oesman dan Alfian, 1993: 100).



Anda dipersilakan mencari informasi dari berbagai sumber tentang makna atau hakikat bentuk negara dan sistem pemerintahan, kemudian analisis dan simpulkan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang ideal bagi bangsa Indonesia.

Setelah Anda menjawab pertanyaan di atas, anda diminta mendiskusikannya dengan teman sekelompok kemudian membuat kesimpulan hasil diskusinya dan diserahkan kepada dosen.

2. Menelusuri Konsep Tujuan Negara

Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu pun hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula, suatu bangsa mendirikan negara, pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Secara teoretik, ada beberapa tujuan negara diantaranya dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut.



Gambar III.2: Intisari 5 teori tujuan negara

Skema di atas menggambarkan intisari 5 teori tujuan negara, yang disarikan dari Diponolo (1975: 112-156), kemudian berikut ini disajikan uraian tujuan negara dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel III.1 Teori Kekuatan dan Kekuasaan sebagai Tujuan Negara

No	Nama Tokoh	Pandangan	Komentar Anda
1.	Shan Yang (Pujangga Filsuf Cina, 4-3 SM)	Satu-satunya tujuan bagi raja ialah membuat negara kuat dan berkuasa. Hal ini hanya mungkin dicapai dengan memiliki tentara yang besar dan kuat.	
2.	Nicollo Machiavelli (1469-1527)	Raja harus tahu bahwa ia senantiasa dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengintai kelemahan dan menunggu kesempatan menerkam atau merebut kedudukannya, maka raja haruslah menyusun dan menambah kekuatan terus menerus.	
3.	Fridrieich Nietzsche (1844-1900)	Tujuan hidup umat manusia ialah penjelmaan tokoh pilihan dari mereka yang paling sempurna atau maha manusia (<i>ubermensch</i>). Hidup itu adalah serba perkembangan, serba memenangkan dan menaklukkan, serba meningkat terus ke atas.	
4.	Anda dipersilakan untuk mencari tokoh lain yang mengemukakan teori tujuan negara dalam konteks kekuatan dan kekuasaan		

Tabel III.2 Teori Kepastian Hidup, Keamanan, dan Ketertiban sebagai Tujuan Negara

No	Nama Tokoh	Pandangan	Komentar Anda
1.	Dante Alleghieri (Filsuf Italia, abad 13-14M)	Manusia hanya dapat menjalankan kewajiban dengan baik serta mencapai tujuan yang tinggi di dalam keadaan damai. Oleh karena itu, perdamaian menjadi kepentingan setiap orang. Raja haruslah seorang yang paling baik kemauannya dan paling besar kemampuannya karena ia harus dapat mewujudkan keadilan di antara umat manusia.	
2.	Thomas Hobbes (1588-1679)	Perdamaian adalah unsur yang menjadi hakikat tujuan negara. Demi keamanan dan ketertiban, maka manusia melepaskan dan melebur kemerdekaannya ke dalam kemerdekaan umum, yaitu negara.	
3.	Theodore Roosevelt (Presiden Amerika Serikat)	<i>In case of a choise between order and justice I will be on the side of order</i> (apabila saya harus memilih antara ketertiban dan keadilan, maka saya akan memilih ketertiban).	
4.	Anda dipersilakan untuk mencari tokoh lain yang mengemukakan teori tujuan negara dalam konteks kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban.		

Tabel III.3 Kemerdekaan sebagai Tujuan Negara

No	Nama Tokoh	Pandangan	Komentar Anda
1.	Herbert Spencer (1820-1903)	Negara itu tak lain adalah alat bagi manusia untuk memperoleh lebih banyak kemerdekaan daripada yang dimilikinya sebelum adanya negara. Jadi, negara itu adalah alat untuk menegakkan kemerdekaan.	
2.	Immanuel Kant (1724-1804)	Kemerdekaan itu menjadi tujuan negara. Terjadinya negara itu adalah untuk membangun dan menyelenggarakan hukum, sedangkan hukum adalah untuk menjamin kemerdekaan manusia. Hukum dan kemerdekaan tidak dapat dipisahkan.	
3.	Hegel (Refleksi absolut, 1770-1831)	Negara adalah suatu kenyataan yang sempurna, yang merupakan keutuhan daripada perwujudan kemerdekaan manusia. Hanya dengan negara dan dalam negara manusia dapat benar-benar memperoleh kepribadian dan kemerdekaannya.	
4.	Anda dipersilakan untuk mencari tokoh lain yang mengemukakan teori tujuan negara dalam konteks kemerdekaan		

Tabel III.4 Teori Keadilan sebagai Tujuan Negara

No	Nama Tokoh	Pandangan	Komentar Anda
1.	Aristoteles (384-322 SM)	Negara seharusnya menjamin kebaikan hidup para warga negaranya. Kebaikan hidup inilah tujuan luhur negara. Hal ini hanya dapat dicapai dengan keadilan yang harus menjadi dasarnya setiap pemerintahan. Keadilan ini harus dinyatakan dengan undang-undang.	
2.	Thomas Aquinas (1225-1274)	Kekuasaan dan hukum negara itu hanya berlaku selama ia mewujudkan keadilan, untuk kebaikan bersama umat manusia, seperti yang dikehendaki Tuhan.	
3.	Immanuel Kant (1724-1804)	Terjadinya negara itu dari kenyataan bahwa manusia demi kepentingan sendiri telah membatasi dirinya dalam suatu kontrak sosial yang menumbuhkan hukum. Hukum adalah hasil daripada akal manusia untuk mempertemukan dan menyelenggarakan kepentingan bersama. Hukum keadilan semesta alam menghendaki agar manusia berbuat terhadap orang lain seperti yang ia harap orang lain berbuat terhadap dirinya.	
4.	Anda dipersilakan untuk mencari tokoh lain yang mengemukakan teori tujuan negara dalam konteks keadilan.		

Tabel III.5 Teori Kesejahteraan dan Kebahagiaan sebagai Tujuan Negara

No	Nama Tokoh	Pandangan	Komentar Anda
1.	Mohammad Hatta (1902-1980)	"Bohonglah segala politik jika tidak menuju kepada kemakmuran rakyat".	
2.	Immanuel Kant (1724-1804)	Tujuan politik ialah mengatur agar setiap orang dapat puas dengan keadaannya. Hal ini menyangkut terpenuhinya kebutuhan yang bersifat bendawi dan terwujudnya kebahagiaan yang bersifat kerohanian.	
3.	Anda dipersilakan untuk mencari tokoh lain yang mengemukakan teori tujuan negara dalam konteks kesejahteraan.		

Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan, tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut kalau disederhanakan dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yaitu:

a. Aliran liberal individualis

Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas.

b. Aliran kolektivis atau sosialis

Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin/totaliter.

Pada umumnya, tujuan suatu negara termaktub dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara tersebut. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah tujuan negara Amerika Serikat, Indonesia dan India.

Tabel III.6 Perbandingan tujuan Negara: Amerika Serikat, Indonesia, dan India

Amerika Serikat	Indonesia	India
“... In order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the common defence, promote the welfare and secure the blessings of liberty to ourselves and to our posterity, ...”	Cita-cita negara (alinea ke-2): 1) merdeka, 2) bersatu, 3) berdaulat, 4) adil, dan 5) makmur Tujuan negara (alinea ke-4): 1) melindungi segenap bangsa, 2) melindungi segenap tumpah darah, 3) memajukan kesejahteraan umum, 4) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 5) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia	“... to constitute India into a sovereign democratic state and to secure to all its citizens: justice, social, economic and political; liberty of thought, expression, belief, faith and worship; equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and unity of the nation,”

Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2 (dua), yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu:

- Pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*)
- Pendekatan keamanan (*security approach*)



Anda dipersilakan untuk berkontemplasi, merenungkan apakah tujuan hidup Anda sejalan atau merupakan subordinasi dari tujuan negara (*national interest*) sebagaimana terefleksi dalam dasar negara dan cita-cita nasional. Anda dipersilakan untuk melaporkan secara tertulis hasil perenungan Anda dalam lembar kertas dan diserahkan kepada dosen.

3. Menelusuri Konsep dan Urgensi Dasar Negara

Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah *grundnorm* (norma dasar), *rechtsidee* (cita hukum), *staatsidee* (cita negara), *philosophische grondslag* (dasar filsafat negara). Banyaknya istilah Dasar Negara dalam kosa kata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara.

Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara, mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut *a basic norm* atau *Grundnorm* (Kelsen, 1970: 8). Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah (Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993: 74). Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Hans Nawiasky menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut *staatsfundamentalnorm*, yang untuk Indonesia berupa Pancasila (Riyanto dalam Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2013: 93-94). Dalam pandangan yang lain, pengembangan teori dasar negara dapat diambil dari pidato Mr. Soepomo. Dalam penjelasannya, kata “cita negara” merupakan terjemahan dari kata “*Staatsidee*” yang terdapat dalam kepustakaan Jerman dan Belanda. Kata asing itu menjadi terkenal setelah beliau menyampaikan pidatonya dalam rapat pleno Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 31 Mei 1945. Sebagai catatan, Soepomo menerjemahkan “*Staatsidee*” dengan “dasar pengertian negara” atau “aliran pikiran negara”. Memang, dalam bahasa asing sendiri kata itu tidak mudah memperoleh uraian pengertiannya. J. Oppenheim (1849-1924), ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Groningen Belanda, mengemukakan dalam

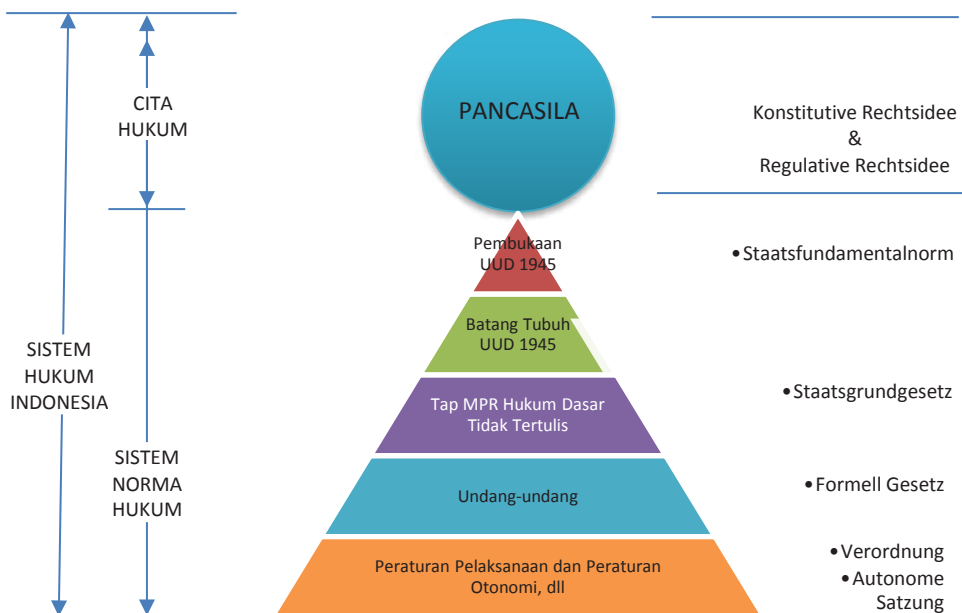
pidato pengukuhan yang kedua (1893) sebagai guru besar mengemukakan bahwa “*staatsidee*” dapat dilukiskan sebagai “hakikat yang paling dalam dari negara” (*de staats diapse wezen*), sebagai “kekuatan yang membentuk negara-negara” (*de staten vermonde kracht*) (Attamimi dalam Soeprapto, Bahar dan Arianto, 1995: 121).

Dalam karyanya yang berjudul *Nomoi (The Law)*, Plato (Yusuf, 2009) berpendapat bahwa “suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal”. Senada dengan Plato, Aristoteles memberikan pandangannya, bahwa “suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum”. Sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat, norma hukum memiliki sifat yang berjenjang atau bertingkat. Artinya, norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan bersumber lagi pada norma hukum yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma dasar/norma yang tertinggi dalam suatu negara yang disebut dengan *grundnorm*.

Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (*rechtsidee*), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat (Yusuf, 2009). Terdapat ilustrasi yang dapat mendeskripsikan tata urutan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana Gambar III.3.

Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Gambar III.3: Teori Tata Urutan Perundangan
(Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993: 85)



Anda masing-masing diminta untuk menelusuri dari berbagai sumber mengenai fungsi konstitutif dan fungsi regulatif dari Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia, kemudian Anda diminta untuk membuat ringkasannya untuk diserahkan kepada dosen.

B. Menanya Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Dasar Negara

Setiap orang pasti bertanya-tanya termasuk Anda, benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan mulai dari analogi terlebih dahulu. Apakah Anda mempunyai kendaraan? Apa yang harus Anda lakukan jika tidak ada jalan yang dapat dilalui? Ya, Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal, meskipun kendaraan dapat berjalan tetapi dalam waktu yang singkat kendaraan Anda akan cepat rusak.



Gambar III.4: Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan
Sumber: satu-1-satu.blogspot.com

Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup bangsa) (Muzayin, 1992: 16).

Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh (Muzayin, 1992: 16).

Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan

menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Lalu, bagaimana dengan pemerintah? Sebagai penyelenggara negara, mereka seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Mereka harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain, agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Demikian pula halnya dengan petugas pajak yang bertanggung jawab mengemban amanat untuk menghimpun dana bagi keberlangsungan pembangunan, mereka harus mampu menjadi panutan bagi warga negara lain, terutama dalam hal kejujuran sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dari nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilainya hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga orang-orang yang ada dalam pemerintahan yang notabene sebagai pemangku jabatan yang berwenang merumuskan kebijakan atas nama bersama. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran ke-empat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara (Bakry, 2010).



Gambar III.5: Beberapa pegawai pajak memperlihatkan tapak tangan yang telah diberi warna dalam kegiatan pembubuhan cap tapak tangan berwarna di spanduk "*Pernyataan Komitmen Anti Gratifikasi No Korupsi*" (sumber: <http://www.pajak.go.id/content/flash-foto/pernyataan-komitmen-anti-gratifikasi-pegawai-kpp-madya-makassar-dengan-cap-tapak>)

C. Menggali Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Negara

Dalam rangka menggali pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, Anda akan dihadapkan pada berbagai sumber keterangan. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Berikut merupakan rincian dari sumber-sumber tersebut.

1. Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009--2014, 2013: 89).

Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Meskipun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 90).

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 90-91).

2. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Radjiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Soepomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, *Philosophische grondslag* bagi Indonesia merdeka. *Philosophische grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah '*Weltanschauung*' atau pandangan dunia (Bahar, Kusuma, dan Hudawaty, 1995: 63, 69, 81; dan Kusuma, 2004: 117, 121, 128, 129). Dapat diumpamakan, Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat gedung Republik Indonesia itu didirikan (Soepardo dkk, 1962: 47).

Selain pengertian yang diungkapkan oleh Soekarno, "dasar negara" dapat disebut pula "ideologi negara", seperti dikatakan oleh Mohammad Hatta:

"Pembukaan UUD, karena memuat di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara, beserta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik negeri seterusnya, dianggap sendi daripada hukum tata negara Indonesia. Undang-undang ialah pelaksanaan daripada pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhnya, adalah dasar mengatur politik negara dan perundang-undangan negara, supaya terdapat Indonesia merdeka seperti dicita-citakan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" (Hatta, 1977: 1; Lubis, 2006: 332).

Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai *Philosophische Grondslag* dari negara, ideologi negara, *staatsidee*. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara (Darmodiharjo, 1991: 19).

Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009--2014, 2013: 94). Pancasila dijadikan sebagai

dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945, yang terkenal dengan *Jakarta-charter* (Piagam Jakarta), tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945, dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Notonagoro, 1994: 24). Terkait dengan hal tersebut, Mahfud MD (2009:14) menyatakan bahwa berdasarkan penelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Lebih lanjut, Mahfud MD menyatakan bahwa ia bukan hasil karya Moh. Yamin ataupun Soekarno saja, melainkan hasil karya bersama sehingga tampil dalam bentuk, isi, dan filosofinya yang utuh seperti sekarang.



Berdasarkan penjelasan di atas, Anda dipersilakan mencari sumber-sumber historis lainnya yang menjelaskan bahwa Pancasila telah diakui sebagai dasar negara! Kemudian, diskusikan dengan teman sekelompok dan buat kesimpulan hasil diskusinya untuk diserahkan kepada dosen.

3. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara ringkas, Latif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009--2014, 2013) menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut.

Pertama, nilai-nilai ketuhanan (*religiusitas*) sebagai sumber etika dan *spiritualitas* (yang bersifat *vertical transcendental*) dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi terhadap semua agama dan keyakinan serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama.

Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial (bersifat *horizontal*) dianggap penting

sebagai fundamental etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi.

Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Dalam khazanah Indonesia, hal tersebut menyerupai perspektif “etnosimbolis” yang memadukan antara perspektif “modernis” yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan dengan perspektif “*primordialis*” dan “*perenialis*” yang melihat unsur lama dalam kebangsaan.

Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.

Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pandangan tersebut berlandaskan pada pemikiran Bierens de Haan (Soeprapto, Bahar dan Arianto, 1995: 124) yang menyatakan bahwa keadilan sosial setidaknya-tidaknnya memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita negara bagi bangsa Indonesia yang akan membentuk negara dengan struktur sosial asli Indonesia. Namun, struktur sosial modern mengikuti perkembangan dan tuntunan zaman sehingga dapatlah dimengerti apabila para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 berpendapat bahwa cita negara Indonesia (*de*

Indonesische Staatsidee) haruslah berasal dan diambil dari cita paguyuban masyarakat Indonesia sendiri.



1. Berdasarkan penjelasan tersebut, Anda diminta untuk mencari bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.
2. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok, apakah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak, kemudian rumuskan kesimpulan hasil diskusi tersebut untuk diserahkan kepada dosen.

4. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Negara

Mungkin Anda pernah mengkaji ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan di dalam Pasal 36A jo. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik (sektor pemerintah), yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik (sektor masyarakat), seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud *clean government* dan *good governance* demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan (meminjam istilah mantan Wapres Umar Wirahadikusumah).



1. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dan menelusuri bukti-bukti dalam kehidupan politik tentang perilaku politik para politisi yang telah dijiwai nilai-nilai Pancasila.
2. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dan menelusuri tentang kebijakan publik/pemerintah yang dilaksanakan yang telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sehingga kepentingan rakyat menjadi fokus utama.

Anda diminta untuk melaporkan secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945 barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggakunya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal.

Setelah dilaksanakan Dekrit Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan, perdebatan tentang dasar negara di Konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat, tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri (komunis). Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30S PKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari

garis politik Pancasila dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme-kapitalisme dalam mengelola negara.

Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden. Namun, sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap *fatsoen* politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain.



Gambar III.6: Gerakan reformasi Mei 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa.
Sumber: www.kaskus.co.id

Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.



1. Berdasarkan uraian di atas, Anda dipersilakan untuk menyimpulkan mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara.
2. Setelah Anda menjawab pertanyaan di atas, Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok, kemudian membuat kesimpulan dari hasil diskusi tersebut untuk diserahkan kepada dosen!

2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila

Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental-ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

Tantangan yang muncul, antara lain berasal dari derasny arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal inipun dapat dilihat dengan jelas, betapa paham-paham tersebut telah merasuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong-royong.

Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya, di satu pihak, dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena *code of conduct* yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi *euforia* politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional.
- b. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang *aji mumpung* atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum

dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara.

Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas, hanya merupakan sebagian kecil saja karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti fenomena gunung es, yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat.



1. *Anda dipersilakan untuk mendiskusikan tentang berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi.*
2. *Kemudian, Anda diminta untuk membuat ringkasan hasil diskusi tersebut untuk diserahkan kepada dosen.*

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

a. Esensi Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama akan memudahkan semua *stakeholder* bangsa dalam membangun negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional.

Mahfud M.D. (2009: 16--17) menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Lebih lanjut, Mahfud M.D. menyatakan bahwa dari Pancasila dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun

dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori.
- 2) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.
- 3) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologis menganut prisma antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
- 4) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun, tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan.

Pancasila sebagai dasar negara menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Di sisi lain, pada penjelasan pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kaelan, 2000: 91-92).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijemakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.
- 2) Meliputi suasana kebatinan (*Geislichenhintergrund*) dari UUD 1945.
- 3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
- 4) Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- 5) Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat (Kaelan, 2000: 198--199)

Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan *consensus*, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 88).



Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang esensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kemudian mendiskusikan dengan teman sekelompok Anda dan membuat ringkasannya untuk diserahkan kepada dosen.

b. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas tetapi meyakinkan, sebagai berikut:

Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 94-95).

Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu institusional (kelembagaan) dan *human resources* (personal/sumber daya manusia). Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern, yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional (*national interest*), yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara, *human resources* terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan (aparatur negara) yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Demikian pula halnya pada tahap implementasi yang harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain transparan, akuntabel, dan *fairness* sehingga akan terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis, harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan *free fight liberalism*, tidak terjadi monopoli dan monopsoni; serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik (infrastruktur politik). Dalam kehidupan kemasyarakatan, baik dalam bidang sosial maupun bidang politik seyogyanya nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan kaidah penuntun. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi *fatsoen* atau etika

politik yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suasana kehidupan yang harmonis.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata “berdasarkan” yang berarti, Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara, harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Pada gilirannya, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan.



1. *Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok tentang kondisi negara Indonesia dewasa ini dilihat dari penyelenggaraan negara, apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum.*
2. *Anda diminta untuk merumuskan kesimpulan hasil diskusi tersebut dan menyerahkannya kepada dosen.*

2. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan RI

Pada hakikatnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal, sebagai berikut:

- a. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar;
- b. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu (Kaelan, 1993: 62).

Setelah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya, yaitu 18 Agustus 1945, disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar

yang didalamnya memuat Pembukaan. Di dalam Pembukaan UUD 1945 tepatnya pada alinea ke-3 terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia, maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

- a. Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga Pembukaan menunjukkan bahwa antara Proklamasi dengan Pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan;
- b. Ditetapkannya Pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua Proklamasi;
- c. Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan, dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila;
- d. Dengan demikian, sifat hubungan antara Pembukaan dan Proklamasi, yaitu: memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 (Kaelan, 1993: 62-64).



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan tentang hubungan antara Pancasila dan proklamasi, kemudian membuat rumusan untuk diserahkan kepada dosen.

3. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Notonagoro (1982:24-26) menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya, masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar, yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*). Lebih lanjut, Notonagoro menjelaskan bahwa secara ilmiah kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak, yang dapat dilihat dari dua segi. Pandangan Notonagoro tentang unsur mutlak tersebut secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut:

Unsur Mutlak *Staatsfundamental*

Dari Segi Terjadinya

- Ditentukan oleh pembentuk negara
- Terjelma dalam bentuk pernyataan lahir sebagai kehendak pembentuk negara mengenai dasar-dasar Negara yang dibentuk

Dari segi isinya memuat dasar-dasar Negara yang dibentuk

- Asas kerohanian negara
- Asas politik negara
- Tujuan negara
- Memuat ketentuan diadakannya UUD negara

Gambar III.7: Unsur Mutlak *Staatsfundamental*

Berdasarkan paradigma berpikir tersebut, maka Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak *staatsfundamentalnorm*, yang tergambar dalam skema berikut ini:

Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai *Staats Fundamental Norm*

Dari Segi Terjadinya

- Ditentukan oleh PPKI sbg bentuk negara
- Dalam alinea 3, dinyatakan "... maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Dari segi isinya memuat dasar-dasar Negara yang dibentuk *Asas kerohanian Negara yaitu Pancasila pada alinea 4, "... dengan berdasar kepada Ketuhanan "*

- Asas politik Negara, yaitu kedaulatan rakyat, alinea 2 dan 4
- Tujuan Negara pada alinea 4
- Ketentuan diadakannya UUD, alinea 4" ... dalam suatu UUD Negara Indonesia, ..."

Gambar III.8: Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai *Staats Fundamental Norm*

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai *staatsfundamentalnorn*. Oleh karena itu, kedudukan Pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengan Peraturan Daerah harus sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.
- 2) Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorn*. Secara ilmiah-akademis, Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorn* mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah (Notonagoro, 1982: 25).

Dalam kaitan itu, silakan disimak ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945 pasca amandemen ke-4, dalam Pasal 37 tersebut hanya memuat ketentuan perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945, tidak memuat ketentuan untuk mengubah Pembukaan UUD 1945. Hal ini dapat dipahami karena wakil-wakil bangsa Indonesia yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat memahami kaidah ilmiah, terkait kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang sifatnya permanen sehingga mereka mengartikulasikan kehendak rakyat yang tidak berkehendak mengubah Pembukaan UUD 1945.



Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian mendiskusikan dengan teman sekelompok dan membuat kesimpulannya untuk diserahkan kepada dosen.

4. Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI 1945

Benarkah pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu berhubungan dengan Pancasila? Mari cermati bahasan berikut! (Anda dapat membaca kembali contoh hubungan dasar negara dengan bentuk negara pada uraian terdahulu)

Anda tentu mengetahui bahwa setelah Amandemen atau Perubahan ke-4 (dalam 2002), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal (lihat Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945). Hal ini berarti bahwa Penjelasan UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan dalam UUD 1945. Meskipun Penjelasan UUD 1945

sudah bukan merupakan hukum positif, tetapi penjelasan yang bersifat normatif sudah dimuat dalam pasal-pasal UUD 1945. Selain itu, dalam tataran tertentu penjelasan UUD 1945 dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan bernegara bagi warga negara.

Terkait dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, silahkan Anda simak bunyi penjelasan UUD 1945, sebagai berikut.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya."

Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran Penjelasan UUD 1945 tersebut, merupakan penjelmaan dari Pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorn*. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorn*.
2. Pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
3. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 terjelma dalam pasal-pasal UUD 1945.

Dalam kaitannya dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, perlu Anda ingat kembali uraian terdahulu yang mengemukakan prinsip bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah-akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari Pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praksis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai dasar. Adapun nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam UUD 1945. Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Implikasinya pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak bersifat permanen, artinya dapat diubah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945.

Perlu juga Anda pahami bahwa setiap pasal dalam UUD 1945 tidak sepenuhnya mengejawantahkan nilai dari suatu sila dalam Pancasila secara utuh. Di sisi lain, suatu pasal dalam UUD 1945 dapat mencerminkan sebagian nilai yang terkait dengan beberapa sila dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dipahami karena pasal-pasal UUD 1945 sebagai nilai instrumental dapat terkait dengan satu bidang kehidupan atau terkait dengan beberapa bidang kehidupan bangsa secara integral. Di sisi lain, nilai-nilai Pancasila antara nilai sila 1 dengan nilai sila lainnya tidak terpisah-pisah, melainkan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan harmonis.

Beberapa contoh pejabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.7 Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD 1945

No.	Nilai Dasar (Pancasila)	Nilai Instrumental (Pasal-Pasal dalam UUD 1945)
1.	Nilai Sila 1	Pasal 28E ayat (1), Pasal 29, dan pasal lain
2.	Nilai Sila 2	Pasal 1 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J, dan pasal lain
3.	Nilai Sila 3	Pasal 25A, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan pasal lain
4.	Nilai Sila 4	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 19, Pasal 22C, Pasal 22E, dan pasal lain
5.	Nilai Sila 5	Pasal 23, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan pasal lainnya.

5. Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa konsep implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada berbagai bidang kehidupan negara. Sudah barang tentu konsep-konsep yang diuraikan berikut ini bukan merupakan konsep yang mutlak, melainkan merupakan konsep dasar sebagai bahan diskusi.

a. Bidang Politik

Pernahkah Anda lihat rapat Rukun Warga di tempat tinggal Anda? Apa yang biasanya terjadi dalam rapat tersebut? Pasti Anda melihat sekumpulan orang atau beberapa orang yang berkumpul dan membicarakan masalah yang dihadapi daerahnya dengan musyawarah. Seperti itulah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan politik terjadi di lingkungan tempat tinggal. Mereka merumuskan kebijakan bukan dengan suara terbanyak,

melainkan saling memberi dan saling menerima argumen dari peserta musyawarah. Dengan demikian, kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan lebih diutamakan dalam kebijakan yang dirumuskan.

Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik, dibatasi oleh konstitusi. Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme, yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh UUD, dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat pun akan terhindar dari perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya.

Beberapa konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Sektor Suprastruktur Politik

Adapun yang dimaksud suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan, seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah. Semua lembaga pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai batas kewenangan yang ditentukan dalam UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga-lembaga pemerintah tersebut berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing. Kebijakan publik tersebut harus mengakomodasi *input* atau aspirasi masyarakat (melalui infrastruktur politik) sesuai mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan substansi, prosedur formulasi, dan implementasi kebijakan publik, semua lembaga pemerintah harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di samping substansi, kebijakan publik tersebut harus merupakan terjemahan atau mengartikulasikan kepentingan masyarakat, pemerintah juga harus melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

2) Sektor Masyarakat

Pada uraian terdahulu, telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga sosial politik, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum. Fungsi memberikan masukan tersebut mendorong infrastruktur berperan sebagai *interest group* dan/atau *pressure group*. Dapat dibayangkan apabila dalam proses tersebut tidak ada aturan main, maka akan timbul *chaos* atau kekacauan di masyarakat. Dalam kondisi seperti itulah, diperlukan kaidah penuntun yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar dalam proses tersebut tetap terjaga semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Nilai-nilai Pancasila akan menuntun masyarakat ke pusat inti kesadaran akan pentingnya harmoni dalam kontinum antara sadar terhadap hak asasinya di satu sisi dan kesadaran terhadap kewajiban asasinya di sisi lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Indikator bahwa seseorang bertindak dalam koridor nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara adalah sejauh perilakunya tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.



Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang kebijakan-kebijakan politik yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang ada di daerah Anda, apakah kebijakan politik tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anda diminta untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok mengapa hal tersebut terjadi, kemudian membuat kesimpulannya dan menyerahkan kepada dosen.

b. Bidang Ekonomi

Apakah Anda masih melihat koperasi di daerah sekitar tempat tinggal Anda? Apakah koperasi sebagai badan usaha masih berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apakah Anda tertarik untuk mendirikan atau masuk menjadi anggota koperasi? Memang bentuk badan usaha dalam sistem ekonomi nasional bukan hanya koperasi, melainkan juga ada bentuk badan usaha milik perseorangan atau swasta, dan badan usaha milik negara. Ketiga bentuk badan usaha tersebut diakui keberadaannya bahkan menempati posisi yang sama pentingnya dalam meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, bentuk badan usaha koperasi

terkesan mendapat perhatian yang lebih besar berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Padahal, apabila dicermati ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2), maka terasa bahwa bentuk badan usaha milik swasta juga menempati kedudukan yang strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, apabila dicermati ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, maka Badan Usaha Milik Negara juga menempati posisi yang strategis dalam



Gambar III.6: Kegiatan koperasi Mahasiswa sebagai bentuk kegotongroyongan ekonomi
Sumber: kopsagoe.blogspot.com

meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UUD 1945, negara Indonesia berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat yang lemah, serta memelihara kelompok marginal, khususnya fakir miskin dan anak terlantar.



ILUSTRASIKAN DALAM BENTUK GAMBAR YANG MENCERMINKAN KEGIATAN KOPERASI SEBAGAI PENGANTI GAMBAR DI ATAS!

Mungkin dalam pemikiran Anda terbersit bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) terasa paradoks dengan ketentuan dalam Pasal 33 khususnya ayat (1), (2), (3), dan ayat (4). Kedua prinsip dalam 2 Pasal tersebut ibarat kontinum dari kiri (sosialisme) ke kanan (kapitalisme/liberalisme), yang di tengahnya ada titik keseimbangan. Titik keseimbangan tersebut akan ditentukan oleh DPR bersama Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Inti dari ketentuan dalam Pasal tersebut adalah bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Spirit yang terkandung dalam Pasal 33, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), serta Pasal 34 UUD 1945 adalah ekspresi dari jiwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi. Keberadaan ketiga bentuk badan usaha di samping usaha perseorangan, yaitu Badan Usaha Milik Perseorangan/Swasta, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara merupakan cerminan kepribadian manusia Indonesia yang terpancar terutama dari nilai sila ke-lima yang lebih bertumpu pada sosialitas dan sila ke-dua yang lebih bertumpu pada individualitas terkait sistem perekonomian nasional. Sudah barang tentu, prinsip-prinsip nilai sila ke-lima dan sila ke-dua dalam sistem perekonomian tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai sila lainnya dalam Pancasila.

Sebagai bahan pembanding atas uraian tersebut, berikut ini adalah pandangan Mubyarto dalam Oesman dan Alfian (1993: 240--241) mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Ketuhanan Yang Maha Esa**, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
- 2) **Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**, ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (*egalitarian*), sesuai asas-asas kemanusiaan;
- 3) **Persatuan Indonesia**, prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi;
- 4) **Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijakan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama;
- 5) **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dalam implementasi kebijakan

ekonomi. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD 1945. Kebijakan ekonomi nasional tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh dana pembangunan yang besar. Dana pembangunan diperoleh dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Pajak merupakan bentuk distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, sehingga pada hakikatnya pajak itu dari rakyat untuk rakyat.



1. *Anda dipersilakan untuk mendiskusikan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional.*
2. *Anda harus mendiskusikan dengan teman sekelompok mengenai alternative terbaik sebagai upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.*
3. *Anda diminta untuk membuat kesimpulan alternatif terbaik dan cara memperjuangkan alternatif tersebut agar dapat diadopsi pemerintah dan didukung masyarakat. Kemudian, menyerahkan hasil ringkasan kepada dosen.*

c. Bidang Sosial Budaya

Apakah Anda pernah mencoba menyapu halaman rumah dengan menggunakan satu lidi? Bagaimana kalau lidi itu banyak, kemudian diikat dalam satu ikatan? Bagaimana hasilnya, apakah cepat yang satu lidi atau seikat lidi? Pertanyaan di atas merupakan dasar berpijak masyarakat yang dibangun dengan nilai persatuan dan kesatuan. Bahkan, kemerdekaan Indonesia pun terwujud karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa.



Gambar III.7: Bhinneka Tunggal Ika
Sumber: kfk.kompas.com

Sejatinya, masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945. Namun akhir-akhir ini, semangat kegotongroyongan di kalangan masyarakat menunjukkan gejala semakin luntur. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan nilai individualistik dan materialistik. Apabila hal ini tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin jati diri bangsa akan semakin terancam. Mengingat karakter masyarakat Indonesia yang berbhinneka tunggal ika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 A UUD 1945. Hal tersebut mengisyaratkan kepada segenap komponen bangsa agar berpikir konstruktif, yaitu memandang kebhinnekaan masyarakat sebagai kekuatan bukan sebagai kelemahan, apalagi dianggap sebagai faktor disintegratif, tanpa menghilangkan kewaspadaan upaya pecah belah dari pihak asing.

Strategi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan melalui pembangunan sosial-budaya, ditentukan dalam Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945, disebutkan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Di sisi lain, menurut Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Sejalan dengan hal itu, menurut Pasal 32 ayat (3) UUD 1945, ditentukan bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

Nilai-nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutuhan atau integrasi nasional sebagaimana tersebut di atas, sejalan dengan pandangan ahli sosiologi dan antropologi, yakni Selo Soemardjan dalam Oesman dan Alfian (1993:172) bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang. Mungkin perkembangannya berjalan lambat, seperti terjadi dalam masyarakat pedesaan yang kurang sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat lain. Mungkin juga perkembangan tersebut berjalan cepat, bahkan sering terlampaui cepat, seperti yang terjadi pada masyarakat kota. Perkembangan budaya itu terdorong oleh aspirasi masyarakat dengan bantuan teknologi. Hanya untuk sebagian saja perkembangan kebudayaan itu

dipengaruhi oleh negara. Dapat dikatakan, bahwa terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara masyarakat dengan kebudayaannya pada satu pihak dan negara dengan sistem kenegaraannya pada pihak lain. Apabila kebudayaan masyarakat dan sistem kenegaraan diwarnai oleh jiwa yang sama, maka masyarakat dan negara itu dapat hidup dengan jaya dan bahagia. Akan tetapi, apabila antara kedua unsur itu ada perbedaan, bahkan mungkin bertentangan, kedua-duanya akan selalu menderita, frustrasi, dan rasa tegang.

Dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang konstruktif sehingga budaya tersebut harus dikembangkan dalam konteks kekinian.



1. *Anda dipersilakan untuk mencari bentuk-bentuk gotong royong yang ada di daerah Anda, kemudian menjelaskan fungsi dari gotong royong tersebut dalam pengembangan sosial budaya masyarakat setempat.*
2. *Anda diminta mendiskusikannya dengan teman sekelompok apakah nilai gotong royong tersebut masih dapat dipertahankan, dan bagaimana cara mensosialisasikannya. Anda diminta merumuskan kesimpulan hasil diskusi tersebut dan menyerahkan kepada dosen.*

d. Bidang Hankam

Anda sudah akrab dengan istilah bela negara, istilah pertahanan, dan istilah keamanan negara. Ketiga istilah tersebut terkait dengan pembahasan mengenai implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan negara. Anda juga sudah paham bahwa berbicara tentang hal tersebut, sudah barang tentu harus terkait dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Bagi Anda sebagai warga negara yang baik, bela negara bukan hanya dilihat sebagai kewajiban, melainkan juga merupakan kehormatan dari negara. Bela negara dapat didefinisikan sebagai segala sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dan bangsa, dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila guna

mewujudkan tujuan nasional. Wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara dalam keadaan damai banyak bentuknya, aplikasi jiwa pengabdian sesuai profesi pun termasuk bela negara. Semua profesi merupakan medan juang bagi warga negara dalam bela negara sepanjang dijiwai semangat pengabdian dengan dasar kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Hal ini berarti pahlawan tidak hanya dapat lahir melalui perjuangan fisik dalam peperangan membela kehormatan bangsa dan negara, tetapi juga pahlawan dapat lahir dari segala kegiatan profesional warga negara. Misalnya, dalam bidang pendidikan dapat lahir pahlawan pendidikan, dalam bidang olah raga dikenal istilah pahlawan olah raga, demikian pula dalam bidang ekonomi, teknologi, kedokteran, pertanian, dan lain-lain dapat lahir pahlawan-pahlawan nasional. Demikian pula halnya dengan pembayar pajak, mereka juga pahlawan karena mereka rela menyerahkan sebagian dari penghasilan dan kekayaannya untuk membantu Negara membiayai pembangunan, seperti: pembangunan jalan/jembatan, pembayaran gaji TNI/POLRI serta penyediaan program pembangunan yang pro masyarakat miskin berupa subsidi, dan sebagainya.



Gambar III.8: Personil tentara dan alutsista untuk mendukung strategi pertahanan dan keamanan, dibiayai dari pajak yang dibayar oleh rakyat
Sumber: strategi-militer.blogspot.com

Bela negara dalam konteks khusus perjuangan fisik, terkait dengan istilah pertahanan dan keamanan. Upaya pembangunan pertahanan adalah daya upaya bangsa dalam membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari luar negeri dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu integritas nasional. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan bidang keamanan adalah daya upaya bangsa dalam

membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri serta ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

Sebagaimana dikemukakan pada uraian di atas, bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, terkait dengan nilai-nilai instrumental sebagaimana terkandung dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) UUD 1945. Prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana terkandung dalam Pasal 30 UUD 1945 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan
Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
2. Sistem pertahanan dan keamanan
Adapun sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang lazim disingkat Sishankamrata. Dalam Sishankamrata, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
3. Tugas pokok TNI
TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara dengan tugas pokok mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
4. Tugas pokok POLRI
POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat masyarakat, mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kelangsungan hidup bangsa dan negara bukan hanya tanggung jawab TNI dan POLRI, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, tidak terkecuali Anda. Bukankah Anda sepakat bahwa asas politik negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang dapat dimaknai bahwa negara Indonesia milik seluruh warga negara, termasuk Anda. Ibaratnya, negara Indonesia adalah rumah Anda, siapakah yang bertanggung jawab menjaga keselamatan rumah dengan segala isinya, sudah barang tentu Anda sepakat bahwa yang bertanggung jawab adalah seluruh pemilik rumah tersebut. Berdasarkan analogi rumah

tersebut, maka logis apabila seluruh warga negara merasa bertanggung jawab dalam bidang pertahanan dan keamanan negara.



1. Berdasarkan uraian di atas, Anda dipersilakan untuk mengemukakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dapat dikategorikan bela negara.
2. Kemudian Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok mengenai tingkat kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa, dan merumuskan kesimpulan hasil diskusi tersebut untuk diserahkan kepada dosen.

F. Rangkuman tentang Makna dan Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan/atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna, antara lain bahwa, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara.

Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: 1) agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan 2) agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran.

G. Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Dasar Negara

Agar pemahaman Anda bertambah mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Anda diminta membuat suatu proyek lapangan yang dimaksudkan agar Anda memiliki kemampuan mengkritisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, baik yang bersifat idealis maupun praktis-pragmatis dalam perspektif sebagai dasar negara.

Anda diharapkan untuk mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Bentuklah kelompok dari kelas Anda, setiap kelompok berjumlah sekitar 8 orang. Dalam kelompok tersebut, dibagi lagi menjadi 4 kelompok kecil. Setiap kelompok mempunyai tugas-tugas sebagai berikut!
 - a. Kelompok pertama menyusun latar belakang,
 - b. Kelompok kedua mengidentifikasi berbagai alternatif peraturan atau kebijakan publik,
 - c. Kelompok ketiga memilih alternatif peraturan atau kebijakan publik yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah di suatu daerah,
 - d. Kelompok keempat menyusun rencana aksi dari alternatif yang sudah dipilih bersama.

2. Melakukan penelitian

Masing-masing kelompok meneliti tentang masalah eksistensi Pancasila dalam kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Anda dapat melakukan penelitian di pemerintah daerah setempat atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan peraturan atau kebijakan publik. Kemudian, Anda diminta menganalisis apakah nilai-nilai Pancasila itu telah menjiwai peraturan atau kebijakan pemerintah tersebut!

3. Presentasi

Setelah Anda melakukan penelitian, selanjutnya Anda mempresentasikan hasil penelitian kelompok masing-masing di depan kelas bersama pakar atau dosen Pancasila!

BAB IV

MENGAPA PANCASILA MENJADI IDEOLOGI NEGARA?



Gambar IV.0 ideologi merupakan seperangkat sistem yang menjadi dasar pemikiran setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada Bab IV ini Anda akan diajak menelusuri berbagai konsep tentang ideologi negara. Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anda tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti **kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh**. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya berbagai komponen budaya yang meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, sebagaimana

diungkapkan Koentjaraningrat dalam buku *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (2004: 2), memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Perlu diketahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara, lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka.

Perlu diketahui juga bahwa agama dapat menjadi sumber bagi suatu Ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Apabila suatu negara bercorak teokrasi, maka pada umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut berasal dari doktrin agama tertentu. Demikian pula halnya, dengan pemimpin negara teokrasi pada umumnya adalah pemimpin agama. Dalam rumusan bahasa yang sederhana, dapat diberikan rumusan tentang negara teokrasi sebagai berikut. **NT = HA + PA (Negara Teokrasi = Hukum Agama + Pemimpin Agama)**. Pada zaman dahulu, banyak negara yang bercorak teokrasi, seperti kerajaan-kerajaan di Cina, Jepang, bahkan Indonesia pada zaman kerajaan. Dewasa ini, bentuk negara teokrasi masih menyisakan beberapa negara di antaranya ialah negara Vatikan.

Bagaimana pula halnya dengan ideologi yang bersumber dari pemikiran para tokoh? Marxisme termasuk salah satu di antara aliran ideologi (*mainstream*) yang berasal dari pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx. Pengaruh ideologi Marxisme masih terasa sampai sekarang di beberapa negara, walaupun hanya menyisakan segelintir negara, seperti Korea Utara, Kuba, Vietnam. Bahkan Cina pernah berjaya menggunakan ideologi Marxis di zaman Mao Ze Dong, meskipun sekarang bergeser menjadi semiliberal, demikian pula halnya dengan Rusia.



Ideologi merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan negara yang bersumber dari nilai dasar yang berkembang dalam suatu bangsa. Sehubungan dengan itu, Anda dipersilakan untuk mencari informasi tentang nilai-nilai ideal, instrumental, dan praksis dan dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Diskusikan dengan kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

Dewasa ini, ideologi berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas, seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Ideologi pasar berkembang dalam kehidupan modern sehingga melahirkan sikap konsumtif; sedangkan ideologi agama berkembang ke arah radikalisme agama. Bagaimana halnya dengan ideologi Pancasila? Apakah Pancasila itu bersumber dari kebudayaan ataukah agama, ataukah pemikiran tokoh? Hal inilah yang akan ditelusuri dalam Bab IV.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Anda dapat menguasai kompetensi sebagai berikut:

Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya; mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif; menganalisis ideologi besar dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia; menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

1. Konsep Pancasila sebagai Ideologi Negara

Masih ingatkah Anda, apa yang dimaksud dengan ideologi? Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata *idea*, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan *logos* yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian dasar (Kaelan, 2013: 60-61).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 517). Dalam pengertian tersebut, Anda dapat

menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik.

Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan Destutt de Tracy pada penghujung abad kedelapanbelas. Tracy menyebut ideologi sebagai *science of ideas*, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Perancis. Namun, Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka, yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan (Kaelan, 2003: 113). Jorge Larraín menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan borjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Niccolò Machiavelli (1460--1520) merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktik politik para pangeran, dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik, meskipun ia tidak menggunakan istilah "*ideology*" sama sekali. Ada tiga aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli melihat bahwa orang-orang sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan, hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. Larraín menyitir pendapat Machiavelli sebagai berikut.

"Agama kita lebih memuliakan orang-orang yang rendah hati dan tafakur daripada orang-orang yang bekerja. Agamalah yang menetapkan kebaikan tertinggi manusia dengan kerendahan hati, pengorbanan diri dan sikap memandang rendah untuk hal-hal keduniawian. Pola hidup ini karenanya tampak membuat dunia itu lemah, dan menyerahkan diri sebagai mangsa bagi mereka yang jahat, yang menjalankannya dengan sukses dan aman, karena mereka itu sadar bahwa orang-orang yang menjadikan surga sebagai tujuan pada umumnya beranggapan bertahan itu lebih baik daripada membalas dendam, terhadap perbuatan mereka yang tidak adil" (Larraín, 1996: 9).

Sikap semacam itulah yang menjadikan Machiavelli menghubungkan antara ideologi dan pertimbangan mengenai penggunaan kekuatan dan tipu daya untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Para penguasa – pangeran – harus belajar mempraktikkan tipuan, karena kekuatan fisik saja tidak pernah mencukupi. Machiavelli menengarai bahwa hampir tidak ada orang berbudi yang memperoleh kekuasaan besar "hanya dengan

menggunakan kekuatan yang terbuka dan tidak berkedok”, kekuasaan dapat dikerjakan dengan baik, hanya dengan tipuan. Machiavelli melanjutkan analisisnya tentang kekuasaan dengan mengatakan bahwa meskipun menjalankan kekuasaan memerlukan kualifikasi yang baik, seperti menepati janji, belas kasihan, tulus ikhlas. Penguasa tidak perlu memiliki semua persyaratan itu, tetapi dia harus tampak secara meyakinkan memiliki kesemuanya itu (Larrain, 1996: 9). Ungkapan Machiavelli tersebut dikenal dengan istilah *adagium*, “tujuan menghalalkan segala macam cara”.



ILUSTRASIKAN DALAM BENTUK GAMBAR TENTANG SANG PANGERAN KARYA MACHIAVELLI!



Anda dipersilakan untuk mencermati praktik politik yang terjadi di Indonesia dewasa ini yang mencerminkan pola pikir Machiavelli. Diskusikan dengan kelompok Anda faktor-faktor apa saja yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, kemudian laporkan secara tertulis.

Marx melanjutkan dan mengembangkan konsep ideologi Machiavelli yang menonjolkan perbedaan antara penampilan dan realita dalam pengertian baru. Ideologi bagi Marx, tidak timbul sebagai penemuan yang memutar balik realita, dan juga tidak sebagai hasil dari realita yang secara objektif gelap (kabur) yang menipu kesadaran pasif (Larrain, 1996: 43). Marx mengandaikan bahwa kesadaran tidak menentukan realitas, tetapi realitas material-lah yang menentukan kesadaran. Realitas material itu adalah cara-cara produksi barang dalam kegiatan kerja (Hardiman, 2007: 241). Ideologi timbul dari “cara kerja material yang terbatas”. Hal ini memunculkan hubungan yang saling bertentangan dengan berbagai akibatnya. Marx mengajarkan bahwa tesis dari dialektika materialis yang dikembangkannya adalah masyarakat agraris yang di dalamnya kaum feodal pemilik tanah sebagai kelas penguasa dan petani penggarap sebagai kelas yang tertindas. Antitesisnya adalah masyarakat kapitalis, di dalamnya modal dikuasai oleh kaum borjuis penguasa, sedangkan pekerja atau proletar adalah kelas yang tertindas. Sintesisnya adalah di dalam masyarakat komunis, tidak ada lagi kelas penguasa (feodal/borjuis) dan yang dikuasai (proletar) (Larrain, 1996: 43).



Anda dipersilakan untuk mencermati fenomena kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini yang memperlihatkan benturan kepentingan antara pengusaha (kaum kapitalis) dan pihak buruh (kaum proletar) dalam perspektif Marx. Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

Selanjutnya, Anda perlu mengenal beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut:

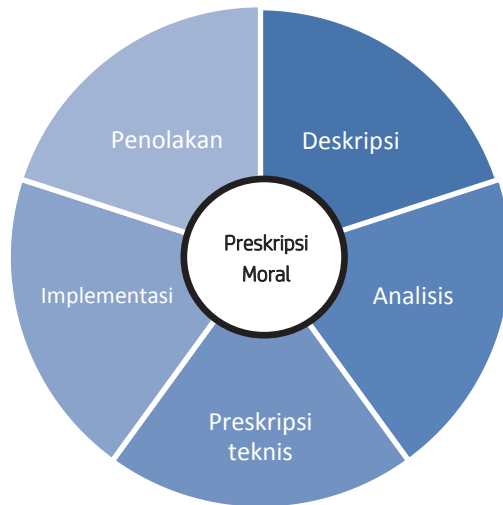
- a. Sastrapratedja (2001: 43): "Ideologi adalah seperangkat gagasan/pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur".
- b. Soerjanto (1991: 47): "Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya".
- c. Mubyarto (1991: 239): "Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu".

Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut perlu Anda ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut.

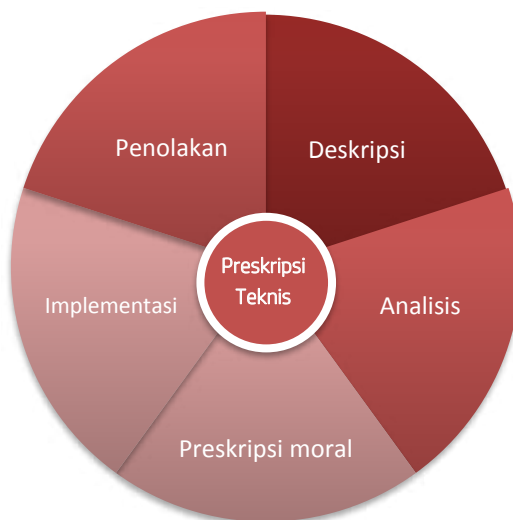
- a. Martin Seliger: Ideologi sebagai sistem kepercayaan

Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi legitimasi yang rasional dari penerapan preskripsi teknik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk pemeliharaan, pembentukan kembali, destruksi atau rekonstruksi dari suatu tatanan yang telah tersedia. Martin Seliger, lebih lanjut menjelaskan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif (Thompson, 1984: 79). Ideologi fundamental meletakkan preskripsi moral pada posisi sentral yang didukung oleh beberapa unsur, yang meliputi: deskripsi, analisis, preskripsi teknis, pelaksanaan, dan penolakan. Ideologi operatif meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur-unsur pendukung, meliputi:

deskripsi, analisis, preskripsi moral, pelaksanaan, dan penolakan. Adapun perbedaan di antara kedua ideologi ini digambarkan sebagai berikut (Thompson, 1984: 80). Kedua bentuk ideologi tersebut mengandung konsekuensi yang berbeda dalam penerapannya.



Gambar IV.1: Ideologi Fundamental



Gambar IV.2: Ideologi Operatif

b. Alvin Gouldner: Ideologi sebagai Proyek Nasional

Gouldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Lebih lanjut, Gouldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Gouldner juga mengatakan bahwa kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme (Thompson, 1984: 85-86).

c. Paul Hirst: Ideologi sebagai Relasi Sosial

Hirst meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirst menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Lebih lanjut, Hirst menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi mengacu kepada kompleks nir-kesatuan (*non-unitary*) praktik sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis (Thompson, 1984:94-95).

Untuk lebih memperdalam pemahaman, berikut ini beberapa corak ideologi.

- a. Seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara.
- b. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, budaya.
- c. Suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan.
- d. Berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok (Sastrapratedja, 2001: 45-46).



Anda dipersilakan untuk menelusuri corak-corak ideologi dunia dengan berbagai karakteristiknya. Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

Setelah memperoleh gambaran dan pemahaman tentang teori dan corak ideologi, maka Anda perlu mengenali beberapa fungsi ideologi sebagai berikut:

- a. Struktur kognitif; keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya.
- b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- c. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- d. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya
- e. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- f. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya (Soerjanto, 1991: 48).



Gambar IV.3: Sejak lahirnya kapitalisme, ada dua kelas yang terus bertarung: buruh dan kapitalis. Kapitalis ingin memberikan upah yang rendah, sementara buruh terus menuntut upah yang lebih baik. Bagaimana pandangan ini menurut Pancasila? (Sumber: http://kartunmartono.files.wordpress.com/2008/06/73391_268645813232157_210779659018773_537894_2141703914_o.jpg)

Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka Anda perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut.

- a. Marxisme-Leninisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip; *pertama*,

penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi; *kedua*, proses perubahan sosial bersifat dialektis.

- b. Liberalisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu.
- c. Sosialisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep *welfare state*.
- d. Kapitalisme; suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki (Sastrapratedja, 2001: 50 – 69).

2. Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

Setelah Anda menelusuri berbagai pengertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastrapratedja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut:

- a. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik.
- b. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius.
- c. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerjasama dan bersaing sehingga tidak ada satu pun ideologi yang dominan.
- d. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen.
- e. Nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda (Sastrapratedja, 2001: 26--27).

Berdasarkan karakteristik kebudayaan global tersebut, maka perlu ditelusuri fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap

ideologi Pancasila. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut:



Gambar IV.4: Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka.

Sumber: <http://joglosemar.co/2013/03/globalisasi-era-melek-budaya-dan-bahasa.html>

- a. Fase embrio; berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional Abad Tengah.
- b. Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan.
- c. Fase *take off* yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional.
- d. Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis, seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

- e. Fase ketidakpastian; berlangsung dari 1960--1990 ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih.
- f. Fase kebudayaan global; fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet (runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara), berakhirnya perang dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi (Sastrapratedja, 2001: 49 – 50).

B. Menanya Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Ideologi Negara

1. Warga Negara Memahami dan Melaksanakan Pancasila sebagai Ideologi Negara

Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini, perlu diidentifikasi unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut:

- a. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan.

Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif.



ILUSTRASIKAN DALAM BENTUK GAMBAR GAYA HIDUP KONSUMTIF YANG MELANDA MASYARAKAT INDONESIA DEWASA INI!



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan tentang gaya hidup konsumerisme yang melanda kehidupan masyarakat kita dewasa ini dan cara-cara penanggulangannya, kemudian melaporkannya dalam bentuk tertulis.

Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi, antara lain terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media masa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, antara lain:

- a. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya.
- b. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa.
- c. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Berikut ini gambar yang mencerminkan tentang terorisme.



Gambar IV.5: Terorisme merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. (Sumber: <http://jalurhitam.blogspot.com/2011/07/al-qaeda-berencana-merilis-film-animasi.html>)



Gambar IV.6: Untuk menanggulangi terorisme dan radikalisme, perlu penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan Pancasila kepada generasi muda.

Sumber: <http://purwoudiutomo.com/>



Anda dipersilakan untuk menemukan alasan terjadinya terorisme dan radikalisme di Indonesia. Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia.
- b. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
- c. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gambar berikut mencerminkan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang ingin coba-coba menggunakan narkoba:



Gambar IV.6: Akibat yang akan dialami oleh generasi muda yang memakai narkoba.
Sumber: <http://designcartoon.wordpress.com/media-kie/p-o-s-t-e-r-narkoba/>



Anda dipersilakan untuk menemukan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Anda diminta untuk menemukan dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba terhadap bidang ekonomi dan masa depan bangsa. Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

2. Penyelenggara Negara Memahami dan Melaksanakan Pancasila sebagai Ideologi Negara

Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional:

- a. Kesiediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia, tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka.
- b. Aktualisasi lima sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut:
 - (1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan.
 - (2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolok ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara.
 - (3) Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia.
 - (4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan.
 - (5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia (Magnis Suseno, 2011: 118--121).



ILUSTRASIKAN GAMBAR TENTANG PERILAKU KORUPSI YANG TERJADI DI BEBERAPA LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA!

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara

1. Sumber historis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia:

a. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945--1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960--1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia.

b. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR No. II/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P-4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru (mono tafsir ideologi) yang berkuasa pada waktu itu.

c. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie

Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998, atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No. 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Sebenarnya, dalam Keppres tersebut dinyatakan akan dibentuk

lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada.

d. Pancasila sebagai Ideologi dalam masa pemerintahan Presiden

Abdurrahman Wahid

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah.

e. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati

Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi.

f. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono (SBY)

Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam dua periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Keppres No. 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat (3).

Habibie dalam pidato 1 Juni 2011, mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi ialah:

".....sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya 'amnesia nasional' tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai

grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga negara yang plural"

(<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/01/lm43df-ini-dia-pidato-lengkap-presiden-ketiga-ri-bj-habibie>).

2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib.
- b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang.
- c. Sila Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri.
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.
- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan.



Anda dipersilakan menggali informasi untuk memperkaya pengetahuan tentang sumber sosiologis (kearifan lokal) dalam hal kehidupan beragama, menghormati hak-hak orang lain, bentuk solidaritas, dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

3. Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama.
- b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
- c. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai.
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting.
- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi.



ILUSTRASIKAN GAMBAR TENTANG TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT UNTUK MENDESKRIPSIKAN BUTIR (a.)!

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Ideologi Negara

Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno; sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom.

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR No. II/1978 tentang pamasayarakatan P-4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi

Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik (Orpol) dan organisasi masyarakat (Ormas).

Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti: enggan para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut:

- a. Pertarungan ideologis antara negara-negara *super power* antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara *super power*.
- b. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi.
- c. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkritnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan.

Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik (parpol) juga berdampak terhadap ideologi negara sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.



Gambar IV.7: Gambar ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik.
Sumber: inilah.com

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

1. Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, akan di pahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi sebagai berikut:

- a. Dimensi realitas; mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
- b. Dimensi idealitas; mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita.

- c. Dimensi fleksibilitas; mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakini untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya (Alfian, 1991: 192 – 195).



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan hakikat nilai Pancasila tentang sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sehingga terlihat aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kemudian melaporkannya secara tertulis.

2. Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya.
- b. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Gambar berikut ini memperlihatkan bagaimana terorisme telah merusak nilai toleransi.



Gambar IV.8: Robeknya Bhineka Tunggal Ika karena kasus terorisme dan kekerasan
 Sumber: <http://ressay.wordpress.com/2012/03/07/kebebasan-beragama-dapat-dibatasi-sejauh-manakah/>

F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis.

G. Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Ideologi Negara

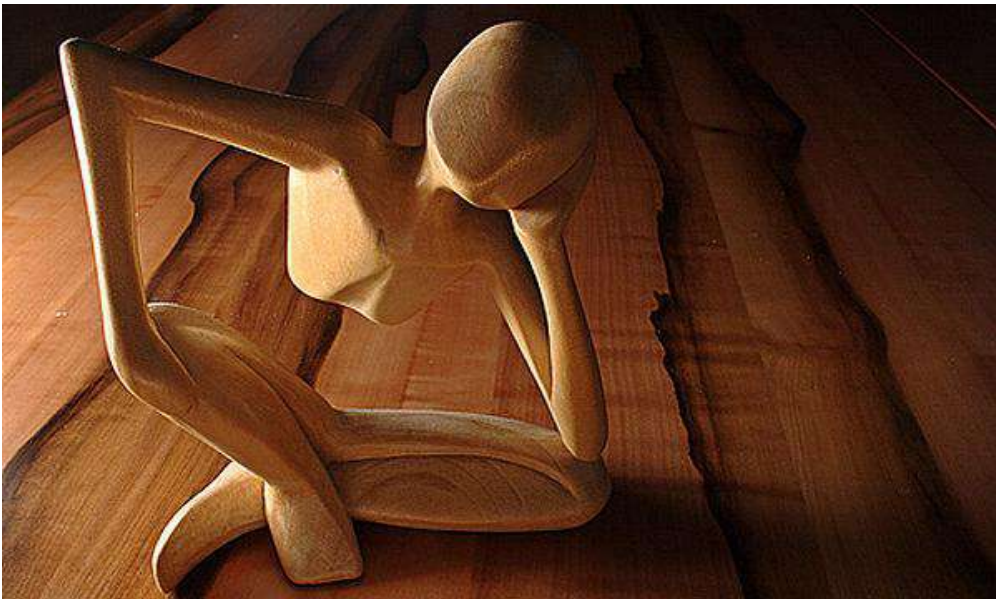
Untuk memahami Pancasila sebagai ideologi negara, Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang:

1. Berbagai konsep dan pengertian dan karakter tentang ideologi besar dunia, khususnya tentang ideologi tertutup dan ideologi terbuka.
2. Pancasila sebagai ideologi, termasuk bersifat tertutup atau terbuka, berikan argumen Anda.
3. Berbagai kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan yang mengancam eksistensi Pancasila.
4. Berbagai kasus yang terkait dengan terorisme yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila.
5. Berbagai kasus yang terkait dengan korupsi di Indonesia yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila.
6. Berbagai kasus kesadaran pajak warga Negara yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila.

Anda juga dipersilakan untuk mendiskusikan faktor-faktor yang mengancam keutuhan nasional bangsa Indonesia, sekaligus memperlihatkan peran ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

BAB V

MENGAPA PANCASILA MERUPAKAN SISTEM FILSAFAT?



Gambar V.0 Perenungan merupakan upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas. (Sumber: digantjsn.wordpress.com)

Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide *Philosophische Grondslag*. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat.

Kendatipun demikian, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Notonagoro, Soerjanto

Poespowardoyo, Sastrapratedja termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, akan dibahas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat. Mengapa mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis? Alasannya karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi sebagai berikut. Bersikap inklusif, toleran dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya; mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif; bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar prinsip musyawarah; memahami dan menganalisis hakikat sila-sila Pancasila, serta mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku; mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan tentang Pancasila yang hidup dalam tata kehidupan Indonesia.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat



Filsafat merupakan awal dari ilmu pengetahuan, filsafat disebut juga sebagai “Mother of Science”. Anda dipersilakan untuk mencari bentuk pemikiran filsafat dan mencari istilah-istilah yang semakna dengan filsafat, kemudian melaporkannya secara tertulis sebagai tugas individual.

1. Konsep Pancasila sebagai Sistem Filsafat

a. Apa yang dimaksudkan dengan sistem filsafat

Apakah Anda sering mendengar istilah “filsafat” diucapkan seseorang, atau mungkin Anda sendiri seringkali mengucapkannya? Namun, apakah Anda mengerti dan faham apa yang dimaksudkan dengan filsafat itu? Untuk itu, coba Anda renung dan pikirkan beberapa pernyataan yang memuat istilah “filsafat” sebagai berikut:

- 1) “Sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya”.
- 2) “Saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir”.
- 3) “Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku”.
- 4) “Sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat”.

Berdasarkan keempat pernyataan di atas, maka Anda tentu dapat membedakan bunyi pernyataan (1), (2), (4), dan pernyataan (3). Untuk dapat memahami perbedaan keempat pernyataan tersebut, maka perlu menyimak beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith & Nolan sebagai berikut:

- 1) Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. (**arti informal**)
- 2) Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. (**arti formal**)
- 3) Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. (**arti komprehensif**).
- 4) Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. (**arti analisis linguistik**).
- 5) Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. (**arti aktual-fundamental**).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian filsafat dalam arti informal itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam, sebagaimana pernyataan pedagang dalam butir (1), pernyataan prajurit butir (2), dan pernyataan wakil rakyat butir (4). Ketiga butir pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis.

Adapun pernyataan butir (3) merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Hal ini disebabkan oleh pernyataan “Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku” mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri

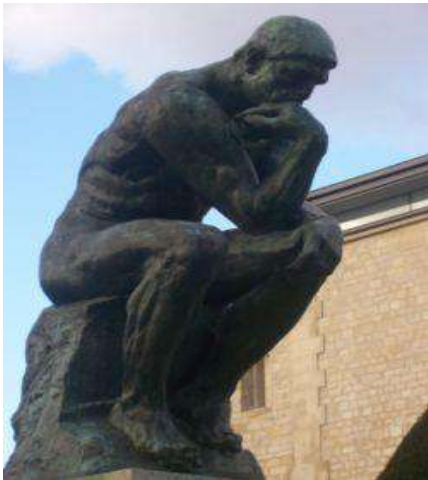
pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat.

Pengertian filsafat butir (2) *suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi*, lebih mengacu pada arti refleksif, yaitu sikap terbuka dan toleran dan mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka (Titus, Smith & Nolan, 1984: 11--12). Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekadar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat. Misalnya, masyarakat awam beranggapan bahwa tenggelamnya seseorang yang sedang mandi di pantai Parangtritis dipercaya sebagai ulah Nyi Roro Kidul yang mengambilnya sebagai pasukan. Ungkapan semacam ini, dalam filsafat dikategorikan sebagai mitos, sedangkan kelahiran filsafat sejak zaman Yunani kuno justru sebagai reaksi terhadap mitos. Adagium pada zaman Yunani berbunyi, "*Logos* (akal) mengalahkan *mitos* (dongeng, legenda) yang bersifat irrasional". Voltaire, salah seorang filsuf Perancis abad kedelapan belas pernah melontarkan adagium yang berbunyi, "Takhayul (mitos) membakar dunia, filsafat memadamkannya" (Magee, 2008: i).

Pengertian filsafat butir (4) *sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep*, lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan (Titus, Smith & Nolan, 1984: 13). Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana berpikir kritis untuk memahami makna suatu ungkapan.

Misalnya, pernyataan Voltaire yang berbunyi, "Manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang, sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan uang untuk meraih kembali kesehatan (Hardiman, 2000: 110). Hasil analisis atas pernyataan Voltaire itu menunjukkan bahwa suatu hal yang dilakukan oleh kebanyakan manusia modern itu ternyata sia-sia. Hal ini terjadi karena tujuannya hanya untuk menumpuk kekayaan dengan memforsir tenaga dan pikiran. Tentu saja, hal ini sangat beresiko terhadap kesehatan. Padahal biaya kesehatan itu mahal sehingga merampas kembali dan menghilangkan hasil yang telah diperoleh.

Pengertian filsafat butir (5) sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat, lebih mengacu pada persoalan-persoalan yang mendalam dari eksistensi manusia (Titus, Smith & Nolan, 1984: 13). Misalnya, apakah kebenaran itu? Apakah keadilan itu? Persoalan-persoalan tersebut menyita sebagian besar waktu para pemikir, termasuk pemikir bangsa Indonesia.



Gambar V.1

Patung yang dibuat oleh Auguste Rodin menggambarkan tentang *wise man*, artinya manusia sebagai makhluk hidup yang arif atau bijaksana melalui proses berpikir dan berkontemplasi

Sumber:

<http://tutinonka.wordpress.com/2008/09/17/high-concept-high-touch-2/>



Gambar V.2

Patung Soekarno sedang duduk di taman rumah pengasingan di Ende menggambarkan ia sedang memikirkan dan merenungkan masa depan Bangsa Indonesia. Hasil pemikiran dan perenungan itu adalah Pancasila sebagai dasar negara dan *Philosophische Grondslag*.

Sumber:

<http://rosodaras.wordpress.com/tag/bra-stagi/>

Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. **Pertama;** dalam sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama *Philosophische Grondslag daripada Indonesia Merdeka*. Adapun pidatonya sebagai berikut:

Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki! Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta Philosophische Grondslag, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu Weltanschauung, di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu". (Soekarno, 1985: 7).

Noor Bakry menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilosafatan. Beberapa ciri berpikir kefilosafatan meliputi: (1). sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri; (2). sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia; (3). sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (4). sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI (Bakry, 1994: 13--15).

Sastrapratedja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antarsesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara (Sastrapratedja, 2001: 1).

Istilah *Philosophische Grondslag* dan *Weltanschauung* merupakan dua istilah yang sarat dengan nilai-nilai filosofis. Driyarkara membedakan antara filsafat dan *Weltanschauung*. Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. *Weltanschauung* lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Driyarkara menegaskan bahwa *weltanschauung* belum tentu didahului oleh filsafat karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup (*Weltanschauung*) yang tidak didahului rumusan filsafat. Filsafat berada dalam lingkup ilmu, sedangkan *weltanschauung* berada di dalam lingkungan hidup manusia, bahkan banyak pula bagian dari filsafat (seperti: sejarah filsafat, teori-teori tentang alam) yang tidak langsung terkait dengan sikap hidup (Driyarkara, tt: 27).

Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*) nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 3 ayat (a) berbunyi, "Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan". Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan.

Kedua, Pancasila sebagai *Weltanschauung*, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*). *Weltanschauung* merupakan sebuah pandangan dunia (*world-view*). Hal ini menyitir pengertian filsafat oleh J. A. Leighton sebagaimana dikutip The Liang Gie, "*A complete philosophy includes a world-view or a reasoned conception of the whole cosmos, and a life-view or doctrine of the values, meanings, and purposes of human life*" (The Liang Gie, 1977: 8). Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam *Weltanschauung* itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan Bangsa Indonesia.



Anda dipersilakan untuk menelusuri nilai-nilai kearifan lokal dari daerah Anda masing-masing yang mencerminkan sila-sila Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Diskusikan dengan teman-teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

b. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawaban atas pertanyaan tersebut dikemukakan Titus, Smith and Nolan sebagai berikut. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di zaman modern sekarang ini pun, manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. **Pertama**, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketenteraman (*security*) dan kenikmatan (*comfort*). Akan tetapi, pada waktu yang sama manusia merasa tidak tenteram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. **Kedua**, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. (Titus, 1984: 24). Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan pahami adalah sebagai berikut. **Pertama**, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajagi

kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah diidentifikasi dan diselidiki, maka menjadi mudahlah bagi manusia untuk mendapatkan pemecahan persoalan atau untuk meneruskan mempertimbangkan jawaban-jawaban tersebut. **Kedua**, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. **Ketiga**, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai” (Titus, 1984: 26).

Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastrapratedja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. **Pertama**, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. **Kedua**, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. **Ketiga**, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. **Keempat**, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional (Sastrapratedja, 2001: 3). Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila, meskipun masih ada beberapa aspek lagi yang masih dapat dipertimbangkan.

B. Menanya Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Sistem Filsafat

1. Filsafat Pancasila sebagai *Genetivus Objectivus* dan *Genetivus Subjectivus*

Pancasila sebagai *genetivus-objektivus*, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik

filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul *Pancasila Ilmiah Populer*. Adapun Drijarkara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religious sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul *Pancasila dan Religi*.

Pancasila sebagai *genetivus-subjectivus*, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Sastrapratedja (2001: 2) mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun Soerjanto (1991:57-58) mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya.

2. Landasan Ontologis Filsafat Pancasila

Pancasila sebagai *Genetivus Subjectivus* memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup tiga dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Pernahkah Anda mendengar istilah "ontologi"? Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi (Taylor, 1955: 42). Substansi menurut *Kamus Latin – Indonesia*, berasal dari bahasa Latin "*substare*" artinya serentak ada, bertahan, ada dalam kenyataan. *Substantialitas* artinya sesuatu yang berdiri sendiri, hal berada, wujud, hal wujud (Verhoeven dan Carvallo, 1969: 1256).

Ontologi menurut pandangan Bakker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya (ekstensif) dan menurut segala aspeknya (intensif) (Bakker, 1992: 16). Lebih lanjut, Bakker

mengaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila dalam uraian berikut. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial (monodualisme), yang secara universal berlaku pula bagi substansi infrahuman, manusia, dan Tuhan. Kelima sila Pancasila menurut Bakker menunjukkan dan mengandaikan kemandirian masing-masing, tetapi dengan menekankan kesatuannya yang mendasar dan keterikatan dalam relasi-relasi. Dalam kebersamaan itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu hirarki teratur yang berhubungan satu sama lain, tanpa dikompromikankan otonominya, khususnya pada Tuhan. Bakker menegaskan bahwa baik manusia maupun substansi infrahuman bersama dengan otonominya ditandai oleh ketergantungan pada Tuhan Sang Pencipta. Ia menyimpulkan bahwa segala jenis dan taraf substansi berbeda secara esensial, tetapi tetap ada keserupaan mendasar (Bakker, 1992: 38).

Stephen W. Littlejohn dan Karen A Foss dalam *Theories of Human Communication* menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Setidaknya, ada empat masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial, yaitu: (1) pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata?; (2) apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat?; (3) Apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial?; (4) pada tingkatan apakah komunikasi sosial menjadi kontekstual? (Littlejohn and Foss, 2008: 26). Penerapan keempat masalah ontologis tersebut ke dalam Pancasila sebagai sistem filsafat menghasilkan hal-hal berikut. Pertama, ada tiga *mainstream* yang berkembang sebagai pilihan nyata bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu (1) determinisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh banyak kondisi sebelumnya sehingga manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Pancasila sebagai sistem filsafat lahir sebagai reaksi atas penjajahan yang melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana amanat yang tercantum dalam alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan*". (2) pragmatisme yang menyatakan bahwa manusia merencanakan perilakunya untuk mencapai tujuan masa depan sehingga manusia merupakan makhluk yang aktif dan dapat mengambil keputusan yang memengaruhi nasib mereka. Sifat aktif yang memunculkan semangat

perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan termuat dalam alinea II Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Adapun butir (3) aliran yang berdiri pada posisi tengah (kompromis) yang menyatakan bahwa manusia yang membuat pilihan dalam jangkauan yang terbatas atau bahwa perilaku telah ditentukan, sedangkan perilaku yang lain dilakukan secara bebas. Ketergantungan di satu pihak dan kebebasan di pihak lain tercermin dalam alinea III Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”*. Ketergantungan dalam hal ini adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sedangkan kebebasan bangsa Indonesia mengacu pada keinginan luhur untuk bebas merdeka.

Persoalan kedua, terkait dengan apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk *keadaan* atau *sifat*? Dalam hal ini, *keadaan* mencerminkan kedinamisan manusia, sedangkan *sifat* mengacu pada karakteristik yang konsisten sepanjang waktu (Littlejohn and Foss, 2008: 26). Keadaan dan sifat membentuk perilaku manusia sehingga penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang itu membentuk kedinamisan rakyat Indonesia untuk terus mengadakan perlawanan yang tertuang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sifat yang mengacu pada karakteristik bangsa Indonesia berupa solidaritas, rasa kebersamaan, gotong rotong, bahu-membahu untuk mengatasi kesulitan demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Persoalan ontologis ketiga yang dikemukakan Littlejohn and Fossterkait dengan apakah pengalaman manusia semata-mata individual ataukah sosial? Seiring dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, harus diakui memang ada individu-individu yang menonjol, seperti para pahlawan (Diponegoro, Imam Bonjol, Pattimura, dan seterusnya), tokoh-tokoh pergerakan nasional (Soekarno, M. Hatta, A.A Maramis, Agus Salim, dan seterusnya) yang mencatatkan nama-namanya di

dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Namun, harus pula diakui bahwa para pahlawan dan tokoh-tokoh pergerakan nasional itu tidak mungkin bergerak sendiri untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa Sepuluh November di Surabaya ketika terjadi pertempuran antara para pemuda, *arek-arek Surabaya* dan pihak sekutu membuktikan bahwa Bung Tomo berhasil menggerakkan semangat rakyat melalui orasi dan pidato-pidatonya. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk individu baru mempunyai arti ketika berelasi dengan manusia lain sehingga sekaligus menjadi makhluk sosial.



Gambar V.3: Bung Tomo, salah satu pahlawan nasional yang berhasil menggerakkan semangat rakyat melalui orasi dan pidato-pidatonya.

Sumber:

http://cdn.tempo.co/data/2015/11/08/id_452356/452356_620.jpg

Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan *raison d'être* sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Sastrapratedja (2010: 147--154) menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut: (1) Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. (2). Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. (3). Prinsip Persatuan

mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. (4). Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. (5). Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan (*welfare state*).



Anda diharapkan untuk menanya tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan sebagai mahasiswa melalui diskusi dengan sesama mahasiswa. Misalnya, apakah Anda dapat menerima jika teman anda minta izin untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya di saat sedang ada kegiatan bersama. Diskusikan dengan teman-teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

3. Landasan Epistemologis Filsafat Pancasila

Pernahkah Anda mendengar istilah “epistemologi”? Istilah tersebut terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan (*knowledge*). Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan (Bahm, 1995: 5). Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat *sui generis*, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar (Hardono Hadi, 1994: 23). Littlejohn and Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi sebagai berikut: (1) pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman? (2) pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti? (Littlejohn and Foss, 2008: 24).

Problem pertama tentang cara mengetahui itu ada dua pendapat yang berkembang dan saling berseberangan dalam wacana epistemologi, yaitu

rasionalisme dan empirisme. Kaum rasionalis berpandangan bahwa akal merupakan satu-satunya sarana dan sumber dalam memperoleh pengetahuan sehingga pengetahuan bersifat *a priori*. Empirisisme berpandangan bahwa pengalaman inderawi (empiris) merupakan sarana dan sumber pengetahuan sehingga pengetahuan bersifat *a posteriori*. Pancasila sebagaimana yang sering dikatakan Soekarno, merupakan pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengalaman kehidupan rakyat Indonesia sehingga Soekarno hanya menggali dari bumi pertiwi Indonesia. Namun, pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman, dalam kehidupan bangsa Indonesia, yakni ketika menetapkan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatasi pluralitas etnis, religi, dan budaya. Pancasila diyakini mampu mengatasi keberagaman tersebut sehingga hal tersebut mencerminkan tingkatan pengetahuan yang dinamakan *a priori*.

Problem kedua tentang pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti berkembang menjadi dua pandangan, yaitu pengetahuan yang mutlak dan pengetahuan yang relatif. Pancasila dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat sila-silanya, yaitu Tuhan, manusia, satu (solidaritas, nasionalisme), rakyat, dan adil dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Notonagoro menamakannya dengan istilah Pancasila abstrak-umum universal. Pada posisi yang lain, sifat relatif pengetahuan tentang Pancasila sebagai bentuk pengamalan dalam kehidupan individu rakyat Indonesia memungkinkan pemahaman yang beragam, meskipun roh atau semangat universalitasnya tetap ada. Notonagoro menyebutnya dengan pelaksanaan Pancasila umum kolektif dan singular konkrit. (Bakry, 1994: 45).

Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman (empiris) bangsa Indonesia, kemudian disintesis menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Sila Persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecahbelahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik *Devide et Impera* menimbulkan konflik antarmasyarakat Indonesia. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Misalnya, masyarakat Minangkabau mengenal peribahasa yang berbunyi "*Bulek aie dek pambuluh, bulek kato dek mufakat*", bulat air di dalam bambu, bulat kata dalam permufakatan. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong.



Gambar V.4: Musyawarah merupakan ciri khas masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah. (Sumber: <http://gallery-humas-agam.blogspot.com/2012/12/bupati-agam-membuka-acara-musyawah.html>)

4. Landasan Aksiologis Pancasila

Pernahkah Anda mendengar istilah “aksiologi”? Kalau belum pernah, maka satu hal yang perlu Anda ketahui bahwasanya istilah “aksiologis” terkait dengan masalah nilai (*value*). *The study of the theory of values is axiology (Gr. Axios, of like value + logos, theory). Pure axiology is the study of values of all types.* (Hunnex, 1986: 22). Frondizi (2001:7) menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, ia membutuhkan pengemban untuk berada.

Mari perhatikan beberapa contoh pernyataan sebagai berikut:

- a. Berapa nilai pertandingan antara Persipura melawan Persib?
- b. Berapa nilai sepeda motor Honda yang dipakainya itu?
- c. Berapa nilai IPK yang Anda peroleh semester ini?
- d. Lukisan Afandi dikatakan bersifat ekspresionis karena di situlah letak nilai keindahannya.

Istilah nilai yang digunakan dalam pernyataan tersebut bukan mengacu pada makna nilai (*value*) dalam arti filosofis, melainkan lebih mengacu pada arti skor (a), harga (b), dan angka atau *grade* (c). Nilai (*value*) lebih mengacu pada kualitas yang bersifat abstrak, yang melekat pada suatu objek, sebagaimana yang tercermin pada contoh pernyataan butir (d).

Littlejohn and Foss mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Salah satu masalah penting dalam aksiologi yang ditengarai Littlejohn and Foss, yaitu: dapatkah teori bebas dari nilai? (Littlejohn and Foss, 2008: 27--28). Problem apakah teori atau ilmu itu dapat bebas dari nilai, memiliki pengikut yang kuat dalam kubu positivisme. Pengikut positivis meyakini bahwa teori dan ilmu harus bebas nilai untuk menjaga semangat objektivitas ilmiah. Namun, perlu disadari bahwa tidak semua aspek kehidupan manusia dapat diukur secara “ilmiah” menurut perspektif positivistik karena banyak aspek kehidupan manusia ini yang mengandung muatan makna dan bernilai tinggi ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang berdimensi spiritual, ideologis, dan kepercayaan lainnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Kelima sila tersebut mengandung dimensi nilai yang “tidak terukur” sehingga ukuran “ilmiah” positivistik atas kelima sila tersebut sama halnya dengan mematikan denyut nadi kehidupan atau memekanisasikan Pancasila. Pancasila justru merupakan sumber nilai yang memberi aspirasi bagi rakyat Indonesia untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia seharusnya dikembangkan tidak hanya dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam bidang akademis sehingga teori ilmiah yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berorientasi pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Dunia akademis tidak berkembang dalam ruang hampa nilai sebab semangat akademis harus berisikan nilai spiritualitas untuk

menggugah kesadaran tentang pentingnya keyakinan kepada Sang Pencipta sebagai pendorong dan pembangkit motivasi kegiatan ilmiah.

Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong.



Gambar V.5: Gotong royong merupakan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat

Sumber: <http://muhammadbagusjazuli.blogspot.com/2011/05/nurul-ummah-gotong-royong-mrantas-gawe.html>



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan tentang implementasi nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai tantangannya, kemudian melaporkannya secara tertulis.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Filsafat

1. Sumber Historis Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di *Suluh Indonesia* yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh (Yudi Latif, 2011: 68). Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. (Lihat *Negara Paripurna*, Yudi Latif).

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi-politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial (Yudi-Latif, 2011: 57--59).

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim telah menjelajah keberbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah Internasionalisme atau Perikemanusiaan. Kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian, dan keadilan sosial serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia (Yudi-Latif, 2011: 201).

c. Sila Persatuan Indonesia.

Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Jika di tanah dan air yang kurang lebih sama, nenek moyang bangsa Indonesia pernah menorehkan tinta keemasannya, maka tidak ada alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak dapat mengukir kegemilangan (Yudi-Latif, 2011:377).

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia, yang muncul sebagai ikutan formasi negara republik Indonesia merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, banjar di Bali, dan lain sebagainya. Tan Malaka mengatakan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan Minangkabau, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kemudian, Hatta menambahkan ada dua anasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu; hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi (Yudi-Latif, 2011: 387--388).

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan "*Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja*". Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu,

para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran, keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme (Yudi-Latif, 2011: 493--494).

2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, *Way of life* yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah-akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis.

Kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius karena perkembangan kepercayaan yang ada di masyarakat sejak animisme, dinamisme, politeistik, hingga monoteis.

Pancasila sebagai sistem filsafat, menurut Notonagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Notonagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi.

Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramidal digambarkan Notonagoro (1980: 110) dengan bentuk piramida yang bertingkat lima, sila Ketuhanan Yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai alas piramida. Rumusan hierarkis piramidal itu dapat digambar sebagai berikut:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin

- oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
 - c. Sila Persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjiwai dan meliputi sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
 - d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
 - e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Kaelan, 2003: 60-61).

Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengkualifikasi atau mengisi dapat digambar sebagai berikut:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah KETUHANAN yang ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ber-Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah KEMANUSIAAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- c. Sila Persatuan Indonesia adalah PERSATUAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah KERAKYATAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah KEADILAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Kaelan, 2003: 61).



Gambar V.6: Salah satu kearifan lokal Suku Baduy adalah menyimpan padi di lumbung untuk mengatasi masa paceklik (kesusahan/kekurangan pangan)
 Sumber: (rynari.wordpress.com)



Anda dipersilakan menggali sumber informasi tentang berbagai bentuk kearifan lokal yang terkait dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan dalam budaya masyarakat Indonesia. Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

3. Sumber Politis Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama,

meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959, tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua, mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011.

Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka ketika Soekarno melontarkan konsep *Philosophische Grondslag*, dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei 1958 menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai *Weltanschauung* dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa (Soekarno, 2001: 65). Pada kuliah umum di Istana Negara pada 26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila I, pada garis besarnya manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan agama di Indonesia sehingga apabila elemen Ketuhanan ini dibuang, berarti telah membuang sesuatu yang mempersatukan batin segenap rakyat sebagai bangsa Indonesia. Kalau sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dimasukkan, maka akan kehilangan salah satu *leitstar* yang utama dalam kehidupan bangsa. Dengan demikian, elemen Ketuhanan ini perlu dimasukkan ke dalam sila-sila Pancasila, karena menjadi bintang penuntun atau pedoman dalam bertindak (Soekarno, 2001: 93).

Selanjutnya, Soekarno menjelaskan tentang Sila II yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam *chauvinisme* atau *rasialisme*. Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme ala Hitler merupakan nasionalisme yang tidak berperikemanusiaan karena didasarkan pada sikap *chauvinistis* (Soekarno, 2001: 142).

Soekarno memberikan kuliah umum tentang Sila III pada Juli 1958 di Istana Negara. Soekarno bertitik tolak dari berbagai pengertian tentang bangsa yang diambilnya dari berbagai pemikiran, seperti teori Ernest Renan yang mengatakan bahwa bangsa itu sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan bersatu hidup bersama (*Le desire d'être ensemble*). Soekarno juga

menyitir pendapat Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah persatuan, persamaan watak, yang dilahirkan karena persamaan nasib. Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, Soekarno menyimpulkan bahwa bangsa itu hidup dalam suatu kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan untuk mempersatukan (Soekarno, 2001: 114).

Sila IV, Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila kerakyatan pada 3 September 1958 di Istana Negara. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia, yang membawa keperibadian Indonesia sendiri. Demokrasi yang dimaksud bukanlah sekadar alat teknis, melainkan suatu alam jiwa pemikiran dan perasaan bangsa Indonesia (Soekarno, 2001: 165).

Dalam kuliah umum seminar Pancasila di Yogyakarta 21 Februari 1959, Soekarno menguraikan tentang arti sila V sebagai berikut: Keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan karena hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada masa penjajahan, dan para pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan (Soekarno, 2011: 191).

Kelompok kedua, diwakili Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah dilupakan dalam rentang waktu yang cukup panjang sekitar satu dasawarsa pada eforia politik di awal reformasi. Pidato Habibie dapat diuraikan sebagai berikut: **Pertama**, pernyataan Habibie tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama hingga era reformasi. Habibie mengatakan sebagai berikut.

“Selama enam puluh enam tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak zaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap zaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tidak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah” (Habibie, 2011: 1).

Kedua, pernyataan Habibie tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga diperlukan reaktualisasi Pancasila. Habibie menyatakan hal itu sebagai berikut:

"Beberapa perubahan yang kita alami antara lain: (1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya; (2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia (KAM); (3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga yang rentan terhadap "manipulasi" informasi dengan segala dampaknya. Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. (Habibie, 2011: 2).

Ketiga, penegasan Habibie tentang makna penting reaktualisasi Pancasila diungkapkan sebagai berikut:

".... reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa ke mana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian?" (Habibie, 2011: 5).

Keempat, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia diungkapkan Habibie dalam pernyataan berikut:

"Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam lima silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan" (Habibie, 2011: 6).

Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. "Bendera Negara Indonesia ialah sang merah putih". Pasal 36, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Pasal 36A, "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika". Pasal 36B, "Lagu kebangsaan Indonesia ialah

Indonesia Raya”. Bendera merah putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya, semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Tahukah Anda apa yang dimaksudkan dengan simbol itu? Simbol menurut teori Semiotika Peirce adalah bentuk tanda yang didasarkan pada konvensi. (Berger, 2010: 247). Simbol adalah tanda yang memiliki hubungan dengan objeknya berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau aturan. Simbol ditandai dengan kesepakatan, seperti halnya bahasa, gerak isyarat, yang untuk memahaminya harus dipelajari. Makna suatu simbol ditentukan oleh suatu persetujuan atau kesepakatan bersama, atau sudah diterima oleh umum sebagai suatu kebenaran. Contoh, lampu lalu lintas adalah simbol, yakni warna merah artinya berhenti, hijau berarti jalan, warna kuning berarti pengguna jalan harus berhati-hati. Simbol adalah sesuatu yang maknanya diterima sebagai suatu kebenaran melalui konvensi atau aturan dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat yang telah disepakati. Demikian pula halnya dengan Burung Garuda, diterima sebagai simbol oleh bangsa Indonesia melalui proses panjang termasuk dalam konvensi. Contoh, simbol Burung Garuda sebagai berikut:



Gambar V.7: Burung Garuda Pancasila sebagai simbol Negara
(<http://agusramdanirekap.blogspot.com/2011/12/arti-dan-makna-lambang-garuda-pancasila.html>)

Tahukah Anda apa arti dari simbol yang termuat dalam perisai di dada Burung Garuda tersebut? Berikut adalah arti dalam lambang Garuda Pancasila tersebut:



Gambar V.8: Perisai Pancasila
Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>

- a. Garuda Pancasila sendiri adalah Burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wishnu yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.
- b. Warna keemasan pada Burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan.
- c. Garuda memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan.
- d. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari jadi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, di antaranya:
 - 1) 17 helai bulu pada masing-masing sayap
 - 2) 8 helai bulu pada ekor
 - 3) 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor
 - 4) 45 helai bulu di leher
- e. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.
- f. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat.
- g. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan negara Indonesia "Merah-Putih", sedangkan pada bagian tengah berwarna dasar hitam.

- h. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan pada lambang perisai adalah sebagai berikut:
- 1) Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa; dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar hitam.
 - 2) Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah.
 - 3) Sila ketiga: Persatuan Indonesia; di lambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih.
 - 4) Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah.
 - 5) Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; Dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih.

Rancangan awal burung garuda dibuat oleh Sultan Hamid II. **Sultan Hamid II** lahir dengan nama **Syarif Abdul Hamid Alkadrie**, putra sulung Sultan Pontianak Sultan Syarif Muhammad Alkadrie (lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, 12 Juli 1913 – meninggal di Jakarta, 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun).



Gambar V.9: Rancangan burung Garuda oleh Sultan Hamid II
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Hamid_II



Gambar V.10: Garuda yang sudah disempurnakan dan diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950

Sumber:

[http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Winner_Republik_Indonesia_Serikat_\(United_States_of_Indonesia\)_COA_1950.jpg](http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Winner_Republik_Indonesia_Serikat_(United_States_of_Indonesia)_COA_1950.jpg)



Anda dipersilakan untuk menggali sumber politis tentang Burung Garuda Pancasila sebagai simbol negara. Diskusikan dengan teman kelompok Anda faktor penyebab nama Sultan Hamid II kurang dikenal dalam sejarah sebagai perancang simbol Garuda Pancasila, kemudian laporkan secara tertulis.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat

1. Dinamika Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah "*Philosophische Grondslag*". Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang *Philosophische Grondslag* belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang, dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih

menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia.

Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis (dalam hal ini istilah yang lebih tepat adalah *weltanschauung*). Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P-4.

Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa:

“Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik” (Habibie, 2011: 1--2).

2. Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain.

Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah

dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat

1. Esensi (hakikat) Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Hakikat (esensi) Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut:

Pertama; hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom (kebebasan, kemandirian) di satu pihak, dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta.

Kedua; hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis, yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat (jiwa, raga), sifat kodrat (makhluk individu, sosial), kedudukan kodrat (makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan) (Notonagoro).

Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air, yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air *real*, tanah air formal, dan tanah air mental. **Tanah air real** adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka, dan berduka, yang dialami secara fisik sehari-hari. **Tanah air formal** adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar, yang Anda, manusia Indonesia, menjadi salah seorang warganya, yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan, dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenalan lainnya. **Tanah air mental** bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital (Daed Joesoef, 1987: 18-20)

Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas.

Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara (Notonagoro dalam Kaelan, 2013: 402).

2. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. **Pertama**, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materiil maupun spiritual. **Kedua**, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. **Ketiga**, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. **Keempat**, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi *way of life* sekaligus *way of thinking* bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa.

F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara (*Philosophische Grondslag*) dan pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*). Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang

mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai *genetivus objectivus* dan Pancasila sebagai *genetivus subjectivus*. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya, sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya.

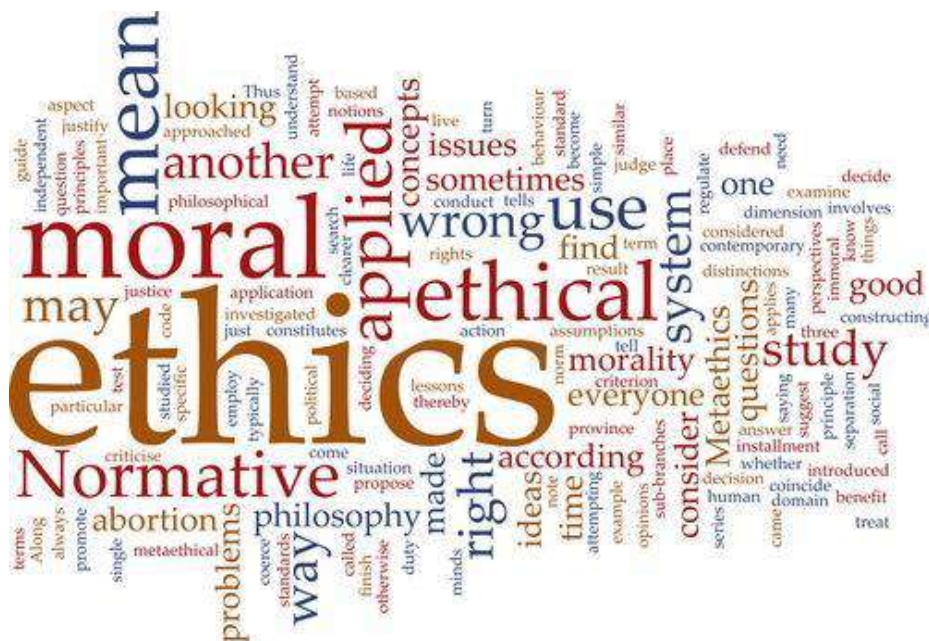
Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik; agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara; agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

G. Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Untuk memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang:

1. Berbagai konsep dan pengertian kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang terkait dengan sikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya.
2. Berbagai kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasilais, seperti jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, dan cinta damai di lingkungan Anda.
3. Contoh tentang keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat di lingkungan sekitar Anda.
4. Berbagai konsep dan pengertian yang terkait dengan pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila dan bagaimana pengaktualisasian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap dan berperilaku masyarakat?
5. Evaluasi hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan tentang Pancasila yang hidup di sekitar Anda.

BAGAIMANA PANCASILA MENJADI SISTEM ETIKA?



Gambar VI.0 Etika merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan dalam bersikap dan bertindak laku

Pancasila sebagai sistem *etika* di samping merupakan *way of life* bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertindak laku. Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah-akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat

mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas, dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai (*value-free*).

Anda sebagai mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan *moral guidance* yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkrit, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral-akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya.

Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga mahasiswa memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi dan dekadensi moral dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Kompetensi Dasar

Taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam pengembangan keilmuan, serta kehidupan akademik dan profesinya; mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial, dan alam; mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif; berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum; menguasai pengetahuan tentang pengertian etika, aliran-aliran etika, etika Pancasila, dan Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa; terampil merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa dengan

pendekatan Pancasila; melaksanakan proyek belajar implementasi Pancasila dalam kehidupan nyata.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

1. Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika

a. Pengertian Etika

Pernahkah Anda mendengar istilah “etika”? Walaupun Anda pernah mendengar istilah tersebut, tahukah Anda apa artinya? Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani, “*Ethos*” yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk (Bertens, 1997: 4--6). Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika (Sastrapratedja, 2002: 81).

Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Apakah yang Anda ketahui tentang nilai? Frondizi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, nilai membutuhkan pengembalian untuk berada (2001:7). Misalnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Lacey menjelaskan bahwa paling tidak ada enam pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya.
2. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang.

3. Suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri.
4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan.
5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertindak laku bagi dirinya dan orang lain.
6. Suatu "objek nilai", suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. (Lacey, 1999: 23).

Dengan demikian, nilai sebagaimana pengertian butir kelima (5), yaitu sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak, merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini pula yang diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak.

Namun, tahukah Anda bahwa dalam bahasa pergaulan orang acap kali mencampuradukkan istilah "etika" dan "etiket"? Padahal, keduanya mengandung perbedaan makna yang hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal usul katanya, etika berasal dari kata "*ethos*", sedangkan etiket berasal dari kata "*etiquette*". Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif. tetapi Etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat, yang diharapkan, serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh, mencuri termasuk pelanggaran moral, tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket, misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket (Bertens, 1997: 9).

Anda dipersilakan untuk mencermati gambar berikut dan diminta untuk membedakan persoalan **etika**, persoalan **etiket**, dan **kode etik profesi**.



Gambar VI.1: Tidak mencontek merupakan salah satu etika dalam melaksanakan ujian sekolah

Sumber: <http://yumnaku.blogspot.com/2012/06/mencontek.html>



Gambar VI.2: Meminta doa restu orang tua merupakan salah satu etika sebelum berangkat sekolah

Sumber: <http://www.anneahira.com/adab-terhadap-orang-tua.htm>



Gambar VI.3: Korupsi merupakan penyakit moral yang kronis yang perlu disembuhkan. (Sumber: <http://loperkoran.wordpress.com/>)



*Anda dipersilakan untuk menelusuri konsep dan pengertian **etika**, **etiket**, dan **kode etik** dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mendiskusikannya dengan teman sekelompok Anda untuk menganalisis perbedaan di antara ketiganya dan melaporkannya secara tertulis.*

b. Aliran-aliran Etika

Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan (*virtue*), artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada *What should I be?*, atau “saya harus menjadi orang yang bagaimana?”. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, ksatriya, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja bersama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, ughari (bersahaja), disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran (Mudhofir, 2009: 216--219). Orang yang memelihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesehatan yang prima juga dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan diri dan disiplin, sebagaimana nasihat Hippocrates berikut ini.

“All parts of the body which have a function, if use moderation and exercise in labours in which each is accustomed, become thereby healthy, well-developed and age slowly, but if unused and left idle they become liable to disease, defective growth, and age quickly”¹

Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan (Mudhofir, 2009: 214). Aliran-aliran etika teleologis, meliputi eudaemonisme, hedonisme, utilitarianisme.

Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan, kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral (yang baik) dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis (Mudhofir, 2009: 141).

Aliran Etika dan Karakteristiknya

Aliran	Orientasi	Watak nilai	Keterangan
Etika Keutamaan	Keutamaan atau kebajikan	Disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya	Moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan.

¹ (<http://www.medscape.org/viewarticle/554276>)

Teleologis	Konsekuensi atau akibat	Kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir	Aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti: Eudaemonisme, Hedonisme, Utilitarianisme.
Deontologis	Kewajiban atau keharusan	Kelayakan, kepatutan, kepantasan	Pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih.



Ketiga mainstream dalam bidang etika sebagaimana diuraikan di atas mewarnai sikap dan perilaku masyarakat dewasa ini. Anda dipersilakan untuk menelusuri dan menemu kenali (mengidentifikasi) konsep dan pengertian Eudaemonisme, Hedonisme, Utilitarianisme dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda! Kemudian, Anda diminta untuk mendiskusikannya dalam kelompok Anda tentang keunggulan dan kelemahan masing-masing aliran etika tersebut dan melaporkannya secara tertulis.

c. Etika Pancasila

Setelah Anda mendapat gambaran tentang pengertian etika dan aliran etika, maka selanjutnya perlu dirumuskan pengertian etika Pancasila, dan aliran yang lebih sesuai dengan etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi *humanus*, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan (*mitsein*), cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain.

Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, meskipun corak kedua *mainstream* yang lain, deontologis dan teleologis termuat pula di dalamnya. Namun, etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam empat tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal – rasa – kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak (Tuhan) dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Kesederhanaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Keteguhan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya (Mudhofir, 2009: 386).



Anda dipersilakan untuk menelusuri konsep dan pengertian Pancasila sebagai sistem etika sebagaimana yang terkandung dalam sila 1, 2, 3, 4, dan 5 sehingga penamaan etika Pancasila sebagai Common Denominator dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah-filosofis.

Kemudian mendiskusikan tentang etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia dalam kelompok Anda dan melaporkannya secara tertulis.

2. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. **Pertama**, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. **Kedua**, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. **Ketiga**, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara, seperti: kasus penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta, pada tahun 2013 yang lalu. **Keempat**, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. **Kelima**, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia Schapell Corby. **Keenam**, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia

membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus panama papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai *Leading Principle* bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis-rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi lantaran seorang pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang memerlukan bantuan atau jasa si pejabat agar urusannya lancar. Si pejabat menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan hadiah. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang menerima sesuatu dalam konteks politik sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk suap, seperti contoh berikut:



Gambar VI.4: Salah satu etika dalam berdemokrasi adalah menolak berbagai macam bentuk suap dalam proses pemilihan wakil-wakil rakyat.

Sumber: Kompas.com



Anda diharapkan untuk menelusuri dan mendiskusikan dalam kelompok Anda berbagai contoh yang terkait dengan pemberian hadiah yang tulus dan hadiah yang mengandung unsur gratifikasi sehingga Anda dapat membedakan antara suatu pemberian itu dikatakan suap dan hadiah atau pemberian yang tulus atau pemberian tanpa pamrih. Kemudian, buatlah laporan hasil diskusi tersebut secara tertulis.

B. Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Sistem Etika

Anda perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Anda dapat bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi *guidance* atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral, antara lain: penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah.

Kedua, korupsi akan bersimharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk (*good and bad*). Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik (*good*) dan buruk (*bad*). Archie Bahm dalam *Axiology of Science*, menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia, maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk (korupsi), maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Archie Bahm, "Maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan" (Bahm, 1998: 58).

Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Berikut ini diperlihatkan gambar tentang iklan layanan masyarakat tentang pendidikan yang dibiayai dengan pajak.



Gambar VI.5: Pajak yang telah dibayar oleh masyarakat salah satunya digunakan untuk membiayai pendidikan di Indonesia, membangun gedung sekolah, mendanai Bantuan Operasional Sekolah, maupun untuk membeli buku-buku pelajaran agar jutaan anak Indonesia dapat terus bersekolah. (Sumber: www.pajeglempung.com)

Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT), penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-

nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM (Lihat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, *global warming*, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Selain itu, penggiat lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga perlu mendapat penghargaan seperti gambar berikut.



Gambar VI.6: Penerima penghargaan Kalpataru sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap pemerhati lingkungan.

Sumber: <http://www.voaindonesia.com/content/presiden-bagikan-penghargaan-kalpataru-dan-adipura/1678556.html>

Lingkungan hidup yang nyaman melahirkan generasi muda yang sehat dan bersih sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi lebih bermakna sebagaimana tercermin dalam gambar berikut.



Gambar VI.7: Menanam pohon sebagai bentuk kesadaran atas lingkungan hidup yang asri.

Sumber: <http://seminarhasilpenelitian.wordpress.com/2010/03/24/10-alasan-untuk-menanam-pohon/>



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dalam kelompok Anda berbagai faktor penyebab terjadinya perusakan lingkungan dan dampak perusakan lingkungan terhadap hajat hidup orang banyak, kemudian melaporkannya secara tertulis.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Etika

1. Sumber historis

Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung*. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa orde lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).

Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P-4 dan diinstitutionalkan dalam wadah BP-7. Ada banyak butir

Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP-7. Untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila dapat dilihat pada tabel berikut (Soeprapto, 1993: 53--55).

SILA PANCASILA		CARA PENGAMALAN
1. Ketuhanan Yang Maha Esa	a.	Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
	b.	Hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
	c.	Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
	d.	Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	a.	Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
	b.	Saling mencintai sesama manusia.
	c.	Mengembangkan sikap tenggang rasa.
	d.	Tidak semena-mena terhadap orang lain.
	e.	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
	f.	Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
	g.	Berani membela kebenaran dan keadilan.
	h.	Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
3. Persatuan Indonesia	a.	Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan ber negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
	b.	Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
	c.	Cinta tanah air dan bangsa.
	d.	Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
	e.	Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka tunggal ika.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan	a.	Sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
	b.	Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
	c.	Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
	d.	Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
	e.	Dengan itikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah.
	f.	Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
	g.	Putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	a.	Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
	b.	Bersikap adil.
	c.	Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

	d. Menghormati hak-hak orang lain. e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. g. Tidak bersifat boros. h. Tidak bergaya hidup mewah. i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. j. Suka bekerja keras. k. Menghargai hasil karya orang lain. l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah *abuse of power*, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara.



Anda dipersilakan untuk menggali sumber historis Pancasila sebagai sumber etika pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Membandingkan dan menunjukkan kekhasan yang terdapat pada masing-masing zaman.

Menunjukkan dalam berbagai contoh bentuk pelanggaran etis yang dilakukan pada masing-masing zaman.

Kemudian, mendiskusikannya dalam kelompok Anda dan melaporkannya secara tertulis.

2. Sumber Sosiologis

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip “bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat”. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam.



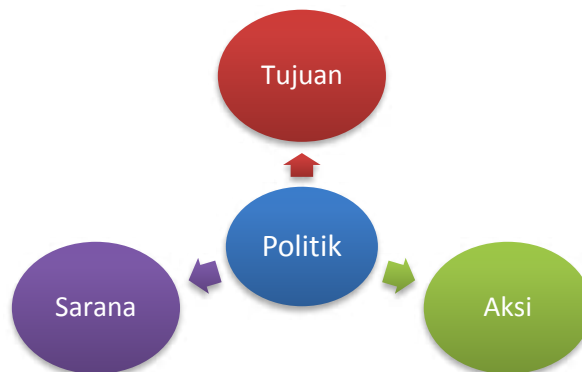
Anda diminta mencari dan menggali sumber sosiologis tentang berbagai kearifan lokal di Indonesia yang terkait dengan sistem etika berdasarkan sila-sila Pancasila. Kemudian, mendiskusikan dalam kelompok Anda berbagai bentuk kearifan lokal (local wisdom) dan hambatan lokal (local constraint) dalam kelompok etnis tertentu.

3. Sumber politis

Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar (*Grundnorm*) sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkrit norma tersebut (Kaelan, 2011: 487). Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi (*Grundnorm*) yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkrit.

Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan (Haryatmoko, 2003: 25 – 28).

Hubungan antara dimensi tujuan, sarana, dan aksi politik dapat digambarkan sebagai berikut (Haryatmoko, 2003: 26).



Gambar VI.8 Hubungan antara dimensi tujuan, sarana, dan aksi politik



Anda diminta untuk menggali sumber politis tentang Pancasila sebagai sistem etika dalam bentuk perilaku politik yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, mendiskusikannya dalam kelompok Anda dan melaporkannya secara tertulis.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Sistem Etika

Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. **Pertama**, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi memenangkan empat partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Nahdhatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila, bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin, yang cenderung otoriter.

Kedua, pada zaman Orde Baru sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P-4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang (Martodihardjo, 1993: 171).

Manusia Indonesia seutuhnya (adalah makhluk mono-pluralis yang terdiri atas susunan kodrat: jiwa dan raga; Kedudukan kodrat: makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri; sifat kodrat: makhluk sosial dan makhluk individual. Keenam unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan, pokok dan pelaku utama dalam budaya Pancasila. (Notonagoro dalam Asdi, 2003: 17-18).

Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta machiavelisme (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan). Sofian Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada dalam sambutan pembukaan Simposium Nasional Pengembangan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional (2006: xiv) mengatakan sebagai berikut:

"Bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa".



Gambar VI.9: Hilangnya Nasionalisme
Sumber: <http://blogs.itb.ac.id/djadja/tag/nasionalisme/>

2. Argumen tentang Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika

Apakah Anda mengetahui bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika apa saja yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia? Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila.

Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat.

Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK (Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi) yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu.

Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era Reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi.



Anda dipersilakan untuk membangun argumen dan menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan atas Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Kemudian, mendiskusikannya dalam kelompok Anda dan melaporkannya secara tertulis.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

1. Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut:

Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama,

maka prinsip tersebut memiliki kekuatan (*force*) untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya.

Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada *actus humanus*, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan *actus homini*, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antarmanusia dan antarmakhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan.

Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa.

Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain.

Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata (deontologis) atau menekankan pada tujuan belaka (teleologis), tetapi lebih menonjolkan keutamaan (*virtue ethics*) yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri.

2. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. **Kedua**, Pancasila sebagai sistem etika memberi *guidance* bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. **Ketiga**, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. **Keempat**, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas

nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara.



ILUSTRASIKAN GAMBAR TENTANG PENEMPATAN PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA!

F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Sistem Etika

Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya.

Pentingnya pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara, seperti korupsi (penyalahgunaan kekuasaan) dapat diminimalkan.

G. Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Sistem Etika

Untuk memahami Pancasila sebagai sistem etika, Anda dipersilakan mencari informasi dari berbagai sumber tentang:

1. Beberapa kasus yang memperlihatkan keterampilan individu atau kelompok dalam merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa (misalnya: kepatuhan membayar pajak, mencegah korupsi, dan lain-lain) dengan pendekatan Pancasila.
2. Beberapa contoh individu atau kelompok di lingkungan Anda yang melaksanakan proyek belajar implementasi Pancasila dalam kehidupan nyata.

BAB VII

MENGAPA PANCASILA MENJADI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU?



Gambar VII.0 ideologi Pancasila berperan sebagai *leading principle* dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. (Sumber: careerminer.infomine.com)

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya, artinya iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Kuntowijoyo dalam konteks pengembangan ilmu menengarai bahwa kebanyakan orang sering mencampurkan antara kebenaran dan kemajuan sehingga pandangan

seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Kuntowijoyo menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat *non-cumulative* (tidak bertambah) karena kebenaran itu tidak makin berkembang dari waktu ke waktu. Adapun kemajuan itu bersifat *cumulative* (bertambah), artinya kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Agama, filsafat, dan kesenian termasuk dalam kategori *non-cumulative*, sedangkan fisika, teknologi, kedokteran termasuk dalam kategori *cumulative* (Kuntowijoyo, 2006: 4). Oleh karena itu, relasi iptek dan budaya merupakan persoalan yang seringkali mengundang perdebatan.

Relasi antara iptek dan nilai budaya, serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. **Pertama**, iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap *human-religius*. **Kedua**, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai *human-religius*. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. **Ketiga**, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri (faktor internal), tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal (budaya, ideologi, dan agama) untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat.

Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama, meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama, jelas bercorak positivistis. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sebab

iptek yang berkembang di ruang hampa nilai, justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan.

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab, pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa, justru dapat mengakibatkan sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman *Renaissance* di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas.

Bertitik tolak dari asumsi di atas, maka *das Sollen* ideologi Pancasila berperan sebagai *leading principle* dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Para Ilmuwan tetap berpeluang untuk mengembangkan profesionalitasnya tanpa mengabaikan nilai ideologis yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri.

Kompetensi Dasar:

Bersikap inklusif, toleran dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya; bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat; merumuskan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia; merumuskan konsep karakter keilmuan berdasar Pancasila; menciptakan model pemimpin, warga negara dan ilmuwan yang Pancasila.

A. Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

1. Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. **Pertama**, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. **Kedua**, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-

nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. *Ketiga*, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. *Keempat*, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indegenisasi ilmu (mempribumikan ilmu).

Keempat pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengertian kedua bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan.

Pengertian ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main.

Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indegenisasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia, sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil.

2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Apakah Anda menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua, di satu sisi iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi, tetapi di pihak lain dapat membunuh, bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikut, bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Nilai kemanusiaan bukan milik individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia.



Gambar VII.1: Dampak bom atom di Hiroshima menimbulkan korban dan kesengsaraan.

Sumber: http://ilmupengetahuandanisinya.blogspot.com/2010_12_01_archive.html

Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. *Kedua*, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh

karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. **Ketiga**, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.



Anda dipersilakan untuk menelusuri pengaruh pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Anda diharapkan untuk mendiskusikan dalam kelompok Anda hal tersebut dan mengajukan tawaran solusi bagi pengembangan iptek yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian melaporkannya secara tertulis.

B. Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Pernahkah terpikir oleh Anda bahwa tidak ada satu pun bangsa di dunia ini yang terlepas dari pengaruh pengembangan iptek, meskipun kadarnya tentu saja berbeda-beda. Kalaupun ada segelintir masyarakat di daerah-daerah pedalaman di Indonesia yang masih bertahan dengan cara hidup primitif, asli, belum terkontaminasi oleh kemajuan iptek, maka hal itu sangat terbatas dan tinggal menunggu waktunya saja. Hal ini berarti bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh pengembangan iptek yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan gejala yang merambah ke seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. **Pertama**, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang, menerima resiko kehidupan

yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana, seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya.

Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler.

Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti: budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi *free rider* di negara ini, sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme; solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis; musyawarah untuk mufakat digantikan dengan *voting*, dan seterusnya.



Gambar VII.2: *Free rider*, menikmati manfaat pembangunan tanpa berkontribusi melalui pajak. Hal ini diibaratkan seperti penumpang kereta api yang tidak membeli tiket tetapi menikmati manfaat transportasi tersebut

(Sumber: <http://kp2kpngabang.blogspot.co.id/2013/09/jangan-menjadi-free-rider-di-atas-roda.html>)



Anda dipersilakan untuk menanya alasan tentang faktor-faktor penyebab mudurnya nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, solidaritas, kinerja dan produktivitas yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek.

Silakan diskusikan dalam kelompok Anda nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda dalam perkembangan iptek, kemudian melaporkannya secara tertulis.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

1. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi:

*"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ... dan seterusnya".*

Kata "mencerdaskan kehidupan bangsa" mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam Pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya, yakni Pancasila. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai sipiritualitas, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cerdik cendekia atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Para intelektual merangkap sebagai pejuang

bangsa masih disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Penjajahan tidak hanya menguras sumber daya alam negara Indonesia, tetapi juga menjadikan bagian terbesar dari rakyat Indonesia berada dalam kemiskinan dan kebodohan. Segelintir rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di masa penjajahan itulah yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa sehingga ketika negara Indonesia merdeka diproklamirkan, mereka merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia". Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Soekarno dalam rangkaian kuliah umum *Pancasila Dasar Falsafah Negara* pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959 sebagaimana disitir Sofian Effendi, Rektor UGM dalam Simposium dan Sarasehan *Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa*, 14 – 15 Agustus 2006, selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan *blueprint* bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Effendi, 2006: xiii). Pancasila sebagai *blueprint* dalam pernyataan Soekarno kurang lebih mengandung pengertian yang sama dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek karena sila-sila Pancasila sebagai cetak biru harus masuk ke dalam seluruh rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia.

Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia, salah satunya adalah di perguruan tinggi.

Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar 1980-an, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang membicarakan hal tersebut adalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada 15 Oktober 1987, Universitas Gadjah Mada

menyelenggarakan seminar dengan tema ***Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*** bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Gadjah Mada pada waktu itu, Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H. menegaskan bahwa seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi Pengembangan Ilmu merupakan hal baru, dan sejalan dengan Pasal 2 Statuta Universitas Gadjah Mada yang disitirnya dalam dalam sambutan, berbunyi sebagai berikut:

“Universitas Gadjah Mada adalah lembaga pendidikan tinggi nasional bagi pembentukan dan pengembangan kepribadian serta kemampuan manusia seutuhnya bagi pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bagi pelestarian dan pengembangan secara ilmiah unsur-unsur dan seluruh kebudayaan serta lingkungan hidup dan lingkungan alaminya, yang diselenggarakan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara sesuai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tercapainya cita-cita proklamasi kemerdekaan seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945” (Koesnadi, 1987: xi-xii).

Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Prof. Notonagoro, anggota senat Universitas Gadjah Mada sebagaimana dikutip oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri dalam sambutan seminar tersebut, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki (Koesnadi, 1987: xii). Penggunaan istilah “asas dan pendirian hidup” mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan ilmiah.

Daoed Joesoef dalam artikel ilmiahnya yang berjudul ***Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan*** menyatakan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia, artinya nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai sehingga menuntunnya untuk membuat pertimbangan (*judgement*) tertentu tentang gejala, ramalan, dan anjuran tertentu mengenai langkah-langkah praktikal (Joesoef, 1987: 1, 15). Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut cara pandang Daoed Joesoef adalah sebagai tuntunan dan pertimbangan nilai dalam pengembangan iptek.

Prof. Dr. T Jacob melihat bahwa pada abad XVII terjadi perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Hal ini ditandai dengan terjadinya sekularisasi ilmu pengetahuan sehingga terjadi pemisahan antara raga dan jiwa yang dipelajari secara terpisah. Bagian raga diperlakukan sebagai materi dan diterangkan sebagaimana halnya dengan gejala alam. Ilmu pengetahuan alam terpisah dari ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Menjelang akhir abad XX, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat sehingga terjadi teknologisasi kehidupan dan penghidupan. Teknologi berkembang sendiri dan makin terpisah, serta jauh meninggalkan agama dan etika, hukum, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora (Jacob, 1987: 51-52). Prof. Dr. T. Jacob menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, lima prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu (1) Monoteisme; (2) Humanisme dan solidaritas karya negara; (3). Nasionalisme dan solidaritas warga negara; (4). Demokrasi dan perwakilan; (5). Keadilan sosial (Jacob, 1987: 59).

Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan Jacob sebagai berikut: *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa*, melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Sila pertama ini, menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. *Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. *Sila Persatuan Indonesia*, melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain sehingga *supra-sistem* tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Aspek universal dan lokal harus dapat hidup secara harmonis dengan tidak saling merugikan. *Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*, mengimbangi autodinamika iptek, serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Percobaan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarakannya sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan massal hasil-hasilnya. *Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*,

menekankan ketiga keadilan Aristoteles (distributif, legalis, dan komutatif) dalam pengembangan, pengajaran, penerapan iptek. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Contoh penerapan Pancasila sebagai etika ilmiah, antara lain hormat terhadap hayat (penerapan sila I); Persetujuan sukarela untuk eksperimen dengan penerangan yang cukup dan benar tentang guna dan akibatnya (II dan IV); Tanggung jawab sosial ilmu pengetahuan dan teknologi harus lebih penting daripada pemecahan persoalan ilmiah (sila II dan V); Pelestarian lingkungan melewati generasi (sila I, II, V) (Jacob, 1987: 59--61). Sikap ilmiah yang didasarkan pada moralitas Pancasila merupakan upaya pengendalian pengembangan iptek, sekaligus sebagai faktor penyeimbang antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.



ILUSTRASIKAN GAMBAR YANG MENCERMINKAN AKTIVITAS ILMIAH YANG DIWARNAI NILAI-NILAI PANCASILA!

Koentowijoyo dalam artikelnya, *Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Humaniora di Indonesia* bertitik tolak dari kesadaran bahwa manusia hidup di tengah-tengah tiga lingkungan, yaitu lingkungan material, lingkungan sosial, dan lingkungan simbolik. Lingkungan material terkait dengan lingkungan buatan manusia, seperti rumah, jembatan, peralatan, dan lain sebagainya. Lingkungan sosial ialah organisasi sosial, stratifikasi, sosialisasi, gaya hidup, dan sebagainya. Lingkungan simbolik ialah segala sesuatu yang meliputi makna dan komunikasi, seperti bahasa, mite, nyanyian, seni, upacara, tingkah laku, konsep, dan lain sebagainya (Koentowijoyo, 1987: 90). Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam tafsir Koentowijoyo diletakkan sebagai kekuatan normatif humanisasi yang melawan kekuatan kecenderungan naturalisasi manusia, mekanisasi manusia, dan kesadaran teknik. Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif humanisasi dapat merupakan dorongan ke arah dua hal penting: **Pertama**, universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan dengan struktur, terutama penggunaan simbol untuk kepentingan sebuah kelas sosial, baik yang datang dari kubu pasar bebas maupun dari negara perencana. **Kedua**, transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual untuk

melawan dehumanisasi dan subhumanisasi manusia yang datang dari teknologi dan ilmu pengetahuan (Koentowijoyo, 1987: 101).

Simposium dan Sarasehan *Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa* yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan KAGAMA, LIPI, dan LEMHANNAS merupakan upaya untuk menempatkan kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Sofian Effendi, rektor UGM dalam sambutan Simposium tersebut menegaskan bahwa dunia perguruan tinggi seharusnya menjadi *intellectual bastion* (benteng pertahanan intelektual) dalam pengembangan meta-ontologis tentang filsafat ilmu pengetahuan yang menurunkan ilmu pengetahuan yang mendukung kepentingan nasional bangsa Indonesia (Sofian Effendi, 2006: xliv). Beberapa tokoh intelektual yang berpartisipasi dalam simposium dan sarasehan tersebut, antara lain Prof. Dr. Muladi, Prof. Dr. M. Sastraparadja, dan Prof. Dr. Ir. Wahyudi Sediawan.

Prof. Dr. Muladi menegaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai *common denominator values*, artinya nilai yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan melalui *counter values and counter culture*. Pancasila merupakan refleksi penderitaan bangsa-bangsa di dunia secara riil sehingga mengandung nilai-nilai agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai universal HAM. Selanjutnya, Muladi mengaitkan Pancasila dan ilmu pengetahuan dengan meletakkannya pada posisi *in between*, yaitu antara *operational science* yang didasarkan pada *regularity occurring phenomena* dengan *non-origin science* yang didasarkan atas *non-repeatable events* yang biasa dikaitkan dengan alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Muladi, 2006: l-liii). Dengan demikian, pengembangan ilmu dan teknologi seharusnya dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai *common denominator values*, yakni nilai-nilai yang disepakati bersama-sama oleh bangsa Indonesia, sekaligus sebagai kerangka acuan bersama.

Prof. Dr. M. Sastraparadja dalam artikelnya yang berjudul, *Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan* menegaskan ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek, yaitu *pertama*, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, yang *kedua*, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan

mencakup lima hal sebagai berikut. *Pertama*, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan *religious*, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. *Kedua*, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. *Ketiga*, iptek merupakan unsur yang “menghomogenisasikan” budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antarmasyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkuat kesatuan dan membangun identitas nasional. *Keempat*, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. *Kelima*, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus menerus sehingga semakin merata, sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial (Sastrapratedja, 2006: 52--53).

Hal kedua yang meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat dirinci sebagai berikut. (1) Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik; (2) iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan; (3) pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global (4) iptek harus terbuka untuk masyarakat; lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat; (5) iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil (Sastrapratedja, 2006: 53).

Salah satu disiplin ilmu yang acapkali menjadi sorotan karena menyuarakan kepentingan pasar adalah bidang Ekonomi. Pertanyaan yang sering muncul ke permukaan ialah apakah landasan nilai pengembangan ilmu ekonomi di Indonesia? Persoalan ini tampaknya telah menggelitik salah seorang ekonom kenamaan di Indonesia, yaitu Prof. Emil Salim. Pada 1965, Emil Salim memperkenalkan untuk pertama kalinya istilah ekonomi Pancasila dan memublikasikan dua karangan tentang ekonomi Pancasila, yaitu pertama dalam bentuk monografi yang diterbitkan LEKNAS (Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional); yang kedua dalam satu bab khusus buku yang diterbitkan LEKNAS untuk peserta Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional). Istilah ekonomi Pancasila dari Emil Salim, kemudian berkembang dalam

seminar-seminar tentang ekonomi Pancasila yang diselenggarakan sekitar dan 1981. Tokoh atau ekonom yang serius mengembangkan ekonomi Pancasila ini adalah Prof. Mubyarto. Perbedaan di antara kedua tokoh tersebut, ialah Emil Salim mencoba memberi pendasaran terhadap jalan ekonomi yang akan diambil pemerintahan Orde Baru, tetapi Emil Salim tidak pernah menolak kehadiran ekonomi neo-klasik, sebab ia berpandangan bahwa ilmu ekonomi itu bersifat universal. Kalaupun terdapat ketidaksesuaian antara teori ekonomi dan praktik, maka kekeliruannya terletak pada praktik. Oleh karena itu, Emil Salim tidak menyusun teori baru karena memang ilmu ekonomi (neo-klasik) tidak keliru, hanya penerapannya yang mungkin keliru. Berbeda halnya dengan Mubyarto yang dalam pidato Pengukuhan sebagai guru besar ekonomi pada 1979 di Universitas Gadjah Mada dengan tegas mengemukakan bahwa ilmu ekonomi *mainstream* (neo-klasik) tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Mubyarto menegaskan bahwa teori ekonomi neo-klasik tidak mampu mendistribusikan kue ekonomi secara merata, dan tidak mendukung terhadap gagasan keadilan sosial (Tarli Nugroho, tt: 4--5). Landasan nilai yang mencuat dalam pemikiran Mubyarto tentang ekonomi Pancasila, terutama terletak pada kata kunci keadilan sosial, sebab yang dapat merasakan ketimpangan tersebut adalah masyarakat luas. Kesenjangan antara kelompok elit (*The have*) dan kelompok masyarakat awam, *wong alit* (*The have not*) tercermin dalam kehidupan masyarakat.



ILUSTRASIKAN GAMBAR YANG MEMPERLIHATKAN KESENJANGAN ANTARA KELOMPOK ELIT DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT KECIL!

Mubyarto menjelaskan ada lima ciri ekonomi Pancasila, yaitu: (1) roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; (2) kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (egalitarianism); (3) prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi; (4) koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama; (5) adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial

(Nugroho, tt: 9). Berdasarkan pada uraian tersebut diketahui bahwa meletakkan nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu ekonomi merupakan sebuah cara untuk memberi landasan moral terhadap sistem ekonomi yang diterapkan dalam kehidupan bernegara sebagaimana terlihat pada butir (1), di samping itu, keadilan sosial dalam butir (2) dan (5) merupakan hakikat dari ekonomi Pancasila yang didukung dengan semangat nasionalisme, seperti tertuang dalam butir (3), maka pilihan untuk menggerakkan perekonomian bangsa melalui koperasi butir (4) merupakan sebuah pilihan yang tepat bagi penyelenggara negara Indonesia.



Gambar VII.3: Kebijakan dalam tataniaga tempe hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu
Sumber: <http://www.investor.co.id/agribusiness/jk-usul-subsidi-bbm-dialihkan-ke-keedelai/41500>



Anda dipersilakan menggali informasi tentang peran Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi disiplin ilmu Anda masing-masing dengan merinci setiap sila ke dalam kebijakan ilmu dan landasan etika bagi pengembangan ilmu yang Anda pelajari.

Anda diharapkan untuk mencari informasi tentang koperasi di sekitar lingkungan Anda, bagaimana proses perkembangannya di tengah persaingan global seperti sekarang ini.

Diskusikan dalam kelompok Anda tentang keunggulan kelemahan pengelolaan koperasi dan laporkan secara tertulis.

2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Chernobyl Rusia beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN, bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus, seperti rasa cemas, khawatir dan takut yang besarnya tidak mudah dikuantifikasi. Dalam terminologi dampak sosial, hal yang demikian itu dinamakan *perceived impact*, dampak yang dipersepsikan (Sumber: Suara Merdeka, 8 Desember 2006).

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Artinya, pembangunan fasilitas teknologi acapkali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar, padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek karena dampak negatif pengembangan iptek, seperti limbah industri yang merusak lingkungan, secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat.



ILUSTRASIKAN GAMBAR YANG MENCERMINKAN TENTANG LIMBAH INDUSTRI YANG MERUSAK LINGKUNGAN!



Anda dipersilakan untuk menggali informasi yang terkait dengan dampak negatif pengembangan iptek yang merugikan masyarakat. Kemudian, mendiskusikan dalam kelompok Anda hal positif dan negatif dalam pengembangan iptek dan melaporkannya secara tertulis.

3. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar *Doctor Honoris Causa* di UGM pada 19 September 1951, mengungkapkan hal sebagai berikut:

“Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdikan kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda, saya ingin mengabdikan kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus wahyu-mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdewitunggal dengan amal. Malahan, angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus menerus di wajah ibu pertiwi” (Ketut, 2011).

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta, 18 Maret 1962, mengatakan hal sebagai berikut:

“Ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak pula, tetapi kataku tadi, lebih daripada itu, dus lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal lain, satu dasar. Dan yang dimaksud dengan perkataan dasar, yaitu karakter. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak.

Tanpa karakter yang gilang gemilang, orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan nasional itu sebenarnya adalah suatu hal yang berlangit sangat tinggi, dan berakar amat dalam sekali. Berakar amat dalam sekali, oleh karena akarnya itu harus sampai kepada inti-inti daripada segenap cita-cita dan perasaan-perasaan dan gandrungan-gandrungan rakyat” (Soekarno, 1962).

Pidato Soekarno di atas juga tidak mengaitkan dengan Pancasila, tetapi lebih mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional IV, 18 September 1986 di Jakarta sebagai berikut:

“Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita dan betapapun suatu karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi” (Soeharto, 1986: 4).

Demikian pula halnya dengan zaman Orde Baru, meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan.

Pada era Reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan masyarakat ilmiah, 20 Januari 2010 di Serpong. SBY menegaskan sebagai berikut:

Setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Saya

berpendapat, di Indonesia, kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional, yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, berkaitan dengan pandangan ini dalam waktu dekat saya akan membentuk komite inovasi nasional, yang langsung bertanggungjawab kepada presiden, untuk ikut memastikan bahwa sistem inovasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Semua ini penting kalau kita sungguh ingin Indonesia menjadi knowledge society. Strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju, developed country, adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam, iptek, dan budaya atau knowledge based, Resource based and culture based development” (Yudhoyono, 2010).

Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan (Habibie, 2011: 6).

Berdasarkan pemaparan isi pidato para penyelenggara negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut.



Anda dipersilakan untuk membandingkan pandangan kepala negara sejak Soekarno, Soeharto, Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono tentang peran nilai budaya dan kemanusiaan dalam pengembangan iptek. Kemudian, mendiskusikannya dalam kelompok Anda dan melaporkannya secara tertulis.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu

Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan (*humanism*). Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada

yang menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu, 1987 dan Simposium dan Sarasehan Nasional tentang Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional, 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia.



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dalam kelompok Anda tentang peran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, kemudian melaporkannya secara tertulis.

2. Argumen tentang Tantangan Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu

Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia:

- a. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Prof. Mubyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar.
- b. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain.
- c. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara.
- d. Pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu: *workability* (keberhasilan), *satisfaction* (kepuasan), dan *result* (hasil) (Titus, dkk., 1984) mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu untuk Masa Depan

1. Esensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Prof. Wahyudi Sediawan dalam Simposium dan sarasehan *Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa*, sebagai berikut:

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran, seperti: menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat; berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi dan kemanfaatan professional, dan lain-lain, adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut berarti menyukuri anugrah Tuhan (Wahyudi, 2006: 61--62).

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan, seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi (Wahyudi, 2006: 65). Hakikat kodrat manusia yang bersifat mono-pluralis, sebagaimana dikemukakan Notonagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga (susunan kodrat), makhluk individu dan sosial (sifat kodrat), dan makhluk Tuhan dan otonom (kedudukan kodrat) memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerja sama yang sinergis

antarindividu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya (Wahyudi, 2006: 66). Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan, yang mengandung arti bahwa pembentukan negara republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit (Wahyudi, 2006: 68). Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang (*gap*) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan (Wahyudi, 2006: 69). Selama ini, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri.

2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat (*western oriented*).

- b. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga prodi-prodi yang “laku keras” di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar (dunia industri).
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elite yang mengembangkan ilmu (*scientist oriented*).



ILUSTRASIKAN GAMBAR YANG MENCERMINKAN PERKEMBANGAN IPTEK YANG BERORIENTASI PADA DUNIA BARAT!

F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai *intellectual bastion* (Sofian Effendi); Pancasila sebagai *common denominator values* (Muladi); Pancasila sebagai paradigma ilmu.

Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

G. Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Anda dipersilakan untuk menggali sumber dan informasi terkait dengan hal-hal berikut:

1. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang terbentuk dalam sikap inklusif, toleran dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya.

2. Beberapa kasus yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang memperlihatkan sikap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat dalam kehidupan ilmiah.
3. Beberapa contoh tentang perumusan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia.
4. Beberapa ilustrasi tentang karakter keilmuan berdasar Pancasila.
5. Menggambarkan model pemimpin, warga negara, dan ilmuwan yang Pancasila-lah di lingkungan sekitar Anda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan. 1979. *Pengembangan Pancasila Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Admoredjo, Sudjito bin. 2009. "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila". Makalah dalam Kongres Pancasila di UGM Yogyakarta, 30 --31 Mei s.d. 1 Juni 2009.
- Aiken, H. D.. 2009. *Abad Ideologi*, Yogyakarta: Penerbit Relief.
- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Asdi, Endang Daruni. 2003. *Manusia Seutuhnya Dalam Moral Pancasila*. Jogjakarta: Pustaka Raja.
- Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.). 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 --22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Bahm, Archie. 1984. *Axiology: The Science of Values*. New Mexico: Albuquerque.
- _____. 1995. *Epistemology; Theory of Knowledge*. New Mexico: Albuquerque.
- Bakker, Anton. 1992. *Ontologi: Metafisika Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bakry, Noor Ms. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Branson, M. S. 1998. *The Role of Civic Education, A Fortcoming education policy Task Force Position*. Paper from the Communitarian Network.
- Darmodiharjo, Darjiddk. 1991. *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Darmodihardjo, D. 1978. *Orientasi Singkat Pancasila*. Jakarta: PT. Gita Karya.
- Delors, J. et al. 1996. *Learning the Treasure Within, Education for the 21th Century*. New York: UNESCO.
- Diponolo.G.S. 1975. *Ilmu Negara Jilid 1*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswawan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Driyarkara. tt. *Pancasila dan Religi*. Tanpa kota dan penerbit.
- Federick, W. H., dan Soeri Soeroto (Eds). 2005. *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Frondizi, Risieri.. 2001. *What is Value?*. Terjemahan Cuk Ananta Wijaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hatta, Mohammad. 1977. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press.
- Todung Mulya Lubis. tt. "Pancasila, Globalisasi, dan Hak Asasi Manusia " dalam: *Restorasi Pancasila. Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Penyunting, Irfan Nasution dan Ronny Agustinus. Jakarta: Perhimpunan Pendidikan Demokrasi.
- Hunnex, Milton D. 1986. *Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers*. Michigan: Chandler Publishing Company.
- Hidayat, Arief. 2012. *Dengan Judul Negara Hukum Pancasila : Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum*. Artikel ini disampaikan pada Kongres Pancasila IV di UGM Yogyakarta tanggal 31 Mei -- 1 Juni 2012.
- Ismaun. 1978. *Pancasila: Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia: dalam Rangka Cita-cita dan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*. Bandung: Carya Remadja.
- Kaelan. 2000. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kelsen, Hans. 1970. *The Pure Theory of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged)*. German: University of California.
- Kusuma, A.B. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, , Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. 2006. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lacey Hugh. 1999 *Is Science Value Free?* London: Routledge.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2013. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia.
- Littlejohn, Stephen W., Foss, Karen A. 2008. *Theories of Human Communication*. Penerjemah: Mohammad Yusuf Hamdan. (TeoriKomunikasi). Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

- Magee, Bryan. 2008. *The Story of Philosophy*. Penerjemah: Marcus Widodo, Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius.
- MaHFud, M D. 2009. "Pancasila Hasil Karya dan Milik Bersama", Makalah pada Kongres Pancasila di UGM tanggal 30 Mei 2009.
- Magnis-Suseno, Franz. 2011. "Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi" dalam *Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2--3 Mei 2013.
- Martodihardjo, Susanto, dkk. 1993, *Bahan Penataran Pedoaman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Muzayin. 1992. Ideologi Pancasila (Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi Remaja). Jakarta: Golden Terayon Press.
- Notonagoro. 1994. Pancasila Secara ilmiah Populer. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Tarli. tt. *Ekonomi Pancasila: Refleksi Setelah Tiga Dekade*. Tanpa kota dan penerbit.
- Oetojo Oesman dan Alfian (Eds). 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Ohmae, Kenichi. 1995. *The End of the Nation-State: the Rise of Regional Economies*. New York: Simon and Schuster Inc.
- _____. 2002. *Hancurnya Negara-Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia tak Berbatas*. Yogyakarta: Qalam.
- Pabottinggi, Mochtar, 2006, "Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik", dalam Simposium dan Sarasehan *Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa*, 14--15 Agustus 2006, Kerjasama Universitas Gadjah Mada, KAGAMA, LIPI, dan LEMHANNAS. Yogyakarta.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009--2014.(2013). Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Prawirohardjo, Soeroso, dkk. 1987. *Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*. Yogyakarta: Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat.
- Ristek (Ed.). 2009, *Sains dan Teknologi: Berbagi Ide untuk Menjawab Tantangan dan Kebutuhan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Riyanto, Astim. 2009. "Makalah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi :Tinjauan Yuridis" yang dipresentasikan dalam Workshop *Pengkajian Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi* bertempat di Hotel Ambhara Jakarta.
- Sastrapratedja, M. 2001 *Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma.
- Soeharto. 1986. Sambutan pada Pembukaan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IV, 8 September 1986. Jakarta.
- Soepardo, dkk. 1962. *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Soeprapto, Bahar, S dan Arianto, L. 1995. *Cita Negara Persatuan Indonesia*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Suweca, I Ketut. 2011 *Apa Kata Bung Karno tentang Buku, Ilmu, dan Amal?* (Edukasi.kompasiana.com/2011/10/04/apa-kata-bung-karno-tentang-buku-ilmu-dan-amal-398633.html).
- Taylor, A. E. 1955 *Aristotle* New York: Dover Publications, Inc.
- The Liang Gie. 1977. *Suatu Konsepsi ke Arah Penertiban Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Karya Kencana.
- Thomson, J. B. 1984 *Studies in the Theory of Ideology* Los Angeles: University of California Press.
- Titus, Smith, and Nolan. 1984. *Living Issues in Philosophy*. Alih bahasa: H.M. Rasjidi (*Persoalan-Persoalan Filsafat*). Jakarta: BulanBintang.
- Yusuf, Slamet Effendi. 2009. "Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Pancasila". Makalah dalam Kongres Pancasila di UGM Yogyakarta, 30--31 Mei s.d. 1 Juni 2009.
- <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/12/03/7/198717/Indonesia-Peringkat-64-Negara-Paling-Korup-di-Dunia>
- <http://dreamindonesia.wordpress.com/2011/06/10/astaga-hutan-sumatera-dan-hutan-kalimantan-akan-punah-pada-tahun-2022-sehingga-indonesia-di-anugerahi-certificate-guinness-world-records-sebagai-perusak-hutan-tercepat-di-dunia/>
- <http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/27/13/821215/sepanjang-2013-kasus-narkoba-meningkat>
- <http://www.pulausumbawanews.com/hukum/indonesia-peringkat-5-terkorup-di-dunia/>

**“Buku ini dibiayai dengan dana APBN
yang 75% dihimpun dari uang rakyat
melalui perpajakan”**



ISBN 978-602-6470-01-0



**Direktorat Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan**

Gedung D, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Telp. (021) 57946105

alamat kuliah online:

kuliahdaring.dikti.go.id

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

ABSENSI KELAS

Nama Dosen : MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd
IDPTK : 096542108

Nama Matakuliah : PENDIDIKAN PANCASILA
Program Studi : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

NO	PERTEMUAN KE	TOPIK	SUBTOPIK	KEHADIRAN	WAKTU
1	1	Pengantar/kontrak kuliah		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 21 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 1	Jam Mulai : 2024-09-17 11:49:40 Jam Selesai : 2024-09-17 12:42:35
2	2	Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia.		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 19 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 3	Jam Mulai : 2024-09-23 14:34:20 Jam Selesai :
3	3	Makna sila 1 Pancasila		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 21 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 1	Jam Mulai : 2024-09-30 15:10:46 Jam Selesai :
4	4	Makna sila ke-2		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 21 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 1	Jam Mulai : 2024-10-07 14:37:52 Jam Selesai : 2024-10-07 14:38:23
5	5	3. Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 21 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 1	Jam Mulai : 2024-10-14 14:32:19 Jam Selesai :
6	6	Pancasila sebagai idiologi terbuka		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 20 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 2	Jam Mulai : 2024-10-21 14:51:15 Jam Selesai : 2024-10-21 14:51:54
7	7	Ideologi Pancasila		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 0 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 22	Jam Mulai : 2024-10-28 14:51:15 Jam Selesai :
8	8	Ideologi Pancasila		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-10-28 14:49:25 Jam Selesai : 2024-11-18 14:42:04
9	9	UTS		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-11-18 14:42:25 Jam Selesai :
10	10	Nasionalisme		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-02 15:14:04 Jam Selesai :
11	11	memaknai kebenaran ilmiah-filsafati yang terdapat di dalam Pancasila		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-09 14:38:54 Jam Selesai :
12	12	Pancasila sebagai entitas dan identitas Bangsa Indonesia		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-09 14:37:51 Jam Selesai : 2024-12-09 14:39:10
13	13	TELAAH PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-16 15:17:42 Jam Selesai :

14	14	TELAAH PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU	Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-16 15:18:10 Jam Selesai :
15	15	PARADIGMA PANCASILA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI	Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-16 15:19:40 Jam Selesai :

Mengetahui,
Ketua Program Studi



PUTRI ASILESTARI, S.Pd, M.Pd

Bangkinang, 12 Februari 2025
Dosen Pengajar



MUSNAR INDRA DAULAY, Dr.,
S.Pd, M.Pd

CATATAN :

- Jumlah tatap muka / pertemuan mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%
- Absensi perkuliahan secara digital, data kehadiran diambil dari sistem secara otomatis
- Pakain untuk mahasiswa : tidak boleh memakai sandal, kaos oblong, sandal, anting, kalung, gelang
- Pakaian untuk mahasiswi : Tidak boleh memakai sandal, kaos ketat dan baju transparan

Mengetahui,
Ketua Program Studi



PUTRI ASILESTARI, S.Pd, M.Pd

Bangkinang, 12 Februari 2025

Dosen Pengajar



MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd

CATATAN :

- Jumlah tatap muka / pertemuan mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%
- Absensi perkuliahan secara digital, data kehadiran diambil dari sistem secara otomatis
- Pakain untuk mahasiswa : tidak boleh memakai sandal, kaos oblong, sandal, anting, kalung, gelang
- Pakaian untuk mahasiswi : Tidak boleh memakai sandal, kaos ketat dan baju transparan

SOAL UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN 2021/2022
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Mata Ujian	: Pancasila
Dosen	: Dr. Musnar Indra Daulay, MPd
Jenis Ujian	: Take Home
Program Studi	:
Tingkat/Semester	:

Petunjuk Ujian

- a) Baca dan Pahami dengan baik soalnya sebelum menuliskan jawaban !
- b) Tulislah terlebih dahulu jawaban soal yang anda anggap paling mudah !
- c) Jawaban boleh diketik dan tulis tangan
- d) Jawaban dikumpul paling lama 29 Januari 2022, kepada ketua kelas, selanjutnya ketua kelas menyerahkannya kepada dosen, sekaligus dengan absen perkuliahan.

Naskah Soal Ujian

1. Jelaskanlah bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia?
2. Mengapa Negara Republik Indonesia tidak disebutkan sebagai negara agama tetapi negara beragama?
3. mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia?
4. Ada tiga sifat ideologi, diantara ke-3 sifat idiologi tersebut jelaskanlah dimana posisi idiologi Pancasila?
5. Tuliskanlah menurut pendapat Anda tentang sistem politik dan sistem ekonomi di Indonesia, sudahkan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2021/2022
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Mata Ujian	: Pendidikan Pancasila
Dosen	: Dr. Musnar Indra Daulay, MPd
Jenis Ujian	: Take Home
Program Studi	:
Tingkat/Semester	:

Petunjuk Ujian

- a) Baca dan Pahami dengan baik soalnya sebelum menuliskan jawaban !
- b) Tulislah terlebih dahulu jawaban soal yang anda anggap paling mudah !
- c) Jawaban boleh diketik dan tulis tangan
- d) Jawaban dikumpul paling lama 29 Januari 2022, kepada ketua kelas, selanjutnya ketua kelas menyerahkannya kepada dosen, sekaligus dengan absen perkuliahan.

Naskah Soal Ujian

- 1) Menurut anda bagaimana sosok manusia yang pancasilais itu?
- 2) Jelaskan secara singkat makna dari kelima sila pancasila!
- 3) Jelaskan yang dimaksud dengan etika pancasila!
- 4) Analisis kasus korupsi di Indonesia dan bagaimana mengatasinya berdasarkan pancasila!
- 5) Uraikan dengan memberikan contoh konkretnya, bagaimana hubungan antara pancasila, pembukaan UUD 1945.

Cat. Jawaban dikirim ke email musnarindra@yahoo.co.id, paling lambat tanggal 8 Nopember 2021.



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Daftar Peserta Kuliah dan Nilai Akhir (DPNA)

PRODI : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS TAHUN AJARAN : 2024/2025 Ganjil
NAMA : MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA
NIP/NIDN : 096542108 KELAS : A

NO	NIM	NAMA	AKT. PARTISIPATIF	HASIL PROYEK	NILAI TUGAS	NILAI QUIZ	NILAI MID	NILAI UAS	NILAI ANGKA	NILAI HURUF
1	2388203001	ASTRI MAULITA RAHMASARI	90	85	80	85	90	90	87	A
2	2388203002	ELMA HAFIZA NOVA	90	85	85	88	89	88	87.35	A
3	2388203003	FITRIANI	90	85	80	89	88	90	87.1	A
4	2388203004	INDAH DAMAI SARI	90	84	87	90	87	89	87.3	A
5	2388203006	NANDA AMELIA	90	85	86	87	90	88	87.5	A
6	2388203007	NOVRAH SAFITRI YANNI	90	85	80	87	85	90	86.45	A
7	2388203008	MEY ZAFINA KEISHA	90	85	88	88	85	90	87.35	A
8	2388203009	MIFTA HUL JANNAH	90	85	80	87	90	88	86.9	A
9	2388203010	MUHAMMAD ILHAM MAHDI	90	85	85	86	90	90	87.6	A
10	2388203011	RAYHAN ANUGRAH	90	85	85	88	88	90	87.5	A
11	2388203012	NAILATUL SAFITRI	90	85	85	87	87	90	87.25	A
12	2388203013	RUHILLAH NAILA SYALUM	90	85	86	90	88	89	87.65	A
13	2388203014	MUHAMMAD FAHREL ZAFRAN	90	85	87	90	90	88	87.9	A
14	2388203015	NADIA PUTRI ALIFHIA	90	85	90	88	87	90	87.85	A
15	2388203016	RILLA NOVALIA ZAILANI PUTRI	90	85	88	90	85	89	87.4	A
16	2388203017	JELITA LESTARI	90	85	85	87	90	88	87.4	A
17	2388203018	ADEL FITRATUN NUFUS	90	85	85	88	90	88	87.5	A
18	2388203020	LATHIFAH	90	85	88	90	89	87	87.7	A
19	2388203021	FENI NURLIAN	90	85	86	90	90	87	87.65	A
20	2388203022	ZAHWA JASTINA	90	85	86	90	86	88	87.2	A
21	2388203023	SITI ZAHRA	90	85	86	85	88	86	86.7	A
22	2388203024	FAZIRA NABILA KURPA	90	85	88	90	90	87	87.85	A

Bangkinang, 12 Februari 2025

MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd
NIP. 096542108



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Daftar Peserta Kuliah dan Nilai Akhir (DPNA)

PRODI : PENDIDIKAN PROFESI GURU

TAHUN AJARAN : 2024/2025 Ganjil

NAMA : MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd

MATA KULIAH : FILOSOFI PENDIDIKAN INDONESIA

NIP/NIDN : 096542108

KELAS : B

NO	NIM	NAMA	AKT. PARTISIPATIF	HASIL PROYEK	NILAI TUGAS	NILAI QUIZ	NILAI MID	NILAI UAS	NILAI ANGKA	NILAI HURUF
1	2486906009	ANISA HANI	90	90	80	85	90	88	88.2	A
2	2486906018	CAMELIA MANALU	90	90	87	80	88	85	87.65	A
3	2486906042	MARIA ENJELITA SIMANJUNTAK	90	86	88	85	87	90	87.65	A
4	2486906043	MARIA YAPRIANTI	90	90	85	86	88	87	88.35	A
5	2486906044	MELISA	90	87	87	88	85	90	87.85	A
6	2486906045	MERRY NOVIA	90	90	86	88	87	90	88.95	A
7	2486906046	MIA MULYADI	90	85	86	80	90	90	87.1	A
8	2486906047	MUHAMMAD FANI RAUUF	90	85	87	85	88	89	87.25	A
9	2486906048	MUHAMMAD RENARDO	90	87	88	85	87	89	87.8	A
10	2486906050	MUTT'AH	90	88	88	86	90	85	88.05	A
11	2486906051	MUTIARA RAHMADANI	90	87	86	80	90	89	87.55	A
12	2486906052	NIA AGUSTINA GIAWA	87	90	85	88	88	85	87.65	A
13	2486906054	NOPRINA BRIELITHA SEMBIRING	90	88	87	85	90	87	88.15	A
14	2486906055	NUR IZZATI RAHMA	87	88	86	87	88	86	87.2	A
15	2486906056	NUR WAHIDAH SIREGAR	90	90	86	87	88	86	88.4	A
16	2486906058	PUTRI ANITA LESTARI	90	88	85	88	85	89	87.8	A
17	2486906059	PUTRI KRISMA SARI	90	85	88	87	86	88	87.1	A
18	2486906060	QURRATUN MARDHATILLAH	90	85	86	85	90	89	87.45	A
19	2486906062	RESKIKA SAPRIANI	90	89	80	88	90	87	88.05	A
20	2486906063	RINI INDRIYAN	90	85	84	88	87	86	86.65	A
21	2486906064	RIRIN NADILA SAKINAH	90	88	85	85	89	87	87.8	A
22	2486906065	RISTO LURI PRISTIANI	88	86	87	88	90	87	87.45	A
23	2486906066	RIZKA DWI MULYANI	97	80	88	87	89	90	87.75	A
24	2486906067	RIZKA NANDA SARI	90	86	85	88	87	88	87.35	A
25	2486906069	SAKINAH	88	86	88	86	87	87	86.9	A
26	2486906070	SANDI PRATAMA	90	90	87	88	89	80	87.85	A
27	2486906077	SRI DEFY RAHMAWATI	90	88	88	87	88	86	88	A
28	2486906090	WINDI RIANA SARI	90	87	88	90	86	89	88.15	A

Bangkinang, 12 Februari 2025

MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd
NIP. 096542108